



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

INDEKS PARTISIPASI
PILKADA 2024

DARI ANGKA KE MAKNA







INDEKS PARTISIPASI
PILKADA 2024

DARI ANGKA KE MAKNA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

<https://www.kpu.go.id>

Sanksi Pelanggaran
Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

INDEKS PARTISIPASI
PILKADA 2024

**DARI ANGKA
KE MAKNA**

Jakarta © 2025,
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia



Diterbitkan oleh:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Kec.
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 10310

Referensi | Non Fiksi | R/D
xxiii+ hlm; 14,5 x 21 cm
No. ISBN: 978-623-6183-91-5

Cetakan Pertama, Oktober 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

INDEKS PARTISIPASI
PILKADA 2024

DARI ANGKA KE MAKNA

◀ PENGARAH

M. Afifuddin
August Mellaz
Betty Epsilon Idroos
Idham Holik
Parsadaan Harahap
Yulianto Sudrajat
Iffa Rosita
Bernad Dermawan Sutrisno

▲ **PEMBINA**

Eberta Kawima

▲ **PENANGGUNG
JAWAB**

Cahyo Ariawan

▲ **KETUA TIM**

Denny Saputra
Siallagan

▲ **TIM PENYUSUN**

Aqidatul Izza Zain
Diah Widyawati
Erik Kurniawan
Faza Dhora Nailufar
Mada Sukmajati
Masykurudin Hafidz
Muhammad Adnan Maghribbi
Putra Satria
Rudi Rohi



SAMBUTAN

Mochammad Afifuddin

Ketua KPU Republik Indonesia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul **"Indeks Partisipasi Pilkada 2024"** ini dapat hadir di tengah-tengah kita. Buku ini merupakan kontribusi penting dalam upaya bersama untuk terus menguatkan fondasi demokrasi di Indonesia, khususnya melalui penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang kredibel dan partisipatif.

Pilkada adalah pilar penting dalam sistem ketatanegaraan kita, sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat lokal yang menentukan arah pembangunan daerah. Keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari lancar dan amannya proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi yang lebih fundamental adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat yang mencerminkan kesadaran kolektif dalam menentukan arah masa depan bangsa dan daerah.

Namun seringkali partisipasi masyarakat dalam Pilkada hanya dimaknai secara sempit, yaitu sebatas pada kehadiran pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Sementara tahapan Pilkada mencakup tahapan yang cukup luas dimulai dari perumusan kebijakan dalam Pilkada, proses pencalonan yang melibatkan banyak pihak, dan partisipasi dalam kampanye dengan berbagai variasinya.

Kita patut bersyukur, tren partisipasi dalam pesta demokrasi terakhir menunjukkan optimisme. Jika kita melihat kembali gambaran partisipasi Pilkada kemarin dan periode sebelumnya, terjadi peningkatan, yang menunjukkan tingginya kesadaran politik masyarakat. Namun tantangan tetap ada. Variasi partisipasi antar-daerah dan fluktuasi dalam Pilkada menunjukkan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi harus terus diperkuat dan diinovasi.

Penting untuk digarisbawahi, partisipasi yang tinggi tidak hanya mencerminkan suksesnya penyelenggara, tetapi juga berkorelasi dengan legitimasi Pilkada yang lebih kuat. Semakin banyak warga yang berpartisipasi baik dalam proses penyelenggaraannya maupun dalam menggunakan hak pilihnya, semakin kuat pula mandat yang diberikan kepada pemimpin terpilih, sehingga hasil Pilkada akan diakui secara luas dan memiliki daya tahan politik yang lebih baik.



Buku ini menawarkan lebih dari sekadar data statistik, akan tetapi mencakup analisis mendalam mengenai bentuk, jenis dan pola partisipasi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024. Indeks yang dikembangkan dalam buku ini menjadi alat ukur yang strategis bagi KPU dan seluruh pemangku kepentingan untuk: 1) menjadi panduan analisis bagi KPU dan jajaran di semua tingkatan dalam merancang program sosialisasi yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, 2) menyediakan basis data akademik bagi peneliti, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk melakukan kajian mendalam tentang perilaku pemilih, dan 3) mendorong peningkatan kualitas partisipasi Pilkada secara berkelanjutan, sehingga menghasilkan pemimpin daerah dengan legitimasi yang paripurna.

Saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam perumusan dan penyusunan buku IPP 2024 ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi berharga dan inspirasi bagi kita semua dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang semakin matang dan partisipatif.

KATA PENGANTAR

August Mellaz

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
dan Partisipasi Masyarakat KPU RI

Penyusunan Indeks Partisipasi Pilkada merupakan sebuah ikhtiar reflektif untuk menghadirkan standar baru dalam memaknai partisipasi politik di Indonesia. Selama ini, partisipasi sering kali dipersempit hanya pada ukuran kehadiran pemilih di TPS (*voter turnout*). Padahal, seperti diingatkan Dahl (1971), demokrasi hanya dapat bermakna apabila warga memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat secara nyata dalam seluruh proses politik. Dengan perspektif ini, partisipasi seharusnya tidak berhenti pada perhitungan angka kehadiran semata, tetapi juga mencakup dimensi yang membentuk keterlibatan warga sejak tahap awal hingga akhir penyelenggaraan Pilkada.



Atas dasar itu, IPP merumuskan lima variabel kunci, yaitu registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta *voter turnout* yang diyakini menjadi faktor penentu dalam “*mengenerate*” partisipasi politik yang bermakna. Pemilihan variabel ini didasarkan pada pemahaman bahwa partisipasi adalah hasil dari interaksi berlapis antara kesiapan kelembagaan, kualitas kontestasi, ruang deliberasi publik, dan kesadaran pemilih. Sebagaimana dicatat oleh Norris (2002), partisipasi politik lahir dari kombinasi struktur kesempatan politik (*political opportunity structures*) dan kapasitas individu untuk terlibat. Dengan demikian, kelima variabel ini bukan hanya sekadar indikator teknis, tetapi merupakan refleksi dari komitmen untuk menangkap kompleksitas partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 secara lebih utuh, substantif, dan berorientasi pada kualitas demokrasi.

Capaian skor IPP yang sebagian besar berada pada kategori *engagement* adalah gambaran nyata dari kerja tanpa henti KPU dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu, meskipun menghadapi tantangan yang berat. Tahun 2024 menjadi tahun krusial: pemilu nasional dan pilkada diadakan secara beriringan, sementara isu *political fatigue* terus menyelimuti ruang publik. Dalam atmosfer seperti itu, menjaga keterlibatan warga bukanlah tugas ringan. Tapi hasil IPP menunjukkan bahwa

partisipasi publik tetap solid, dan legitimasi demokrasi elektoral memperoleh pijakan yang kokoh. Sebagaimana dikemukakan Diamond (1999), partisipasi warga adalah landasan agar demokrasi tidak berhenti pada formalitas prosedural, melainkan memiliki makna substantif bagi kehidupan politik.

Namun, capaian ini juga hendaknya dibaca dalam skala global sebagai salah satu bukti resiliensi demokrasi Indonesia. Dalam laporan *Democracy Report 2024* dari V-Dem Institute, tercatat adanya tren pelemahan indeks demokrasi pada banyak negara di seluruh dunia - sebuah gelombang *backsliding* yang menjadi sinyal bahwa demokrasi tidak bisa dianggap aman begitu saja. Dalam konteks tersebut, IPP Pilkada 2024 muncul sebagai semacam lampu penanda: bahwa di tengah tekanan-kendala lokal dan ancaman global terhadap demokrasi, Indonesia tetap mampu mempertahankan ruang partisipasi politik. Dengan demikian, IPP tidak sekadar instrumen pengukuran teknis, melainkan juga saksi atas daya tahan demokrasi kita dalam merawat kepercayaan publik dan integritas proses elektoral di tengah guncangan global.



Lebih jauh, KPU menunjukkan komitmen yang melampaui aspek teknis penyelenggaraan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tetap dijalankan bukan semata kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian dari visi kelembagaan untuk menjadi pusat pengetahuan dan kolaborasi multipihak. Hal ini sejalan dengan pandangan Norris (2011) bahwa kualitas partisipasi hanya dapat terwujud jika pemilih memiliki informasi memadai dan kesadaran politik yang berkembang. Dengan demikian, IPP bukan sekadar ukuran angka, tetapi juga refleksi atas dedikasi kelembagaan dalam merawat integritas demokrasi. Dengan demikian, IPP tidak semata hadir sebagai angka statistik, melainkan juga sebagai refleksi atas dedikasi kelembagaan dalam menjaga integritas demokrasi, sekaligus menegaskan bahwa resiliensi demokrasi Indonesia dibangun di atas fondasi pengetahuan, kesadaran, dan kolaborasi.

Akhirnya, Indeks Partisipasi Pilkada 2024 perlu dibaca sebagai capaian yang signifikan sekaligus ruang refleksi untuk perbaikan ke depan. Indeks ini merekam kerja keras, tanggung jawab, dan komitmen KPU dalam menghadirkan pilkada yang berintegritas di tengah tantangan yang tidak sederhana. Namun, pada saat yang sama, IPP juga membuka ruang evaluasi kritis: bagaimana kualitas partisipasi dapat terus ditingkatkan, tidak berhenti pada aspek prosedural semata, tetapi berakar pada kesadaran politik yang lebih kritis, rasional, dan berkelanjutan. Dengan demikian, IPP bukan hanya indikator teknis, melainkan juga instrumen pembelajaran bagi demokrasi Indonesia untuk terus bertumbuh.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota atas dedikasi dan kerja keras yang telah menghidupkan partisipasi warga di setiap daerah. Apresiasi yang mendalam juga patut diberikan kepada Tim Perumus IPP, Biro Parhumas KPU RI, Tenaga Ahli Divisi Sosdiklih Parmas KPU RI, serta seluruh mitra dan pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan agenda besar ini. Tanpa dukungan dan kolaborasi lintas pihak, IPP tidak mungkin terwujud sebagai sebuah standar baru dalam memaknai partisipasi. Harapannya, IPP dapat menjadi warisan pengetahuan sekaligus pijakan bersama untuk menyongsong pemilu dan pilkada berikutnya dengan kualitas partisipasi yang semakin substantif dan berkelanjutan.







DAFTAR ISI

SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR BAGAN	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxvi

BAB I Menakar Partisipasi: Dari Angka Ke Makna Demokrasi	1
---	----------

1.1 Mengapa Indeks Partisipasi Pilkada?	1
1.2 Partisipasi di Pemilu dan Pilkada	5
1.3 Tujuan	11

BAB II Anatomi Partisipasi: Dari Konsep ke Instrumen Pengukuran	17
--	-----------

2.1 Desain Partisipasi	17
2.2 Semesta Indeks Partisipasi Pilkada	19
2.3 Faktor yang Menganarasi Partisipasi: Variabel Indeks	25

2.4	Indikator Partisipasi: Mengubah Konsep Menjadi Ukuran	27
2.5	Langkah Pengukuran	37

BAB III Menyimak Jejak Pemilih: Potret Data Partisipasi Pilkada 2024

49

3.1	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024	50
1.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024	50
2.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024	53
3.	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024	56
3.2	Tingkat Partisipasi Pemilih Berdasarkan Jenis kelamin	58
1.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024	59



2.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024	61
3.	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024	66
3.3	Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas	69
1.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024	69
2.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024	71
3.	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024	73
BAB IV Lanskap IPP Pilkada 2024: Membaca Makna Partisipasi		79
4.1	Menyigi Tren dan Pola Regional: Skor Variabel IPP di Tingkat Provinsi	79
4.2	Dinamika Lokal: Skor Variabel IPP di Kabupaten	87
4.3	Partisipasi di Ruang Urban: Skor Variabel IPP di Kota	94

**BAB V Membaca Wajah
Partisipasi: Hasil Indeks
Pilkada 2024**

		105
5.1	Dimensi Makro: Pola Partisipasi di Tingkat Provinsi	105
	A. Kelengkapan dan Akurasi Registrasi Pemilih	105
	B. Representasi dan Kompetisi dalam Pencalonan	113
	C. Dinamika Kampanye dan Akses Informasi Pemilih	119
	D. Efektivitas Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	129
	E. Partisipasi Aktual: Kehadiran Pemilih di TPS	137
5.2	Dinamika Lokal: Skor IPP di Tingkat Kabupaten	143
	A. Kelengkapan dan Akurasi Registrasi Pemilih	143
	B. Representasi dan Kompetisi dalam Pencalonan	149
	C. Dinamika Kampanye dan Akses Informasi Pemilih	155



D.	Efektivitas Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	164
E.	Partisipasi Aktual: Kehadiran Pemilih di TPS	172
5.3	Pola Partisipasi Wilayah Urban: Skor IPP Pilkada di Tingkat Kota	175
A.	Kelengkapan dan Akurasi Registrasi Pemilih	175
B.	Representasi dan Kompetisi dalam Pencalonan	181
C.	Dinamika Kampanye dan Akses Informasi Pemilih	187
D.	Efektivitas Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	195
E.	Partisipasi Aktual: Kehadiran Pemilih di TPS	204
BAB VI Ragam Inovasi Pendidikan Pemilih di Penjuru Nusantara		211
6.1	Sinergi Pusat dan Daerah	217

6.2	Kopi, Kampus, dan Kotak Suara: Kreativitas Sulawesi Selatan	221
6.3	“Kulak” dan Jambore: Ketahanan Demokrasi Ala Jawa Timur	232
6.4	Rabu Bacarita: “Ruang” penjaga demokrasi di Tomohon	242
6.5	KPU x OSIS: Menyemai Agen Demokrasi Muda di Kabupaten Bima	244
6.6	Secangkir Kopi untuk Demokrasi: Adaptasi Pendidikan Pemilih di Kota Makassar	247
6.7	Ruang, Alam, dan Desa Demokrasi Inisiatif Kepulauan Selayar	250
6.8	Camping Demokrasi: Inovasi Hijau dari Ujung Utara Negeri	255
BAB VII Penutup: Menuju Partisipasi Masyarakat yang Bermakna di Pilkada		261
7.1	Kesimpulan	261
7.2	Rekomendasi	264
Daftar Pustaka		267



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matrik Hubungan Inovasi, Partisipasi dan Indeks Partisipasi Pilkada	23
Tabel 2. Variabel dan Indikator Indeks Partisipasi Pilkada	29
Tabel 3. Instrumen Indeks Partisipasi Pilkada 2024	38
Tabel 4. Kategorisasi Skor Hasil IPP	45
Tabel 5. 25 Kabupaten dengan Tingkat Partisipasi Pemilih Tertinggi dan Terendah pada Pilkada 2024	54
Tabel 6. 10 Kota dengan Tingkat Partisipasi Pemilih Tertinggi dan Terendah pada Pilkada 2024	57
Tabel 7. Kabupaten dengan Kesenjangan Tinggi Partisipasi Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilbup 2024	63
Tabel 8. Peringkat Variabel Registrasi Pemilih pada Indeks Partisipasi Pemilih Pilkada 2024	146
Tabel 9. Peringkat Variabel Pencalonan di Tingkat Kabupaten	153
Tabel 10. Peringkat Variabel Registrasi Pemilih di Tingkat Kota	177
Tabel 11. Peringkat Variabel Pencalonan di Tingkat Kota	185

DAFTAR BAGAN

Grafik 1. Variabel Indeks Partisipasi Pilkada	27
Grafik 2. Pengguna Hak Pilih Pilgub 2024, berdasarkan DPT, DPTB, dan DPT	50
Grafik 3. Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilgub 2024	51
Grafik 4. Pengguna Hak Pilih Pilbup 2024, berdasarkan DPT, DPTB, dan DPK	53
Grafik 5. Pengguna Hak Pilih Pilwakot 2024, berdasarkan DPT, DPTB, dan DPK	56
Grafik 6. Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilgub 2024	59
Grafik 7. Provinsi dengan Kesenjangan Tinggi Partisipasi Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilgub 2024	61
Grafik 8. Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilbup 2024	62
Grafik 9. 10 Kabupaten dengan Dominasi Partisipasi Pemilih Laki-laki pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024	66
Grafik 10. Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilwakot 2024	67
Grafik 11. Kota dengan Kesenjangan Tinggi Partisipasi Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilwakot 2024	68



Grafik 12. Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pilgub 2024	70
Grafik 13. Partisipasi Pemilih Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin dalam Pilgub 2024	70
Grafik 14. Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pilbup 2024	72
Grafik 15. Partisipasi Pemilih Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilbup 2024	72
Grafik 16. Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pilwakot 2024	74
Grafik 17. Partisipasi Pemilih Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilwakot 2024	74
Grafik 18. Skor Akhir per Variabel di IPP Pilgub 2024	80
Grafik 19. Agregat Kategori Partisipasi Provinsi pada Pilgub 2024	83
Grafik 20. Skor IPP Pilkada 2024 Per Provinsi	84
Grafik 21. Skor IPP Provinsi per Variabel	86
Grafik 22. Rata-Rata Nasional Indeks Partisipasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024	88
Grafik 23. IPP Pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2024 berdasarkan Kategori	91
Grafik 24. 19 Daerah Level Participatory Agregat Indeks Partisipasi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2024	92
Grafik 25. Skor Akhir per Variabel di IPP Pilwakot 2024	95

Grafik 26. IPP Pemilihan Walikota/Wakil Walikota 2024 berdasarkan Kategori	98
Grafik 27. Perbandingan Kategori IPP Pemilihan 2024 (Pilgub, Pilbup, dan Piwalkot)	101
Grafik 28. Distribusi Variabel Registrasi Pemilih IPP Pilkada 2024	106
Grafik 29. Skor Variabel Registrasi Pemilih	108
Grafik 30. Kategori Partisipasi pada Variabel Pencalonan di Tingkat Provinsi	114
Grafik 31. Skor Variabel Pencalonan di Tingkat Provinsi	115
Grafik 32. Distribusi Kategori Variabel Kampanye IPP Pilkada 2024 (38 Provinsi)	122
Grafik 33. Skor Variabel Kampanye	123
Grafik 34. Skor Variabel Sosdiklih Parmas	129
Grafik 35. Indeks Partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kategori Participatory	132
Grafik 36. Persentase Indeks Partisipasi Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur	138
Grafik 37. Indeks Partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	140
Grafik 38. Skor Agregat Variabel Registrasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024	144
Grafik 39. Kategori Partisipasi pada Variabel Pencalonan di Tingkat Kabupaten	150
Grafik 40. 10 Besar Skor Variabel Pencalonan pada Pilbup 2024	153
Grafik 41. Skor Agregat Variabel Kampanye Pemilihan di Tingkat Kabupaten	157



Grafik 42. 10 Besar Skor Variabel Kampanye pada Pilbup 2024	159
Grafik 43. 5 Besar Skor Variabel Sosdiklih Parmas Pilbup 2024	164
Grafik 44. GAP Variabel Sosdiklih Parmas Pilbup 2024 Kabupaten dengan Skor Tertinggi dan Terendah	167
Grafik 45. 10 Besar Skor Variabel Voter Turnout Pilbup 2024	172
Grafik 46. Komposisi Persentase Kategori (Participatory, Engagement, Involvement)	173
Grafik 47. Skor Agregat Variabel Registrasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	176
Grafik 48. Skor Agregat Variabel Registrasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	182
Grafik 49. Kategori Partisipasi pada Variabel Pencalonan di Pemilihan Walikota/Wakil Walikota 2024	185
Grafik 50. 10 Besar Variabel Pencalonan pada Pilwaktot 2024	188
Grafik 51. Skor Agregat Variabel Kampanye di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	191
Grafik 52. 10 Besar Variabel Kampanye pada Pilwaktot 2024	196
Grafik 53. GAP Variabel Sosdiklih Parmas Pilwali 2024 Kota	198
Grafik 54. Distribusi Kategori Variabel VTO Kota	204
Grafik 55. 10 Besar Skor Variabel Turnout Plwali 2024	205

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dokumentasi Gala Premiere	220
Gambar 2. Dokumentasi Festival Demokrasi dan Karnaval Maskot	225
Gambar 3. KKN Tematik KPU dan UNHAS	227
Gambar 4. Dokumentasi Cafe Demokrasi	229
Gambar 5. Dokumentasi Pagelaran Seni Budaya dan UMKM	231
Gambar 6. Dokumentasi KPU JATIM Goes To Pesantren	235
Gambar 7. Poster Gelar Seni Budaya	236
Gambar 8. Dokumentasi Jambore Satgas Demokrasi	238
Gambar 9. Poster Pemenang Lomba Foto dan Jurnalistik	241
Gambar 10. Dokumentasi KPU X Pemilihan Ketua OSIS	245
Gambar 11. Dokumentasi KPU X Pemilihan Ketua OSIS	246
Gambar 12. Dokumentasi Cafe Demokrasi	248
Gambar 13. Dokumentasi Cafe Demokrasi	250
Gambar 14. Dokumentasi Grebek Desa	252
Gambar 15. Dokumentasi Kemah Demokrasi	254
Gambar 16. Dokumentasi Camping Pilkada Kepulauan Talaud	256
Gambar 17. Dokumentasi FUN RUN & Line Dance	257





1

**Menakar Partisipasi:
Dari Angka Ke Makna
Demokrasi**



1.

Menakar Partisipasi: Dari Angka Ke Makna Demokrasi

1.1 Mengapa Indeks Partisipasi Pilkada?

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 hadir dengan tantangan yang tidak sederhana, bahkan sebelum hari pelaksanaannya tiba. Kedekatan jadwal Pilkada dengan pemilu legislatif dan presiden menimbulkan keraguan di kalangan publik. Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengenai tingkat partisipasi pemilih. Kekhawatiran utama publik berkaitan dengan fenomena *political fatigue* atau kelelahan politik, yakni kondisi ketika pemilih merasa jenuh karena terlalu sering berhadapan dengan momentum elektoral sehingga enggan menyalurkan hak pilihnya.

Keraguan ini semakin menguat jika kita menengok data historis: partisipasi dalam pemilu nasional hampir selalu lebih tinggi dibandingkan pilkada. Hal ini sejalan dengan pandangan Norris (2011) yang menekankan bahwa partisipasi politik cenderung lebih tinggi pada pemilu nasional karena dianggap lebih menentukan arah kebijakan negara dibandingkan pemilihan di level lokal. Namun demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyadari bahwa partisipasi pemilih tidak semata ditentukan oleh faktor tunggal seperti kelelahan politik. Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, mulai dari kualitas sosialisasi dan pendidikan pemilih, hingga daya tarik kandidat dan kemampuan mereka meyakinkan publik.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, KPU berupaya mengembangkan pendekatan kreatif dan relevan dengan zaman, terutama melalui strategi komunikasi publik yang lebih dekat dengan kultur digital pemilih muda. Upaya ini juga mencerminkan apa yang disebut Putnam (1995) sebagai kebutuhan untuk membangun *social capital* baru yaitu kepercayaan, jaringan, dan keterlibatan aktif warga, agar partisipasi politik tidak hanya dimaknai sebagai angka, tetapi juga sebagai bentuk ketangguhan demokrasi (*democratic resilience*).



Lahirnya Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 menjadi bagian dari strategi tersebut. Indeks ini dirancang untuk menyediakan baseline yang lebih komprehensif dalam memahami partisipasi pemilih di Pilkada. Ia tidak hanya mengukur tingkat kehadiran pemilih, tetapi juga menstrukturkan faktor-faktor determinan yang memengaruhi partisipasi, baik yang bersumber dari sisi penyelenggara, kandidat, maupun masyarakat sipil.

Refleksi yang lebih luas menunjukkan bahwa Pilkada 2024 berlangsung di tengah situasi demokrasi yang sedang menghadapi tekanan, baik di tingkat global maupun nasional. Laporan *Democracy Index 2024* yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit mencatat skor rata-rata global demokrasi merosot ke angka 5,17 terendah sejak indeks ini pertama kali dibuat pada 2006. Indonesia sendiri memperoleh skor 6,44 dan turun ke peringkat 59 dunia, menegaskan adanya penurunan kualitas demokrasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Economist Intelligence Unit, 2025). V-Dem Institute dalam *Democracy Report 2024* juga mencatat adanya erosi kebebasan sipil dan penurunan kualitas demokrasi elektoral di berbagai negara, termasuk Indonesia (V-Dem Institute, 2024).

Namun demikian, justru di tengah kecenderungan global dan nasional yang menurun itu, Pilkada 2024 berhasil diselenggarakan secara lancar dan damai. Hal ini membuktikan bahwa meski indikator demokrasi menurun, komitmen bangsa Indonesia untuk menjaga jalannya mekanisme elektoral tetap kuat. Pilkada 2024 tidak hanya sekadar ajang pemilihan pemimpin lokal, tetapi juga sebuah bukti ketangguhan demokrasi Indonesia, yang masih mampu bertahan dan beradaptasi di tengah tantangan zaman.

Pada akhirnya, hadirnya Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 bukan sekadar instrumen pengukuran partisipasi, melainkan wujud akuntabilitas kerja KPU dalam menjaga legitimasi dan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. IPP menjadi ruang dokumentasi kolektif atas segenap pengalaman, tantangan, dan strategi yang dijalankan sepanjang penyelenggaraan Pilkada 2024. Ia menegaskan bahwa setiap proses demokrasi bukan hanya peristiwa politik lima tahunan, tetapi juga sumber pembelajaran berharga yang memperkuat fondasi demokrasi lokal. Dengan demikian, IPP tidak hanya merekam angka partisipasi, tetapi juga menjadi catatan historis yang meneguhkan komitmen Indonesia untuk terus merawat dan mengembangkan ketangguhan demokrasi di tengah dinamika zaman.



1.2 Partisipasi di Pemilu dan Pilkada

Kita tahu bahwa dalam setiap gelaran pemilu maupun pilkada, isu partisipasi masyarakat selalu menjadi sorotan utama. Sulit membayangkan diskursus elektoral tanpa menyentuh dimensi partisipasi. Kehadiran warga negara di bilik suara, maupun keterlibatan mereka dalam berbagai tahapan, bukan sekadar soal angka kehadiran, tetapi menyangkut legitimasi demokrasi itu sendiri. Pemilu yang adil dan bermakna tidak mungkin terwujud jika masyarakat apatis atau terpinggirkan dari proses politik.

Partisipasi politik merupakan denyut nadi demokrasi. Tanpa ruang bagi warga untuk mengekspresikan pilihan dan suara mereka, demokrasi kehilangan energi yang menyokong keberlangsungannya. Kehadiran ruang partisipasi memungkinkan masyarakat terlibat dalam penentuan arah kebijakan, termasuk dalam memilih siapa yang layak memegang mandat kekuasaan. Dengan cara itu, rakyat tidak sekadar menjadi penonton, melainkan aktor yang berperan dalam mengarahkan jalannya kehidupan berbangsa.

Sebagaimana dirumuskan Verba dan Nie (1972), partisipasi politik yang efektif berhubungan erat dengan tujuan sosial dan politik yang lebih luas. Partisipasi adalah mekanisme melalui mana masyarakat menetapkan agenda, memilih cara mencapainya, sekaligus mengupayakan distribusi manfaat secara adil. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya berarti hadir di tempat pemungutan suara, tetapi juga sebuah ikhtiar kolektif untuk memaksimalkan manfaat bersama sesuai kebutuhan publik.

Salah satu wujud paling nyata dari partisipasi politik adalah pemilu maupun pilkada. Konstitusi kita, melalui Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menegaskan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Lebih lanjut, Pasal 28 menegaskan hak menyatakan pendapat, baik lisan maupun tulisan, yang juga berlaku dalam konteks elektoral. Hak ini bahkan dipertegas oleh Pasal 28I ayat (4) yang memberi mandat negara untuk memajukan partisipasi melalui regulasi maupun pelaksanaan pemerintahan. Dengan kata lain, partisipasi politik bukan semata-mata kebebasan yang bisa digunakan atau ditinggalkan, melainkan hak konstitusional yang wajib dijamin negara.

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan landasan bagi pelibatan masyarakat dalam berbagai aspek pilkada, mulai dari proses tahapan, hingga keterlibatan dalam survei dan penghitungan cepat. KPU kemudian menurunkannya lebih teknis melalui Peraturan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Regulasi ini menegaskan hak dan kewajiban masyarakat sekaligus tanggung jawab KPU dalam memperluas partisipasi.



Tugas KPU bukan hanya mengatur prosedur teknis, tetapi juga memastikan bahwa ruang partisipasi benar-benar inklusif, terbuka, dan setara. Itu berarti tidak boleh ada diskriminasi, baik berdasarkan gender, agama, maupun kondisi fisik. Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, juga harus difasilitasi agar hak politik mereka tidak sekadar formalitas, tetapi sungguh-sungguh dijalankan. Pada titik ini, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk: memperoleh dan menyebarkan informasi, ikut merumuskan kebijakan KPU, terlibat dalam tahapan pemilu dan pilkada, hingga berperan dalam evaluasi penyelenggaraannya.

Refleksi atas uraian ini membawa kita pada satu pemahaman: partisipasi bukan hanya tanggung jawab warga untuk datang ke TPS, melainkan juga tanggung jawab negara dan penyelenggara pemilu dan pilkada untuk membuka, meluaskan, dan memfasilitasi ruang itu. Demokrasi pada akhirnya bukan sekadar prosedur, melainkan sebuah ekosistem yang hidup dari keterlibatan warganya.

Selama ini, perhatian publik terhadap partisipasi politik sering kali terfokus pada satu indikator utama: penggunaan hak pilih dalam pemilu (*voter turnout*). Memilih dalam pemilu atau pilkada dianggap sebagai cara paling nyata bagaimana suara warga berpengaruh dalam sistem politik. Pilihan di bilik suara menentukan siapa yang menduduki jabatan publik sekaligus kebijakan apa yang akan dijalankan oleh mereka yang terpilih. Namun, membatasi partisipasi hanya pada tindakan mencoblos di hari pemungutan suara jelas terlalu sempit.

Voter turnout memang telah lama dijadikan ukuran partisipasi karena sifatnya yang mudah diamati dan dihitung. Keterlibatan jutaan orang secara serentak dalam kurun waktu yang sama memungkinkan penyelenggara untuk memotret partisipasi secara statistik. Data KPU mencatat bahwa Selama gelaran Pilkada Serentak sejak 2015 angka partisipasi menunjukkan tren yang meningkat. Rata-rata partisipasi pada Pilkada Serentak Gelombang I tahun 2015 tercatat sebesar 64,2%. Angka rata-rata partisipasi meningkat pada gelaran Pilkada serentak gelombang II Tahun 2017 sebesar 71,58% dan Kembali meningkat pada perhelatan pilkada serentak gelombang III tahun 2018 yang mencapai 73,24. Puncaknya, tingkat partisipasi tertinggi terjadi pada gelaran Pilkada 2020 yang mencatatkan angka rata-rata partisipasi yang mencapai 76,09% meski diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19.

Namun, angka partisipasi hanyalah potret permukaan. Ia tidak cukup menjelaskan dimensi lain partisipasi yang berlangsung sebelum dan sesudah pencoblosan: bagaimana masyarakat terlibat dalam pemutakhiran data pemilih, dalam proses pencalonan kandidat, dalam penghitungan serta rekapitulasi suara, atau bahkan dalam mengevaluasi jalannya pilkadas. Dengan kata lain, *voter turnout* tidak mampu menangkap kompleksitas partisipasi sebagai sebuah proses yang berlangsung lintas tahapan.



Studi Pippa Norris (2002) memperlihatkan bahwa kualitas partisipasi elektoral di negara berkembang tidak hanya ditentukan oleh tingkat pembangunan manusia, tetapi juga oleh faktor struktural. Di dalamnya termasuk kelembagaan politik, misalnya penerapan sistem perwakilan proporsional dengan daerah pemilihan kecil serta kepastian penyelenggaraan pemilu yang kompetitif dan reguler. Aspek hukum juga memainkan peran penting, terutama perlindungan hak pilih kelompok rentan dan kebijakan afirmatif yang mendorong partisipasi lebih luas. Semua ini menunjukkan bahwa partisipasi berkualitas membutuhkan dukungan dari desain institusional dan jaminan hukum yang memadai.

Dorongan untuk memperbaiki kualitas partisipasi pilkada menjadi kebutuhan mendesak. Bukan hanya mempertahankan tingkat kehadiran di TPS pada angka yang stabil, melainkan juga memperdalam keterlibatan warga di berbagai aspek penyelenggaraan pilkada. Untuk itu, diperlukan potret partisipasi yang lebih utuh – yang tidak berhenti pada statistik kehadiran, tetapi juga menimbang seberapa jauh masyarakat berkontribusi dalam tahap-tahap krusial penyelenggaraan demokrasi elektoral.

Sebagai contoh, keterlibatan masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih dapat meningkatkan akurasi daftar pemilih dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hasil pilkada. Demikian pula dalam proses pencalonan, partisipasi warga akan membantu partai politik menyaring figur-figur dengan kualitas dan legitimasi yang lebih tinggi. Pada akhirnya, keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan pilkada menciptakan insentif ganda: meningkatkan jumlah pemilih sekaligus kualitas pilihan politik yang dihasilkan.

Refleksi dari uraian ini membawa kita pada satu kesimpulan: demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi yang melampaui sekadar kehadiran di TPS. Untuk itu, diperlukan instrumen yang lebih komprehensif, misalnya indeks partisipasi pilkada. Indeks semacam ini tidak hanya akan memberikan gambaran partisipasi yang lebih luas dan mendalam, tetapi juga menjadi acuan penting bagi perumusan kebijakan strategis KPU maupun lembaga terkait dalam memperkuat kualitas partisipasi. Dengan cara itu, pilkada dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana memperkuat legitimasi politik sekaligus memperdalam praktik demokrasi.



Refleksi dari uraian ini membawa kita pada satu kesimpulan penting: demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi yang melampaui sekadar kehadiran di TPS. Kehadiran instrumen seperti Indeks Partisipasi Pilkada menjadi sangat krusial untuk menangkap dimensi partisipasi secara lebih luas dan substantif. Indeks ini merupakan edisi kedua setelah penyusunan Indeks Partisipasi Pilkada, dengan karakteristik yang lebih terfokus. Pada edisi Pilkada, jumlah variabel dan indikator disederhanakan, tetapi tetap diarahkan pada faktor-faktor yang secara signifikan mengenerate partisipasi dalam Pilkada 2024.

Dengan demikian, IPP tidak hanya berfungsi sebagai cermin tingkat keterlibatan warga, tetapi juga sebagai acuan strategis bagi KPU dan lembaga terkait untuk memperkuat kualitas partisipasi di masa depan. Indeks ini membantu memastikan bahwa pilkada tidak berhenti sebagai ritual prosedural, melainkan berfungsi sebagai sarana memperdalam praktik demokrasi dan memperkuat legitimasi politik yang berakar pada partisipasi warga yang sadar, kritis, dan rasional.

1.3 Tujuan

Dalam konteks penyelenggaraan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya berperan sebagai lembaga manajemen pemilu yang bertugas mengatur aspek teknis, tetapi juga sebagai *agent of participatory* yang memiliki tanggung jawab moral untuk menumbuhkan keterlibatan warga dalam demokrasi elektoral (Wall, et al., 2004).

Peran ini menempatkan KPU bukan semata sebagai penyelenggara prosedural, melainkan sebagai motor penggerak partisipasi politik yang lebih luas. Melalui desain program yang inovatif mulai dari penyampaian informasi, seminar dan diskusi publik, hingga pemberdayaan komunitas KPU berupaya menumbuhkan kesadaran politik masyarakat.

Inisiatif dan inovasi program sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU daerah seperti KKN Pemilu, Café Demokrasi, Rabu Bacarita, Camp Pilkada menjadi wujud konkret bagaimana jajaran KPU di daerah mendorong masyarakat agar tidak hanya datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga memahami makna demokrasi sebagai praktik keseharian. Hal ini sejalan dan bahkan mampu menerjemahkan gagasan dalam Cetak Biru Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang disusun oleh KPU sejak 2022.

Menjangkau seluruh lapisan pemilih secara inklusif adalah prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dalam demokrasi. Pilkada yang adil hanya mungkin terwujud jika setiap warga diperlakukan setara, tanpa diskriminasi, serta dijamin hak konstitusionalnya untuk memilih dengan bebas. Inilah yang disebut sebagai *inclusive electoral design*—desain pemilu atau pilkada yang menjamin kesetaraan, kepastian hukum, dan keterbukaan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pemilih, peserta, maupun penyelenggara (Nugroho dan Liando, 2019). Dengan demikian, pemilihan yang inklusif bukan hanya menjamin hak pilih universal sebagai fondasi, tetapi juga memastikan bahwa demokrasi dijalankan dengan prinsip keadilan substantif.

Berangkat dari pemikiran tersebut, penyusunan Indeks Partisipasi Pilkada 2024 menjadi langkah strategis KPU untuk meneguhkan perannya sebagai *knowledge-based institution* yang tidak berhenti pada kerja teknokratis, melainkan juga membangun instrumen reflektif bagi perkembangan demokrasi. IPP edisi Pilkada ini merupakan tindak lanjut dari IPP Pemilu, dengan penyederhanaan variabel dan indikator yang disesuaikan dengan karakteristik pemilihan kepala daerah. Fokus indikator diarahkan pada faktor-faktor yang secara signifikan dapat “menghasilkan” (generate) partisipasi, baik dari sisi keterlibatan kuantitatif pemilih maupun kualitas kesadaran politik yang terbentuk sepanjang proses Pilkada 2024.

IPP Pilkada 2024 memiliki dua dimensi tujuan, yakni tujuan internal dan tujuan eksternal.

IPP disusun untuk memperkuat kapasitas kelembagaan KPU secara berkelanjutan, antara lain melalui:

1. Menyediakan alat ukur partisipasi elektoral yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas program Partisipasi Masyarakat KPU.
2. Membantu KPU merumuskan kebijakan dan intervensi program yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas partisipasi pilkada..
3. Menjadi rujukan bagi KPU dalam menetapkan target *voter turnout* pada kontestasi elektoral mendatang.
4. Memperkuat akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pilkada sehingga setiap langkah strategis KPU memiliki dasar pengukuran yang objektif.

Selain fungsi internal, IPP Pilkada 2024 juga diarahkan untuk memperluas dampak demokratis ke ruang publik, yaitu dengan:

1. Mendorong tercapainya demokrasi substantif Indonesia pada tahun 2045.
2. Memperkuat sinergi antara KPU dan para pemangku kepentingan dalam menciptakan pilkada yang lebih partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas partisipasi pilkada melalui kolaborasi multipihak dan inovasi pendidikan pemilih.

Mengembangkan basis data kepemiluan yang kredibel dan terbuka sebagai rujukan bagi studi akademik, riset kebijakan, dan pembelajaran internasional.



2

Anatomi Partisipasi: Dari Konsep ke Instrumen Pengukuran

2.

Anatomi Partisipasi: Dari Konsep ke Instrumen Pengukuran

2.1 Desain Partisipasi

Dalam berbagai kajian, ukuran partisipasi pemilih sering kali hanya dipahami sebatas angka pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya (voter turnout) pada hari pemungutan suara. Dari sini muncul asumsi bahwa rendahnya jumlah pemilih yang menggunakan hak politiknya mencerminkan partisipasi yang rendah, demikian pula sebaliknya. Geys (2006) menjelaskan bahwa konsep tersebut merujuk pada *"the absolute number of people voting in the election or as the share of the population that has cast its vote..."*. Selain itu, terdapat pandangan yang berkembang di masyarakat bahwa tingkat partisipasi berbanding lurus dengan legitimasi kekuasaan, yaitu semakin sedikit pemilih yang hadir, semakin lemah legitimasi; begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, mendefinisikan partisipasi pemilih secara tepat menjadi hal penting dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Meskipun asumsi tersebut tidak sepenuhnya keliru, namun pemaknaan seperti itu cenderung menyederhanakan fenomena. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dapat berwujud dalam banyak bentuk sepanjang tahapan Pilkada, misalnya keterlibatan pemilih muda dalam kampanye melalui pemanfaatan media digital (Norris, 2003; Anstead & Chadwick, 2008; Lilleker & Vedel, 2013). Selain itu, keputusan pemilih untuk hadir di TPS tidak selalu mencerminkan kesadaran politik, melainkan kerap dipengaruhi mobilisasi partai politik atau kandidat dengan berbagai strategi, seperti pembelian suara, politik identitas, mobilisasi birokrasi, hingga penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian melalui media sosial (Hadiz, 2012; Aspinall & Sukmajati, 2016; Utami, 2018; Hui, 2020; Mathias, 2021).

Dengan demikian, partisipasi pemilih perlu dipahami lebih luas, tidak hanya dari segi jumlah suara yang masuk saat pemungutan, tetapi juga dari keterlibatan dalam berbagai tahapan elektoral lainnya. Bahkan, penting pula menilai dimensi kualitas partisipasi, agar tidak terjebak pada aspek kuantitas semata. Pendekatan ini sejalan dengan cita-cita demokrasi yang tidak hanya prosedural, melainkan juga substansial, sehingga mampu memperkuat kualitas kehidupan politik dan demokrasi Indonesia di masa depan.

2.2 Semesta Indeks Partisipasi Pilkada

Jika partisipasi tidak sekadar dilihat dari angka kehadiran di TPS, maka inovasi diperlukan untuk membuka ruang-ruang partisipasi baru di sepanjang tahapan Pilkada. Misalnya, penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat transparansi data pemilih, program sosialisasi kreatif berbasis komunitas, atau forum deliberatif yang melibatkan kelompok muda dan marjinal. Inovasi-inovasi ini tidak hanya mendorong pemilih hadir di TPS, tetapi juga meningkatkan kesadaran, sukarela, dan kualitas keterlibatan mereka.

Dengan kata lain, inovasi menjadi variabel penghubung antara partisipasi prosedural dengan partisipasi substantif. Tanpa inovasi, partisipasi mudah terjebak dalam mobilisasi politik yang bersifat sesaat dan artifisial. Sebaliknya, dengan inovasi, partisipasi dapat ditopang oleh kesadaran kritis, akses informasi yang memadai, dan pengalaman politik yang bermakna. Hal ini sejalan dengan pandangan Norris (2002) tentang *reinventing political activism* di era digital, di mana inovasi membuka kanal-kanal baru bagi warga untuk terlibat secara lebih luas dalam demokrasi.

Kemampuan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk berinovasi dalam penyelenggaraan Pilkada merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Inovasi dalam konteks kelembagaan publik dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan cara-cara baru dalam memberikan layanan publik dan menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang (Borins, 2001; Hartley, 2005). Di tengah kompleksitas demokrasi elektoral di Indonesia, inovasi KPUD dapat mencakup berbagai aspek, seperti digitalisasi informasi pemilu, pengembangan strategi sosialisasi yang kreatif, pelibatan kelompok muda dan marginal dalam kampanye partisipatif, serta penguatan mekanisme komunikasi dua arah dengan masyarakat.

Secara teoritis, hubungan antara inovasi dan partisipasi dapat dijelaskan melalui kerangka Institutional Isomorphism yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell (1983). Organisasi publik, termasuk penyelenggara pemilu, dituntut untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan agar tetap relevan dan legitimate. Dalam konteks ini, inovasi menjadi bentuk adaptasi institusional yang memungkinkan KPUD memenuhi harapan masyarakat sekaligus menjaga kredibilitas proses elektoral. Adaptasi yang berhasil pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperbesar peluang keterlibatan pemilih dalam Pilkada.



Pada saat yang sama, inovasi juga dapat dipahami sebagai instrumen untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Hartley (2005) menekankan bahwa inovasi dalam tata kelola publik memiliki dampak ganda: selain meningkatkan efektivitas layanan, juga memperdalam legitimasi institusi di mata masyarakat. Oleh karena itu, inovasi yang dihasilkan KPUD bukan hanya berimplikasi pada meningkatnya angka partisipasi pemilih, tetapi juga memperkuat legitimasi kelembagaan KPU secara keseluruhan.

Untuk menilai sejauh mana inovasi tersebut berdampak, diperlukan instrumen ukur yang komprehensif. Indeks Partisipasi Pilkada dirancang untuk menangkap keterkaitan antara inovasi dan partisipasi, tidak hanya dari aspek kuantitatif (seperti tingkat *voter turnout*), tetapi juga dari aspek kualitatif yang mencerminkan kesadaran, kesukarelaan, dan makna keterlibatan pemilih. Indeks ini memungkinkan adanya mekanisme pembelajaran antar-KPUD (*peer study*), di mana praktik terbaik dapat ditransfer lintas daerah dan membentuk pengetahuan kelembagaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, indeks tidak hanya menjadi alat evaluasi teknis, melainkan juga sarana strategis untuk membangun budaya inovasi dan partisipasi di tingkat lokal.

Implikasi lebih luas dari adanya indeks ini adalah penguatan eksistensi KPU RI sebagai lembaga penyelenggara pemilu nasional. Melalui pengelolaan indeks, KPU RI menunjukkan kapasitasnya sebagai *learning institution* yang mampu memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar-KPUD, mendiseminasikan inovasi, serta menjaga legitimasi pemilu di mata publik. Hal ini menegaskan bahwa eksistensi KPU tidak hanya bergantung pada keberhasilan teknis dalam menyelenggarakan pemilu, tetapi juga pada kemampuannya mengelola inovasi, memperkuat partisipasi, dan mewujudkan demokrasi yang lebih substansial.

Dengan demikian, keterkaitan antara inovasi dan partisipasi bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan strategis. Inovasi berfungsi sebagai katalis yang membuka ruang partisipasi lebih luas, meningkatkan kualitas demokrasi, serta memperkuat legitimasi kelembagaan. Indeks Partisipasi Pilkada hadir sebagai instrumen yang menjembatani dimensi teoritis dan praktis ini, sehingga dapat menjadi fondasi bagi pengembangan demokrasi elektoral Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara praktis, hubungan antara inovasi, partisipasi dan Indeks Partisipasi Pilkada dapat dijelaskan pada matriks berikut:

Tabel 1. Matrik Hubungan Inovasi, Partisipasi dan Indeks Partisipasi Pilkada

Aspek	Bentuk Inovasi KPU	Dampak terhadap Partisipasi Pilih	Mekanisme Pengukuran (Indeks Partisipasi Pilkada)	Implikasi bagi KPU RI	Landasan Teoritis
Inovasi Teknologi	Digitalisasi layanan pemilu, aplikasi informasi pemilu, e-voting percobaan terbatas, media sosial interaktif.	Memudahkan akses informasi, meningkatkan kehadiran (<i>turnout</i>), menarik partisipasi generasi muda.	Indikator penggunaan teknologi dalam partisipasi dan keterjangkauan informasi.	KPU tampil sebagai lembaga modern dan adaptif terhadap perubahan zaman.	DiMaggio & Powell (1983) – <i>Institutional Isomorphism</i> ; Norris (2002) – <i>Democratic Phoenix</i> .
Inovasi Sosialisasi	Edukasi politik kreatif, kampanye berbasis komunitas, forum warga, pelibatan pemilih pemula.	Partisipasi lebih inklusif, kesadaran politik meningkat, keterlibatan lebih bermakna sepanjang tahapan Pilkada.	Indikator kualitas partisipasi: kesadaran, kesukarelaan, dan persepsi terhadap pemilu.	KPU dipandang bukan hanya teknis, tetapi juga edukatif dan penggerak demokrasi partisipatoris.	Pateman (1970) – Demokrasi Partisipatoris.
Inovasi Kolaborasi	Kemitraan dengan LSM, perguruan tinggi, media, dan tokoh lokal.	Meningkatkan legitimasi proses pemilu, mengurangi apatisme, memperluas jangkauan partisipasi lintas kelompok masyarakat.	Indikator tingkat keterlibatan multipihak dalam mendorong partisipasi.	KPU RI mendapat kepercayaan publik lebih luas sebagai lembaga yang membangun jejaring demokrasi.	Borins (2001) – <i>Governance Innovation</i> .

<p>Inovasi Regulasi & Tata Kelola</p>	<p>Penyederhanaan prosedur teknis, transparansi dana kampanye, pemanfaatan data kependudukan.</p>	<p>Partisipasi meningkat karena adanya kejelasan prosedur dan transparansi yang meningkatkan kepercayaan masyarakat.</p>	<p>Indikator transparansi, aksesibilitas, dan keadilan regulasi dalam mendorong partisipasi.</p>	<p>KPU RI semakin kokoh sebagai <i>learning institution</i> yang mampu menjaga integritas demokrasi.</p>	<p>Hartley (2005) – <i>Innovation in Governance</i>.</p>
<p>Indeks Partisipasi Pilkada</p>	<p>Evaluasi kuantitatif (<i>turnout</i>) dan kualitatif (motivasi, kesadaran, kesukarelaan).</p>	<p>Memberikan pemetaan menyeluruh tentang pola partisipasi, membandingkan antar-daerah.</p>	<p>Menjadi instrumen <i>peer study</i> dan <i>knowledge sharing</i> antar-KPUD.</p>	<p>Menegaskan eksistensi KPU RI sebagai lembaga demokrasi yang adaptif, profesional, dan berbasis pengetahuan (<i>knowledge-based</i>).</p>	<p>Norris (2002), Hartley (2005).</p>

Sumber: diolah penulis

Matriks di atas memperlihatkan bahwa inovasi KPUD berimplikasi langsung pada partisipasi pemilih, baik dalam dimensi kuantitatif maupun kualitatif. Setiap inovasi yang dijalankan akan tercermin dalam Indeks Partisipasi Pilkada, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai medium pembelajaran antar-daerah. Dari proses ini, KPU RI memperoleh legitimasi baru sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bukan hanya menjalankan fungsi teknis, melainkan juga memfasilitasi transfer pengetahuan, membangun

kepercayaan publik, dan memperkuat demokrasi substansial. Dengan demikian, model konseptual ini menegaskan keterhubungan antara inovasi, partisipasi, evaluasi berbasis indeks, dan penguatan kelembagaan KPU RI dalam satu alur yang saling menopang.

2.3 Faktor yang Menganarasi Partisipasi: Variabel Indeks

Dalam menyusun Indeks Partisipasi Pilkada 2024, pendekatan metodologis yang kokoh menjadi sangat penting. *Rule of Law Index* yang diperkenalkan oleh *World Justice Project* (WJP) dapat menjadi inspirasi berharga. Indeks tersebut berhasil mengubah prinsip abstrak rule of law menjadi seperangkat faktor terukur yang dapat dievaluasi secara komparatif lintas negara. Dari sini, kita belajar bahwa partisipasi politik—meski kerap dipandang sebagai fenomena normatif—juga dapat diturunkan menjadi dimensi yang dapat diukur secara sistematis, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitatif demokrasi lokal.

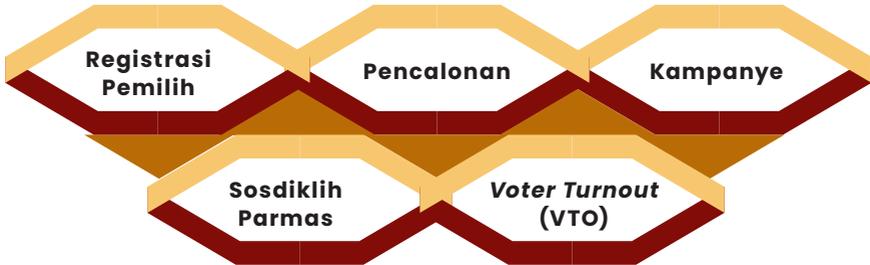
Dengan mengadaptasi semangat tersebut, Indeks Partisipasi Pilkada 2024 dibangun atas lima variabel utama yang merepresentasikan tahap-tahap penting dalam siklus elektoral: registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta tingkat kehadiran di TPS (*voter turnout*). Masing-masing variabel tidak hanya mencerminkan aspek teknis prosedural, tetapi juga merekam denyut kehidupan demokrasi yang nyata. Registrasi pemilih, misalnya, bukan sekadar daftar nama di DPT, melainkan representasi

keadilan akses politik. Demikian pula pencalonan, yang tidak hanya soal formalitas administratif, melainkan juga cermin keterbukaan sistem terhadap keragaman representasi politik.

Kampanye, sebagai variabel ketiga, berfungsi sebagai arena pertarungan gagasan sekaligus ujian bagi kualitas komunikasi politik. Di sini, partisipasi masyarakat tidak hanya berarti hadir sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai aktor yang aktif menilai, menyaring, dan bahkan menantang narasi yang disodorkan kandidat. Sosialisasi dan pendidikan pemilih menempati posisi strategis karena menjadi jembatan antara institusi penyelenggara dengan publik. Tanpa upaya pendidikan politik yang berkelanjutan, partisipasi pemilih cenderung berhenti pada formalitas memilih, bukan pada keterlibatan yang sadar dan kritis.

Akhirnya, *voter turnout* tetap menjadi indikator pamungkas yang paling kasat mata. Namun, kehadiran di bilik suara hanyalah puncak dari sebuah proses panjang yang dipengaruhi oleh empat variabel sebelumnya. Dengan demikian, Indeks Partisipasi Pilkada 2024 bukan hanya alat ukur kuantitas, tetapi juga refleksi tentang seberapa jauh demokrasi lokal kita mampu menumbuhkan keterlibatan warga secara substansial. Ia mengingatkan bahwa partisipasi bukan semata angka statistik, melainkan ekspresi kepercayaan, kesadaran, dan tanggung jawab kolektif terhadap masa depan politik daerah.

Grafik 1. Variabel Indeks Partisipasi Pilkada



Sumber: Data KPU 2025

2.4 Indikator Partisipasi: Mengubah Konsep Menjadi Ukuran

Dalam penelitian ilmiah, variabel merupakan konsep abstrak yang perlu dijabarkan ke dalam bentuk yang dapat diamati dan diukur. Namun, variabel pada dirinya sendiri belum cukup untuk menjadi dasar pengukuran empiris. Menurut Kerlinger (1973), variabel perlu diturunkan menjadi indikator agar konsep-konsep yang bersifat umum dapat dioperasionalisasikan. Indikator inilah yang berfungsi sebagai representasi empiris dari variabel, sehingga memungkinkan peneliti melakukan pengukuran secara sistematis, valid, dan reliabel.

Creswell (2018) menegaskan bahwa indikator berperan sebagai jembatan antara konstruk teoritis dengan instrumen penelitian. Tanpa indikator yang jelas, variabel hanya akan menjadi gagasan normatif yang sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penyusunan indikator bukan sekadar aspek teknis,

melaikan bagian integral dari desain penelitian yang menentukan kualitas temuan. Indikator memberikan batasan yang eksplisit mengenai apa yang sebenarnya diukur, sehingga meminimalkan bias interpretasi sekaligus meningkatkan konsistensi antarpeliti.

Lebih lanjut, Neuman (2014) menyebutkan bahwa indikator memungkinkan terjadinya *conceptualization* dan *operationalization* secara simultan. Dengan indikator, peneliti tidak hanya menjelaskan makna sebuah variabel, tetapi juga menentukan prosedur praktis untuk mengamati fenomena yang dimaksud. Misalnya, variabel “partisipasi politik” dapat dioperasionalkan melalui indikator seperti tingkat kehadiran di TPS, keterlibatan dalam kampanye, atau partisipasi dalam forum publik. Dari indikator inilah kemudian instrumen pengukuran disusun, sehingga data yang dihasilkan memiliki landasan konseptual yang kuat.

Dalam konteks Indeks Partisipasi Pilkada, kelima variabel diatas diturunkan kedalam dua jenis indikator, yaitu indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif digunakan untuk mengukur fenomena yang datanya telah tersedia dalam bentuk numerik, sedangkan indikator kualitatif ditujukan untuk memberikan perspektif lain agar data numerik dapat dianalisis secara berimbang.

Tabel 2. Variabel dan Indikator Indeks Partisipasi Pilkada

No	Variabel	Indikator Kuantitatif	Indikator Kualitatif
	Registrasi Pemilih	Persentase pemilih yang ditemukan TMS setelah pencocokan dan penelitian.	Kontribusi dukcapil dalam proses pemutakhiran data pemilih
		Jumlah laporan masyarakat ke KPU terkait daftar pemilih pada saat masukan masyarakat dalam tahapan DPS.	Kontribusi data disabilitas dan kelompok rentan dari dinas dan organisasi terkait
		Persentase pemilih perempuan dalam DPT	Topografi masing-masing daerah untuk melihat daya jangkau ke TPS
		Persentase pemilih penyandang disabilitas dalam DPT	Angka rata-rata jumlah pemilih setiap TPS
		Persentase pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	
		Persentase Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	
	Pencalonan	Jumlah pasangan calon kepala daerah	Estimasi jumlah massa yang dilibatkan dalam pendaftaran pasangan calon

		Jumlah calon/ pasangan calon perempuan	Jumlah suara parpol (suara sah) pendukung/ pengusung masing- masing pasangan calon
		Jumlah calon/ pasangan calon perseorangan	
	Kampanye	Jumlah kegiatan kampanye yang dilaporkan kepada KPU	Jumlah pelanggaran pada masa kampanye
		Jumlah iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU	
		Jumlah orang yang dilibatkan dalam kegiatan kampanye yang dilaporkan kepada KPU	
		Jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU	
		Jumlah kegiatan debat yang dilakukan oleh satker KPU	



		Jumlah pasangan calon yang menyampaikan LPPADAK	
		Jumlah pihak lain (perorangan dan kelompok) yang menyumbang dana kampanye	
		Jumlah followers media sosial pasangan calon yang didaftarkan ke KPU	
	Sosdiklih Parmas (Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat)	Jumlah kegiatan sosdiklih yang dilakukan oleh KPU	Inisiatif/inovasi yang dilakukan KPU dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih
		Jumlah pemilih yang dilibatkan dalam kegiatan sosdiklih	
		Jumlah pemantau pilkada	
		Jumlah laporan hasil pemantauan pilkada	

		Jumlah kerjasama yang dilakukan oleh KPU dengan para pihak untuk mensosialisasikan pilkada dan pendidikan pemilih	
		Jumlah kegiatan yang dilakukan oleh KPU dengan para pihak untuk mensosialisasikan pilkada dan pendidikan pemilih	
		Jumlah peserta yang dilibatkan dalam kerjasama yang dilakukan oleh KPU dengan para pihak untuk mensosialisasikan pilkada dan pendidikan pemilih	
		Segmentasi pemilih yang dilibatkan pada masing -masing tahapan	



Voter Turn Out	Persentase partisipasi pemilih	Bentuk-bentuk pelanggaran pada hari pemungutan suara
	Persentase partisipasi pemilih perempuan	Peristiwa sosial yang mengurangi kualitas penyelenggaraan Pilkada
	Persentase partisipasi pemilih disabilitas	Tantangan pemilih dalam menyalurkan hak pilih
	Persentase partisipasi pemilih yang terdaftar di DPTb	
	Persentase partisipasi pemilih yang terdaftar di DPK	
	Persentase suara tidak sah	
	Jumlah rata-rata pemilih yang menggunakan hak pilih per-TPS	

Sumber: Data KPU 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki minimal satu indikator kualitatif. Tujuan utamanya adalah agar penghitungan secara numerik dalam indeks ini tidak melupakan konteks sosial, politik, budaya maupun geografis wilayah tersebut.

Pada variabel pertama mislanya, indikator kuantitatif seperti persentase pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat), jumlah laporan masyarakat, atau persentase pemilih disabilitas dalam DPT memang penting untuk mengukur akurasi daftar pemilih. Namun, aspek kualitatif dibutuhkan untuk menangkap dimensi yang tidak bisa terukur dengan angka semata. Misalnya, kontribusi Dukcapil dalam pemutakhiran data menunjukkan kualitas koordinasi antar-lembaga yang berdampak langsung pada validitas DPT. Kontribusi data disabilitas dan kelompok rentan mencerminkan sejauh mana inklusivitas dijamin dalam proses penyusunan daftar pemilih. Sementara topografi daerah dan rata-rata pemilih per TPS menjadi faktor kontekstual yang memengaruhi aksesibilitas pemilih ke TPS. Dengan demikian, indikator kualitatif pada tahap registrasi pemilih memperlihatkan kualitas tata kelola dan inklusivitas penyelenggara, bukan sekadar jumlah.



Selanjutnya, pada variabel pencalonan sebagai variabel kedua, jumlah calon, calon perempuan, atau calon perseorangan dapat dihitung secara kuantitatif dengan jelas. Namun, indikator kualitatif seperti estimasi jumlah massa yang hadir pada pendaftaran atau jumlah suara sah partai pengusung memberi gambaran lebih mendalam mengenai kekuatan basis dukungan politik dan keterlibatan masyarakat pada fase pencalonan. Hal ini penting karena pencalonan bukan hanya soal angka kandidat, tetapi juga mengenai legitimasi sosial politik yang mereka bawa.

Pada variabel ketiga yakni kampanye, indikator jumlah kegiatan kampanye, iklan, APK, atau debat merupakan data numerik yang mencatat aktivitas formal. Namun, indikator kualitatif seperti jumlah pelanggaran kampanye atau besarnya partisipasi dana pihak lain menunjukkan kualitas demokrasi dalam masa kampanye. Selain itu, jumlah followers media sosial pasangan calon memperlihatkan sejauh mana kampanye digital efektif menjangkau publik, meskipun tidak bisa dinilai hanya dari angka kegiatan. Dengan memasukkan aspek kualitatif, analisis kampanye dapat membedakan antara aktivitas kampanye yang prosedural dengan yang substantif.

Lalu pada variabel keempat, Sosdiklih dan Partisipasi Masyarakat, data kuantitatif seperti jumlah kegiatan sosialisasi, kerjasama, atau peserta dapat mencatat intensitas kegiatan secara numerik. Namun, indikator kualitatif seperti inisiatif dan inovasi KPU dalam sosialisasi tidak kalah penting untuk menilai kualitas strategi yang

ditempuh. Begitu juga segmentasi pemilih yang dilibatkan, karena ini menentukan inklusivitas program pendidikan pemilih. Dengan kata lain, aspek kualitatif memberi ukuran apakah kegiatan sosdiklih bersifat seremonial atau benar-benar berdampak dalam meningkatkan literasi demokrasi.

Terakhir, pada variabel VTO sebagai variabel terakhir sekaligus variabel dengan skor tertinggi, persentase kehadiran pemilih atau jumlah suara sah merupakan ukuran utama partisipasi. Namun, indikator kualitatif seperti bentuk pelanggaran pada hari pemungutan, peristiwa sosial yang mengurangi kualitas Pilkada, atau tantangan yang dihadapi pemilih saat menggunakan hak pilih memberi konteks lebih mendalam. Dengan indikator ini, dapat terlihat apakah angka partisipasi yang tinggi benar-benar mencerminkan keterlibatan demokratis, atau justru tercapai di tengah praktik mobilisasi yang problematis.

2.5 Langkah Pengukuran

Penyusunan Indeks Partisipasi Pilkada (IPPilkada) dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis. Tahap awal dimulai dengan diskusi teoritis para pakar untuk mengidentifikasi komponen utama yang membentuk partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Dari diskusi tersebut, disepakati bahwa variabel dan indikator yang digunakan dalam IPPilkada memiliki desain yang sedikit berbeda dengan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP). Perbedaan ini muncul berdasarkan evaluasi terhadap pengalaman penyusunan IPP sebelumnya.

Setelah variabel dan indikator ditetapkan, langkah berikutnya adalah penentuan bobot dan skor untuk masing-masing variabel dan indikator. Namun sebelum tahap itu, dilakukan analisis terhadap sebaran data untuk memahami struktur dasar keseluruhan data. Analisis ini diperlukan guna memastikan apakah pengelompokan indikator ke dalam dimensi-dimensi yang telah ditetapkan secara teoritis sesuai dengan kondisi empiris. Untuk memverifikasi kesesuaian tersebut, digunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Melalui CFA, dapat diketahui tingkat fit setiap indikator dalam dimensi yang menaunginya. Indikator yang terbukti tidak sesuai akan dieliminasi karena dapat menurunkan validitas dan kualitas indeks.

Setelah data indikator terkumpul dari seluruh kabupaten/kota dan provinsi, langkah berikutnya adalah normalisasi skor. Normalisasi dilakukan untuk menyeragamkan skala data sehingga dapat digabungkan dalam satu indeks. Teknik yang dipakai adalah metode min-max

normalization, di mana skor mentah indikator pada tiap daerah disesuaikan dengan nilai minimum dan maksimum observasi. Hasil normalisasi menghasilkan skor dalam rentang 0–1, atau 0–100 apabila dikalikan seratus.

Tahap akhir adalah pembobotan indikator, yang dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah berbasis pendapat ahli. Para pakar diminta memberikan penilaian terhadap tingkat kepentingan masing-masing indikator terhadap indeks secara keseluruhan dengan skala 1–4, di mana skor 1 menunjukkan indikator sangat tidak penting (kontribusi rendah), sedangkan skor 4 berarti indikator sangat penting (kontribusi tinggi). Dengan demikian, pembobotan ini memastikan bahwa setiap indikator memiliki bobot proporsional sesuai tingkat signifikansinya terhadap pengukuran partisipasi dalam Pilkada. Skor yang diberikan para ahli kemudian dijumlahkan untuk masing-masing indikator.

Tabel 3. Instrumen Indeks Partisipasi Pilkada 2024

No	Variabel	Bobot	Skor	Jenis Data	Indikator	Bobot	Skor
1.	Registrasi Pemilih	20%	20	Kuantitatif (60%)	Persentase Pemilih yang ditemukan Tidak Memenuhi Syarat	16,7%	2
				Skor 12	Jumlah laporan masyarakat	16,7%	2
					Persentase pemilih perempuan	16,7%	2
					Persentase pemilih disabilitas	16,7%	2



					Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	16,7%	2
					Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	16,7%	2
				Kualitatif (40%)	Kontribusi dukcapil	25%	2
				Skor 8	Kontribusi data disabilitas	25%	2
					Topografi daerah untuk melihat daya jangkau ke TPS	25%	2
					Angka rata-rata jumlah pemilih tiap TPS	25%	2
Total						20	
No	Variabel	Bobot	Skor	Jenis Data	Indikator	Bobot	Skor
2.	Pencalonan	10%	10	Kuantitatif (60%)	Jumlah pasangan calon kepala daerah	33,3%	2
				6	Jumlah calon perempuan	33,3%	2
					Jumlah pasangan calon perseorangan	33,3%	2

				Kualitatif (40%)	Jumlah suara sah parpol pengusung/ pendukung pasangan calon kepala daerah	50%	2
				4	Estimasi jumlah massa yang dilibatkan dalam pendaftaran pasangan calon	50%	2
Total						10	
No	Variabel	Bobot	Skor	Jenis Data	Indikator	Bobot	Skor
3.	Kampanye	20%	20	Kuantitatif (80%)	Jumlah kegiatan kampanye yang dilaporkan ke KPU	16,7%	2
				16	Jumlah iklan kampanye yang difasilitasi KPU	16,7%	2
					Jumlah pihak lain yang menyumbang dana kampanye	16,7%	2
					Jumlah APK yang difasilitasi KPU	16,7%	2
					Jumlah kegiatan debat yang dilakukan KPU	16,7%	2



					Jumlah pasangan calon yang menyampaikan dan tidak menyampaikan LPPADAK	16,7%	2	
					Jumlah followers media sosial pasangan calon yang didaftarkan ke KPU	16,7%	2	
					Jumlah orang yang dilibatkan dalam kampanye	16,7%	2	
				Kualitatif (20%)	Jumlah/Bentuk pelanggaran pada masa kampanye	50%	4	
				4				
Total							20	
No	Variabel	Bobot	Skor	Jenis Data	Indikator	Bobot	Skor	
4.	Sosdiklih Parmas	20%	20	Kuantitatif (65%)	Jumlah kegiatan sosdiklih yang dilakukan KPU	12,5%	1,625	
					13	Jumlah pemilih yang dilibatkan dalam kegiatan sosdiklih	12,5%	1,625
						Jumlah pemantau Pilkada	12,5%	1,625

				Jumlah laporan hasil pemantauan pilkada	12,5%	1,625
				Jumlah kerjasama yang dilakukan KPU dengan para pihak untuk sosdiklih	12,5%	1,625
				Jumlah kegiatan sosdiklih yang dilakukan KPU dengan para pihak	12,5%	1,625
				Jumlah peserta yang dilibatkan dalam kerjasama yang dilakukan oleh KPU dengan para pihak	12,5%	1,625
				Segmentasi pemilih yang dilibatkan pada masing-masing tahapan	12,5%	1,625
			Kualitatif (35%) 7	Bentuk inisiatif/ inovasi yang dilakukan KPU dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih	100%	7
Total						20



No	Variabel	Bobot	Skor	Jenis Data	Indikator	Bobot	Skor
5.	Voter Turn Out (VTO)	30%	15	Kuantitatif (65%) 9,75	Persentase partisipasi pemilih	16,25	2,44
					Persentase partisipasi pemilih perempuan dan disabilitas	16,25	2,44
					Persentase pemilih yang terdaftar di DPTb	16,25	2,44
					Persentase pemilih yang terdaftar di DPK	16,25	2,44
				Kualitatif (35%) 5,25	Bentuk pelanggaran pada saat pemungutan suara	100%	5,25
		10%	10	Kuantitatif (65%) 6,5	Persentase suara tidak sah	100%	6,5
				Kualitatif (35%) 3,5	Peristiwa sosial yang mengurangi kualitas penyelenggaraan	100%	3,5
		5%	5	Kuantitatif (65%) 3,25	Rata-rata pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS	100%	3,25

				Kualitatif (35%) 1,75	Tantangan pemilih dalam menyalurkan hak pilih	100%	1,75
Total							30

Sumber: Data KPU 2025

Setelah tahap pembobotan indikator dilakukan, langkah berikutnya adalah menghitung skor indikator terbobot. Proses ini dilaksanakan dengan cara mengalikan bobot yang telah ditetapkan pada setiap indikator dengan nilai indikator yang sudah dinormalisasi sebelumnya. Penghitungan skor terbobot ini penting secara metodologis karena tidak semua indikator memiliki tingkat kepentingan yang sama dalam membentuk indeks secara keseluruhan. Dengan memberikan bobot berbeda, indeks yang dihasilkan mampu merefleksikan proporsi signifikansi masing-masing indikator sesuai dengan kontribusinya.

Normalisasi menjadikan setiap indikator berada dalam skala yang seragam, sementara pembobotan memastikan adanya diferensiasi berdasarkan nilai substantif. Kombinasi keduanya menghasilkan skor terbobot yang lebih akurat dan representatif. Dengan demikian, skor terbobot tidak hanya menyatukan berbagai indikator dalam satu ukuran komposit, tetapi juga menjaga keseimbangan antara konsistensi skala dan relevansi substantif indikator terhadap variabel yang diukur.

Selanjutnya, skor terbobot untuk masing-masing indikator dijumlahkan menjadi indeks akhir,

$$IPP_j = \sum_{i=1}^n x_i^*$$

Hasil skor Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) kemudian dinormalisasi kembali agar berada dalam skala seragam 0–100. Skor tersebut selanjutnya dikategorisasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan menggunakan pendekatan persentil serta mempertimbangkan target partisipasi Pemilu sebesar 77,5%. Target ini diposisikan sebagai batas partisipasi tinggi, sementara angka 60% digunakan sebagai ambang batas rata-rata partisipasi rendah. Dengan demikian, daerah dengan skor IPP di bawah 60% dikategorikan sebagai wilayah dengan partisipasi rendah, daerah dengan skor 60% hingga 77,5% masuk kategori sedang, dan daerah dengan skor di atas 77,5% dikategorikan sebagai wilayah dengan partisipasi tinggi.

Kategorisasi ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga memiliki makna konseptual. Partisipasi rendah mencerminkan kondisi *involvement*, yakni keterlibatan yang terbatas hanya pada sebagian kecil proses pemilu. Partisipasi sedang menggambarkan bentuk *engagement*, yaitu keterlibatan lebih luas dalam sebagian besar tahapan pemilu. Sementara itu, partisipasi tinggi mendekati konsep *participatory*, di mana pemilih terlibat secara menyeluruh dalam keseluruhan proses pemilu. Dengan pendekatan ini, IPP tidak sekadar mengukur kuantitas partisipasi, tetapi juga mampu memetakan kualitas keterlibatan warga dalam demokrasi elektoral.

Tabel 4. Kategorisasi Skor Hasil IPP

1	Participatory
2	Engagement
3	Involvement





3

**Menyimak Jejak
Pemilih: Potret Data
Partisipasi Pilkada
2024**



3.

Menyimak Jejak Pemilih: Potret Data Partisipasi Pilkada 2024

Partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 merupakan salah satu indikator utama dalam menilai sejauh mana demokrasi elektoral di tingkat daerah berjalan secara efektif. Tingkat kehadiran masyarakat di TPS tidak hanya mencerminkan keterlibatan warga negara dalam proses politik, tetapi juga menjadi ukuran penting bagi keberhasilan pilkada dalam menyediakan ruang partisipasi yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.

Bab ini secara khusus memaparkan data partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024. Bab ini menguraikan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada tiga level pemilihan, yaitu pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan bupati (pilbup), dan pemilihan walikota (pilwaket). Analisis disajikan tidak hanya pada tingkat agregat keseluruhan, tetapi juga berdasarkan dimensi jenis kelamin serta partisipasi kelompok disabilitas. Secara umum, rata-rata

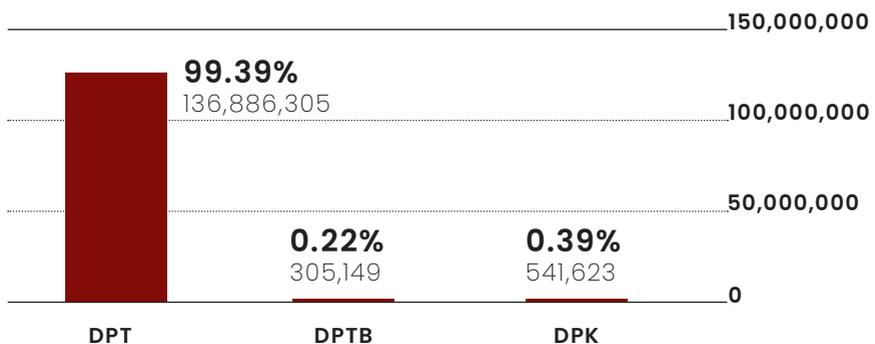
tingkat partisipasi pemilih pada pilgub tercatat sebesar 71,39 persen, pada pilbup sebesar 74,41 persen, dan pada pilwakot sebesar 67,74 persen. Ketiga capaian tersebut masih berada di bawah target partisipasi nasional Pilkada 2024 yang ditetapkan sebesar 82 persen.

3.1 Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024

A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024

Berdasarkan data KPU, dari total 200.779.598 juta pemilih dalam DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024, tercatat 136.886.305 juta pemilih yang menggunakan hak pilih, ditambah 305.149 ribu pemilih dalam DPTb dan 541.623 ribu pemilih dari DPK. Hal ini menghasilkan angka partisipasi rata-rata sebesar 71,39 persen.

Grafik 2. Pengguna Hak Pilih Pilgub 2024, berdasarkan DPT, DPTB, dan DPK

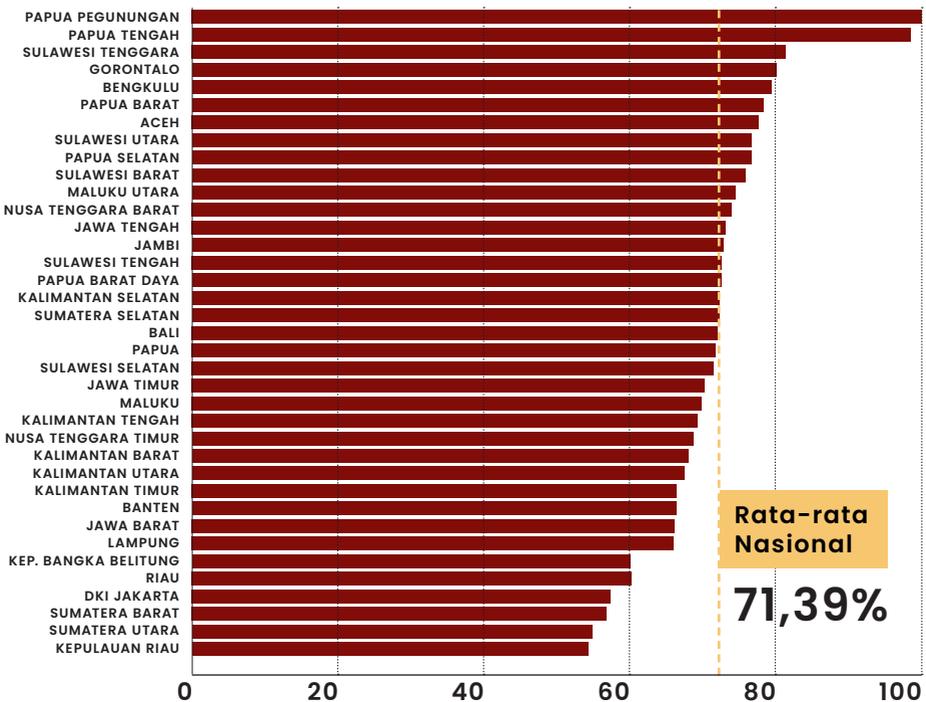


Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis



KPU RI menetapkan target tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Nasional 2024 sebesar 82 persen. Namun demikian, hanya tiga provinsi yang berhasil memenuhi target tersebut, yaitu Papua Pegunungan (99,88 persen), Papua Tengah (98,67 persen), dan Sulawesi Tenggara (81,33 persen). Sisanya, sebanyak 34 provinsi tidak berhasil memenuhi target partisipasi nasional. Secara nasional, tingkat partisipasi pemilih tercatat sebesar 71,39 persen. Dari total 37 provinsi, terdapat 21 provinsi yang berada di atas rata-rata partisipasi nasional, sedangkan 16 provinsi lainnya berada di bawah rata-rata nasional.

Grafik 3. Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilgub 2024



Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis

Jika ditinjau per provinsi, terlihat adanya variasi yang cukup mencolok dalam tingkat partisipasi. Papua Pegunungan mencatat angka partisipasi tertinggi, yaitu 99,88 persen, diikuti oleh Papua Tengah dengan 98,67 persen. Angka partisipasi yang hampir menyentuh 100 persen ini tidak semata-mata mencerminkan tingkat kehadiran individu pemilih di TPS, melainkan juga dipengaruhi oleh praktik sistem noken yang masih berlaku di sebagian besar wilayah Papua.

Dalam sistem noken, suara masyarakat tidak diberikan secara individual, melainkan secara kolektif melalui representasi kepala suku atau tokoh adat. Hal ini membuat seluruh pemilih yang tercatat dalam DPT secara otomatis dianggap menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, tingginya tingkat partisipasi di Papua Pegunungan dan Papua Tengah lebih tepat dipahami sebagai cerminan kearifan lokal dalam mekanisme pemungutan suara, bukan semata hasil dari antusiasme individu pemilih yang hadir di TPS.

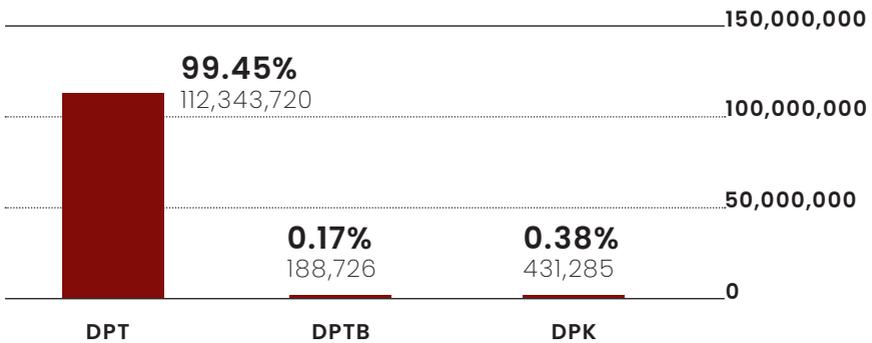
Selain dua provinsi tersebut, beberapa daerah lain juga menampilkan partisipasi yang relatif tinggi, seperti Sulawesi Tenggara (81,33 persen), Gorontalo (79,89 persen), serta Bengkulu (79,24 persen). Sebaliknya, terdapat pula sejumlah provinsi dengan tingkat partisipasi rendah. Kepulauan Riau mencatat partisipasi terendah secara nasional dengan 54,40 persen, disusul oleh Sumatera Utara (55,03 persen), Sumatera Barat (57,15 persen), dan DKI Jakarta (57,45) persen.



B. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024

Berdasarkan data KPU, dari total 159.775.663 juta pemilih dalam DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024, tercatat 112.343.720 juta pemilih yang menggunakan hak pilih, ditambah 188.726 ribu pemilih dalam DPTb dan 431.285 ribu pemilih dari DPK. Hal ini menghasilkan angka partisipasi rata-rata sebesar 74,41 persen.

Grafik 4. Pengguna Hak Pilih Pilbup 2024, berdasarkan DPT, DPTB, dan DPK



Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis

Dari total 415 kabupaten, terdapat 162 kabupaten yang berhasil mencapai target partisipasi nasional sebesar 82 persen, sementara 253 kabupaten lainnya belum berhasil mencapainya. Jika ditinjau dari rata-rata partisipasi nasional yang berada pada angka 74,41 persen, sebanyak 201 kabupaten mencatat tingkat partisipasi di atas rata-rata nasional, sedangkan 214 kabupaten lainnya masih berada di bawah angka tersebut.

Tabel 5. 25 Kabupaten dengan Tingkat Partisipasi Pemilih Tertinggi dan Terendah pada Pilkada 2024

NO	25 KABUPATEN TERTINGGI	PARTISIPASI	NO	25 KABUPATEN TERENDAH	PARTISIPASI
1	Kab. Puncak Jaya	100,00%	1	Kab. Deli Serdang	32,20%
2	Kab. Paniai	100,00%	2	Kab. Asahan	45,85%
3	Kab. Puncak	100,00%	3	Kab. Padang Pariaman	49,71%
4	Kab. Dogiyai	100,00%	4	Kab. Agam	49,92%
5	Kab. Intan Jaya	100,00%	5	Kab. Langkat	51,73%
6	Kab. Deiyai	100,00%	6	Kab. Bangka	52,12%
7	Kab. Yahukimo	100,00%	7	Kab. Bangka Selatan	52,96%
8	Kab. Tolikara	100,00%	8	Kab. Lima Puluh Kota	54,46%
9	Kab. Pegunungan Bintang	100,00%	9	Kab. Bengkulu	55,09%
10	Kab. Lanny Jaya	100,00%	10	Kab. Karimun	55,79%
11	Kab. Yalimo	100,00%	11	Kab. Indragiri Hilir	55,86%
12	Kab. Nduga	100,00%	12	Kab. Sukabumi	56,60%
13	Kab. Mamberamo Tengah	100,00%	13	Kab. Mempawah	56,73%



14	Kab. Pegunungan Arfak	99,99%	14	Kab. Pelalawan	56,79%
15	Kab. Jayawijaya	99,00%	15	Kab. Jember	56,81%
16	Kab. Maybrat	97,45%	16	Kab. Dharmasraya	57,29%
17	Kab. Mimika	97,10%	17	Kab. Solok	57,88%
18	Kab. Manokwari Selatan	95,95%	18	Kab. Indragiri Hulu	58,04%
19	Kab. Tambrauw	95,94%	19	Kab. Nias Utara	58,21%
20	Kab. Nabire	95,63%	20	Kab. Brebes	58,27%
21	Kab. Mamberamo Raya	95,05%	21	Kab. Pematang	58,42%
22	Kab. Konawe Utara	93,18%	22	Kab. Bogor	58,62%
23	Kab. Gayo Lues	92,53%	23	Kab. Bangka Tengah	59,03%
24	Kab. Sorong Selatan	92,36%	24	Kab. Aceh Tamiang	59,31%
25	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	90,40%	25	Kab. Banyuwangi	59,32%

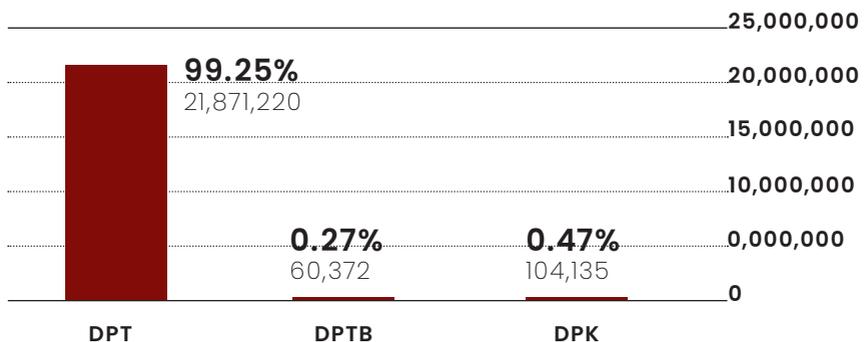
Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis

Data menunjukkan adanya kontras yang tajam dalam tingkat partisipasi pemilih di tingkat kabupaten pada Pilkada 2024. Sebanyak 25 kabupaten mencatat partisipasi tertinggi, sebagian besar berasal dari wilayah Papua, dengan 13 kabupaten di antaranya bahkan mencapai 100 persen. Sebaliknya, 25 kabupaten dengan partisipasi terendah didominasi oleh daerah di Sumatera dan Jawa. Kabupaten Deli Serdang menempati posisi terendah dengan partisipasi hanya 32,20 persen, diikuti Asahan (45,85%), serta Padang Pariaman (49,71%). Beberapa kabupaten lain, hanya mencatat partisipasi berkisar antara 51-59 persen.

C. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024

Berdasarkan data KPU, dari total 35.630.399 juta pemilih dalam DPT pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024, tercatat 21.871.220 juta pemilih yang menggunakan hak pilih, ditambah 60.372 ribu pemilih dalam DPTb dan 104.135 ribu pemilih dari DPK. Hal ini menghasilkan angka partisipasi rata-rata sebesar 67,74 persen.

Grafik 5. Pengguna Hak Pilih Pilwakot 2024, berdasarkan DPT, DPTB, dan DPK



Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis



Dari total 93 kota, hanya 5 kota yang berhasil mencapai target partisipasi nasional sebesar 82 persen. Di antaranya yaitu Kota Pagar Alam (86,77 persen), Kota Tomohon (86,33 persen), Kota Subulussalam (86,13 persen), Kota Tidore Kepulauan (84,80 persen), dan Kota Bima (84,52 persen). Jika ditinjau dari rata-rata partisipasi nasional yang berada pada angka 67,74 persen, sebanyak 46 kabupaten mencatat tingkat partisipasi di atas rata-rata nasional, sedangkan 47 kabupaten lainnya masih berada di bawah angka tersebut.

Tabel 6. 10 Kota dengan Tingkat Partisipasi Pemilih Tertinggi dan Terendah pada Pilkada 2024

NO	10 KOTA TERTINGGI	PARTISIPASI	NO	10 KOTA TERENDAH	PARTISIPASI
1	Kota Pagar Alam	86,77%	1	Kota Medan	34,65%
2	Kota Tomohon	86,33%	2	Kota Pekanbaru	45,87%
3	Kota Subulussalam	86,13%	3	Kota Batam	48,29%
4	Kota Tidore Kepulauan	84,80%	4	Kota Padang	49,06%
5	Kota Bima	84,52%	5	Kota Bandar Lampung	51,99%
6	Kota Batu	81,57%	6	Kota Pangkal Pinang	52,74%
7	Kota Pare Pare	80,70%	7	Kota Pontianak	53,33%
8	Kota Kotamobagu	80,45%	8	Kota Tual	54,78%
9	Kota Prabumulih	80,09%	9	Kota Bekasi	55,62%
10	Kota Kediri	80,00%	10	Kota Surabaya	56,15%

Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis



Berdasarkan data tingkat partisipasi pemilih di 93 kota, terlihat adanya kontras yang tajam dalam tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Sepuluh kota dengan tingkat partisipasi tertinggi didominasi oleh wilayah kota kecil dan menengah, seperti Kota Pagar Alam, Kota Tomohon, Kota Subulussalam, Kota Tidore Kepulauan, serta Kota Bima. Selain itu, beberapa kota lain juga menunjukkan capaian yang tinggi, seperti Kota Batu, Pare Pare, Kotamobagu, Prabumulih, dan Kediri. Sebaliknya, tingkat partisipasi terendah ditemukan pada kota-kota besar dan metropolitan, seperti Kota Medan, Pekanbaru, Bekasi, hingga Surabaya. Pola ini menunjukkan bahwa ukuran dan kompleksitas wilayah perkotaan tampaknya berpengaruh terhadap variasi tingkat partisipasi pemilih.

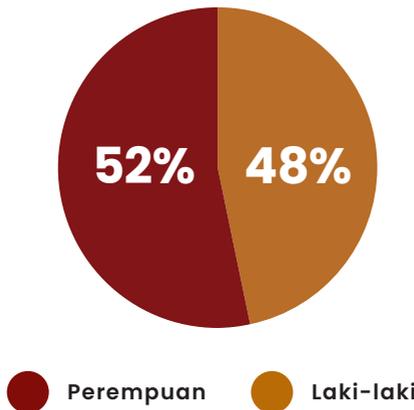
3.2 Tingkat Partisipasi Pemilih Berdasarkan Jenis kelamin

Tingkat partisipasi pemilih berdasarkan jenis kelamin pada Pilkada 2024, memberikan gambaran mengenai jumlah pemilih laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilihnya. Data ini penting untuk menunjukkan sebaran partisipasi antara kedua kelompok, sekaligus memperlihatkan kontribusi masing-masing jenis kelamin dalam keseluruhan pemilih yang hadir di TPS. Dengan demikian, pemetaan partisipasi berdasarkan jenis kelamin dapat menjadi bagian dari potret umum keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah.

A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024

Berdasarkan data KPU, partisipasi pemilih dalam Pilgub 2024 menunjukkan adanya perbedaan yang konsisten antara laki-laki dan perempuan. Dari total 137.733.077 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki tercatat sebanyak 64.749.449 juta orang atau 47,01 persen, sementara perempuan mencapai 72.983.628 juta orang atau 52,99 persen. Secara rata-rata nasional, tingkat partisipasi pemilih berdasarkan jenis kelamin adalah 48,32 persen laki-laki dan 51,68 persen perempuan.

Grafik 6. Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilgub 2024

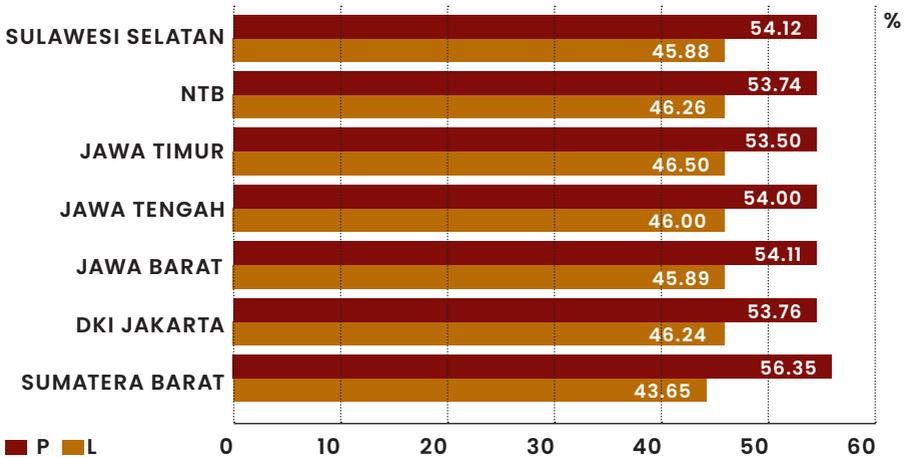


Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis

Secara nasional, pola partisipasi pemilih berdasarkan jenis kelamin menunjukkan kecenderungan yang relatif seragam di hampir seluruh provinsi, di mana tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, meskipun dengan besaran selisih yang bervariasi. Kendati demikian, terdapat empat provinsi yang menunjukkan pola sebaliknya, yakni partisipasi laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Keempat provinsi tersebut adalah Papua (laki-laki 50,39 persen, perempuan 49,61 persen), Papua Pegunungan (laki-laki 53,70 persen, perempuan 46,30 persen), Papua Selatan (laki-laki 50,50 persen, perempuan 49,50 persen), dan Papua Tengah (laki-laki 52,87 persen, perempuan 47,13 persen).

Berdasarkan data partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024, terdapat sejumlah provinsi yang menunjukkan kesenjangan cukup signifikan antara partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan. Di Sumatera Barat, tingkat partisipasi perempuan mencapai 56,35 persen, lebih tinggi 12,70 persen dibandingkan laki-laki yang hanya 43,65 persen. Pola serupa juga terlihat di Sulawesi Selatan dengan selisih 8,24 persen (perempuan 54,12 persen, laki-laki 45,88 persen), Jawa Barat dengan selisih 8,22 persen (perempuan 54,11 persen vs laki-laki 45,89 persen), serta Jawa Tengah dengan selisih 8,00 persen (perempuan 54,00 persen vs laki-laki 46,00 persen). Kesenjangan partisipasi juga tampak di DKI Jakarta dengan selisih 7,52 persen, Nusa Tenggara Barat sebesar 7,48 persen, dan Jawa Timur sebesar 7,00 persen.

Grafik 7, Provinsi dengan Kesenjangan Tinggi Partisipasi
Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilgub 2024

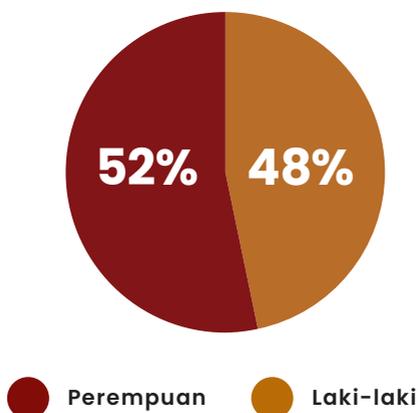


Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis

B. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024

Berdasarkan data KPU, partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 menunjukkan adanya perbedaan yang konsisten antara laki-laki dan perempuan. Dari total 112.963.731 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya, pemilih laki-laki tercatat sebanyak 53.231.911 juta orang atau 47,12 persen, sementara perempuan mencapai 59.731.820 juta orang atau 52,88 persen. Secara rata-rata nasional, tingkat partisipasi pemilih berdasarkan jenis kelamin adalah 48,24 persen laki-laki dan 51,76 persen perempuan.

Grafik 8. Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilbup 2024



Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis

Secara nasional, pola partisipasi pemilih berdasarkan jenis kelamin pada Pilkada 2024 menunjukkan kecenderungan yang relatif seragam, di mana tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini juga terlihat dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati 2024. Kabupaten Pematang Jaya menempati posisi teratas dengan selisih partisipasi sebesar 18,52 persen, di mana partisipasi pemilih perempuan mencapai 59,26 persen sementara laki-laki hanya 40,74 persen. Selisih serupa juga terlihat signifikan di Kabupaten Lima Puluh Kota (18,40 persen), Padang Pariaman (18,00 persen), Brebes (17,24 persen), dan Agam (16,12 persen).

Pola ini berlanjut hingga sejumlah kabupaten lain dengan selisih partisipasi di atas 10 persen, antara lain Tegal, Takalar, Lombok Timur, Cirebon, Buton Selatan, hingga Banjarnegara. Secara umum, data ini menunjukkan kecenderungan kuat dominasi partisipasi pemilih perempuan di berbagai daerah, dengan rentang selisih antara 10 hingga 18 persen.

Tabel 7. Kabupaten dengan Kesenjangan Tinggi Partisipasi Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilbup 2024

NO	KABUPATEN	PARTISIPASI		SELISIH
		L	P	
1	Kabupaten Pematang	40,74%	59,26%	18,52%
2	Kabupaten Lima Puluh Kota	40,80%	59,20%	18,40%
3	Kabupaten Padang Pariaman	41,00%	59,00%	18,00%
4	Kabupaten Brebes	41,38%	58,62%	17,24%
5	Kabupaten Agam	41,94%	58,06%	16,12%
6	Kabupaten Tegal	42,46%	57,54%	15,08%
7	Kabupaten Takalar	42,64%	57,36%	14,72%
8	Kabupaten Lombok Timur	42,90%	57,10%	14,20%
9	Kabupaten Cirebon	43,00%	57,00%	14,00%
10	Kabupaten Buton Selatan	43,00%	57,00%	14,00%
11	Kabupaten Pesisir Selatan	43,05%	56,95%	13,90%

12	Kabupaten Buton Tengah	43,39%	56,61%	13,22%
13	Kabupaten Tasikmalaya	43,40%	56,60%	13,20%
14	Kabupaten Kuningan	43,41%	56,59%	13,18%
15	Kabupaten Tanah Datar	43,44%	56,56%	13,12%
16	Kabupaten Wakatobi	43,54%	56,46%	12,92%
17	Kabupaten Sukabumi	43,69%	56,31%	12,62%
18	Kabupaten Malaka	43,79%	56,21%	12,42%
19	Kabupaten Jember	43,82%	56,18%	12,36%
20	Kabupaten Solok	43,99%	56,01%	12,02%
21	Kabupaten Sambas	44,05%	55,95%	11,90%
22	Kabupaten Grobogan	44,14%	55,86%	11,72%
23	Kabupaten Sijunjung	44,26%	55,74%	11,48%
24	Kabupaten Ciamis	44,27%	55,73%	11,46%
25	Kabupaten Bireuen	44,29%	55,71%	11,42%
26	Kabupaten Jepara	44,49%	55,51%	11,02%
27	Kabupaten Bulukumba	44,55%	55,45%	10,90%
28	Kabupaten Sikka	44,60%	55,40%	10,80%
29	Kabupaten Barru	44,71%	55,29%	10,58%
30	Kabupaten Trenggalek	44,73%	55,27%	10,54%
31	Kabupaten Muna	44,82%	55,18%	10,36%
32	Kabupaten Nias Barat	44,86%	55,14%	10,28%
33	Kabupaten Banjarnegara	44,86%	55,14%	10,28%

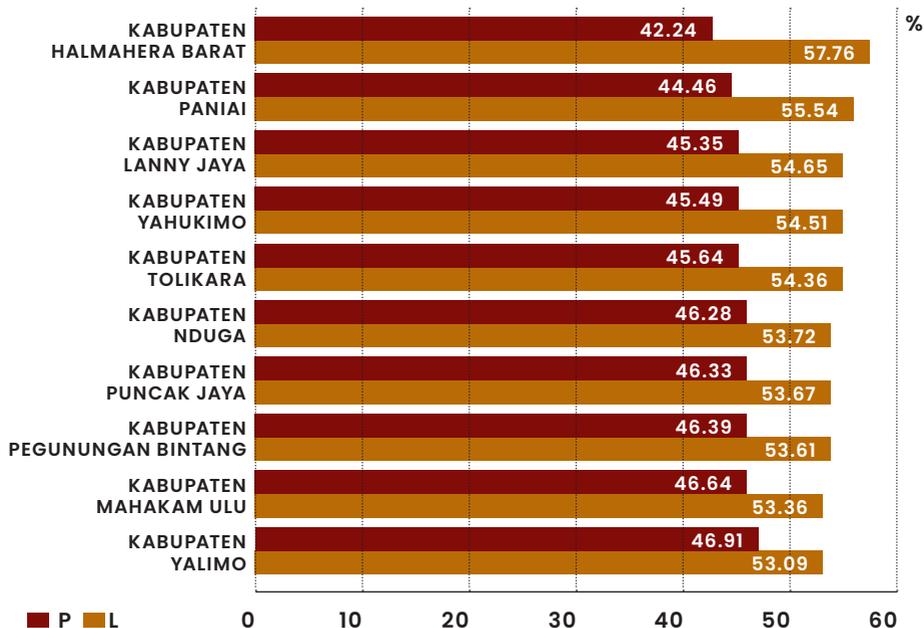
Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis



Meskipun secara umum partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, beberapa kabupaten justru menunjukkan pola sebaliknya dengan memperlihatkan dominasi partisipasi pemilih laki-laki. Kabupaten Halmahera Tengah menempati posisi teratas dengan selisih partisipasi yang signifikan, yaitu 15,52 persen, di mana partisipasi pemilih laki-laki mencapai 57,76 persen sementara partisipasi perempuan hanya 42,24 persen. Pola serupa juga terlihat di Kabupaten Panai dengan selisih 11,08 persen, dimana partisipasi pemilih laki-laki sebesar 55,54 persen dan partisipasi pemilih perempuan sebesar 44,46 persen.

Selain itu, perbedaan tingkat partisipasi yang cukup besar juga tampak di Kabupaten Lanny Jaya dengan selisih 9,30 persen, Yahukimo (9,02 persen), dan Tolikara (8,72 persen). Sementara itu, selisih partisipasi yang lebih kecil, namun tetap menunjukkan dominasi laki-laki, tercatat di Kabupaten Nduga (7,44 persen), Puncak Jaya (7,34 persen), Pegunungan Bintang (7,22 persen), Mahakam Ulu (6,72 persen), serta Yalimo (6,18 persen). Temuan ini mengindikasikan adanya dinamika jenis kelamin tertentu pada partisipasi pemilih di wilayah-wilayah tersebut, yang berbeda dari kecenderungan nasional.

Grafik 9. 10 Kabupaten dengan Dominasi Partisipasi Pemilih Laki-laki pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024

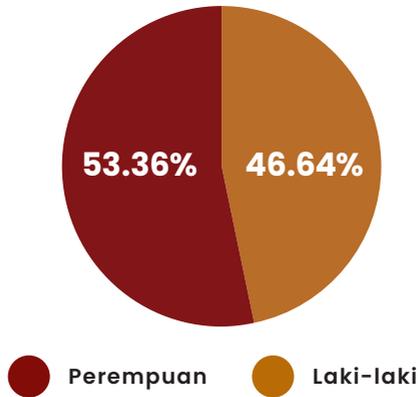


Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis

C. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024

Berdasarkan data KPU, partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024 menunjukkan adanya perbedaan yang konsisten antara laki-laki dan perempuan. Dari total 22.035.727 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya, pemilih laki-laki tercatat sebanyak 10.222.055 juta orang atau 46,39 persen, sementara perempuan mencapai 11.813.672 juta orang atau 53,61 persen. Secara rata-rata nasional, tingkat partisipasi pemilih berdasarkan jenis kelamin adalah 46,64 persen laki-laki dan 53,36 persen perempuan.

Grafik 10. Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilwaket 2024



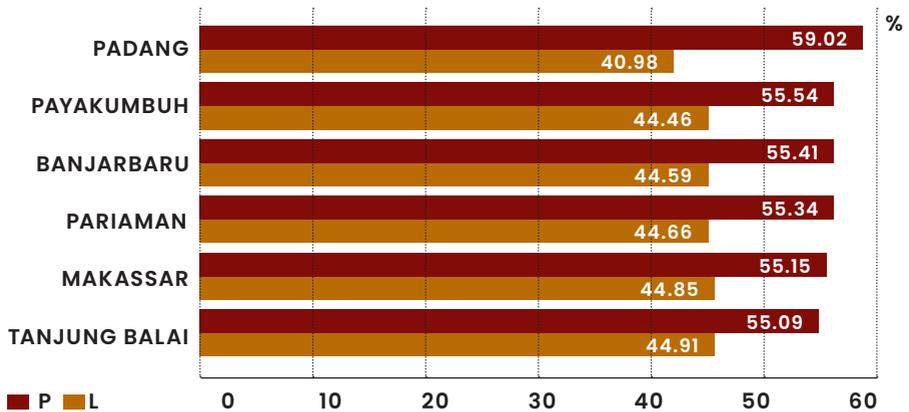
Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis

Secara nasional, pola partisipasi pemilih berdasarkan jenis kelamin pada Pilkada 2024 menunjukkan kecenderungan yang relatif seragam, di mana tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pola ini juga tercermin dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024. Namun demikian, terdapat sejumlah kota yang menampilkan kesenjangan tingkat partisipasi yang cukup besar, yakni lebih dari 10 persen, dengan dominasi partisipasi perempuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Kota Padang mencatat selisih paling besar, dengan tingkat partisipasi perempuan mencapai 59,02 persen, sedangkan laki-laki hanya 40,98 persen, sehingga menghasilkan gap sekitar 18,04 persen. Kesenjangan serupa juga tampak di Kota Payakumbuh (11,08 persen),

Kota Banjarbaru (10,82 persen), Kota Pariaman (10,68 persen), Kota Makassar (10,30 persen), dan Kota Tanjung Balai (10,18 persen). Temuan ini menegaskan bahwa meskipun secara umum kesenjangan partisipasi jenis kelamin relatif kecil di sebagian besar daerah, terdapat kota-kota tertentu dengan perbedaan yang mencolok, menunjukkan dominasi partisipasi pemilih perempuan secara signifikan dibandingkan laki-laki.

Grafik 11. Kota dengan Kesenjangan Tinggi Partisipasi Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilwakot 2024



Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis

Meskipun secara umum tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, terdapat dua kota yang menunjukkan pola sebaliknya, yakni dominasi partisipasi pemilih laki-laki. Kota Jayapura mencatat partisipasi laki-laki sebesar 50,94 persen, sementara perempuan 49,06 persen. Sementara itu, di Kota Pagar Alam partisipasi pemilih laki-laki mencapai 50,70 persen dan perempuan



49,30 persen. Perbedaan ini memang tidak signifikan, tetapi tetap menunjukkan adanya variasi pola partisipasi jenis kelamin di tingkat lokal.

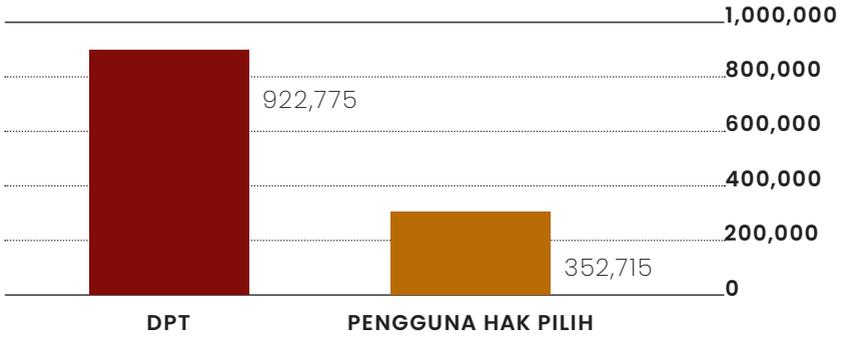
3.3 Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas

Sebagai kelompok warga negara yang memiliki hak politik yang sama, pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi (pilgub) maupun kabupaten/kota (pilbup dan pilwakot). Oleh karena itu, mengukur tingkat partisipasi disabilitas dalam Pilkada 2024 penting untuk melihat sejauh mana keterlibatan mereka dalam proses demokrasi elektoral.

A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024

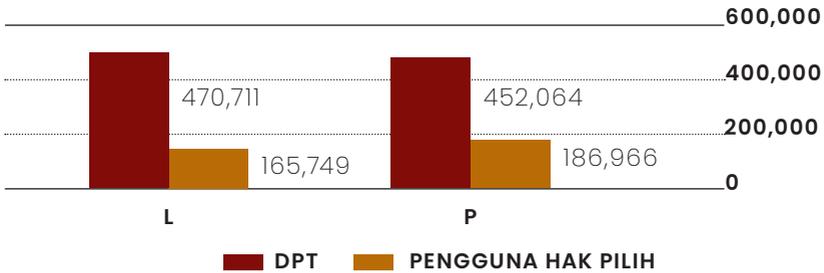
Berdasarkan data KPU, rata-rata tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 tercatat sebesar 52,93 persen. Dari total DPT penyandang disabilitas sebanyak 922.775 orang, terdiri atas 470.711 laki-laki dan 452.064 perempuan. Adapun jumlah pengguna hak pilih penyandang disabilitas mencapai 352.715 orang, dengan rincian 165.749 laki-laki dan 186.966 perempuan. Jika dilihat lebih lanjut, rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas laki-laki adalah 47,95 persen, sedangkan perempuan mencapai 58,37 persen, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam partisipasi politik berdasarkan jenis kelamin di kalangan pemilih disabilitas.

Grafik 12. Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pilgub 2024



Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis

Grafik 13. Partisipasi Pemilih Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin dalam Pilgub 2024



Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis

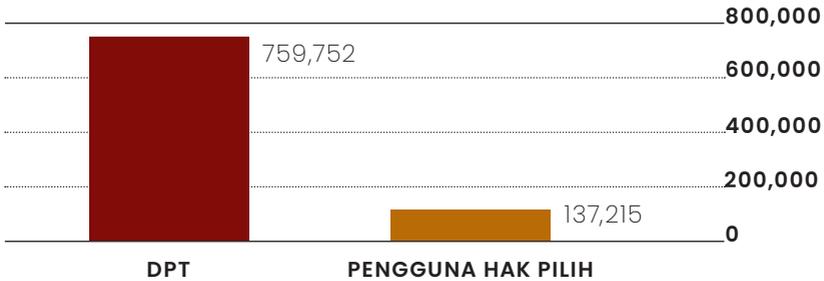
Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 menunjukkan variasi yang cukup mencolok antarwilayah. Tercatat terdapat empat provinsi yang berhasil melampaui target partisipasi nasional sebesar 82 persen. Tiga provinsi, yakni Papua Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya, bahkan mencapai tingkat partisipasi 100 persen, sementara Papua Selatan mencatatkan partisipasi sebesar 82,18 persen.

Di sisi lain, sejumlah provinsi juga menorehkan capaian yang relatif tinggi, yakni pada kisaran 70 persen. Hal ini terlihat di Provinsi Papua (79,87 persen), Maluku (78,22 persen), Sulawesi Tenggara (73,47 persen), Bengkulu (72,59 persen), dan Sulawesi Utara (70,99 persen). Sebaliknya, terdapat provinsi yang menunjukkan partisipasi disabilitas sangat rendah, bahkan tidak mencapai 20 persen, yakni Papua Pegunungan (0 persen) dan Bali (17,20 persen). Selain itu, provinsi lain juga mencatatkan angka rendah, misalnya Jawa Timur (22,51 persen), DKI Jakarta (24,26 persen), dan Bangka Belitung (25,58 persen). Secara agregat, rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pilgub 2024 hanya mencapai 52,93 persen, yang mengindikasikan masih terdapat tantangan serius dalam pemenuhan hak politik kelompok disabilitas di berbagai daerah.

B. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024

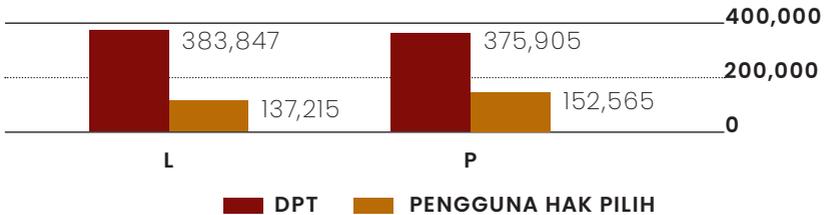
Berdasarkan data KPU, rata-rata tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 tercatat sebesar 53,00 persen. Dari total DPT penyandang disabilitas sebanyak 759.752 orang, terdiri atas 383.847 laki-laki dan 375.905 perempuan. Adapun jumlah pengguna hak pilih penyandang disabilitas mencapai 289.780 orang, dengan rincian 137.215 laki-laki dan 152.565 perempuan. Jika dilihat lebih lanjut, rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas laki-laki adalah 48,97 persen, sedangkan perempuan mencapai 57,52 persen, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam partisipasi politik berdasarkan jenis kelamin di kalangan pemilih disabilitas.

Grafik 14. Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pilbup 2024



Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis

Grafik 15. Partisipasi Pemilih Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilbup 2024



Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarwilayah. Tercatat terdapat 47 kabupaten yang berhasil melampaui target partisipasi nasional sebesar 82 persen. Beberapa kabupaten bahkan mencapai tingkat partisipasi 100 persen, sementara sejumlah daerah lainnya juga mencatat angka yang sangat tinggi, seperti Kabupaten Kepulauan Talaud (99,69 persen), Kabupaten Kepulauan Aru (98,24 persen), Kabupaten Lebong (96,76 persen), Kabupaten Halmahera Timur (96,69 persen), hingga Kabupaten Konawe Kepulauan (82,19 persen).



Sebaliknya, terdapat 13 kabupaten dengan tingkat partisipasi pemilih disabilitas 0 persen, yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Yalimo, Nduga, dan Mamberamo Tengah. Selain itu, sejumlah kabupaten lain juga menunjukkan angka partisipasi yang sangat rendah, misalnya Kabupaten Jember (10,78 persen), Tulungagung (11,24 persen), Gianyar (12,57 persen), Lampung Timur (12,77 persen), dan Probolinggo (12,90 persen).

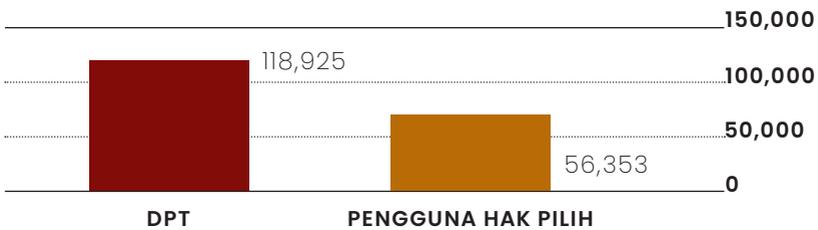
Secara agregat, rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 hanya mencapai 53 persen. Di luar itu, masih banyak kabupaten lain yang hanya mampu mencapai tingkat partisipasi pada kisaran 13 hingga 50 persen. Rendahnya partisipasi di daerah-daerah tersebut mengindikasikan adanya hambatan serius yang dihadapi pemilih disabilitas, baik dalam bentuk keterbatasan aksesibilitas ke TPS, minimnya informasi pemilu yang inklusif, maupun kurangnya dukungan sosial yang memadai.

C. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024

Berdasarkan data KPU, rata-rata tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024 tercatat sebesar 53,12 persen. Dari total DPT penyandang disabilitas sebanyak 118.925 orang, terdiri atas 63.630 laki-laki dan 55.295 perempuan. Adapun jumlah pengguna hak pilih penyandang disabilitas mencapai 56.353 orang, dengan rincian 25.731 laki-laki dan 30.622 perempuan. Jika dilihat lebih lanjut, rata-rata

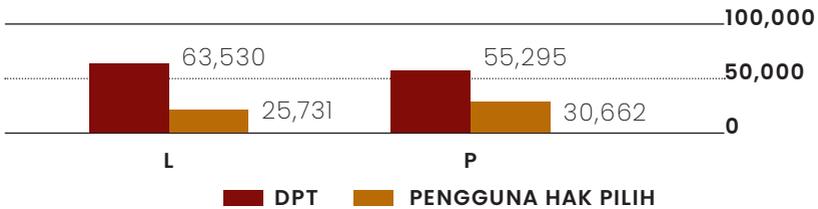
tingkat partisipasi pemilih disabilitas laki-laki adalah 46,19 persen, sedangkan perempuan mencapai 61,26 persen, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam partisipasi politik berdasarkan jenis kelamin di kalangan pemilih disabilitas.

Grafik 16. Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pilwaktot 2024



Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis

Grafik 17. Partisipasi Pemilih Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pilwaktot 2024



Sumber: Keputusan KPU No. 113/2025, diolah penulis



Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarwilayah. Tercatat terdapat lima kota yang berhasil melampaui target partisipasi nasional sebesar 82 persen. Kota Padangsidempuan menorehkan capaian tinggi dengan tingkat partisipasi disabilitas mencapai 99,31 persen, disusul oleh Kota Ternate dengan 88,22 persen. Beberapa kota berhasil mencapai tingkat partisipasi 100 persen, yaitu Kota Tual, Kota Tegal, dan Kota Ambon.

Sebaliknya, terdapat dua kota yang mencatatkan tingkat partisipasi disabilitas sangat rendah, yakni Kota Denpasar dengan 14,95 persen dan Kota Lhokseumawe dengan 17,01 persen. Di luar itu, sejumlah kota lain juga menunjukkan capaian partisipasi yang masih berada pada kategori rendah, dengan kisaran hanya antara 20 hingga 50 persen. Secara agregat, rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024 hanya mencapai 53,12 persen. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup lebar dalam realisasi partisipasi pemilih disabilitas di tingkat perkotaan.





4

**Lanskap IPP Pilkada
2024: Membaca Makna
Partisipasi**

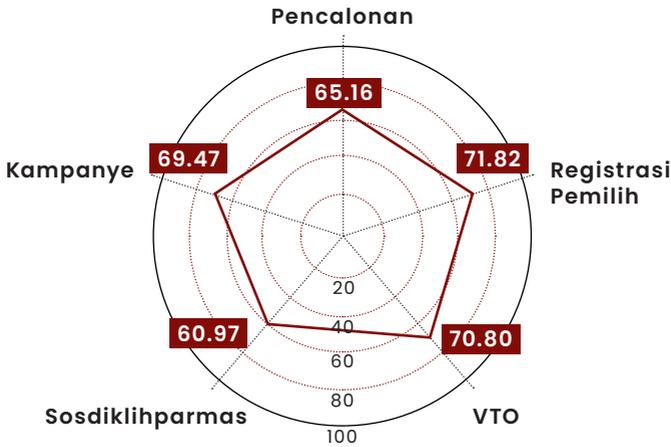
4.

Lanskap IPP Pilkada 2024: Membaca Makna Partisipasi

4.1 Menyigi Tren dan Pola Regional: Skor Variabel IPP di Tingkat Provinsi

Hasil pengukuran Indeks Partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 menunjukkan variasi capaian antar variabel. Dengan dengan rata-rata nasional sebesar 68,21 (skala 0-100) menunjukkan adanya “*engagement*” atau “aksi”. Hal ini menandakan adanya keikutsertaan pemilih pada proses penyelenggaraan Pilkada 2024. Dari lima variabel utama dalam indeks ini, Registrasi Memilih menjadi variabel dengan capaian skor paling tinggi yaitu 71,82. Variabel *Voter Turnout* dan Kampanye menempati urutan selanjutnya, masing-masing dengan skor 70,80 dan 69,47. Sementara untuk dua variabel lain yaitu Pencalonan dan Sosdiklihparmas berada di urutan terakhir, masing-masing dengan skor 65,16 dan 60,97.

Grafik 18. Skor Akhir per Variabel di IPP Pilgub 2024



Sumber: Data KPU 2025

Capaian skor pada variabel registrasi pemilih (71,82) ditopang oleh pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang berjalan dengan baik. Proses ini tidak hanya bergantung pada kerja teknis penyelenggara, tetapi juga pada dukungan partisipatif warga melalui laporan masyarakat yang membantu memperbaiki Daftar Pemilih Sementara (DPS). Selain itu, peran Dukcapil dan dinas terkait sangat krusial dalam melengkapi data kelompok rentan, sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk terdaftar. Dengan demikian, capaian pada variabel ini mencerminkan partisipasi pemilih dalam memastikan jaminan hak pilih, sekaligus menjadi potret atas keadilan akses politik yang menjadi fondasi utama demokrasi elektoral.



Variabel *voter turnout* (70,80) menunjukkan capaian yang impresif. Hasil ini ditopang oleh keterpenuhan indikator partisipasi pemilih yang relatif stabil, meskipun diwarnai isu kelelahan politik (*political fatigue*). Rata-rata tingkat partisipasi pada Pilkada 2024 tetap terjaga pada angka psikologis 71,18%, sebuah pencapaian yang menegaskan resiliensi pemilih dalam menjaga hak politiknya. Menariknya, perempuan sebagai kelompok yang kerap dikategorikan rentan justru tercatat sebagai segmen dengan tingkat partisipasi tertinggi. Selain itu, terdapat pula peningkatan signifikan pada partisipasi pemilih disabilitas, sehingga capaian ini dapat dibaca sebagai indikasi menguatnya inklusivitas dalam praktik demokrasi elektoral.

Capaian Skor pada Variabel kampanye (69,47) menunjukkan adanya dinamika yang cukup tinggi pada tahapan kampanye yang ditandai dengan beragam kegiatan, debat, serta fasilitas kampanye yang disediakan oleh KPU. Kondisi ini mencerminkan terbukanya ruang partisipasi politik yang hidup dan kompetitif. Meskipun diwarnai catatan pelanggaran, hal tersebut juga dapat dibaca dari perspektif lain, yakni sebagai bentuk partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Pilkada. Dengan demikian, kampanye tidak hanya menjadi arena kompetisi antar kandidat, tetapi juga ruang dimana masyarakat berperan aktif menjaga integritas proses demokrasi.

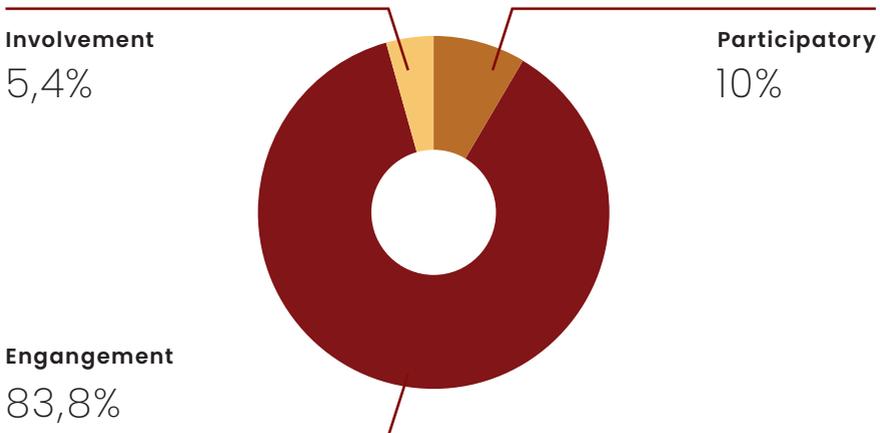
Sebaliknya, skor pada variabel pencalonan dan sosialisasi serta pendidikan pemilih tercatat relatif lebih rendah. Namun capaian ini tidak sepenuhnya dapat ditafsirkan sebagai kelemahan penyelenggara pemilu. Dalam aspek pencalonan (65,16), misalnya, faktor eksternal berperan dominan, seperti kuatnya kontrol partai politik dalam menentukan pasangan calon serta masih terbatasnya keterlibatan calon perempuan maupun calon perseorangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama lebih bersumber pada konfigurasi politik dan kultur representasi, yang berada di luar kendali teknis KPU.

Hal serupa juga terlihat pada variabel sosialisasi dan pendidikan pemilih (60,97). Rendahnya skor pada aspek ini dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi, khususnya terkait mekanisme kerjasama multipihak (MoU) yang masih tersentralisasi di KPU RI. Kondisi ini membatasi ruang inovasi satuan kerja KPU di daerah untuk membangun kemitraan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, minimnya keterlibatan lembaga pemantau turut menyumbang rendahnya capaian variabel ini. Hal tersebut dapat dipahami mengingat banyak lembaga pemantau tidak lagi memiliki sumber daya dan daya dukung memadai, baik dari negara maupun dari lembaga donor, sehingga kapasitas mereka untuk menjalankan fungsi pengawasan partisipatif semakin terbatas.

4.1.1 Peta Data Skor IPP Tiap Provinsi

Hasil pengukuran Indeks Partisipasi Pilkada 2024 menunjukkan komposisi yang cukup berimbang, meskipun masih didominasi oleh kategori *engagement*. Sebanyak 31 provinsi (83,8%) berada dalam kategori ini, yang merefleksikan partisipasi pemilih yang relatif terjaga namun lebih banyak pada dimensi prosedural: memastikan nama terdaftar dalam DPT, hadir di TPS, serta mengikuti proses kampanye secara umum.

Grafik 19. Agregat Kategori Partisipasi Provinsi pada Pilgub 2024

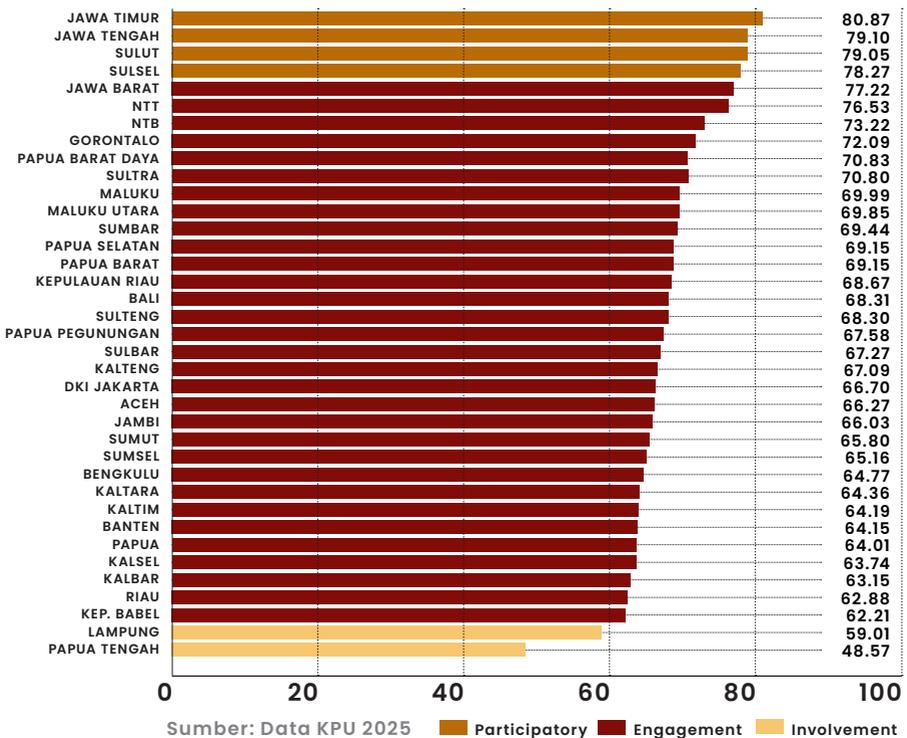


Sumber: Data KPU 2025

Sementara itu, terdapat 4 provinsi (10,8%) yang mampu menembus kategori *participatory*, yaitu Jawa Timur (80,87), Jawa Tengah (79,10), Sulawesi Utara (79,05), dan Sulawesi Selatan (78,27). Capaian ini menandai kualitas partisipasi politik yang lebih bermakna, di mana pemilih

tidak hanya hadir secara kuantitatif, tetapi juga terlibat secara aktif dalam pendidikan pemilih, pengawasan proses, dan membangun kesadaran kritis atas pilihan politiknya. Adapun 2 provinsi (5,4%) masih berada pada kategori *Involvement*, yaitu Lampung (59,01) dan Papua Tengah (48,57). Ini menunjukkan masih rendahnya intensitas partisipasi warga dan masih terbatas pada keikutsertaan yang bersifat minimal.

Grafik 20. Skor IPP Pilkada 2024 Per Provinsi





Komposisi data ini dapat dibaca sebagai cerminan dua wajah demokrasi elektoral Indonesia. Di satu sisi, keberhasilan sebagian besar provinsi berada pada kategori *engagement* patut diapresiasi, karena mencerminkan fondasi yang relatif kuat dalam menjamin hak pilih, menjaga kehadiran di TPS, dan menyediakan ruang kampanye yang cukup hidup. Namun, di sisi lain, dominasi kategori ini juga memperlihatkan adanya tantangan untuk mendorong partisipasi yang lebih substantif, yakni bagaimana kehadiran di bilik suara dapat ditopang dengan kesadaran politik yang kritis dan inklusif.

Refleksi ini menuntun pada orientasi ke depan: pemilu selanjutnya perlu lebih memberi perhatian pada aspek pendidikan pemilih, penguatan peran pemantau independen, dan kolaborasi lintas pihak. Dengan cara ini, dominasi kategori *engagement* dapat perlahan ditransformasikan menuju *participatory*, sehingga kualitas partisipasi pemilih tidak hanya diukur dari angka kehadiran, tetapi juga dari kedalaman keterlibatan dalam proses demokrasi. Dalam kerangka itu, capaian hari ini adalah pijakan awal yang menjanjikan, sekaligus tantangan yang harus dijawab bersama untuk memastikan demokrasi lokal Indonesia semakin matang.

Grafik 21. Skor IPP Provinsi per Variabel

NO	PROVINSI	Registrasi Pemilih	Pencalonan	Kampanye	Sosdiklihparmas	VTO	Skor Akhir
1	ACEH	61.60	57.00	78.50	67.28	63.64	66.27
2	BALI	67.20	56.00	72.50	70.26	69.07	68.31
3	BANTEN	58.00	56.00	72.50	71.07	60.79	64.15
4	BENGKULU	60.00	77.00	65.00	69.88	60.32	64.77
5	DKI JAKARTA	70.50	66.00	69.50	59.69	67.21	66.70
6	GORONTALO	79.00	70.00	72.00	74.19	66.83	72.09
7	JAMBI	67.00	73.00	65.50	46.69	76.30	66.03
8	JAWA BARAT	81.50	86.00	83.50	72.41	70.48	77.22
9	JAWA TENGAH	79.50	73.00	84.50	90.31	69.81	79.10
10	JAWA TIMUR	84.00	83.00	86.50	89.03	68.88	80.87
11	KALBAR	71.00	46.00	67.00	46.97	71.87	63.15
12	KALSEL	72.60	61.00	63.50	49.91	68.14	63.74
13	KALTARA	71.00	71.00	66.00	43.88	70.30	64.36
14	KALTENG	71.60	74.00	67.50	70.28	59.37	67.09
15	KALTIM	69.60	62.00	64.50	42.09	75.85	64.19
16	KEP. BABEL	63.50	66.00	63.00	57.31	62.81	62.21
17	KEPULAUAN RIAU	76.00	57.00	70.00	51.94	77.94	68.67
18	LAMPUNG	64.50	61.00	65.00	54.28	53.83	59.01
29	MALUKU	84.70	67.00	62.00	61.53	72.15	69.99
20	MALUKU UTARA	70.66	73.00	69.00	56.97	77.42	69.85
21	NTB	77.50	67.00	81.00	75.41	65.80	73.22
22	NTT	79.70	71.00	69.50	69.22	85.81	76.53
23	PAPUA	70.00	47.00	65.00	50.88	73.79	64.01
24	PAPUA BARAT	74.00	48.00	62.00	52.50	88.83	69.15



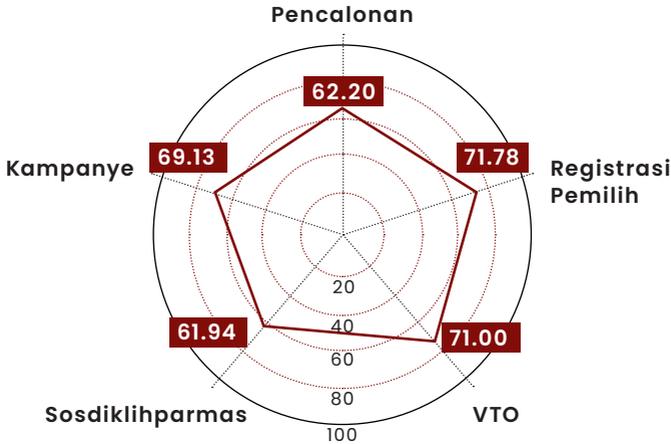
25	PAPUA BARAT DAYA	76.50	71.00	58.00	56.81	84.88	70.83
26	PAPUA PEGUNUNGAN	74.00	60.00	64.00	53.97	77.30	67.58
27	PAPUA SELATAN	75.00	69.00	74.00	45.09	78.12	69.15
28	PAPUA TENGAH	44.00	49.00	57.50	40.22	51.07	48.57
29	RIAU	65.60	54.00	71.00	55.19	63.74	62.88
30	SULBAR	67.70	70.00	67.00	59.50	71.43	67.27
31	SULSEL	73.50	63.00	74.00	89.19	82.10	78.27
32	SULTENG	76.60	72.00	66.50	46.56	77.24	68.30
33	SULTRA	83.50	70.00	77.50	50.72	71.54	70.80
34	SULUT	78.50	79.00	79.50	81.91	77.21	79.05
35	SUMBAR	75.80	62.00	64.00	70.97	70.27	69.44
36	SUMSEL	64.50	67.00	64.00	63.00	67.21	65.16
37	SUMUT	77.60	57.00	68.50	49.00	70.27	65.80

Sumber: Data KPU 2025

4.2 Dinamika Lokal: Skor Variabel IPP di Kabupaten

Indeks Partisipasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 secara nasional mencatat skor rata-rata 68,09. Angka ini menandakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pilkada berjalan cukup baik, meski belum sepenuhnya merata di semua dimensi. Dari lima variabel utama, registrasi pemilih menempati capaian tertinggi dengan skor 71,78, disusul voter turnout sebesar 71,00, dan kampanye sebesar 69,13. Sementara itu, dua variabel lain, yakni pencalonan (62,20) dan sosialisasi serta pendidikan pemilih (61,94), masih menjadi variabel yang paling rendah.

Grafik 22. Rata-Rata Nasional Indeks Partisipasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024



Sumber: Data KPU 2025

Keberhasilan tertinggi terlihat pada variabel registrasi pemilih, yang memperlihatkan bahwa pemutakhiran daftar pemilih berjalan dengan cukup efektif. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara, serta peran Dukcapil dalam memperbaiki data kependudukan, turut mendorong tercapainya akurasi data. Hal ini penting karena memastikan tidak ada kelompok rentan yang kehilangan hak pilihnya. Dengan demikian, capaian di aspek ini bukan hanya sekadar pencapaian administratif, tetapi juga gambaran dari jaminan kesetaraan akses politik bagi warga negara.



Pada variabel *voter turnout*, skor 71,00 memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi memilih tetap berada pada angka psikologis yang tinggi. Fakta ini cukup penting mengingat adanya kecenderungan kejenuhan politik (*political fatigue*) setelah rangkaian Pemilu 2024. Menariknya, kelompok perempuan justru mencatatkan partisipasi lebih tinggi. Pemilih disabilitas juga mengalami peningkatan. Ini menunjukkan adanya pergeseran positif dalam inklusivitas pemilu.

Sementara itu, kampanye dengan skor 69,13 menunjukkan bahwa tahapan ini tetap menjadi ruang interaksi politik yang dinamis. Debat publik, kampanye tatap muka, hingga kampanye berbasis media sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi sekaligus menilai kapasitas kandidat. Kendati masih ditemukan berbagai pelanggaran kampanye, fenomena ini juga menandakan bahwa ruang publik politik tetap hidup, dan masyarakat ikut serta dalam mengawasi jalannya kontestasi.

Berbeda dengan tiga variabel di atas, capaian pencalonan (62,20) dan sosialisasi serta pendidikan pemilih (61,94) masih relatif rendah. Pada aspek pencalonan, dominasi partai politik dalam menentukan kandidat membuat peluang calon perseorangan maupun keterlibatan perempuan terbatas. Akibatnya, kualitas kompetisi sering kali bergantung pada dinamika internal parpol, bukan pada keterbukaan ruang kontestasi. Sedangkan pada aspek sosialisasi dan pendidikan

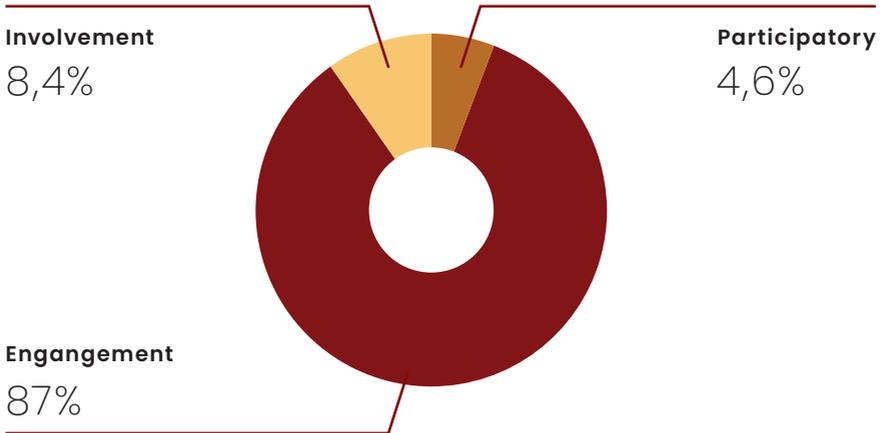
pemilih, tantangan utamanya terletak pada keterbatasan regulasi dan minimnya dukungan multipihak. KPU daerah seringkali tidak leluasa menjalin kerja sama lokal karena prosedur masih terpusat, sementara lembaga pemantau juga mengalami keterbatasan kapasitas.

Secara keseluruhan, gambaran indeks ini memperlihatkan dua hal utama: pertama, fondasi partisipasi pemilih sudah cukup kokoh melalui registrasi dan tingkat kehadiran di TPS; kedua, ada pekerjaan rumah besar dalam memperkuat aspek representasi kandidat, efektivitas kampanye, dan pendidikan pemilih. Artinya, meskipun antusiasme masyarakat untuk hadir dan menggunakan hak pilih tergolong baik, kualitas partisipasi belum sepenuhnya mencerminkan kompetisi politik yang inklusif dan partisipatif.

4.2.1 Peta Data Skor IPP Kabupaten

Hasil pengukuran Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 pada level kabupaten menunjukkan adanya variasi kualitas partisipasi yang cukup mencolok. Dari 415 kabupaten yang diukur, hanya 19 kabupaten (4,6%) yang berhasil masuk kategori *participatory*, 361 kabupaten (87%) berada pada kategori *engagement*, dan 35 kabupaten (8,4%) masih bertahan di level *involvement*.

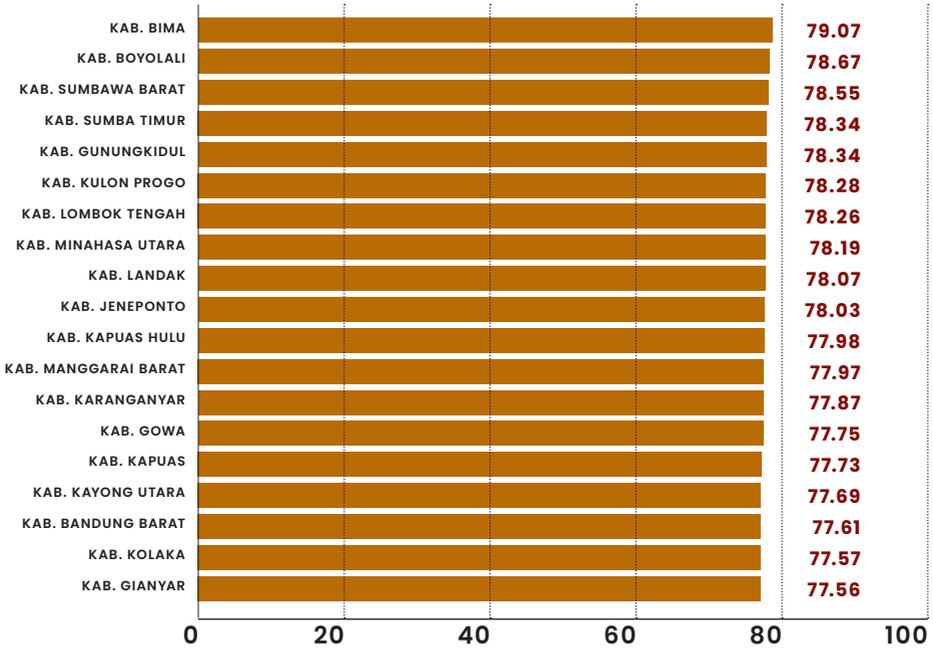
Grafik 23. IPP Pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2024 berdasarkan Kategori



Sumber: Data KPU 2025

Pada kategori *participatory*, skor agregat yang diraih relatif merata, berkisar antara 77,56 hingga 79,07. Kabupaten Bima menjadi daerah dengan capaian tertinggi (79,07), disusul Boyolali (78,67), Sumbawa Barat (78,55), serta Sumba Timur (78,34). Keberhasilan daerah-daerah ini ditopang oleh keseimbangan skor pada lima variabel utama IPP: registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih (sodiklihparmas), serta *voter turnout*. Karakteristik yang menonjol adalah kuatnya dinamika kampanye yang membuka ruang partisipasi luas bagi warga, serta sodiklihparmas yang cukup intensif sehingga memperkuat kesadaran pemilih. Di sisi lain, tahapan pencalonan yang relatif kompetitif turut mendorong meningkatnya minat dan keterlibatan masyarakat, sehingga partisipasi tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif.

Grafik 24. 19 Daerah Level *Participatory* Agregat Indeks Partisipasi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2024



Sumber: Data KPU 2025

Sebagian besar kabupaten berada di kategori *engagement* (361 daerah atau 87%). Capaian ini menunjukkan bahwa pemilih di wilayah-wilayah tersebut sudah cukup aktif dalam proses elektoral, terutama dalam registrasi pemilih dan kehadiran di TPS yang konsisten tinggi. Namun, skor cenderung menurun pada variabel *sosdiklihparmas* dan pencalonan. Misalnya, Kabupaten Lombok Utara (71,51), Dairi (76,18), Flores Timur (76,54), hingga Kabupaten Banyuwangi (72,36) menunjukkan capaian baik dalam pendaftaran dan kehadiran di TPS, tetapi keterbatasan masih terlihat pada kualitas pendidikan pemilih dan dinamika politik dalam tahapan pencalonan. Hal ini menegaskan bahwa *engagement*

adalah fase transisi: partisipasi sudah meluas, tetapi lebih banyak bersifat prosedural ketimbang tumbuh dari kesadaran politik yang kritis.

Sementara itu, 35 kabupaten (8,4%) masih berada pada kategori *involvement*, dengan skor relatif rendah. Kabupaten Intan Jaya menempati posisi terendah (50,61), disusul Luwu (51,22), Yalimo (52,57), Majene (53,97), dan Kuantan Singingi (55,12). Tantangan utama di daerah-daerah ini tampak pada variabel *sosdiklihparmas* dan *voter turnout*, yang jauh tertinggal dibanding daerah lain. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya penetrasi kampanye menjadi faktor penghambat. Akibatnya, partisipasi warga lebih bersifat minimal, terbatas pada mobilisasi sesaat atau sekadar pemenuhan kewajiban formal, alih-alih tumbuh dari keterlibatan politik yang sadar dan berkelanjutan.

Dari pola ini, dapat ditarik benang merah bahwa keberhasilan suatu daerah mencapai kategori *participatory* erat kaitannya dengan dua faktor utama: (1) kualitas kampanye yang kompetitif, inklusif, dan memberi ruang interaksi warga, serta (2) efektivitas *sosdiklihparmas* yang mampu memperkuat literasi politik masyarakat. Sebaliknya, daerah-daerah yang masih tertahan di kategori *involvement* umumnya lemah di dua variabel ini, meskipun pada aspek registrasi pemilih dan pencalonan mungkin menunjukkan capaian yang lumayan. Oleh karena itu, perbedaan kategori tidak semata-mata soal angka kehadiran di TPS, tetapi sangat ditentukan oleh sejauh mana partisipasi politik warga didorong menjadi pengalaman yang lebih substantif dan sadar.

Dengan demikian, tantangan utama ke depan bukan lagi sekadar meningkatkan jumlah kehadiran pemilih, tetapi memperdalam kualitas partisipasi. Upaya ini menuntut penguatan pendidikan pemilih, keterlibatan pemantau independen, serta kolaborasi erat antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil. Hanya dengan cara itu, transformasi dari *engagement* menuju *participatory* dapat berlangsung secara lebih luas, dan demokrasi lokal di Indonesia dapat berkembang menuju arah yang lebih matang dan berkelanjutan.

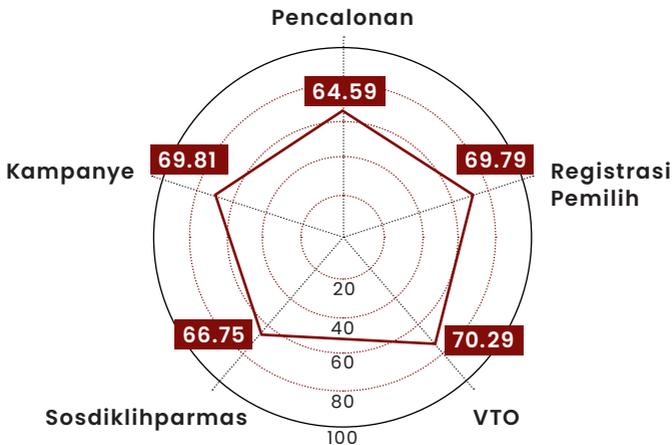
4.3 Partisipasi di Ruang Urban: Skor Variabel IPP di Kota

Indeks Partisipasi Pilkada 2024 di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024 menampilkan capaian yang paling baik dibandingkan tingkat provinsi dan kabupaten, dengan skor rata-rata nasional sebesar 68,81. Meski sama-sama berada dalam kategori *engagement*, Indeks Partisipasi Pemilihan di level kota menunjukkan karakteristik partisipasi pemilih yang lebih homogen dan konsisten.

Indeks Partisipasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024 secara nasional mencatat skor rata-rata 68,81. Angka ini menampilkan capaian yang paling baik dibandingkan tingkat provinsi dan kabupaten. Meski sama-sama berada dalam kategori *engagement*, Indeks Partisipasi Pemilihan di level kota menunjukkan karakteristik partisipasi pemilih yang lebih homogen dan konsisten. Capaian ini menandakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pilkada berjalan cukup baik, meski belum sepenuhnya merata di semua dimensi.

Dari lima variabel utama, *Voter Turnout* menempati capaian tertinggi dengan skor 70,29, disusul Kampanye sebesar 69,81, dan Registrasi Pemilih sebesar 69,79. Sementara itu, dua variabel lain, yakni Sosdiklihparmas (66,75) dan Pencalonan (64,69) menjadi variabel yang paling rendah.

Grafik 25. Skor Akhir per Variabel di IPP Pilwakot 2024



Sumber: Data KPU 2025

Keberhasilan tertinggi terlihat pada variabel VTO (70,29) yang menunjukkan tingkat keterlibatan pemilih untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya cukup tinggi. Fakta ini menjadi penting mengingat adanya kecenderungan *political fatigue* atau kejenuhan politik pasca rangkaian Pemilu 2024 yang begitu panjang dan intens. Menariknya, tingkat partisipasi kelompok perempuan justru tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran positif menuju pemilu yang lebih inklusif, di mana kesadaran perempuan sebagai subjek politik semakin menguat.

Sementara itu, variabel Kampanye (69,81) menunjukkan bahwa tahapan ini masih menjadi ruang interaksi politik yang dinamis antara kandidat dan masyarakat. Aktivitas seperti debat publik, kampanye tatap muka, hingga kampanye berbasis media sosial membuka kesempatan bagi warga untuk menyuarakan aspirasi sekaligus menilai kapasitas calon kepala daerah. Meskipun masih dijumpai sejumlah pelanggaran kampanye, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa ruang publik politik tetap hidup dan masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi jalannya kontestasi.

Pada variabel Registrasi Pemilih (69,79), keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara serta peran proaktif Dukcapil dalam memperbaiki data kependudukan berkontribusi pada meningkatnya akurasi daftar pemilih. Capaian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan administratif, tetapi juga menjadi indikator penting dari jaminan kesetaraan akses politik bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan yang kerap berisiko kehilangan hak pilih.

Sebaliknya, dua variabel lainnya yakni Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (66,75) serta Pencalonan (64,59) masih menunjukkan capaian yang relatif rendah. Pada aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih, tantangan utama terletak pada keterbatasan regulasi dan minimnya dukungan multipihak. KPU daerah sering kali tidak leluasa menjalin kemitraan dengan organisasi lokal karena prosedur birokratis yang masih terpusat, sementara lembaga pemantau dan kelompok masyarakat sipil juga menghadapi keterbatasan sumber daya. Adapun



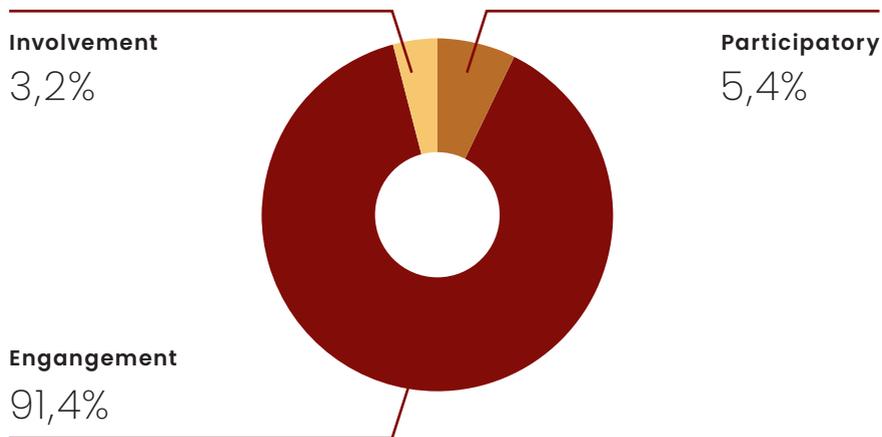
dalam aspek pencalonan, dominasi partai politik dalam menentukan kandidat menyebabkan ruang bagi calon perseorangan dan perempuan semakin sempit. Kondisi ini membuat kualitas kompetisi cenderung bergantung pada dinamika internal partai politik ketimbang keterbukaan ruang kontestasi yang sejati.

Secara keseluruhan, gambaran indeks ini memperlihatkan bahwa partisipasi dalam Pilkada 2024 masih menunjukkan vitalitas demokrasi elektoral di tingkat lokal, terutama dalam dimensi partisipasi pemilih dan dinamika kampanye. Namun, rendahnya skor pada aspek sosialisasi dan pencalonan menjadi sinyal perlunya perbaikan struktural dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu, agar partisipasi politik tidak hanya bermakna hadir di bilik suara, tetapi juga mencerminkan keterlibatan warga secara menyeluruh dalam setiap tahapan demokrasi lokal.

4.3.1 Peta Data Skor IPP di Tingkat Kota

Peta partisipasi politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024 menunjukkan tren yang cukup positif, terutama jika dilihat dari penilaian yang mencakup lima variabel utama, yaitu registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih (*sosdiklihparmas*), serta *voter turnout* (VTO). Berdasarkan hasil agregat kelima variabel tersebut, sebagian besar kota menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup kuat, menandakan bahwa proses demokrasi telah berjalan dengan partisipasi publik yang semakin membaik.

Grafik 26. IPP Pemilihan Walikota/Wakil Walikota 2024 berdasarkan Kategori



Sumber: Data KPU 2025

Dari total 93 Kota, sebanyak 85 kota (91,4%) masuk dalam kategori *engagement*, yang menggambarkan bahwa masyarakat di daerah-daerah tersebut telah aktif dalam proses elektoral, baik melalui partisipasi dalam kampanye, keterlibatan dalam sosialisasi politik, maupun partisipasi pada hari pemungutan suara. Kategori ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak pasif, melainkan telah berkontribusi nyata dalam tahapan-tahapan pemilihan, meskipun belum sepenuhnya mencapai kualitas partisipasi yang substantif dan berkelanjutan.

Sementara itu, terdapat lima kota (5,4%) yang berhasil mencapai kategori *participatory*, yakni Kota Tomohon (79,36), Kota Makassar (78,75), Kota Bukittinggi (78,64), Kota Cilegon (77,71), dan Kota Pariaman (77,59).



Kota-kota ini menunjukkan kinerja unggul pada sebagian besar variabel, khususnya pada aspek pencalonan dan kampanye, yang ditandai dengan kompetisi kandidat yang sehat, kehadiran calon perempuan atau perseorangan, serta distribusi dukungan partai politik yang merata. Selain itu, tingkat partisipasi pemilih (VTO) di kota-kota ini juga relatif tinggi, memperkuat kualitas keterlibatan warga dalam menentukan arah politik lokal.

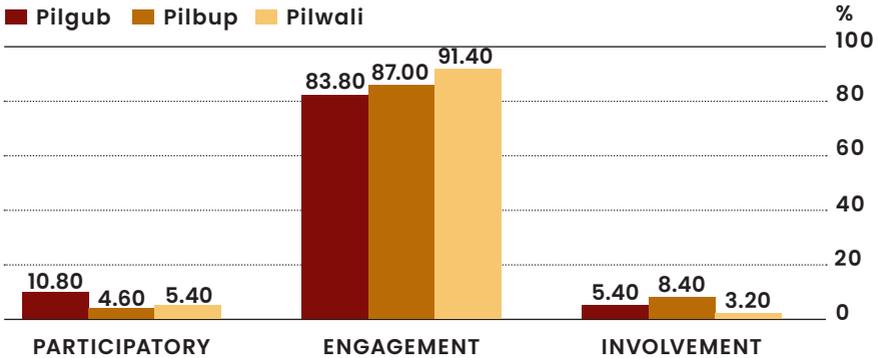
Di sisi lain, hanya tiga kota (3,2%) yang masuk dalam kategori *involvement*, yaitu Kota Cimahi (52,22), Kota Jayapura (57,03), dan Kota Langsa (58,82). Cimahi memperoleh nilai cukup tinggi pada registrasi pemilih (70,50) dan pencalonan (70,00), namun partisipasi publik masih lemah pada sosdiklihparmas (40,03) dan VTO (44,04). Jayapura mencatat VTO (67,40) yang baik, tetapi skor rendah pada pencalonan (53,00) dan sosdiklihparmas (40,03) menandakan tantangan dalam memperluas kesadaran politik. Sementara itu, Sorong menonjol pada pencalonan (88,00) dan kampanye (68,50), mencerminkan dinamika politik lokal yang kuat meski masih perlu penguatan pada aspek registrasi pemilih (61,50) dan sosdiklihparmas (46,48). Secara umum, capaian ini menggambarkan bahwa partisipasi politik di ketiga kota tersebut sudah memasuki tahap keterlibatan aktif, namun belum menyeluruh; penguatan literasi politik dan sosialisasi yang lebih inklusif menjadi kunci agar partisipasi masyarakat dapat berkembang dari sekadar keterlibatan menjadi partisipasi substantif.

Secara keseluruhan, gambaran indeks partisipasi politik kota pada Pilkada 2024 mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam keterlibatan warga negara, dengan sebagian besar daerah menunjukkan semangat partisipatif yang tumbuh dari bawah. Meskipun belum semua kota mencapai tahap partisipasi penuh, dominasi kategori *engagement* menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di tingkat lokal masih hidup dan terus berkembang, serta membuka peluang besar untuk memperkuat kualitas partisipasi politik warga di masa mendatang.

4.4 Perbandingan Skor IPP tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Secara umum, indeks partisipasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didominasi oleh kategori *engagement*, dengan persentase tertinggi tercatat pada Pilwakt (91,40%), disusul Pilbup (87%) dan Pilgub (83,80%). Dominasi kategori ini menunjukkan bahwa mayoritas daerah telah mencapai tingkat partisipasi yang melibatkan masyarakat secara aktif, meskipun belum sepenuhnya menyentuh bentuk partisipasi substantif seperti dalam kategori *participatory*. Artinya, warga tidak hanya hadir sebagai pemilih pasif, tetapi telah menunjukkan bentuk keterlibatan yang lebih luas, misalnya melalui diskusi publik, pemantauan proses kampanye, serta partisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tingginya angka *engagement* ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu di berbagai tingkatan telah berhasil menciptakan ruang partisipatif yang relatif terbuka dan mengundang keterlibatan masyarakat.

Grafik 27. Perbandingan Kategori IPP Pemilihan 2024 (Pilgub, Pilbup, dan Pilwali)

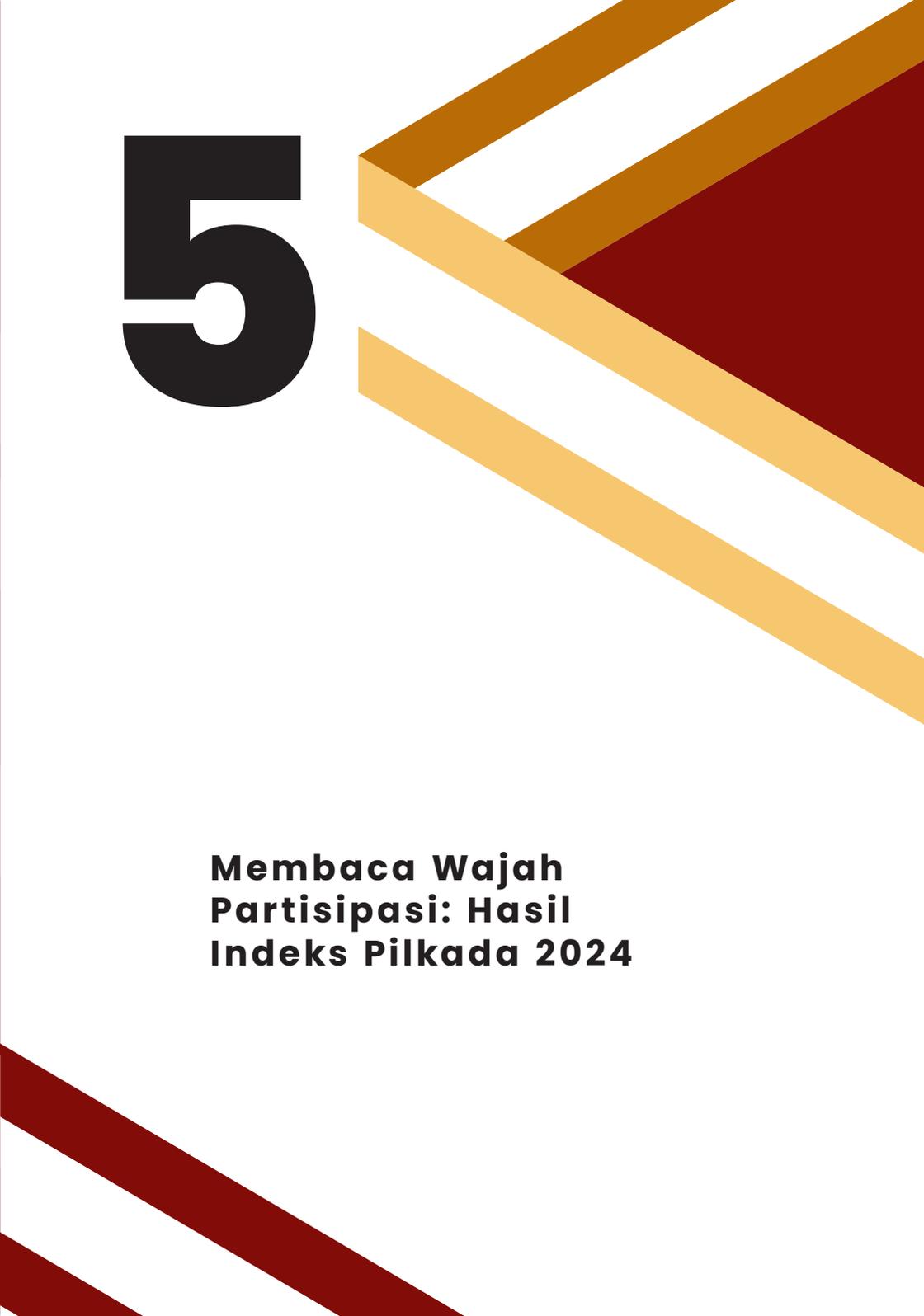


Sumber: Data KPU 2025

Sementara itu, kategori *participatory* dan *involvement* menunjukkan variasi yang menarik. Pada kategori *participatory*, Pilgub mencatatkan persentase tertinggi (10,80%), menandakan bahwa di beberapa daerah tingkat provinsi, partisipasi warga telah berkembang menuju bentuk keterlibatan yang lebih bermakna, di mana pemilih aktif terlibat dalam keseluruhan proses elektoral. Sebaliknya, Pilwali hanya mencatat 5,40%, yang mengindikasikan masih terbatasnya ruang partisipasi substantif di tingkat kota. Pada kategori *involvement*, Pilbup menempati posisi tertinggi (8,40%), menunjukkan adanya sejumlah daerah kabupaten yang masih berada pada tahap partisipasi minimal, di mana masyarakat mulai menunjukkan keterlibatan, tetapi belum secara konsisten dalam setiap aspek pemilu. Secara keseluruhan, perbandingan ini menggambarkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2024 sudah cukup aktif dan meluas, namun masih perlu diperkuat secara kualitas agar keterlibatan warga tidak berhenti pada tingkat prosedural, melainkan berkembang menjadi partisipasi yang lebih kritis dan deliberatif di seluruh tahapan pemilu.







5

**Membaca Wajah
Partisipasi: Hasil
Indeks Pilkada 2024**

5.

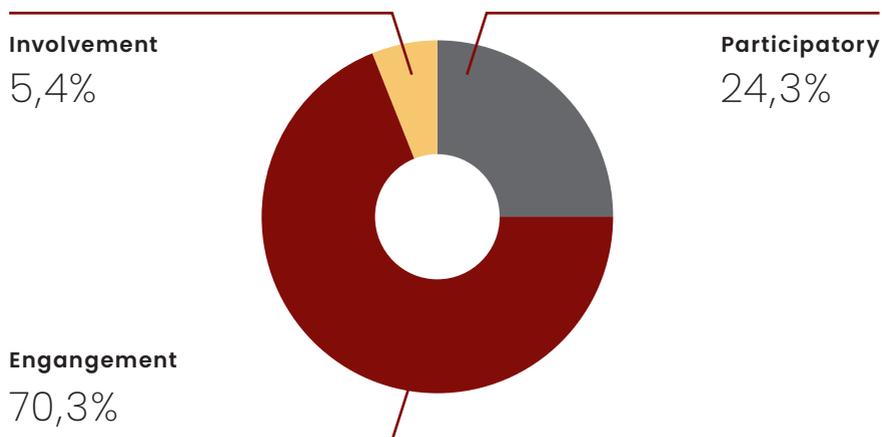
Membaca Wajah Partisipasi: Hasil Indeks Pilkada 2024

5.1 Dimensi Makro: Pola Partisipasi di Tingkat Provinsi

A. Kelengkapan dan Akurasi Registrasi Pemilih

Variabel Registrasi Pemilih menunjukkan rata-rata nasional sebesar 71,82, menjadikannya capaian tertinggi kedua setelah variabel *Voter Turnout* (VTO). Berdasarkan hasil skoring akhir variabel registrasi pemilih, sembilan provinsi masuk dalam kategori *participatory* dengan perolehan skor di atas ($> 77,50$), dua puluh enam (26) provinsi dalam kategori *engagement* dengan rentang perolehan skor akhir sebesar (60 - 77,50), dan hanya dua provinsi dalam kategori *involvement* yang skornya kurang dari (< 60). Sebaran ini mengindikasikan bahwa proses registrasi pemilih di sebagian besar provinsi sudah berjalan relatif baik, meski masih ada ruang signifikan untuk perbaikan menuju standar yang optimal.

Grafik 28. Distribusi Variabel Registrasi Pemilih IPP Pilkada 2024



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

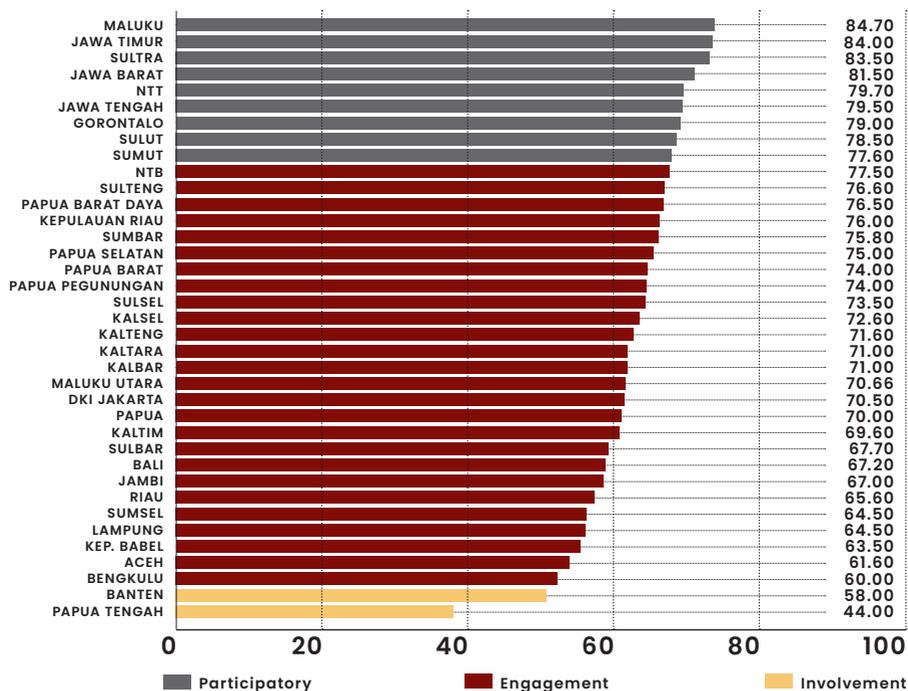
Kinerja variabel Registrasi Pemilih sangat bergantung pada faktor internal KPU di setiap daerah. Faktor ini mencakup kualitas sistem kerja, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta kemampuan KPU dalam berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk memastikan seluruh proses teknis penyusunan data pemilih berjalan optimal. Semakin berkualitas dan partisipatif proses ini dijalankan, maka semakin tinggi pula skor yang dicapai.



kualitas kinerja pada variabel Registrasi Pemilih secara langsung diukur melalui serangkaian indikator kunci yang merefleksikan kesiapan dan kapasitas internal KPU. Kemampuan teknis ini tercermin dari rendahnya persentase pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setelah proses coklit, yang menunjukkan kecermatan verifikasi, serta kelihaihan administratif dalam mengelola data pemilih yang dinamis seperti Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk menjamin pemilih yang melakukan pindah memilih dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk menjamin pemilih yang belum terdaftar sebelumnya.

Lebih dari sekadar kecermatan teknis, kinerja KPU juga dinilai dari kemampuannya membuka ruang pengawasan publik, yang diukur melalui jumlah laporan masyarakat selama tahap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Selain itu, keberhasilan proses ini juga dinilai dari aspek keadilan dan advokasi pemilih rentan, yang dibuktikan melalui persentase keterwakilan pemilih perempuan dan penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan demikian, kombinasi indikator-indikator ini secara kongruen membentuk sebuah penilaian objektif terhadap kemampuan KPU dalam menyelenggarakan proses registrasi pemilih yang akurat, partisipatif, dan inklusif.

Grafik 29. Skor Variabel Registrasi Pemilih



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Berdasarkan gambar di atas, ada tiga (3) provinsi dengan skor tertinggi pada variabel Registrasi Pemilih yang masuk dalam kategori *Participatory*. Maluku (84,70), diikuti oleh Jawa Timur (84,00), dan Sulawesi Tenggara (83,50). Ketiga provinsi ini mencapai skor tinggi berkat keberhasilan ketiganya dalam memenuhi indikator penilaian utama dalam variabel ini, yang meliputi efektivitas sistem registrasi pemilih melalui optimalisasi proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), minimnya temuan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setelah proses pencocokan dan penelitian, serta kemampuan mengakomodasi berbagai segmen pemilih, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, DPT Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).



Dalam konteks Maluku, faktor dominan yang mendorong tingginya skor variabel registrasi pemilih adalah keterlibatan aktif dan masif dari masyarakat dalam memvalidasi data. Hal ini terlihat jelas dari tingginya jumlah laporan dan masukan publik selama tahap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Jumlah laporan yang masuk mencapai 49.541, sebuah angka yang mengindikasikan bahwa KPU Maluku berhasil menciptakan mekanisme yang efektif untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam proses pengawasan kualitas penyusunan daftar Pemilih. Masyarakat berperan sebagai pengawas langsung terhadap keakuratan data yang dipublikasikan. Selain itu, laporan tersebut juga membantu KPU mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kegandaan, pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), atau pemilih yang belum terdaftar. Tingginya jumlah laporan ini menunjukkan bahwa program dan sosialisasi KPU berhasil membangun kesadaran kolektif bahwa akurasi data pemilih merupakan tanggung jawab bersama.

Sementara itu, Jawa Timur (84,00) menempati peringkat kedua dengan keunggulan yang bersumber dari kapasitas administratif dan kemampuan satker dalam mengelola daftar pemilih yang besar dan kompleks. Jumlah DPT di tingkat provinsi pada Pilgub Jatim 2024 sebanyak 31.280.418. Terdiri dari 15.410.935 pemilih laki laki, dan 15.869.483 pemilih perempuan. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, tingginya skor Jawa Timur dipengaruhi oleh rendahnya persentase pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang ditemukan pasca proses coklit jika dibandingkan

dengan total DPT yang ada di Jawa Timur. Hanya 7 persen dari total DPT yang berjumlah 31.280.418. Hal ini mengindikasikan kualitas data kependudukan awal dari Dukcapil cukup akurat dan sinergi kelembagaan berjalan optimal. Selain itu, Jawa Timur dinilai berhasil dalam aspek inklusivitas, yang dibuktikan dengan tingginya persentase pemilih perempuan dan penyandang disabilitas yang terakomodasi dalam DPT. Dalam DPT Pilgub Jawa Timur pemilih perempuan mendominasi pemilih laki-laki dengan persentase sebesar 50,73 persen. Selain itu, kemampuan untuk mengelola Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam jumlah besar, yang mencerminkan tingginya mobilitas penduduk, menjadi bukti konkret dari solidnya sistem administrasi kependudukan dan pemilihan di provinsi ini.

Di peringkat ketiga, Sulawesi Tenggara (83,50) provinsi ini juga kemampuan mengatasi tantangan geografis yang signifikan. Skor tinggi ini salah satunya didorong oleh keterlibatan aktif lebih dari 505 warga yang memberikan laporan dan masukan selama tahap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Angka ini menunjukkan bahwa KPU Sulawesi Tenggara juga berhasil membuka ruang partisipasi yang efektif dan berhasil menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kualitas daftar pemilih. Keterlibatan publik ini berkorelasi positif dengan rendahnya persentase pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca proses pencocokan dan penelitian dilakukan, membuktikan bahwa masukan dari masyarakat secara langsung meningkatkan akurasi data pemilih.

Sementara dua (2) provinsi yang masuk dalam kategori skor *involvement* dalam variabel registrasi pemilih, yakni provinsi Papua Tengah (44,00) dan Provinsi Banten (58,00) juga memberikan catatan dan pembelajaran penting. Skor rendah yang diperoleh kedua provinsi ini menyoroti bahwa tantangan dalam pemutakhiran data pemilih dapat bersumber dari akar masalah yang sangat berbeda, yaitu tantangan struktural-geografis di satu sisi dan tantangan administratif-demografis di sisi lain.

Skor terendah yang diraih oleh Papua Tengah merupakan cerminan dari tantangan fundamental terkait infrastruktur data dan kondisi geografis. Faktor utama di balik rendahnya skor ini adalah kesulitan ekstrem dalam pelaksanaan proses pencocokan dan penelitian (coklit). Kondisi topografi yang berat, akses transportasi yang terbatas, dan sebaran penduduk yang tidak merata membuat proses verifikasi data dari rumah ke rumah menjadi tidak optimal. Hal ini secara langsung berdampak pada beberapa indikator kunci seperti akurasi data pemilih. Tingginya tantangan geografis menyebabkan persentase pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang ditemukan kemungkinan besar masih sangat tinggi, bahkan setelah proses pemutakhiran, karena tidak semua data dapat diverifikasi secara faktual.

Kedua, mekanisme untuk laporan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) hampir tidak dapat berjalan efektif. Keterbatasan akses informasi dan infrastruktur komunikasi menghalangi partisipasi publik dalam mengawasi dan memperbaiki data pemilih. Sebagai daerah otonom baru, kualitas data kependudukan awal yang diserahkan oleh Dukcapil

kemungkinan besar belum sepenuhnya akurat dan komprehensif, memberikan beban berat sejak awal bagi KPU.

Secara keseluruhan, capaian pada variabel Registrasi Pemilih menunjukkan bahwa kualitas proses pemutakhiran data pemilih tidak ditentukan oleh besar kecilnya jumlah pemilih, melainkan oleh kemampuan manajerial dan inovasi dari penyelenggara pemilu di tingkat provinsi. Keberhasilan provinsi-provinsi seperti Maluku, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara membuktikan argumentasi tersebut. Maluku unggul karena tingginya partisipasi publik dalam pengawasan, Jawa Timur menonjol berkat kapasitas administrasi yang solid untuk mengelola data raksasa, sementara Sulawesi Tenggara berhasil mengombinasikan partisipasi warga dengan kemampuan mengatasi tantangan geografis. Keberagaman pendekatan ini menggarisbawahi bahwa tidak ada formula tunggal, melainkan perlunya adaptasi strategi sesuai dengan konteks dan karakteristik wilayah masing-masing.

Temuan ini memberikan pelajaran berharga bahwa fondasi pemilu yang kredibel terletak pada proses registrasi yang partisipatif dan inklusif. Ke depan, tantangannya adalah mereplikasi keberhasilan ini di provinsi lain dengan mendorong kolaborasi yang lebih erat antara KPU, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Upaya peningkatan tidak hanya berfokus pada aspek teknis-administratif semata, tetapi juga pada pembangunan kesadaran kolektif bahwa daftar pemilih yang akurat adalah tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kualitas demokrasi dapat terus diperkuat



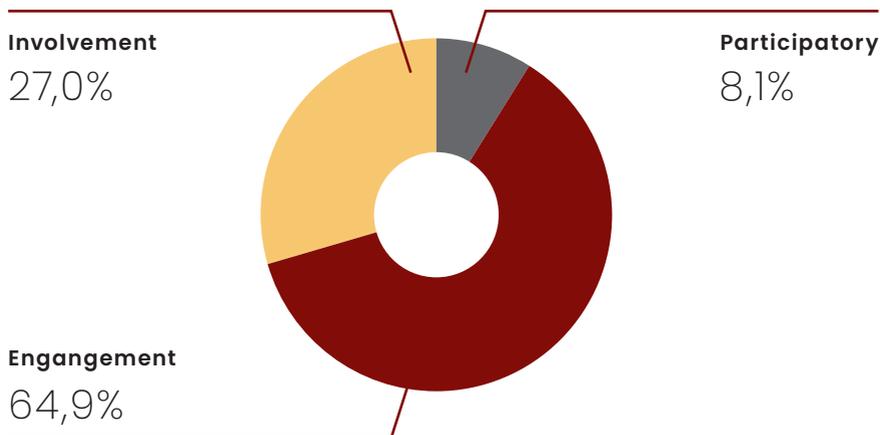
dari tahap paling fundamental, yakni memastikan setiap warga negara yang berhak dapat terdaftar dan menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan.

B. Representasi dan Kompetisi dalam Pencalonan

Variabel pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 mencatatkan rata-rata nasional sebesar 65,16. Menempati posisi terendah kedua di antara variabel lainnya. Capaian ini tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai kelemahan penyelenggara pemilu, sebab dalam aspek pencalonan faktor eksternal berperan sangat dominan. Kuatnya kontrol partai politik dalam proses rekrutmen calon kepala daerah membatasi ruang bagi KPU untuk mendorong variasi dan kualitas kandidat. Akibatnya, potensi lahirnya calon perseorangan maupun keterwakilan perempuan dalam pencalonan masih terbatas, yang secara langsung menurunkan skor variabel ini.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tantangan pencalonan lebih bersumber pada konfigurasi politik dan kultur representasi yang mengakar di tingkat lokal maupun nasional, bukan semata pada aspek teknis penyelenggaraan. Rendahnya skor pencalonan dengan demikian memperlihatkan adanya gap struktural dalam sistem kandidasi yang menempatkan KPU lebih pada posisi fasilitator administratif, sementara kekuatan penentu tetap berada di tangan partai politik. Capaian ini pada akhirnya mencerminkan tantangan struktural dalam mendorong kompetisi politik yang sehat dan inklusif, baik di tingkat kandidat maupun dalam proses internal partai politik.

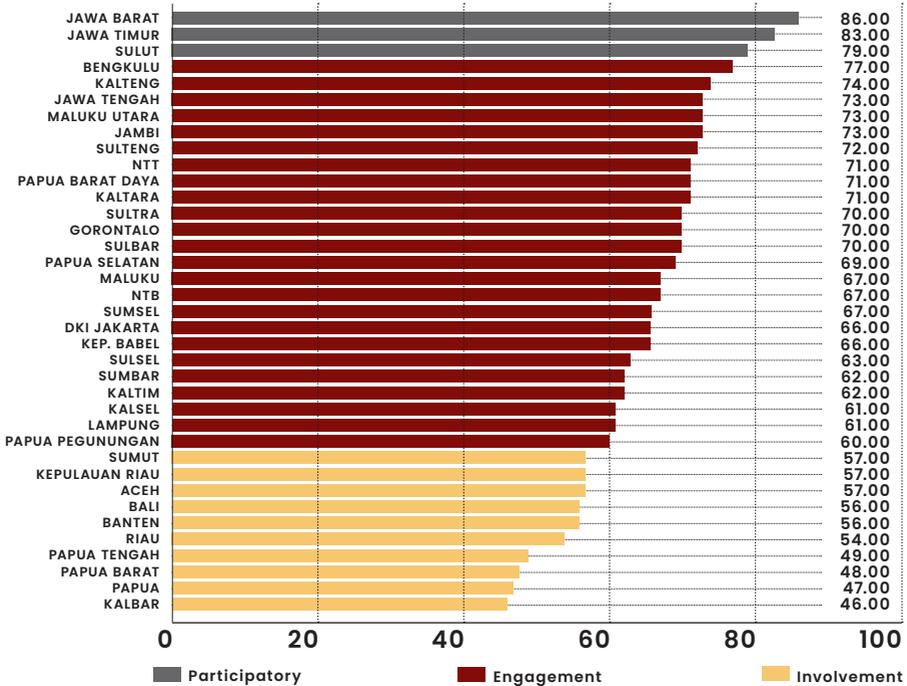
Grafik 30. Kategori Partisipasi pada Variabel Pencalonan di Tingkat Provinsi



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Hasil skor variabel pencalonan menunjukkan masih didominasi oleh kategori *engagement* sebanyak 24 provinsi (64,9%). Terdapat 3 provinsi (8,1%) yang mampu menembus kategori *participatory*, yaitu Jawa Barat (86,00), Jawa Timur (83,00), dan Sulawesi Utara (79,00). Capaian ini menandai bahwa proses pencalonan di ketiga provinsi tersebut relatif lebih kompetitif dan representatif dibandingkan sebagian besar provinsi lainnya. Adapun kategori *involvement* ditempati oleh 10 provinsi (27,0%), yang menunjukkan masih adanya wilayah dengan dinamika pencalonan yang lemah dan terbatas.

Grafik 31. Skor Variabel Pencalonan di Tingkat Provinsi



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Keunggulan Jawa Barat ditopang oleh jumlah pasangan calon yang cukup banyak (empat paslon) serta kehadiran satu kandidat perempuan. Jawa Timur juga menunjukkan variasi representasi dengan tiga pasangan calon, di mana seluruhnya melibatkan kandidat perempuan, meski tingkat kompetisinya berada pada level sedang.

Sementara itu, Sulawesi Utara mencatat tiga pasangan calon dengan tingkat kompetisi tinggi, meski belum menghadirkan calon perempuan dalam kontestasi.

Capaian tinggi ini juga tidak terlepas dari intensitas kompetisi yang relatif kuat, khususnya di Jawa Barat dan Sulawesi Utara, yang menunjukkan distribusi dukungan partai politik lebih berimbang sehingga meningkatkan dinamika persaingan. Selain itu, mobilisasi dukungan publik dalam momentum pendaftaran pasangan calon turut memperkuat keterhubungan kandidat dengan basis konstituennya. Dengan demikian, capaian kategori *participatory* di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara merefleksikan kualitas pencalonan yang lebih kompetitif dan inklusif.

Sebanyak 24 provinsi berada dalam kategori *engagement*. Pada kategori ini terdapat variasi jumlah calon kepala daerah serta kehadiran kandidat perempuan di sejumlah provinsi. Misalnya di NTB dan Sumatera Selatan terdapat masing-masing tiga pasangan calon dengan dua calon perempuan, sementara di Sulawesi Tengah terdapat empat pasangan calon dengan satu calon perempuan. Dukungan partai politik terhadap pasangan calon juga relatif kuat, meski mobilisasi massa saat pendaftaran cenderung terbatas. Akibatnya, keterlibatan publik tidak sebesar yang diharapkan. Dengan demikian, provinsi dalam kategori ini menunjukkan adanya ruang representasi, tetapi belum sepenuhnya ditopang oleh partisipasi publik yang luas dan aktif.



Provinsi seperti Bengkulu, Jambi, dan Jawa Tengah memperlihatkan bahwa keterbatasan jumlah kandidat, hanya dua pasangan calon dengan representasi perempuan yang minim atau bahkan absen, tidak serta merta menurunkan kualitas kontestasi. Persaingan antar partai yang cukup ketat serta mobilisasi publik dalam pendaftaran calon justru menjaga dinamika kompetisi. Faktor inilah yang mendorong ketiganya masuk dalam kategori *engagement*, meskipun dari sisi representasi kandidat belum sepenuhnya inklusif.

Adapun 10 provinsi lainnya masuk dalam kategori *involvement*. Pada kategori ini, variasi pencalonan dan mobilisasi dukungan masyarakat masih minim. Dukungan partai politik pun terbatas, bahkan sangat rendah di beberapa wilayah seperti Papua Tengah, Papua, dan Kalimantan Barat. Meski jumlah calon lebih dari satu, tidak ada keterwakilan perempuan maupun calon perseorangan. Mobilisasi massa saat pendaftaran pasangan calon juga masih berlangsung simbolis. Bahkan, di Papua Barat hanya terdapat calon tunggal. Gambaran ini menunjukkan bahwa di provinsi-provinsi kategori *involvement*, proses pencalonan masih bersifat formalistik dan belum mampu membangun partisipasi masyarakat secara substansial.

Variabel pencalonan yang menunjukkan bahwa rata-rata nasional sebesar 65,16 masih menempatkannya pada posisi lemah dibanding variabel lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dinamika pencalonan di tingkat provinsi masih menghadapi tantangan struktural, terutama terkait kuatnya dominasi partai politik dalam rekrutmen calon, minimnya kandidat perempuan, serta absennya calon perseorangan. Namun, capaian provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara yang masuk kategori *participatory* memperlihatkan bahwa keterlibatan partai politik yang lebih berimbang, mobilisasi publik yang intensif, serta adanya representasi perempuan, dapat mendorong kualitas pencalonan menjadi lebih kompetitif dan inklusif.

Di tengah keterbatasan tersebut, KPU tetap memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas proses pencalonan melalui sejumlah instrumen yang tersedia. Upaya yang dilakukan antara lain memfasilitasi partisipasi publik pada momentum pendaftaran pasangan calon, memperpanjang masa pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 135 PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pilkada, yang memberikan peluang perpanjangan apabila hingga penutupan pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon dan masih ada partai politik yang belum mengusung kandidat. Meski demikian, perpanjangan pendaftaran tidak selalu efektif, sebagaimana terlihat di Papua Barat yang tetap hanya menghasilkan satu pasangan calon meskipun diberi waktu tambahan.



Selain itu, KPU juga mengoptimalkan penggunaan SILON untuk mempermudah proses administrasi, serta menyediakan *helpdesk* pencalonan guna mendampingi partai politik maupun pasangan calon selama proses pencalonan berlangsung. Berbagai intervensi teknis ini memang tidak serta-merta mengubah konfigurasi politik yang cenderung ditentukan oleh dinamika internal partai, tetapi langkah tersebut mampu memperluas akses, meningkatkan transparansi, dan memastikan proses pencalonan berjalan lebih terbuka sekaligus memberi ruang bagi kontestasi yang lebih sehat.

C. Dinamika Kampanye dan Akses Informasi Pemilih

Tahapan kampanye merupakan tahapan yang sangat krusial dari proses kontestasi elektoral. Tahapan ini menjadi sangat vital, di mana ruang publik menjadi arena kontestasi bagi para peserta pilkada untuk mengembangkan politik programatik dan merebut dukungan dari para pemilih dengan rasionalitasnya masing-masing. Dengan argumen tersebut, Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) Pilkada 2024 juga fokus pada tahapan kampanye. Hal ini penting untuk mengukur lebih dari sekadar kemeriahan, tapi lebih dari itu untuk membedah kualitas dan substansi dari partisipasi masyarakat. Bagian ini akan mengupas secara mendalam capaian partisipasi masyarakat dalam tahapan kampanye di seluruh provinsi pada Pilkada 2024.

Untuk memastikan penilaian yang komprehensif, partisipasi masyarakat dalam tahapan kampanye diukur melalui berbagai indikator yang saling melengkapi, mulai dari dinamika dan partisipasi publik yang tercermin dari jumlah kegiatan dan keterlibatan masyarakat, hingga peran fasilitasi KPU dalam menjamin kesetaraan melalui debat publik dan penyediaan alat peraga kampanye. Selain itu, aspek yang tidak kalah penting adalah integritas dan kepatuhan dari para peserta pilkada, yang diukur dari ketaatan para kandidat dalam pelaporan dana kampanye serta angka pelanggaran dalam tahapan kampanye yang ditangani oleh Bawaslu.

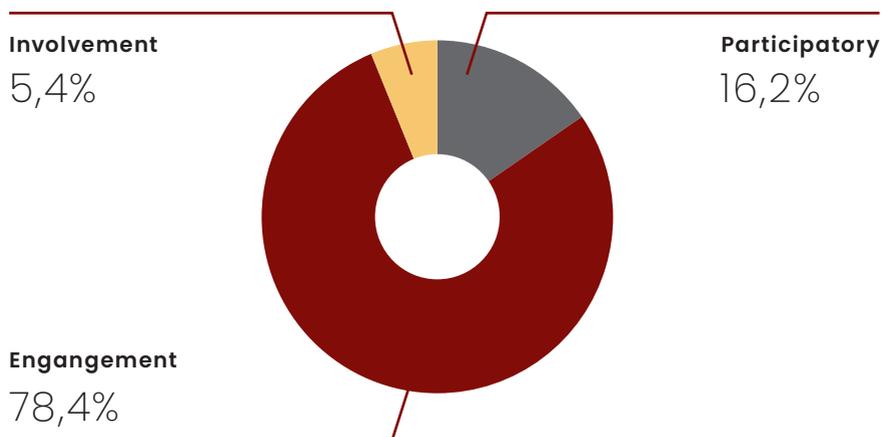
Penilaian skor untuk variabel ini sendiri mengombinasikan dua pendekatan. Penilaian kuantitatif digunakan untuk menangkap data objektif, seperti jumlah kegiatan atau laporan pelanggaran yang tercatat. Namun, tentu saja angka saja tidak cukup. Oleh karena itu, penilaian Kualitatif juga dilakukan melalui *expert judgement* dalam rangka memberikan diagnosis yang lebih mendalam. Beberapa data Kualitatif kemudian juga digunakan untuk menganalisis substansi debat, masif atau tidaknya sebuah pelanggaran, serta sentimen publik secara umum. Lebih jauh, dalam mendeskripsikan temuan dan menyajikan penilaian pada variabel Kampanye, analisis terhadap konteks eksternal yang membentuk dinamika kampanye di setiap daerah juga menjadi sesuatu yang tidak dapat dihilangkan. Faktor-faktor seperti kultur politik lokal, kondisi geografis, tingkat kompetisi, dan isu keamanan menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan bersifat adil dan merefleksikan tantangan serta karakteristik di masing-masing provinsi.



Secara umum, temuan utama pada variabel Kampanye pada Pilkada 2024 di tingkat provinsi menunjukkan bahwa rata-rata skor nasional untuk variabel ini mencapai 69,47. Capaian tersebut menempatkan variabel Kampanye pada posisi ketiga dalam keseluruhan variabel yang digunakan pada Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) Pilkada 2024 di tingkat provinsi, setelah variabel Registrasi Pemilih dan *Voters Turn Out* (VTO). Jika kita elaborasi lebih lanjut, di sini sebenarnya kita dapat melihat betapa pentingnya variabel Kampanye untuk mengkonversi partisipasi pada registrasi pemilih ke partisipasi pada jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya (VTO). Dapat dikatakan bahwa angka partisipasi yang pemilih yang tinggi pada tahapan kampanye akan berkorelasi positif pada kesesuaian antara partisipasi pada registrasi pemilih dengan VTO. Sebaliknya, angka partisipasi pemilih yang rendah pada tahapan kampanye akan berkorelasi positif pada kesenjangan antara partisipasi pada registrasi pemilih dengan VTO.

Lebih spesifik, dari 38 provinsi yang dianalisis, terdapat 6 provinsi (16,2%) yang masuk dalam kategori *participatory*. Sebagian besar provinsi, yakni 29 provinsi (78,4%), berada pada kategori *engagement*. Sementara itu, masih dua provinsi (5,4%) yang masuk dalam kategori *involvement*. Dari data ini kita dapat mengatakan bahwa mayoritas partisipasi pemilih pada tahapan kampanye di tingkat provinsi pada Pilkada 2024 masih berada dalam kategori partisipasi yang bersifat prosedural. Sedangkan di beberapa daerah, partisipasi pemilih sudah mengarah pada bentuk partisipasi yang lebih substansial dan bermakna (*meaningful participation*).

Grafik 32. Distribusi Kategori Variabel Kampanye IPP Pilkada 2024 (38 Provinsi)

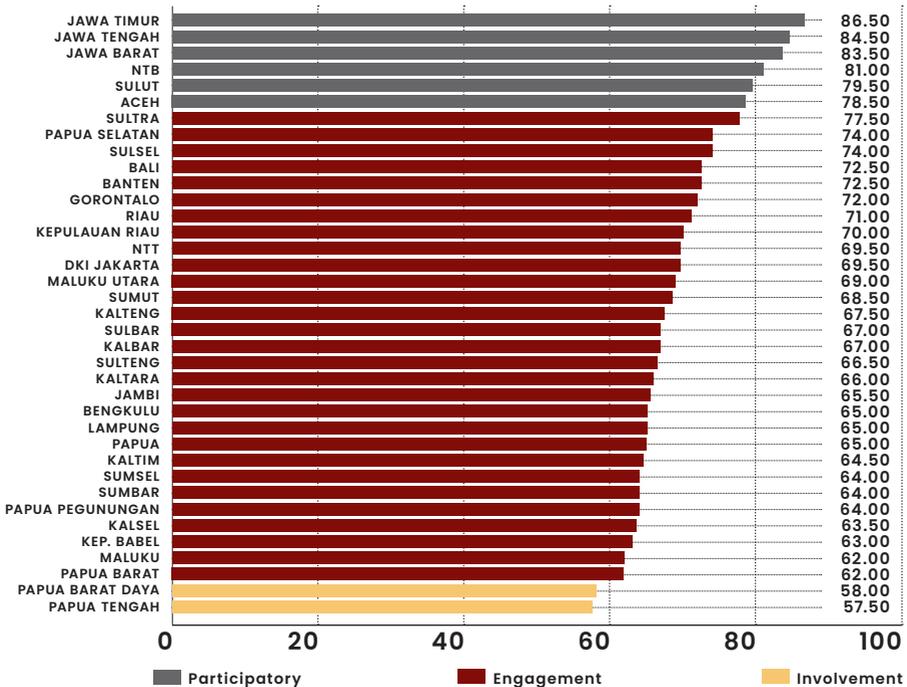


Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Lebih jauh, dari data di atas kita juga dapat melihat bahwa praktik kampanye dalam Pilkada 2024 di tingkat provinsi pada umumnya sudah melibatkan partisipasi pemilih. Pemilih tidak hanya menjadi sasaran informasi, tetapi juga mulai diberi ruang untuk berinteraksi. Namun demikian, masih terbatasnya provinsi yang mencapai kategori *participatory* memperlihatkan bahwa kualitas partisipasi belum sepenuhnya mendorong keterlibatan aktif masyarakat pada tahapan kampanye. Selain itu, keberadaan dua provinsi yang masih berada pada kategori *involvement* menunjukkan masih perlunya upaya untuk peningkatan kapasitas kelembagaan maupun strategi komunikasi politik, terutama (dan bukan satu-satunya) bagi lembaga penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, potret partisipasi publik dalam tahapan kampanye di Pilkada 2024 di tingkat provinsi adalah bahwa kampanye relatif telah bergerak menuju keterlibatan yang lebih inklusif. Namun demikian, sebenarnya masih terdapat ruang yang lebar untuk mendorong penguatan partisipasi public agar terjadi penguatan pula pada partisipasi politik pada tahapan pemungutan suara (VTO).

Grafik 33. Skor Variabel Kampanye



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Secara lebih detail, data di atas memperlihatkan distribusi skor variabel Kampanye untuk setiap provinsi yang menyelenggarakan Pilkada 2024. Dari data tersebut, kita dapat melihat adanya variasi capaian yang cukup lebar, mulai dari skor tertinggi 86,50 yang diraih oleh Jawa Timur hingga skor terendah 57,50 di Papua Tengah. Provinsi-provinsi dengan capaian tertinggi umumnya berada di kawasan Jawa, yakni Jawa Timur (86,50), Jawa Tengah (84,50), dan Jawa Barat (83,50), di mana daerah-daerah ini memiliki jumlah pemilih terbanyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Rentang skor kampanye sebesar 29,00 poin menunjukkan disparitas yang relatif lebih kecil dibanding variabel lainnya, namun tetap mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas penyelenggaraan kampanye yang lebih merata.

Ketiga provinsi ini menempati kategori *participatory* dan menjadi representasi kuat dari wilayah dengan infrastruktur politik yang relatif matang, kapasitas kelembagaan KPU yang solid, serta tingkat literasi politik pemilih yang tinggi. Selain itu, Nusa Tenggara Barat (81,00) dan Sulawesi Utara (79,50) juga menunjukkan performa menonjol. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah di luar Jawa pun sebenarnya mampu untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam tahapan kampanye di Pilkada 2024. Lebih jauh, provinsi-provinsi dengan skor tinggi umumnya menunjukkan tingkat pelanggaran yang rendah, mencerminkan budaya politik yang lebih tertib dan patuh terhadap regulasi.



Sebagai studi kasus, kita dapat menganalisa secara singkat kondisi di Provinsi Jawa Timur yang memperoleh skor tertinggi dan masuk dalam kategori *participatory*. Terdapat setidaknya beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa daerah ini memiliki angka partisipasi publik di tahapan kampanye yang tinggi. Pertama, keberhasilan KPU di provinsi ini dalam memastikan proporsionalitas layanan pada tahapan kampanye, yang dibuktikan dengan terdokumentasinya setidaknya 376 laporan kegiatan kampanye pasangan calon. Kedua, KPU juga memfasilitasi iklan dan materi kampanye secara massif, dengan jumlah iklan kampanye yang difasilitasi mencapai 1.467 iklan. Ketiga, KPU Jawa Timur berhasil melakukan pendataan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye, di mana paling tidak, tercatat hampir 149.969 warga yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

Selain faktor teknis tersebut, keberhasilan KPU di daerah ini juga ditopang oleh koordinasi internal KPU dan hubungan yang relatif kooperatif dengan pasangan calon. Hal ini terlihat dari kepatuhan kandidat dalam melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPADAK). Di sisi lain, para kandidat juga secara mandiri aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi dan kampanye. Tingginya jumlah pengikut akun media sosial masing-masing kandidat menjadi bukti bahwa strategi komunikasi digital yang dikembangkan juga telah berdampak pada peningkatan partisipasi publik di wilayah Jawa Timur.

Hal yang sama juga terjadi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Provinsi Jawa Barat. Kedua daerah ini juga menunjukkan adanya optimalisasi dalam memanfaatkan berbagai platform komunikasi politik, dari kegiatan konvensional hingga media digital, serta tingkat kepatuhan yang baik terhadap regulasi kampanye.

Sedangkan mayoritas provinsi lainnya berada kategori *engagement*, yaitu antara skor 65,00 hingga 75,00. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi sudah berada pada tahap keterlibatan pemilih yang lebih interaktif dibanding sekadar informasi sepihak. Namun demikian, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi partisipasi aktif yang menjadi indikator bagi berkembangnya demokrasi deliberatif. Hal ini yang sebenarnya dapat menjadi indikasi untuk menjelaskan fenomena menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak politik di Pilkada 2024 dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak politik di Pemilu 2024.

Sementara itu, beberapa daerah mencatatkan skor rendah. Sebagai ilustrasi, kita bisa melihat kondisi di Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah yang sama-sama masuk dalam kategori *involvement*. Pada kasus Papua Barat Daya, kemampuan KPU di provinsi ini dalam memastikan terdokumentasinya kegiatan kampanye kandidat masih relatif rendah, dengan hanya 14 kegiatan kampanye yang dilaporkan. Selain itu, KPU setempat hanya mampu memfasilitasi sekitar 50 iklan kampanye. Sementara itu, data terkait masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kampanye juga masih minim.

Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor adalah adanya keterbatasan infrastruktur komunikasi di daerah ini. Selain itu, kondisi geografis dan isu keamanan dalam menyelenggarakan kegiatan kampanye juga menjadi tantangan di daerah-daerah seperti Papua Tengah. Faktor yang lain adalah kapasitas teknis yang terbatas dalam memanfaatkan platform digital dan memenuhi administrasi tahapan kampanye. Rendahnya capaian ini mengindikasikan tantangan yang dihadapi provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia, terutama terkait kondisi geografis, isu keamanan, keterbatasan infrastruktur komunikasi politik, serta kompleksitas dalam menjangkau kelompok pemilih yang tersebar di wilayah kepulauan dan pegunungan.

Rendahnya skor variabel Kampanye di daerah-daerah ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal dari lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga erat kaitannya dengan peran para peserta pilkada. Sinergi peserta pilkada dengan penyelenggara pemilu masih tergolong rendah yang terlihat dari minimnya kandidat yang melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPADAK) serta kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi dan kampanye. Dengan demikian, peran pihak lain, dalam hal ini adalah peserta pilkada, juga sangat menentukan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat di tahapan kampanye pada Pilkada 2024.

Dari keseluruhan data tentang partisipasi publik dalam tahapan kampanye di tingkat provinsi pada Pilkada 2024, kita dapat membuat beberapa poin kesimpulan. **Pertama**, partisipasi masyarakat dalam kampanye pada umumnya berada dalam kategori *engagement*.

Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas partisipasi publik tidak lagi bersifat sepenuhnya pasif, di mana masyarakat masih sebatas menjadi obyek dari pilkada serta partisipasi yang hanya bersifat prosedural. Namun demikian, kuantitas dan kualitas partisipasi publik juga belum bersifat sepenuhnya aktif, di mana masyarakat sudah menjadi subyek yang mandiri serta partisipasi yang ada bersifat substansial dan bermakna.

Kedua, adanya kesenjangan partisipasi masyarakat dalam tahapan kampanye, terutama jika dibandingkan antara daerah-daerah di Jawa dan di luar Jawa. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kapasitas kelembagaan KPU dan konteks sosial-politik lokal di masing-masing daerah yang memiliki variasi sangat tinggi, termasuk faktor geografis, isu keamanan, dan kelengkapan infrastruktur komunikasi. **Ketiga**, partisipasi publik dalam Kampanye memperlihatkan dinamika yang kompleks antara kelembagaan penyelenggara pemilu di daerah, strategi komunikasi dari para peserta pilkada, serta konteks sosial-politik lokal di masing-masing daerah, terutama kondisi literasi politik masyarakat setempat.

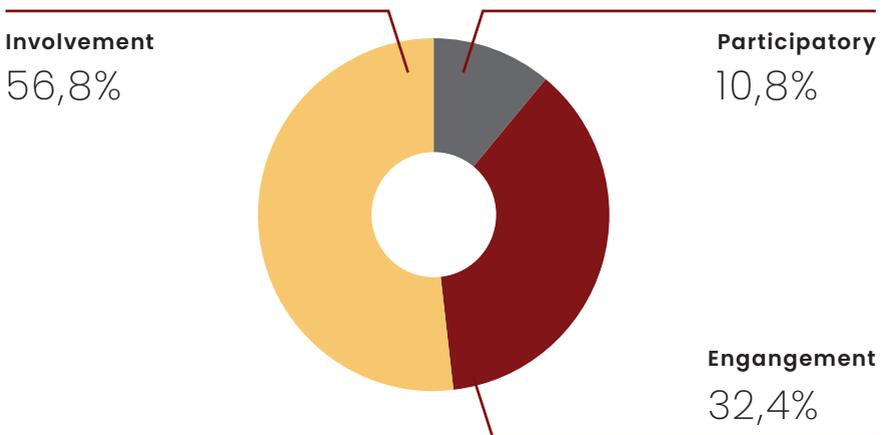
Keempat, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KPU untuk telah relatif berhasil untuk melakukan transformasi bentuk partisipasi masyarakat. Namun demikian, berbagai strategi penguatan kampanye yang lebih kontekstual, baik melalui inovasi komunikasi politik yang inklusif, peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara, maupun dorongan kepada para peserta pilkada untuk patuh terhadap regulasi perlu terus dioptimalkan secara berkesinambungan di masa depan. Tanpa optimalisasi tersebut, maka partisipasi pemilih di kampanye pilkada

di masa depan tidak akan pernah mencapai bentuk partisipasi politik yang substansial dan bermakna.

D. Efektivitas Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) mencatatkan rata-rata skor nasional pada angka 60,97. Berdasarkan hasil skoring akhir variabel sosdiklih parmas, empat provinsi masuk dalam kategori *participatory* dengan perolehan skor di atas ($> 77,50$), dua belas provinsi dalam kategori *engagement* dengan rentang perolehan skor akhir sebesar (60 - 77,50), dan dua puluh satu provinsi dalam kategori *involvement* yang skornya kurang dari (< 60). Angka ini mengindikasikan masih banyaknya tantangan dalam upaya peningkatan literasi dan kesadaran politik masyarakat. Capaian ini menjadi *concern* utama karena Sosdiklih Parmas merupakan fondasi penting bagi terciptanya partisipasi politik yang bermakna dan berkelanjutan.

Grafik 34. Distribusi Kategori Variabel Sosdiklih Parmas



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Namun demikian, capaian variabel Sosdiklih Parmas perlu dipahami dalam konteks keserentakan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tahun 2024. Beban keserentakan ini mengharuskan KPU secara kelembagaan mengalokasikan sumber daya pada tahapan-tahapan krusial seperti registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara yang berdampak langsung terhadap keabsahan penyelenggaraan pemilihan. Dalam situasi ini, program Sosdiklih Parmas yang bersifat lebih pembinaan jangka panjang dan memerlukan waktu untuk menunjukkan dampak terukur, menjadi prioritas berikutnya meski perannya sangat strategis untuk keberlanjutan kualitas demokrasi.

Beberapa indikator dalam Sosdiklih Parmas juga bergantung pada kondisi ekosistem politik lokal yang berada di luar KPU. Pertama, indikator jumlah pemantau dan laporan hasil pemantauan sangat dipengaruhi oleh keaktifan lembaga pemantau di masing-masing provinsi. Data menunjukkan jumlah rata-rata pemantau secara nasional hanya 3,81 per provinsi dengan rata-rata laporan pemantauan 1,78. Kondisi ini tidak terlepas dari dinamika dunia pemantauan pemilu di Indonesia yang meredup dalam beberapa tahun terakhir. Minimnya sumber pendanaan untuk aktivitas pemantauan, baik dari lembaga donor internasional maupun sumber domestik, telah berdampak signifikan terhadap keberlanjutan kerja organisasi pemantau pemilu. Fenomena ini menunjukkan perlunya kehadiran negara untuk menstimulasi kembali ekosistem pemantauan pemilu melalui skema pendanaan yang berkelanjutan, penguatan kapasitas lembaga pemantau, dan penciptaan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil. Revitalisasi dunia pemantauan pemilu menjadi kebutuhan mendesak



untuk memastikan pengawasan partisipatif yang efektif sebagai pilar penting demokrasi Indonesia.

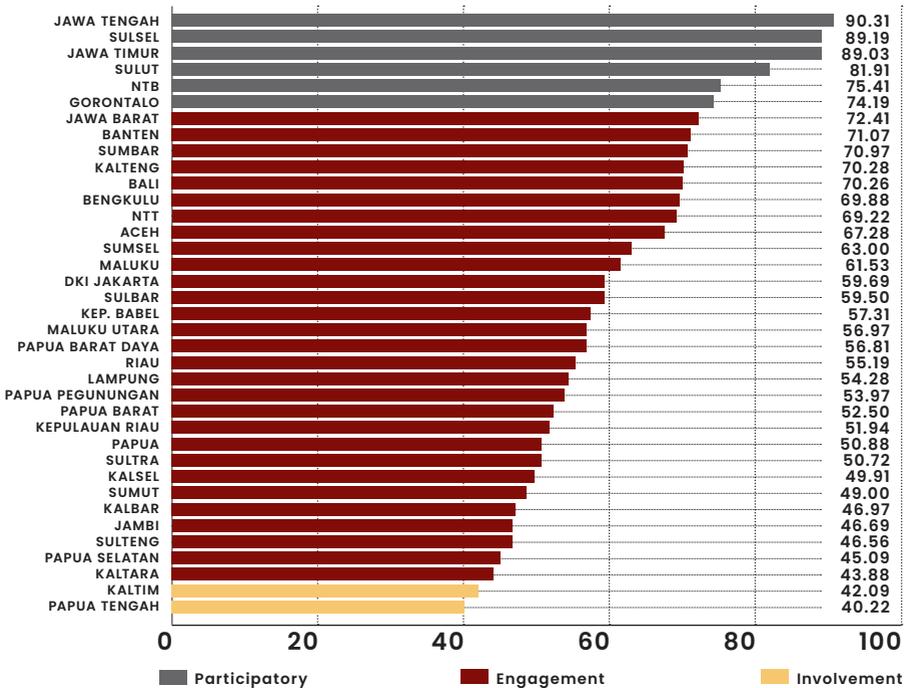
Kedua, indikator jumlah kerja sama yang dilakukan KPU dengan pihak eksternal menghadapi variasi kondisi antar-daerah. Dari 37 provinsi, sebanyak 15 provinsi (40,5%) belum mencatatkan kerja sama formal berbentuk MoU, dengan rata-rata nasional 9,97 kerja sama per provinsi. Perbedaan capaian ini tidak terlepas dari hambatan regulasi yang mensyaratkan bahwa KPU daerah hanya dapat melakukan kerja sama dengan lembaga atau instansi yang telah terlebih dahulu menjalin kerja sama dengan KPU RI. Ketentuan ini, meski bertujuan untuk memastikan koordinasi dan standarisasi program, dalam praktiknya cukup menghambat akselerasi kerja sama di tingkat daerah, terutama ketika terdapat mitra lokal yang responsif dan relevan namun belum memiliki perjanjian kerja sama dengan KPU RI.

Menariknya, beberapa KPU Provinsi yang mencatatkan jumlah kerjasama tinggi—seperti Jawa Tengah (36 kerjasama) dan Sulawesi Utara (26 kerjasama). Mereka secara proaktif mengidentifikasi mitra strategis, memfasilitasi komunikasi antara mitra lokal dengan KPU RI, dan dalam beberapa kasus mengambil langkah inovatif untuk mempercepat proses kolaborasi. Kondisi ini menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap regulasi kerjasama yang ada, dengan mempertimbangkan pemberian fleksibilitas lebih besar kepada KPU daerah untuk berkolaborasi dengan mitra lokal yang kredibel, sambil tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan koordinasi nasional. Penyederhanaan prosedur, percepatan proses persetujuan di tingkat pusat, atau pemberian delegasi kewenangan yang lebih luas kepada KPU Provinsi dapat

menjadi solusi untuk mengakselerasi pembangunan ekosistem kolaboratif di seluruh Indonesia.

Secara umum, nilai indeks partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dicapai terdistribusi secara tidak merata di antara kategori *participatory*, *engagement*, dan *involvement*. Sekiranya hanya terdapat 4 provinsi atau setara dengan 8,11% masuk dalam kategori *participatory*. Provinsi-provinsi dimaksud meliputi Jawa Tengah (90,31), Sulsel (89,19), Jawa Timur (89,03), dan Sulawesi Utara (81,91).

Grafik 35. Skor Variabel Sosdiklih Parmas



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Jawa Tengah mencatatkan pencapaian tertinggi dengan skor 90,31, menunjukkan keberhasilan program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang komprehensif dan inovatif. Keunggulan utama Jawa Tengah terletak pada optimalisasi platform digital modern melalui inovasi “Podcast KPU Jateng VoteCast” yang menghadirkan tema-tema menarik dan berhasil meraih 65.300 subscriber. Strategi ini secara efektif menjangkau segmentasi pemilih milenial dan Gen Z yang akrab dengan teknologi. Dari sisi indikator kuantitatif, Jawa Tengah mencatatkan 66 kegiatan sosdiklih yang melibatkan 100.000 pemilih, didukung oleh 36 kerja sama formal (tertinggi nasional) yang menghasilkan 66 kegiatan kerja sama. Ekosistem pemantauan di Jawa Tengah juga berkembang dengan baik, tercatat 11 pemantau yang menghasilkan 10 laporan pemantauan, menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan partisipatif.

Sulawesi Selatan (89,19) menempati posisi kedua dengan pendekatan multi-platform terintegrasi. Inovasi unggulan berupa program “GREBEG” (Gerakan Pendidikan Pemilih secara Berkelanjutan dan Terintegrasi), Festival Demokrasi, KKN Tematik, dan Cafe Demokrasi menunjukkan pemahaman mendalam terhadap keberagaman preferensi masyarakat. Sulawesi Selatan mencatatkan 86 kegiatan sosdiklih yang melibatkan 10.500 pemilih, didukung oleh 11 kerja sama formal yang menghasilkan 20 kegiatan kerjasama dengan 3.700 peserta. Keberhasilan Sulsel lainnya terletak pada variasi segmentasi pemilih yang mencakup 8 kategori segmentasi pemilih, menunjukkan inklusivitas program yang menjangkau beragam kelompok. Ekosistem pemantauan juga berkembang dengan 5 pemantau yang menghasilkan 5 laporan hasil pemantauan.

Jawa Timur (89,03) melengkapi tiga besar dengan pendekatan berbasis budaya lokal yang masif. Inovasi gelar seni budaya, Jambore Satgas Demokrasi, serta lomba jurnalistik, fotografi, dan video menunjukkan efektivitas adaptasi program sosialisasi dengan konteks sosial-budaya setempat. Pencapaian kuantitatif Jawa Timur sangat mengesankan: 19.559 kegiatan sosdiklih yang melibatkan 17.534.944 pemilih (hampir seluruh DPT), menjadikannya provinsi dengan jangkauan terluas secara absolut. Meski memiliki 7 kerja sama formal, Jawa Timur mampu menghasilkan 221 kegiatan kerja sama yang menjangkau sekitar 23.000 peserta, menunjukkan efektivitas tinggi dari setiap kerja sama. Dengan 8 kategori segmentasi pemilih, Jawa Timur berhasil menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Terdapat potensi pengembangan lebih lanjut dalam aspek dokumentasi hasil pemantauan untuk melengkapi capaian yang sudah sangat baik ini.

Sulawesi Utara (81,91) menempati posisi keempat dengan inovasi "Rabu Bacarita" yang melibatkan petugas adhoc di tingkat kecamatan (PPK) dalam program sosialisasi berkelanjutan secara serentak dan terstruktur. Pendekatan ini mencerminkan strategi partisipatif yang memanfaatkan petugas adhoc sebagai jembatan untuk memperluas jangkauan sosialisasi hingga tingkat akar rumput. Sulawesi Utara mencatatkan 105 kegiatan sosdiklih (diluar program Rabu Bacarita) dengan partisipasi ribuan pemilih, didukung oleh 26 kerja sama formal (tertinggi kedua nasional) yang menghasilkan 49 kegiatan kerjasama. Selain itu tercatat 4 pemantau terakreditasi yang menghasilkan 2 laporan, ekosistem pemantauan Sulut menunjukkan perkembangan yang positif.

Sementara potret empat provinsi yang berada di level *involvement*, mencerminkan beragam tantangan. Di posisi pertama, Papua Tengah mencatatkan skor 40,22 dengan berbagai indikator yang masih memerlukan pengembangan intensif. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang sangat spesifik dan kompleks yang dihadapi provinsi termuda hasil pemekaran tahun 2022 ini. Sebagai provinsi yang baru terbentuk dengan wilayah geografis yang sangat menantang, terdiri dari pegunungan tinggi dengan infrastruktur komunikasi dan transportasi yang masih terbatas, Papua Tengah memerlukan pendekatan bertahap. Keterbatasan kapasitas kelembagaan KPU Provinsi yang masih dalam tahap konsolidasi, kondisi geografis ekstrem yang menyulitkan mobilisasi kegiatan, keterbatasan infrastruktur komunikasi, serta tantangan dalam alokasi anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor-faktor yang perlu mendapat dukungan komprehensif. Papua Tengah memerlukan pendampingan intensif, penguatan kapasitas teknis penyelenggara, serta alokasi sumber daya khusus untuk membangun fondasi program Sosdiklih Parmas yang sesuai dengan karakteristik lokalnya.

Di posisi selanjutnya, Kalimantan Timur (42,09) mencatatkan jumlah kegiatan yang belum signifikan, dengan 3 pemantau yang menghasilkan 1 laporan. Sebagai provinsi dengan kondisi infrastruktur yang relatif lebih baik, capaian Kaltim menunjukkan potensi besar yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Belum adanya kerja sama formal mengindikasikan peluang untuk membangun jejaring kolaboratif dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media lokal yang

tersedia di Kaltim. Dengan dukungan fasilitasi yang tepat, khususnya dalam proses administrasi kerja sama dan identifikasi mitra potensial, Kaltim memiliki kapasitas untuk meningkatkan capaian secara signifikan.

Di tempat ketiga dan keempat yaitu Kalimantan Utara (43,88) dan Papua Selatan (45,09) memiliki tantangan yang relatif sama dengan Provinsi Papua Tengah yang mencerminkan kondisi provinsi muda yang masih dalam proses membangun ekosistem kelembagaan. Tahap konsolidasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem politik lokal memerlukan waktu dan dukungan yang berkelanjutan. Pembangunan kapasitas internal KPU Provinsi dan stimulasi pertumbuhan organisasi masyarakat sipil lokal menjadi prioritas untuk mendukung pengembangan program Sosdiklih Parmas ke depan.

Disparitas skor pada variabel Sosdiklih Parmas, mencerminkan keberagaman kondisi, kapasitas, dan tantangan yang dihadapi masing-masing provinsi. Kesenjangan ini bersifat multidimensional, mencakup perbedaan dalam akses infrastruktur komunikasi, kematangan ekosistem kelembagaan, serta kondisi geografis dan demografis yang sangat bervariasi.



Keberhasilan empat provinsi teratas menunjukkan bahwa kombinasi antara inovasi platform komunikasi (digital dan konvensional), kemitraan multi-stakeholder yang ekstensif, pendekatan berbasis budaya lokal, dan segmentasi pemilih yang inklusif menjadi praktik baik yang dapat diadaptasi sesuai konteks masing-masing daerah. Sementara bagi provinsi yang masih menghadapi berbagai tantangan, diperlukan pendekatan pengembangan yang mempertimbangkan konteks spesifik masing-masing daerah. Pengembangan *knowledge sharing* antar-provinsi juga dapat mempercepat proses pembelajaran dan adaptasi praktik baik sesuai dengan kondisi lokal masing-masing.

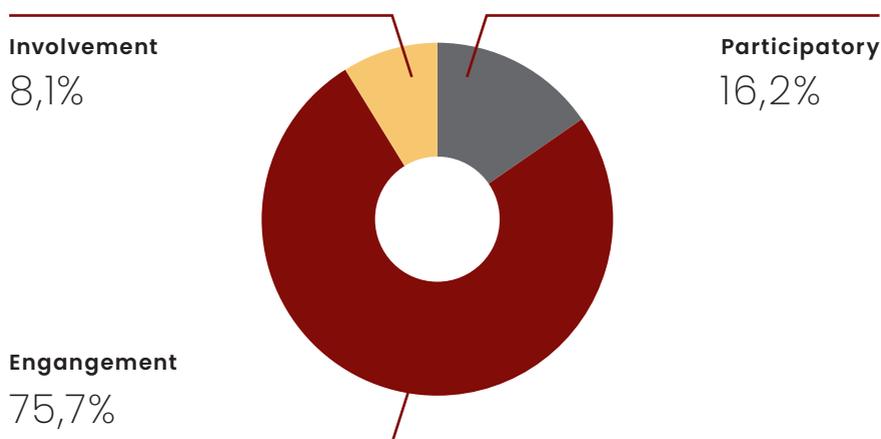
E. Partisipasi Aktual: Kehadiran Pemilih di TPS

Indikator pengukuran VTO mencakup dimensi kuantitatif berupa persentase partisipasi pemilih secara keseluruhan, partisipasi pemilih perempuan, partisipasi pemilih penyandang disabilitas, partisipasi pemilih DPTb dan DPK, persentase suara tidak sah, serta rasio rata-rata pemilih per TPS. Dimensi kualitatif meliputi bentuk pelanggaran pada hari pemungutan suara, peristiwa sosial yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan, serta tantangan geografis dan infrastruktur yang dihadapi pemilih untuk datang ke TPS.

Variabel *Voter Turnout* (VTO) mencatat rata-rata nasional sebesar 70,80, menempati posisi tertinggi kedua dalam indeks. Hasil skor variabel VTO menunjukkan masih didominasi oleh kategori *engagement* sebanyak 28 provinsi (75,7%). Terdapat 6 provinsi (16,2%) yang mampu

menembus kategori *participatory*, sementara kategori *involvement* ditempati oleh 3 provinsi (8,1%). Angka ini mencerminkan antusiasme masyarakat yang cukup kuat dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Gubernur 2024. Walaupun terdapat sejumlah catatan dalam penyelenggaraan, termasuk pelaksanaan pilkada di tengah isu kelelahan politik (*political fatigue*), tingkat partisipasi aktual pemilih tetap menunjukkan bahwa komitmen publik terhadap demokrasi elektoral masih terjaga pada level yang memadai.

Grafik 36. Distribusi Kategori Variabel VTO Provinsi



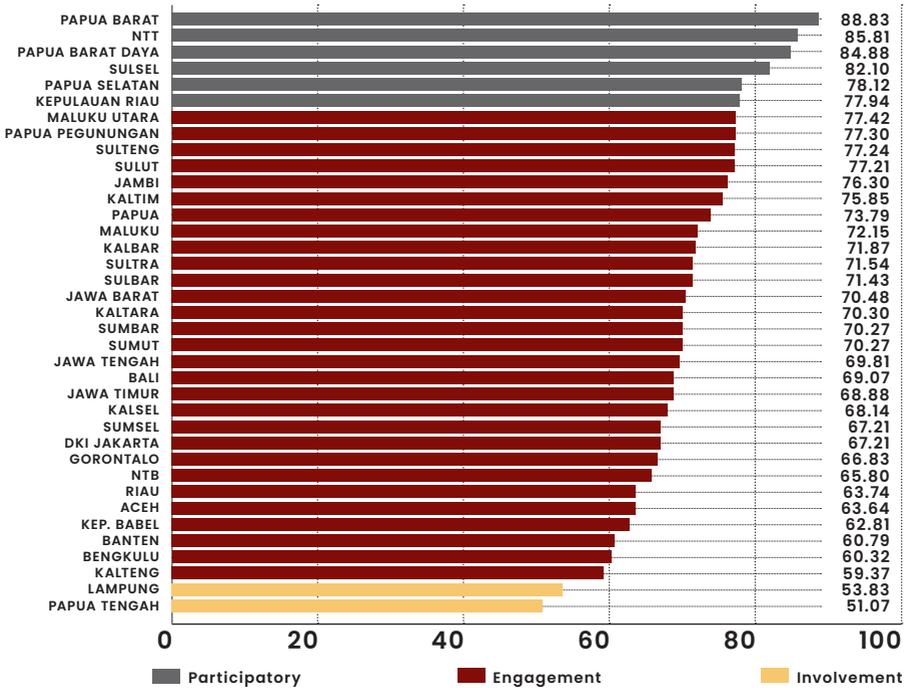
Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024



Papua Barat, sebagai provinsi kepulauan dengan kondisi geografis yang sangat menantang, berhasil memobilisasi partisipasi pemilih secara luar biasa dengan partisipasi riil mencapai 78,14%, partisipasi perempuan di angka 79,13% dan suara tidak sah 3%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa faktor kunci. Pertama, kesadaran politik masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya memilih pemimpin daerah, yang mungkin diperkuat oleh isu-isu lokal yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, aksesibilitas TPS yang dipastikan melalui upaya luar biasa penyelenggara dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil, terlihat dari rata-rata pemilih per TPS yang moderat (280,8) yang mengindikasikan distribusi TPS yang baik. Ketiga, mobilisasi komunitas yang kuat, di mana tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama berperan aktif dalam mendorong partisipasi. Keempat, minimnya hambatan administratif pada hari pemungutan suara.

Nusa Tenggara Timur menunjukkan pola yang sangat menarik dengan partisipasi pemilih disabilitas yang sangat tinggi mencapai 48,68% (di atas rata-rata nasional 43,08%), partisipasi perempuan 70,28%, dan suara tidak sah yang sangat rendah (2,04%). Dengan tantangan geografis di level sedang, NTT berhasil menunjukkan inklusivitas luar biasa dalam memfasilitasi partisipasi kelompok marginal. Papua Barat Daya juga menunjukkan komitmen serupa dengan partisipasi perempuan 75,21% dan upaya maksimal dalam menjangkau pemilih disabilitas. Tingginya partisipasi di daerah-daerah ini mengindikasikan bahwa relevansi kontestasi bagi kehidupan masyarakat lokal menjadi faktor motivasi yang sangat kuat, lebih kuat bahkan dari hambatan fisik yang harus dihadapi pemilih.

Grafik 37. Skor Variabel VTO Provinsi



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Salah satu temuan menarik adalah fenomena beberapa provinsi yang mencatatkan skor rendah di variabel persiapan (registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, atau sosdiklih parmas) namun tetap mampu mencatatkan VTO yang relatif tinggi. Namun, yang lebih menarik justru terjadi pada provinsi-provinsi dengan partisipasi pemilih sangat tinggi namun mendapat skor variabel VTO rendah. Papua Tengah mencatatkan partisipasi pemilih luar biasa tinggi 98,67% (hampir sempurna) dengan partisipasi perempuan 99,22% dan partisipasi disabilitas

100%, namun skor variabel VTO terendah nasional yaitu 51,07. Papua Pegunungan juga menunjukkan fenomena serupa dengan partisipasi pemilih 99,88% (tertinggi nasional), partisipasi perempuan 99,88%, namun skor VTO hanya 77,30.

Hal ini mengungkap dimensi krusial dalam pengukuran VTO yang tidak sekadar melihat angka kehadiran, tetapi juga kualitas proses pemungutan. Rendahnya skor VTO Papua Tengah dan Papua Pegunungan meski dengan partisipasi hampir sempurna mengindikasikan adanya permasalahan serius pada indikator kualitatif lain yang tidak terlihat dari angka partisipasi semata. Fenomena ini menunjukkan beberapa kemungkinan interpretasi. Pertama, partisipasi yang sangat tinggi di daerah terpencil Papua mungkin lebih didorong oleh tekanan sosial komunitas atau mobilisasi struktural yang sangat kuat, ketimbang oleh pemahaman politik substantif. Kedua, kondisi geografis ekstrem membuat pengawasan dan penjaminan kualitas proses di setiap TPS menjadi sangat sulit, sehingga meski kehadiran tinggi, standar teknis penyelenggaraan sulit dipertahankan. Ketiga, di beberapa wilayah dengan kohesi sosial yang sangat kuat atau di mana politik lokal sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, motivasi intrinsik masyarakat untuk berpartisipasi tidak selalu bergantung pada intensitas kampanye atau program sosialisasi formal

Sebaliknya, provinsi seperti Sulawesi Selatan (skor VTO 82,10 dengan partisipasi 71,49%) dan Sulawesi Utara (skor VTO 77,21 dengan partisipasi 76,62%) menunjukkan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas. Partisipasi yang tinggi disertai dengan tantangan geografis yang

lebih rendah, partisipasi disabilitas yang baik (50,23% dan 47,47%), suara tidak sah yang terkendali (3,78% dan 2,59%), serta distribusi TPS yang optimal menghasilkan skor VTO yang juga tinggi. Ini menegaskan bahwa infrastruktur pemungutan suara dan aksesibilitas TPS pada hari H menjadi faktor krusial dalam menghasilkan partisipasi yang tidak hanya tinggi secara kuantitas tetapi juga berkualitas secara proses.

Secara garis besar, capaian ini memperlihatkan adanya titik temu yang cukup signifikan antara kerja penyelenggara pemilu dengan antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Dengan kata lain, meskipun pilkada kali ini dilaksanakan di tengah isu political fatigue atau kelelahan politik, infrastruktur pemungutan suara dan mobilisasi pemilih secara umum dapat berjalan relatif efektif. Hal ini menjadi penanda bahwa kepercayaan publik terhadap proses elektoral belum sepenuhnya terkikis, melainkan masih cukup kuat untuk menjaga legitimasi politik di tingkat lokal.

Namun demikian, pencapaian ini tidak boleh dilihat sebagai akhir dari perjalanan demokrasi elektoral. Tantangan terbesar justru terletak pada peningkatan kualitas partisipasi. Angka kehadiran yang tinggi tentu penting, tetapi jauh lebih penting adalah memastikan bahwa keterlibatan warga lahir dari kesadaran politik, pemahaman kritis terhadap isu-isu publik, serta kemampuan memilih secara rasional. Tanpa fondasi tersebut, demokrasi hanya akan berhenti pada level prosedural dan kehilangan makna substansialnya.

Oleh karena itu, hasil Pilkada 2024 patut diapresiasi sebagai capaian penting yang menunjukkan kemajuan dalam partisipasi pemilih, tetapi sekaligus menjadi pengingat akan pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan. Penguatan pendidikan politik, pembukaan ruang deliberasi publik, serta perbaikan ekosistem dukungan bagi kelompok rentan adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia tidak hanya hidup dalam angka, melainkan juga berakar kuat dalam kesadaran politik masyarakatnya.

5.2 Dinamika Lokal: Skor IPP di Tingkat Kabupaten

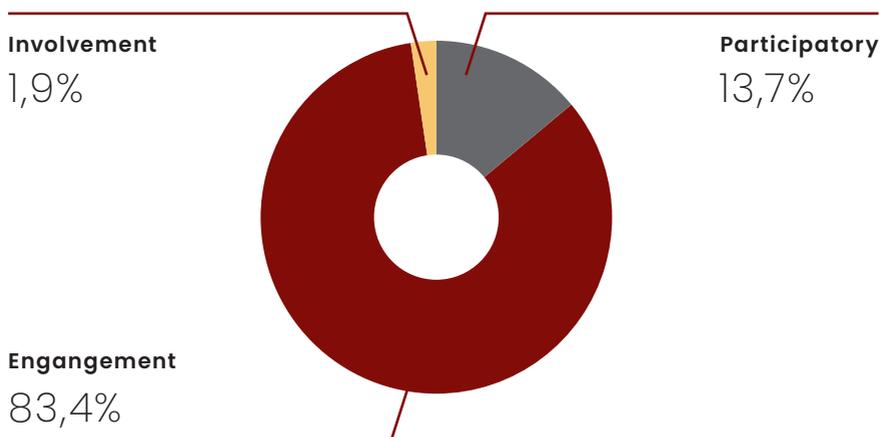
A. Kelengkapan dan Akurasi Registrasi Pemilih

Analisis Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) pada variabel Registrasi Pemilih untuk tingkat kabupaten menyajikan sebuah gambaran yang kompleks. Di satu sisi, data menunjukkan stabilitas dan konsistensi nasional. Skor rata-rata yang dicapai oleh 415 kabupaten penyelenggara Pilkada adalah 71,78, angka yang hampir identik dengan capaian di tingkat provinsi (71,82). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem, regulasi, dan standar teknis untuk pemutakhiran data pemilih telah diimplementasikan secara relatif seragam di seluruh tingkatan.

Secara umum, capaian skor variabel registrasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 terbagi ke dalam tiga kategori, yakni *Participatory*, *Engagement*, dan *Involvement*. Dari total 415 kabupaten yang dianalisis, sebanyak 350 kabupaten atau setara dengan 84,3% masuk dalam kategori *Engagement*.

Sementara itu, 57 kabupaten (13,7%) termasuk dalam kategori *Participatory*, dan hanya 8 kabupaten (1,9%) yang masih berada pada kategori *Involvement*.

Grafik 38. Skor Agregat Variabel Registrasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan provinsi, kabupaten dan kota memperoleh skor yang tinggi dalam variabel ini sangat dipengaruhi oleh aspek internal KPU dalam melaksanakan proses penyusunan daftar pemilih yang diukur berdasarkan indikator-indikator spesifik. Aspek internal KPU sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap melaksanakan sistem registrasi pemilu yang berkualitas.



Jika dianalisis terhadap 10 kabupaten dengan skor tertinggi dan 10 kabupaten dengan skor terendah dalam penilaian variabel registrasi pemilih pada Indeks Partisipasi Pemilih Pilkada 2024, tampak pola dan dinamika yang cukup menarik. Pertama, seluruh kabupaten dengan skor tertinggi berada pada kategori *participatory*. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi serta kinerja satuan kerja (satker) di wilayah tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dalam proses penyusunan daftar pemilih. Sebaliknya, dari 10 kabupaten dengan skor terendah, dua di antaranya masuk dalam kategori *engagement*, sedangkan delapan lainnya berada pada kategori *involvement*. Kedua, pencapaian tinggi dalam variabel registrasi pemilih ternyata tidak berkorelasi langsung dengan besaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun kondisi topografi. Hal ini dapat dilihat pada Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara yang sama-sama meraih skor 86,50 dan masuk kategori *participatory*. Lombok Tengah memiliki jumlah DPT yang besar, yakni 777.196 pemilih, sementara Lombok Utara dengan DPT yang jauh lebih kecil, yaitu 185.461 pemilih, mampu menunjukkan capaian yang setara. Ketiga, apabila ditinjau dari perspektif kewilayahan, khususnya daerah kategori 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), terlihat bahwa berbagai tantangan geografis tetap dapat diatasi melalui optimalisasi proses yang tepat dalam penyusunan daftar pemilih.

Tabel 8. Peringkat Variabel Registrasi Pemilih pada Indeks Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Ranking	Nama Satker	Skor Variabel Registrasi Pemilih	Jumlah DPT	Kategori Variabel Registrasi Pemilih	Daerah 3T
1	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	86.50	777.196	Participatory	YA
2	KABUPATEN LOMBOK UTARA	86.50	185.461	Participatory	YA
3	KABUPATEN NIAS UTARA	84.70	103.908	Participatory	YA
4	KABUPATEN BIMA	84.50	377.655	Participatory	YA
5	KABUPATEN DAIRI	84.20	229.061	Participatory	TIDAK
6	KABUPATEN FLORES TIMUR	83.50	209.711	Participatory	TIDAK
7	KABUPATEN PINRANG	83.50	294.224	Participatory	TIDAK
8	KABUPATEN BENGKAYANG	83.50	206.308	Participatory	YA
9	KABUPATEN NIAS SELATAN	83.20	210.841	Participatory	YA
10	KABUPATEN SUMBA TENGAH	83.00	57.952	Participatory	YA
406	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	60.00	1.001.344	Engagement	TIDAK



407	KABUPATEN BANJAR	60.00	425.597	Engagement	TIDAK
408	KABUPATEN WAROPEN	59.50	25.473	Involvement	YA
409	KABUPATEN LANGKAT	56.50	781.526	Involvement	TIDAK
410	KABUPATEN MAPPI	56.50	82.136	Involvement	YA
411	KABUPATEN NGANJUK	56.00	852.679	Involvement	TIDAK
412	KABUPATEN INTAN JAYA	52.50	124.994	Involvement	YA
413	KABUPATEN MAJENE	49.50	126.429	Involvement	TIDAK
414	KABUPATEN YALIMO	49.50	88.813	Involvement	YA
415	KABUPATEN LUWU	48.50	270.044	Involvement	TIDAK

Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Merujuk pada tabel di atas, Kabupaten Nias Utara (84,70) dan Bima (84,50) melengkapi peringkat teratas, keduanya adalah daerah 3T dengan topografi menantang namun mampu mengoptimalkan seluruh indikator registrasi pemilih. Hal ini mencakup minimnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setelah pencocokan dan penelitian, tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan ketidakakuratan data pada tahap pemutakhiran, kemampuan mengakomodasi segmen khusus seperti penyandang disabilitas, serta koordinasi efektif dengan Dukcapil dan organisasi terkait.

Sebaliknya, 10 kabupaten terbawah menunjukkan pola yang beragam. Kabupaten Luwu sebagai peringkat terendah (48,50) memiliki DPT cukup besar (270.044) dengan topografi relatif mudah dan bukan merupakan daerah 3T, mengindikasikan tantangan yang lebih kompleks dari sekadar faktor geografis. Menariknya, beberapa kabupaten dengan topografi sulit seperti Intan Jaya dan Yalimo juga berada di peringkat bawah, menunjukkan bahwa kombinasi tantangan geografis, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan tetap mempengaruhi capaian variabel registrasi pemilih.

Temuan paling signifikan adalah bahwa 7 dari 10 kabupaten teratas merupakan daerah 3T, sementara 4 dari 10 kabupaten terbawah juga daerah 3T. Hal ini mengindikasikan bahwa status 3T tidak otomatis menentukan capaian rendah, tetapi lebih pada kemampuan optimalisasi proses dan inovasi pendekatan Satker yang sesuai karakteristik lokal. Rentang skor 38,00 poin menegaskan pentingnya penguatan kapasitas teknis KPU kabupaten, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan pengembangan strategi registrasi pemilih yang adaptif terhadap keberagaman kondisi demografis dan geografis.

Secara keseluruhan, analisis variabel Registrasi Pemilih di tingkat kabupaten menyajikan satu kesimpulan utama yang kuat. Bahwa kualitas proses pemutakhiran data pemilih tidak ditentukan oleh kondisi eksternal seperti besaran DPT atau status geografis, melainkan oleh kapasitas dan kualitas tata kelola internal KPU. Temuan bahwa 7 dari 10 kabupaten berkinerja terbaik justru berasal dari daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)

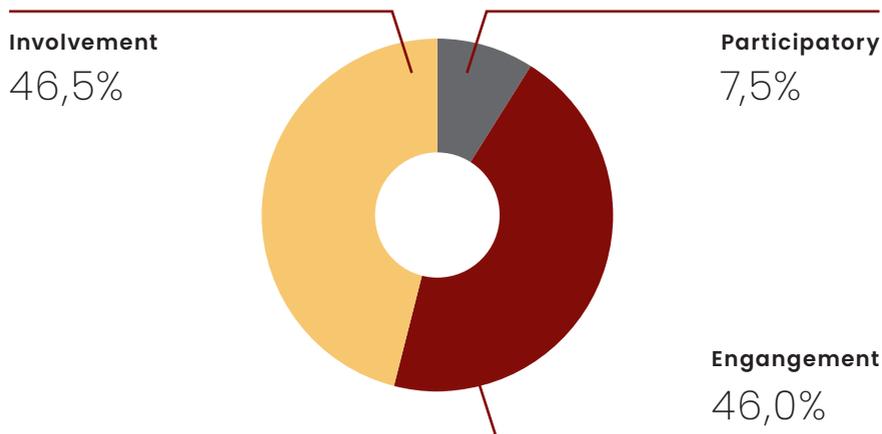
secara meyakinkan menggugat asumsi bahwa tantangan kewilayahan adalah penghalang utama. Kasus seperti Lombok Utara dan Nias Utara membuktikan bahwa keterbatasan dapat diatasi melalui strategi yang tepat, terutama dengan mendorong partisipasi publik yang aktif dan memastikan proses verifikasi lapangan berjalan cermat.

Di sisi lain, spektrum kinerja di peringkat bawah menunjukkan adanya dua akar masalah yang berbeda. Kegagalan di kabupaten seperti Luwu dan Majene, yang bukan merupakan daerah 3T, mengindikasikan adanya kelemahan manajerial dan administratif. Sementara itu, kinerja rendah di kabupaten seperti Yalimo dan Intan Jaya menyoroti adanya tantangan struktural ekstrem di mana metode standar sulit diterapkan. Oleh karena itu, rentang skor yang lebar menegaskan bahwa upaya perbaikan ke depan harus bersifat kontekstual yaitu melakukan penguatan kapasitas manajerial untuk mengatasi masalah internal, serta pengembangan kebijakan afirmatif untuk daerah dengan kendala luar biasa.

B. Representasi dan Kompetisi dalam Pencalonan

Hasil pengukuran terhadap variabel pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 menunjukkan variasi capaian antar daerah. Penilaian ini didasarkan pada beberapa indikator utama, yaitu jumlah pasangan calon, kehadiran calon perempuan dan calon perseorangan, pemerataan suara sah partai pengusung, serta tingkat keterlibatan massa dalam proses pendaftaran pasangan calon di KPU. Variabel Pencalonan di tingkat kabupaten mencatat rata-rata terendah yaitu 62,20, sedikit lebih rendah dari tingkat provinsi (65,16).

Grafik 39. Kategori Partisipasi pada Variabel Pencalonan di Tingkat Kabupaten



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Terdapat 31 kabupaten (7,5%) yang berhasil mencapai kategori *participatory*. Skor variabel pencalonan tertinggi diraih oleh Kabupaten Sumbawa Barat dengan skor 95,00. Capaian ini menunjukkan dinamika kompetisi elektoral yang kuat, ditandai dengan hadirnya empat pasangan calon, satu calon perempuan, serta satu pasangan calon yang berasal dari jalur perseorangan. Selain itu, dukungan partai politik di daerah ini juga terdistribusi relatif merata sehingga tidak terjadi dominasi dukungan pada satu pasangan calon tertentu. Keterlibatan masyarakat pun tinggi, tercermin dari banyaknya massa yang berpartisipasi dalam tahapan pendaftaran pasangan calon di KPU.



Pola serupa juga terlihat di Kabupaten Lombok Barat (91,00), Kabupaten Lahat (90,00), Kabupaten Rote Ndao (89,00), dan Kabupaten Sorong Selatan (89,00). Daerah-daerah tersebut memperoleh skor tinggi karena memiliki lebih dari dua pasangan calon, disertai kehadiran calon perempuan yang memperkaya representasi politik, serta tingkat kompetisi yang tinggi meskipun tanpa adanya calon perseorangan. Kombinasi antara keragaman kandidat, distribusi dukungan politik yang kompetitif, dan partisipasi masyarakat yang luas menjadikan daerah-daerah ini menonjol dalam kategori partisipatif pada variabel pencalonan.

Sebanyak 191 kabupaten (46%) lainnya berada dalam kategori *engagement*. Beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori *engagement* juga menunjukkan dinamika kompetisi yang cukup tinggi, dengan skor yang relatif mendekati kategori *participatory*. Secara umum, daerah-daerah ini memiliki lebih dari dua pasangan calon, yang menunjukkan adanya keterbukaan dalam proses pencalonan dan potensi kompetisi yang sehat antar kandidat. Dukungan partai politik pun terdistribusi cukup merata sehingga tidak terjadi dominasi oleh satu pasangan calon, dan di beberapa daerah juga terdapat calon perempuan yang memperkuat dimensi representasi politik. Namun, perbedaan utama dengan kategori *participatory* terletak pada rendahnya tingkat keterlibatan massa saat tahapan pendaftaran pasangan calon di KPU, yang cenderung bersifat formal dan tidak diikuti mobilisasi dukungan publik secara luas. Kondisi ini menggambarkan bahwa aspek partisipatif dalam dimensi sosial belum sekuat aspek kompetisi elektoralnya.

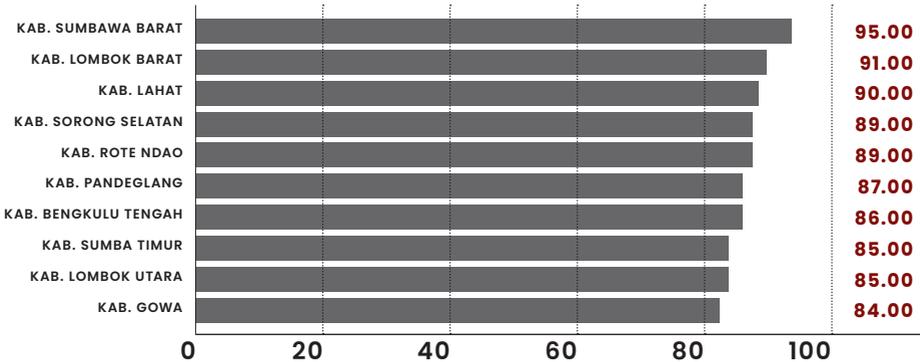
Beberapa kabupaten yang mencerminkan pola tersebut adalah Kabupaten Alor, Seram Bagian Timur, Kepulauan Tanimbar, Boalemo, Seram Bagian Barat, Pesisir Barat, dan Bangli, yang masing-masing memperoleh skor sekitar 77,00.

Sebanyak 193 kabupaten (46,5%) masuk dalam kategori *involvement*. Pada kategori *involvement*, sebagian besar kabupaten menunjukkan tingkat partisipasi dalam proses pencalonan yang relatif rendah, meskipun di beberapa daerah masih terdapat indikasi kompetisi yang berlangsung. Kabupaten Banggai Laut, misalnya, memperoleh skor 60,00 dengan tiga pasangan calon, termasuk satu pasangan calon perseorangan. Namun demikian, dukungan partai terhadap dua pasangan calon lainnya tidak merata dan cenderung terkonsentrasi pada satu paslon tertentu, sehingga mengurangi kesetaraan kompetisi. Selain itu, tidak terdapat calon perempuan dalam kontestasi tersebut, dan pelibatan massa pada saat pendaftaran pasangan calon di KPU juga tergolong minim.

Sementara itu, beberapa kabupaten lain justru menunjukkan kondisi yang lebih tertutup, di mana hanya terdapat calon tunggal tanpa adanya kompetisi politik yang berarti. Misalnya, Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang, keduanya memperoleh skor 44,00, mencerminkan minimnya keragaman politik, absennya calon perempuan, serta lemahnya partisipasi publik dalam tahapan pencalonan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pada kategori *involvement*, proses pencalonan masih didominasi oleh pola partisipasi yang sempit dan elitis, di mana keterlibatan masyarakat maupun variasi representasi politik masih sangat terbatas.



Grafik 40. 10 Besar Skor Variabel Pencalonan pada Pilbup 2024



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Tabel 9. Peringkat Variabel Pencalonan di Tingkat Kabupaten

Rangking	Kabupaten	Skor Variabel Pencalonan	Jumlah Paslon	Paslon Perempuan	Paslon Perseorangan	Tingkat Kompetensi
1	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	95,00	4	1	1	TINGGI
2	KABUPATEN LOMBOK BARAT	91,00	4	4	0	TINGGI
3	KABUPATEN LAHAT	90,00	3	2	0	TINGGI
4	KABUPATEN ROTE NDAO	89,00	3	2	0	TINGGI
6	KABUPATEN SORONG SELATAN	89,00	5	2	0	TINGGI
7	KABUPATEN PANDEGLANG	87,00	4	2	2	TINGGI

8	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	86,00	3	1	0	TINGGI
9	KABUPATEN LOMBOK UTARA	85,00	3	0	0	TINGGI
10	KABUPATEN SUMBA TIMUR	85,00	3	0	0	TINGGI
413	KABUPATEN BANYUWANGI	44,00	2	0	0	RENDAH
414	KABUPATEN ACEH UTARA	44,00	1	0	0	SANGAT RENDAH
415	KABUPATEN ACEH TAMIANG	44,00	1	0	0	SANGAT RENDAH

Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Secara keseluruhan, dinamika pada variabel pencalonan dalam Pilkada 2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi di tahap ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di luar kendali penyelenggara pemilu. KPU pada dasarnya telah berupaya mendorong terbukanya ruang kompetisi dengan mencegah munculnya calon tunggal, antara lain melalui kebijakan perpanjangan masa pendaftaran ketika hingga batas waktu yang ditentukan hanya terdapat satu pasangan calon, sementara masih ada partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusung calon lain. Upaya ini tercermin dalam laporan KPU setelah perpanjangan pendaftaran pada 2-4 September 2024, yang menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan langkah-langkah perbaikan, masih terdapat 41 wilayah dengan calon tunggal, terdiri atas satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota.



Sebelumnya, sebelum perpanjangan dibuka, jumlah wilayah dengan satu pasangan calon mencapai 43 daerah. Hanya dua kabupaten yang kemudian berhasil menambah pasangan calon baru, yakni Kabupaten Pohuwato di Gorontalo dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Sulawesi Utara. Fakta ini memperlihatkan bahwa struktur politik lokal, keterbatasan kaderisasi partai, serta dominasi aktor politik tertentu masih menjadi faktor utama yang membentuk tingkat kompetisi dalam pencalonan. Dengan demikian, meskipun KPU memiliki mekanisme intervensi prosedural untuk memperluas partisipasi, kualitas partisipasi dalam variabel pencalonan tetap sangat ditentukan oleh dinamika politik lokal dan distribusi kekuasaan antar partai di tingkat daerah.

C. Dinamika Kampanye dan Akses Informasi Publik

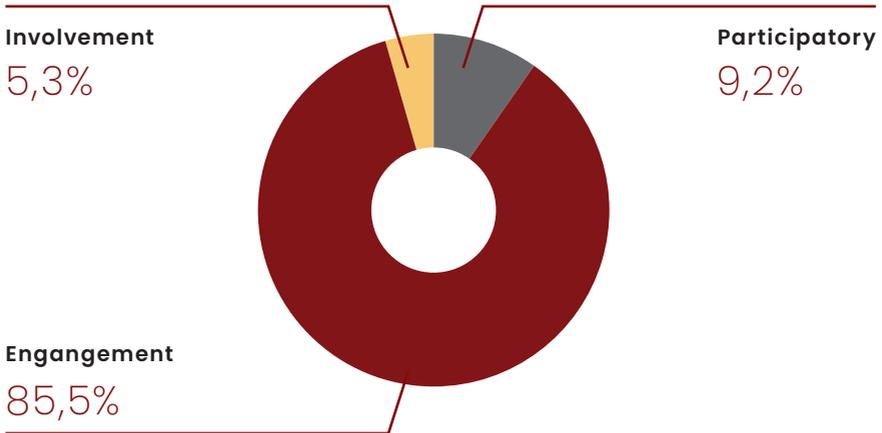
Pilkada di tingkat kabupaten adalah jantung dari kontestasi electoral di ranah politik lokal. Hal ini sangat terkait dengan desain hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, di mana titik berat desentralisasi dan otonomi daerah diletakan di tingkatan kabupaten/kota. Di sini terjadi pertarungan politik programatik antar peserta pilkada untuk merumuskan berbagai kebijakan publik sebagai solusi atas persoalan keseharian warga negara. Di sini pula mobilisasi dukungan dilakukan secara intensif dan masif. Dengan demikian, kuantitas dan kualitas kampanye di tingkat kabupaten secara langsung mencerminkan kesehatan demokrasi di ranah politik lokal. Bagian ini membedah secara mendalam capaian partisipasi masyarakat dalam tahapan tahapan kampanye di 415 kabupaten

pada Pilkada 2024. Kerangka metodologi yang digunakan sama dengan kerangka metodologi yang digunakan di tingkat provinsi, dengan konteks yang tentu saja berbeda berbeda.

Untuk menjaga konsistensi metodologis, partisipasi publik dalam tahapan kampanye di Pilkada 2024 di tingkat kabupaten diukur melalui serangkaian indikator yang sama dengan indikator yang digunakan di tingkat provinsi dan di tingkat kota. Penilaian difokuskan pada beberapa pilar utama, yaitu dinamika dan partisipasi publik yang terlihat dari jumlah kegiatan, keterlibatan warga, dan dukungan dana kampanye; peran fasilitasi KPU dalam memastikan kesetaraan melalui debat dan penyediaan alat peraga; serta integritas dan kepatuhan, yang diukur dari ketaatan pelaporan dana kampanye dan angka pelanggaran di Bawaslu, termasuk di dalamnya adalah transparansi dana kampanye, praktek politik uang, dan praktek kampanye hitam. Kombinasi indikator ini memberikan gambaran utuh tentang sejauhmana partisipasi masyarakat berkembang dalam tahapan kampanye di wilayah urban.

Sama dengan bagian lain, metode penilaian untuk variabel Kampanye ini menyinergikan dua pendekatan guna menangkap realitas sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Penilaian kuantitatif berfungsi untuk merekam data objektif, seperti jumlah pasti Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye yang masuk atau jumlah laporan pelanggaran yang tercatat. Sedangkan untuk memahami makna di balik angka tersebut, penilaian Kualitatif melalui *expert judgement* juga digunakan.

Grafik 41. Skor Agregat Variabel Kampanye Pemilihan di Tingkat Kabupaten



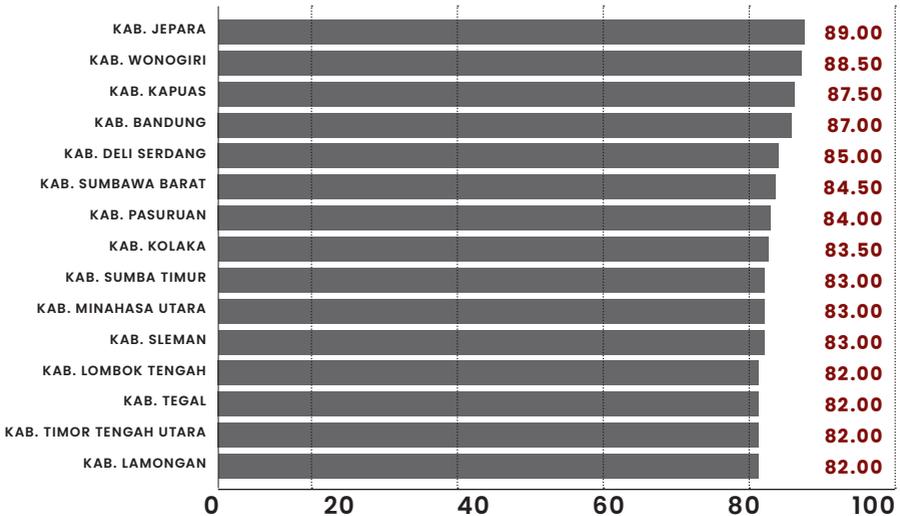
Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Secara umum, rata-rata skor nasional untuk variabel Kampanye untuk Pilkada 2024 di tingkat kabupaten adalah 69,13 sehingga berada dalam kategori *engagement*. Capaian tersebut menempatkan variabel Kampanye pada posisi ketiga dalam keseluruhan variabel yang digunakan pada Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) Pilkada 2024 di tingkat kabupaten, setelah variabel Registrasi Pemilih dan *Voters Turn Out* (VTO). Capaian ini juga sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi (69,47) dan di tingkat kota (69,81). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya kita dapat melihat betapa pentingnya angka partisipasi masyarakat di tahapan kampanye karena angka ini bisa jadi akan menentukan angka partisipasi masyarakat di tahapan VTO.

Secara lebih spesifik, jika ditinjau dari distribusi kategori yang digunakan pada IPP Pilkada 2024, dari 415 kabupaten yang dianalisis, terdapat 38 kabupaten (9,2%) yang masuk dalam kategori *participatory*. Hal ini menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, partisipasi masyarakat di kampanye pilkada di tingkat kabupaten sudah mengarah pada bentuk partisipasi yang lebih substansial atau bermakna. Namun demikian, sebagian besar kabupaten, yaitu 355 kabupaten (85,5%), berada dalam kategori *engagement*. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih sudah mulai tidak lagi hanya menjadi obyek dan pemilih sudah mulai memiliki ruang partisipasi yang lebih luas. Sedangkan 22 kabupaten (5,3%) masih tergolong dalam kategori *involvement*. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi pemilih di daerah-daerah ini masih memiliki kuantitas dan kualitas yang rendah.

Sebaran data sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten telah mampu menghadirkan proses kampanye yang melibatkan partisipasi pemilih secara tidak sekedar prosedural. Namun demikian, belum banyak kabupaten yang mencapai tingkat partisipasi yang ideal, yaitu partisipasi substantif dan bermakna. Sama dengan kondisi di tingkat provinsi, mayoritas partisipasi pemilih di tahapan kampanye di tingkat kabupaten masih berada dalam kategori *engagement*. Sedangkan di beberapa daerah, partisipasi pemilih sudah mengarah pada bentuk partisipasi yang lebih substansial dan bermakna (*meaningful participation*). Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk mendorong penguatan partisipasi public di tahapan kampanye agar terjadi penguatan pula pada partisipasi masyarakat pada VTO.

Grafik 42. 10 Besar Skor Variabel Kampanye pada Pilpub 2024



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Merujuk pada grafik di atas, terdapat 38 kabupaten yang masuk dalam kategori *participatory*, menandakan adanya tingkat keterlibatan publik yang tinggi dalam tahapan kampanye. Kabupaten Jepara (89,00) menempati posisi tertinggi, disusul oleh Kabupaten Wonogiri (88,50) dan Kabupaten Kapuas (87,50). Ketiga kabupaten ini menonjol karena keberhasilannya memenuhi sebagian besar indikator penilaian dalam variabel Kampanye, baik dari sisi partisipasi masyarakat, fasilitasi penyelenggara, maupun kepatuhan kandidat terhadap regulasi kampanye.

Sebagai ilustrasi, Kabupaten Jepara menunjukkan performa yang komprehensif dengan terdokumentasinya 46 kegiatan kampanye yang dilaporkan secara resmi ke KPU. Selain itu, tercatat setidaknya 22.374 warga terlibat dalam berbagai kegiatan kampanye. Keterlibatan masyarakat yang luas ini mencerminkan adanya ruang

partisipatif yang aktif antara kandidat, penyelenggara, dan publik. Selain itu, KPU Kabupaten Jepara juga berhasil memfasilitasi sedikitnya 84 iklan kampanye bagi setiap pasangan calon, yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan akses informasi bagi pemilih.

Capaian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pada variabel Kampanye tidak hanya ditentukan oleh Kuantitas kegiatan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan keterbukaan prosesnya. Kabupaten-kabupaten dengan skor tinggi umumnya memiliki pola koordinasi yang baik antara KPU, pasangan calon, dan masyarakat, serta menunjukkan kemampuan untuk mengelola tahapan kampanye secara transparan, inklusif, dan berintegritas.

Adapun kabupaten yang memperoleh skor dalam kategori *engagement*, dengan rentang skor 66,00 hingga 77,50, terlihat mendominasi partisipasi masyarakat di tahapan kampanye. Dominasi kategori ini menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten telah berhasil menciptakan proses kampanye yang terbuka dan interaktif, di mana pemilih tidak hanya menjadi penerima informasi secara pasif, tetapi juga mulai memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam diskursus publik seputar agenda dan visi dari para peserta Pilkada 2024.



Namun demikian, capaian pada kategori *engagement* ini juga mencerminkan bahwa kualitas partisipasi politik masih berada pada tahap transformasi menuju bentuk partisipasi yang lebih substantif dan bermakna. Dalam banyak kasus, interaksi antara kandidat, penyelenggara, dan masyarakat masih bersifat seremonial atau terbatas pada kegiatan kampanye konvensional, seperti pertemuan tatap muka dan pemasangan alat peraga. Belum banyak kabupaten yang mampu mengintegrasikan pendekatan partisipatif yang lebih deliberatif, seperti pelibatan masyarakat dalam penyusunan isu kampanye, pemanfaatan media digital untuk dialog publik, atau pelaksanaan forum kampanye yang inklusif bagi kelompok rentan.

Sedangkan daerah-daerah lain masih berada pada kategori *involvement*. Dari total 22 kabupaten yang masuk dalam kategori ini, tercatat tiga kabupaten dengan skor terendah, yakni Kabupaten Purwakarta (51,50), Kabupaten Lanny Jaya (52,50), dan Kabupaten Intan Jaya, yang menempati posisi paling bawah. Capaian seperti ini di sejumlah kabupaten menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara serta perbaikan sistem dokumentasi dan transparansi kampanye. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, proses kampanye di tingkat kabupaten tidak hanya akan menjadi ajang mobilisasi politik semata, tetapi juga ruang pembelajaran demokrasi yang substantif dan berkelanjutan bagi masyarakat di akar rumput.

Sebagai catatan, terdapat beberapa faktor teknis yang menjelaskan angka partisipasi masyarakat di tahapan kampanye yang rendah. **Pertama**, banyak indikator penilaian dalam variabel Kampanye yang tidak terpenuhi secara optimal, seperti minimnya dokumentasi kegiatan kampanye atau pelaporan partisipasi masyarakat. Kedua, terdapat keterbatasan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh KPU dalam proses penyusunan indeks ini, baik terkait laporan kegiatan kampanye, fasilitasi iklan, maupun keterlibatan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan semata pada rendahnya aktivitas kampanye, tetapi juga pada aspek tata kelola dan kapasitas kelembagaan dalam memastikan transparansi serta pendokumentasian proses kampanye secara menyeluruh.

Dari keseluruhan data tentang partisipasi publik dalam tahapan kampanye di Pilkada 2024 di tingkat kabupaten, kita dapat merumuskan beberapa poin kesimpulan. Pertama, partisipasi masyarakat dalam kampanye pada umumnya berada dalam kategori *engagement*. Dengan kata lain, terjadi proses transformasi masyarakat dari kategori *involvement* ke kategori *participatory*. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi bersifat sepenuhnya pasif sehingga masyarakat hanya menjadi obyek dari kontestasi *electoral* di ranah lokal. Namun, partisipasi masyarakat juga belum bersifat ideal, dimana masyarakat sudah menjadi subyek yang mandiri dengan memiliki partisipasi yang sangat bermakna.



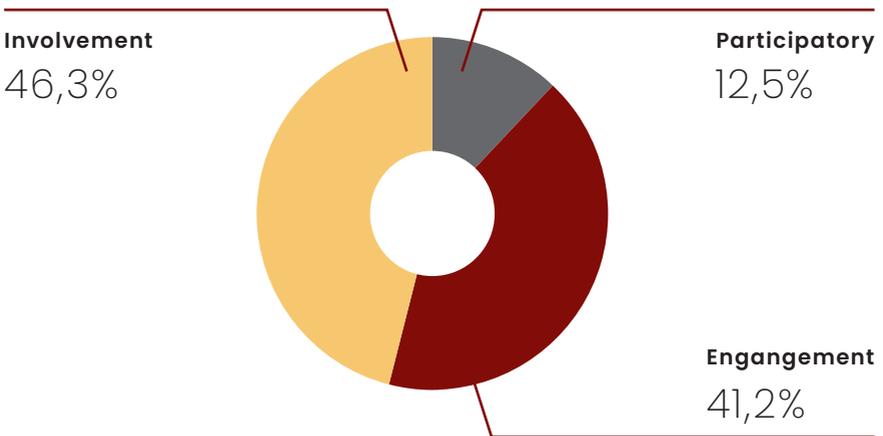
Kedua, adanya kesenjangan partisipasi masyarakat dalam tahapan kampanye di beberapa daerah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kapasitas kelembagaan KPU dan konteks sosial-politik lokal di masing-masing daerah yang memiliki variasi sangat tinggi, termasuk faktor geografis dan kelengkapan infrastruktur komunikasi. **Ketiga**, partisipasi publik dalam Kampanye memperlihatkan dinamika yang kompleks antara kelembagaan penyelenggara pemilu di daerah, strategi komunikasi dari para peserta pilkada, serta konteks sosial-politik lokal di masing-masing daerah, terutama kondisi literasi politik masyarakat setempat.

Terakhir, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan kampanye telah berdampak pada terjadinya proses transformasi bentuk partisipasi masyarakat. Keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di tahapan kampanye di beberapa daerah, seperti Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Kapuas menunjukkan bahwa tata kelola kampanye yang transparan, fasilitatif, dan inklusif dapat menjadi model ideal bagi KPU di kabupaten-kabupaten yang lain.

D. Efektivitas Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) mencatatkan rata-rata 61,94 di tingkat kabupaten, sedikit lebih tinggi dari tingkat provinsi (60,97) namun masih menjadi variabel dengan capaian terendah kedua. Berdasarkan hasil skoring akhir variabel sosdiklih parmas, 52 kabupaten masuk dalam kategori *participatory* dengan perolehan skor di atas (> 77,50), 171 kabupaten masuk dalam kategori *engagement* dengan rentang perolehan skor akhir sebesar (60 - 77,50), 192 kabupaten masuk dalam kategori *involvement* yang skornya kurang dari (< 60). Kondisi ini masih mengindikasikan tantangan dalam implementasi program literasi dan kesadaran pemilih di tingkat kabupaten, meski dengan potensi inovasi yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat lokal.

Grafik 43. Distribusi Kategori Variabel Sosdiklih Parmas Kabupaten



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024



Seperti halnya di tingkat provinsi, capaian variabel Sodiklih Parmas di kabupaten perlu dipahami dalam konteks keserentakan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tahun 2024. Beban ganda ini mengharuskan KPU kabupaten untuk memprioritaskan tahapan-tahapan yang berdampak langsung terhadap keabsahan penyelenggaraan, sementara program Sodiklih Parmas menjadi prioritas berikutnya.

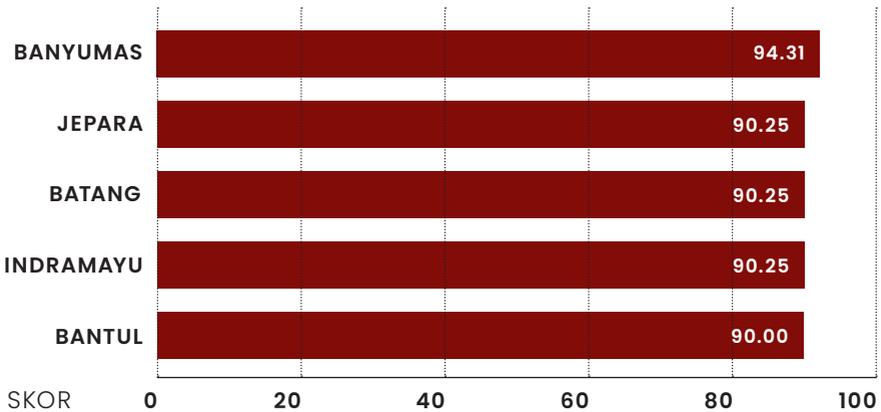
Tantangan di tingkat kabupaten dalam beberapa indikator bahkan lebih kompleks dibandingkan provinsi, terutama yang berkaitan dengan ekosistem eksternal. Pertama, indikator jumlah pemantau dan laporan hasil pemantauan menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Rata-rata nasional pemantau di kabupaten hanya 0,78 per kabupaten, jauh lebih rendah dari provinsi (3,81). Lebih memprihatinkan lagi, 293 kabupaten dari 415 kabupaten (70,6%) sama sekali tidak memiliki pemantau pilkada. Rata-rata laporan pemantauan pun hanya 0,56 per kabupaten, dengan mayoritas kabupaten tidak menghasilkan laporan pemantauan sama sekali.

Kondisi ini mencerminkan realitas peredupan ekosistem pemantauan pemilu yang lebih terasa di tingkat lokal. Minimnya organisasi masyarakat sipil yang memiliki kapasitas dan sumber daya untuk melakukan pemantauan sistematis di kabupaten, ditambah dengan keterbatasan pendanaan baik dari donor internasional maupun domestik, menyebabkan hampir tidak adanya pengawasan partisipatif di sebagian besar kabupaten. Kondisi ini menguatkan urgensi kehadiran negara untuk merevitalisasi ekosistem pemantauan, khususnya di tingkat kabupaten, melalui skema pendanaan yang berkelanjutan dan penguatan kapasitas organisasi lokal.

Kedua, indikator jumlah kerjasama juga menghadapi tantangan serupa dengan provinsi. Meski rata-rata nasional kerjasama di kabupaten mencapai 9,56 MoU per kabupaten (hampir setara dengan provinsi: 9,97), angka ini tidak mencerminkan distribusi yang merata. 266 kabupaten dari 415 kabupaten (64,1%) belum mencatatkan kerjasama formal sama sekali. Hambatan regulasi yang mensyaratkan lembaga atau instansi harus terlebih dahulu menjalin kerjasama dengan KPU RI sebelum dapat berkolaborasi dengan KPU Kabupaten tetap menjadi kendala struktural yang signifikan.

Namun demikian, beberapa KPU Kabupaten yang mencatatkan jumlah kerja sama tinggi menunjukkan bahwa dengan inisiatif dan kreativitas, hambatan ini dapat dinavigasi. Kabupaten-kabupaten ini secara proaktif membangun komunikasi dengan mitra lokal yang relevan, memanfaatkan jaringan informal, dan mengembangkan mekanisme kolaborasi yang fleksibel sambil tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas.

Grafik 44. 5 Besar Skor Variabel Sosdiklih Parmas Pilbup 2024



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Kabupaten Banyumas mencatatkan pencapaian tertinggi dengan skor 94,31, menunjukkan keberhasilan program sosialisasi yang sangat komprehensif dan inovatif. Keunggulan utama Banyumas terletak pada integrasi program sosialisasi dengan sistem pendidikan formal. Inovasi “Sosialisasi melalui Upacara di SMA” mengintegrasikan pendidikan politik dalam aktivitas rutin sekolah, sementara pemanfaatan program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap kurikulum pendidikan nasional. Banyumas juga mengembangkan Podcast sebagai platform modern yang menjangkau pemilih muda. Dari sisi kuantitatif, Banyumas mencatatkan 44 kegiatan sosdiklih yang melibatkan 109.181 pemilih, didukung oleh 12 kerja sama formal yang menghasilkan 12 kegiatan dengan 775 peserta. Yang paling mengesankan adalah keberhasilan menjangkau 9 kategori segmentasi pemilih, menunjukkan inklusivitas program yang luar biasa. Ekosistem pemantauan juga berkembang dengan baik, dengan 4 pemantau yang menghasilkan 4 laporan pemantauan.

Kabupaten Jepara (90,25) menempati posisi kedua dengan pendekatan kolaboratif yang luar biasa. KPU Jepara membangun kolaborasi strategis dengan Polres Jepara, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kominfo, Kementerian Agama, SMA Negeri 1 Tahunan, SMK Negeri 1 Batealit, dan Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. Keberagaman mitra ini memungkinkan penetrasi program yang sangat luas ke berbagai segmen masyarakat. Pencapaian kuantitatif Jepara sangat mengesankan dengan 857 kegiatan sosdiklih yang melibatkan 473.051 pemilih, menunjukkan jangkauan masif. Dengan 7 kerja sama formal yang menghasilkan 12 kegiatan dengan 31.980 peserta, Jepara menunjukkan kemampuan mobilisasi yang kuat. Meski demikian dari sisi pemantau, Jepara hanya tercatat 1 pemantau yang menghasilkan 1 laporan.

Kabupaten Batang (90,25) berbagi posisi kedua dengan pendekatan berbasis budaya lokal yang sangat khas Jawa Tengah. Inovasi "*Edulection Tour*" mengombinasikan edukasi dengan wisata, sosialisasi melalui seni budaya seperti wayang kulit menunjukkan pemahaman mendalam terhadap preferensi budaya masyarakat lokal, sementara pemanfaatan pasar tiban dan jalan sehat mengintegrasikan sosialisasi dalam aktivitas kemasyarakatan rutin. Batang mencatatkan 38 kegiatan sosdiklih yang melibatkan 14.800 pemilih, dengan 5 kerja sama formal yang menghasilkan 38 kegiatan kerja sama. Ekosistem pemantauan menunjukkan perkembangan positif dengan 2 pemantau yang menghasilkan 2 laporan. Dengan 7 kategori segmentasi pemilih, Batang berhasil menjangkau mayoritas kelompok masyarakat.



Posisi keempat diisi oleh Kabupaten Indramayu (90,25) yang juga menunjukkan konsistensi dalam pemanfaatan media sosial dengan ajakan rutin yang sistematis serta inovasi dalam desain materi sosialisasi. Inovasi kreatif berupa penyematan tanggal 27 November pada semua seminar kit sebagai “hari kasih suara” menciptakan *recall* yang efektif terhadap hari pemungutan suara. Indramayu mencatatkan 116 kegiatan sosdiklih, tertinggi di antara top 5, yang melibatkan 7.230 pemilih. Dengan 11 kerjasama formal yang menghasilkan 30 kegiatan kerjasama dengan 3.256 peserta, Indramayu menunjukkan efektivitas yang baik dalam memobilisasi program. Terdapat 2 pemantau meski belum menghasilkan laporan tertulis, mengindikasikan potensi pengembangan dalam aspek dokumentasi. Dengan 8 kategori segmentasi pemilih, Indramayu berhasil menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Kemudian dilanjutkan oleh Kabupaten Bantul (90,00) melengkapi lima besar dengan strategi sosialisasi berbasis kewilayahan yang sangat komprehensif dan terstruktur. Inovasi utama berupa sosialisasi berbasis RT yang dilakukan oleh seluruh PPS dalam kegiatan rutin masyarakat menunjukkan pendekatan akar rumput yang efektif. Sosialisasi melalui upacara bendera di seluruh sekolah menengah, pemanfaatan program P5, dan optimalisasi berbagai event lokal (Hari Jadi Kabupaten, Merti Dusun, Jogja Jazz, Bantul Expo, pasar tradisional, pengajian) menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap momentum kemasyarakatan. Yang paling progresif adalah kewajiban bagi seluruh PPK dan PPS memiliki media sosial official untuk memperluas jangkauan sosialisasi.

Pencapaian kuantitatif Bantul luar biasa: 10.830 kegiatan sosdiklih (tertinggi absolut) yang melibatkan 1.753.898 pemilih (lebih dari dua kali lipat DPT 745.992). Meski hanya memiliki 5 kerja sama formal, Bantul menghasilkan 34 kegiatan kerja sama dengan 3.925 peserta. Ekosistem pemantauan berkembang dengan 3 pemantau yang menghasilkan 3 laporan. Dengan 8 kategori segmentasi pemilih, Bantul memperlihatkan inklusivitas yang luar biasa.

Sementara itu, disparitas skor Sosdiklih Parmas di tingkat kabupaten mencapai 54,28 poin, sedikit lebih tinggi dari provinsi (50,09 poin), menunjukkan keragaman kondisi dan kapasitas yang sangat besar antar-kabupaten. Kesenjangan ini bersifat multidimensional, mencakup perbedaan akses infrastruktur komunikasi, kematangan ekosistem kelembagaan, ketersediaan mitra kolaboratif lokal, serta kondisi geografis dan demografis yang sangat bervariasi.

Kondisi ekosistem pemantauan yang sangat lemah di tingkat kabupaten dengan 70,6% kabupaten tanpa pemantau sama sekali, serta hambatan kerja sama formal yang dialami 64,1% kabupaten memerlukan perhatian serius dan intervensi secara struktural. Perbaikan ekosistem pemantauan tidak dapat hanya mengandalkan pertumbuhan organik, tetapi memerlukan pengembangan skema pendanaan khusus baik dari APBN maupun APBD, program *capacity building* untuk organisasi masyarakat sipil lokal dan perguruan tinggi daerah, serta penyederhanaan mekanisme akreditasi dan pelaporan agar lebih aksesibel. Untuk mengatasi hambatan kerjasama, KPU RI perlu mempertimbangkan



delegasi kewenangan yang lebih besar kepada KPU tingkat Kabupaten untuk menjalin kerja sama dengan mitra lokal.

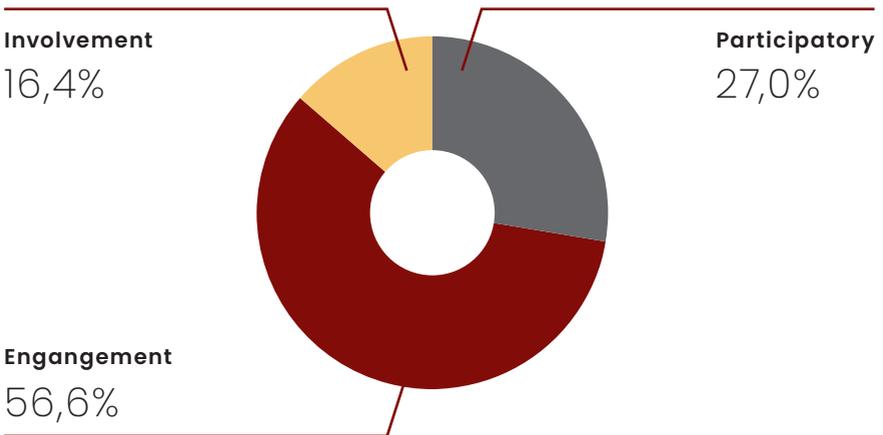
Bagi kabupaten yang masih menghadapi berbagai tantangan, diperlukan pendekatan pengembangan yang mempertimbangkan konteks spesifik masing-masing daerah. Penguatan kapasitas teknis penyelenggara melalui pelatihan intensif dan program mentoring dari kabupaten dengan praktik baik, stimulasi inovasi melalui kompetisi dan apresiasi bagi program sosialisasi kreatif, serta pengembangan pendekatan yang hemat biaya namun efektif seperti optimalisasi struktur PPS untuk sosialisasi berbasis RT/RW atau pemanfaatan momentum kegiatan kemasyarakatan yang sudah ada, menjadi prioritas strategis. Penguatan kolaborasi informal dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer lokal juga dapat menjadi alternatif ketika kerjasama formal sulit direalisasikan, sambil tetap membangun kemitraan yang lebih terstruktur di masa mendatang.

Keberhasilan lima kabupaten teratas membuktikan bahwa keterbatasan sumber daya dapat diatasi dengan kreativitas, inisiatif, dan pemahaman mendalam terhadap karakteristik masyarakat lokal. Investasi dalam *knowledge sharing* antar-kabupaten, dokumentasi praktik baik, dan platform pembelajaran bersama akan mempercepat proses adopsi inovasi dan meningkatkan kualitas program Sisdiklih Parmas secara nasional.

E. Partisipasi Aktual: Kehadiran Pemilih di TPS

Voter Turnout (VTO) mencatat rata-rata tertinggi sebesar 71,00 di tingkat kabupaten, hampir identik dengan capaian tingkat provinsi (70,80). Hasil skor variabel VTO menunjukkan masih didominasi oleh kategori *engagement* sebanyak 235 kabupaten (56,6%). Terdapat 112 kabupaten (27,0%) yang mampu menembus kategori *participatory*, sementara kategori *involvement* ditempati oleh 68 kabupaten (16,4%). Perolehan ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam hari pemungutan suara Pilkada 2024 tetap terjaga dengan baik di tingkat kabupaten.

Grafik 45. Distribusi Kategori Variabel VTO Kabupaten

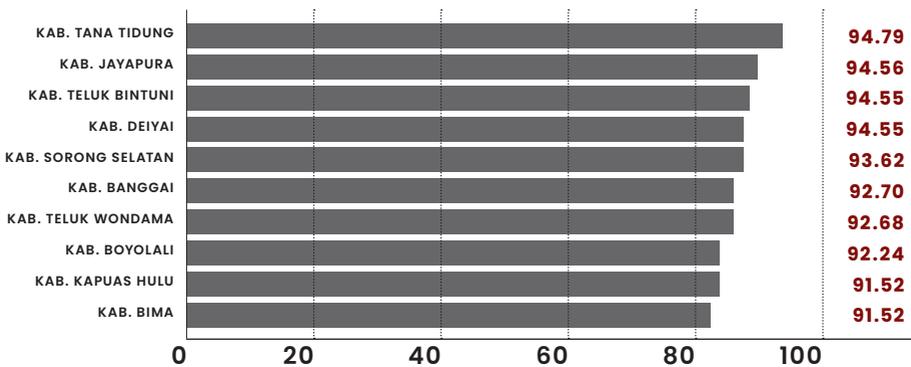


Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024



Kabupaten Tana Tidung meraih skor VTO tertinggi dengan 94,79, diikuti dengan Kabupaten Jayapura (94,56), Kabupaten Deiyai (94,55), Kabupaten Teluk Bintuni (95,55), Kabupaten Sorong Selatan (93,62), Kabupaten Banggai (92,70), Kabupaten Teluk Wondama (92,68), Kabupaten Boyolali (92,24), Kabupaten Kapuas Hulu (91,52), dan Kabupaten Bima (91,52). Pencapaian ini mencakup optimalisasi berbagai indikator VTO, termasuk persentase partisipasi pemilih secara umum, partisipasi pemilih perempuan dan penyandang disabilitas, partisipasi pemilih DPTb dan DPK, minimnya suara tidak sah, serta efisiensi rasio pemilih per TPS.

Grafik 46. 10 Besar Skor Variabel Voter Turnout Pilbup 2024



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Selanjutnya, terdapat setidaknya 235 kabupaten atau setara dengan 56,63% dari total kabupaten yang ada yang masuk dalam kategori *engagement*. Beberapa kabupaten di antaranya adalah Gianyar, Sorong Selatan, Indramayu, Toraja Utara, Banyumas, Sampang, Nias Selatan, Mamuju, Magelang, Flores Timur, Demak, Pohuwato, Sleman, Pati, Dairi, Kapulauan Talaut, Bangkalan, dan sejumlah kabupaten lainnya yang tersebar merata di hampir semua provinsi.

Sedangkan untuk kategori *involvement*, terdapat setidaknya 16,39% atau sama dengan 68 kabupaten. Deratan kabupaten dimaksud antara lain Empat Lawang, Barito Timur, Bener Meriah, Nias, Pidie, Mappi, Tapanuli Tengah, Ogan Komering Ulu Timur, Nunukan Nias Barat, Bangka Aceh Jaya, Mandaling Natal, Kutai Kertanegara, Mamberamo Raya, Nduga, Aceh Selatan, Belitung Timur, Aceh Tamiang, Tangerang, Sukarama, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Takalar, Pak-Pak Barat, Purwakarta, Solok, Tanah Datar, Serdang Bedagai, Langkat, Kuantan Singingi dan sejumlah kabupaten lain yang meliputi Majene, Yalimo, Luwu, Intan Jaya, dan sebagainya.

Sementara di urutan terbawah ada Kabupaten Serdang Bedagai yang mencatatkan skor terendah pada 47,64, menunjukkan tantangan signifikan dalam memenuhi partisipasi pemilih. Rendahnya VTO di Kabupaten Serdang Bedagai (partisipasi pemilih: 60,60%) dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk tantangan geografis dan infrastruktur, peristiwa sosial yang mempengaruhi akses pemilih ke TPS.

Rentang skor VTO mencapai 47,15 poin, menunjukkan variasi yang cukup besar dalam tingkat partisipasi pemilih antar kabupaten. Menariknya, beberapa kabupaten dengan skor rendah di variabel persiapan lainnya masih dapat mencatatkan VTO yang relatif baik, pola yang sama seperti pada level provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi masyarakat untuk berpartisipasi pada hari pemilihan relatif terjaga, meski belum optimal pada tahap persiapan.

Tingginya rata-rata VTO dibanding variabel lain menunjukkan bahwa infrastruktur pemungutan suara di tingkat kabupaten secara umum telah berfungsi dengan efektif. Namun, tantangan ke depan terletak pada peningkatan kualitas partisipasi yang tidak hanya mengukur kuantitas kehadiran, tetapi juga pemahaman pemilih terhadap isu-isu substantif dan kemampuan melakukan pilihan politik yang rasional.

5.3 Pola Partisipasi Wilayah Urban: Skor IPP Pilkada di Tingkat Kota

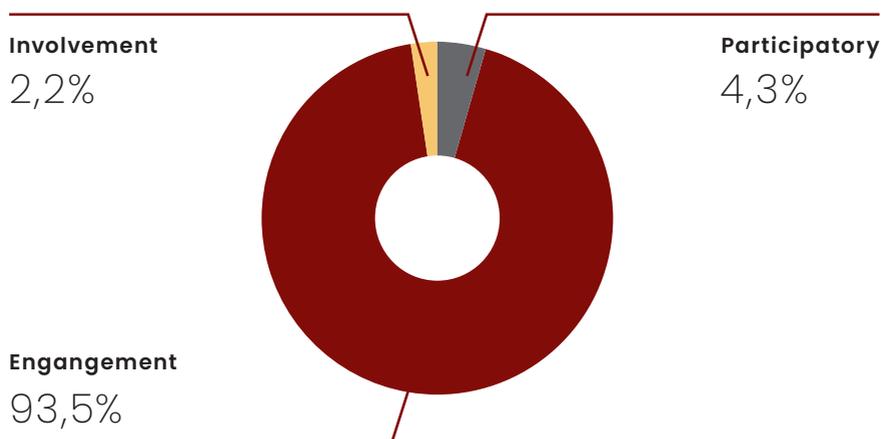
A. Kelengkapan dan Akurasi Registrasi Pemilih

Analisis variabel Registrasi Pemilih di tingkat kota menyajikan sebuah dinamika yang khas. Dengan skor rata-rata nasional 69,79, capaian di 93 kota sedikit lebih rendah dibandingkan provinsi (71,82) dan kabupaten (71,78). Perbedaan ini mengindikasikan adanya tantangan unik dalam konteks urban yang memengaruhi proses pemutakhiran data pemilih. Meski demikian, sebaran skor yang luas dari yang tertinggi 85,00 hingga terendah 58,00 menunjukkan bahwa tantangan tersebut dapat diatasi.

Berdasarkan grafik di bawah, capaian skor variabel registrasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024 terbagi ke dalam tiga kategori. Dari 93 kota, sebanyak 87 kota atau setara dengan 93,5% masuk dalam kategori *Engagement*. Selanjutnya, terdapat 4 kota atau 4,3% yang berada pada kategori *Participatory*, sedangkan hanya 2 kota atau 2,2% yang masuk dalam kategori *Involvement*.

Grafik 47. Skor Agregat Variabel Registrasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Analisis terhadap 10 kota dengan skor tertinggi dan 10 kota dengan skor terendah, sebagaimana juga terlihat pada tingkat provinsi dan kabupaten, menunjukkan pola yang menarik. Pencapaian tinggi dalam variabel registrasi pemilih tidak berkorelasi langsung dengan besaran Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari 10 kota dengan skor tertinggi, empat di antaranya masuk dalam kategori *participatory*, sementara enam lainnya berada pada kategori *engagement*. Adapun pada 10 kota dengan skor terendah, sebagian besar termasuk kategori *engagement*, dan hanya dua kota yang terkategori sebagai *involvement*.



Tabel 10. Peringkat Variabel Registrasi Pemilih di Tingkat Kota

Ranking	Nama Satker	Skor Variabel Registrasi Pemilih	Jumlah DPT	Kategorisasi
1	KOTA PARIAMAN	85.00	72,660	Participatory
2	KOTA PALOPO	82.50	125,572	Participatory
3	KOTA TUAL	80.10	64,244	Participatory
4	KOTA SUKABUMI	78.50	259,961	Participatory
5	KOTA YOGYAKARTA	77.50	320,594	Engagement
6	KOTA BOGOR	77.50	815,249	Engagement
7	KOTA TIDORE KEPULAUAN	76.50	80,700	Engagement
8	KOTA GUNUNGSITOLI	76.10	92,679	Engagement
9	KOTA PROBOLINGGO	75.00	179,416	Engagement
10	KOTA TOMOHON	74.50	79,211	Engagement
84	KOTA LANGSA	62.50	128,861	Engagement
85	KOTA JAYAPURA	62.50	289,451	Engagement
86	KOTA SERANG	62.00	513,851	Engagement
87	KOTA LHOKSEUMAWA	61.50	135,319	Engagement
88	KOTA AMBON	61.50	250,194	Engagement
89	KOTA SORONG	61.50	205,412	Engagement
90	KOTA MEDAN	60.50	1,799,421	Engagement
91	KOTA PEMATANGSIANTAR	60.50	70,164	Engagement
92	KOTA KOTAMOBAGU	58.20	90,298	Involvement
93	KOTA PALANGKA RAYA	58.00	217,584	Involvement

Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Kota Pariaman memimpin dengan skor 85,00 meskipun hanya memiliki DPT sebesar 72.660 pemilih. Tingginya skor tersebut dipengaruhi oleh indikator jumlah laporan masyarakat ke KPU dalam proses penyusunan daftar pemilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa KPU Kota Pariaman berhasil menciptakan ruang keterlibatan publik yang luas dalam tahapan penyusunan daftar pemilih, terbukti dengan masuknya 581 laporan masyarakat selama proses berlangsung. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah koordinasi dan kerja sama yang baik antara KPU dan pihak eksternal, seperti Dukcapil serta dinas terkait. Kolaborasi tersebut berdampak pada minimnya laporan terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat pasca tahapan penelitian dan pencocokan data pemilih. Pola serupa juga terlihat di Kota Palopo yang memperoleh skor 82,50 dan masuk kategori *participatory*, di mana keberhasilan tersebut ditopang oleh faktor-faktor yang relatif sama.

Yang menarik adalah kasus Kota Yogyakarta. Meski masuk dalam 10 besar kota dengan skor tertinggi untuk variabel registrasi pemilih, kota ini hanya berada pada kategori *engagement*. Kota Yogyakarta berhasil memfasilitasi laporan masyarakat terkait pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dan menghadirkan potret data pemilih yang inklusif, dengan 52,14 persen pemilih perempuan terakomodasi dalam DPT. Selain itu, koordinasi dan kerja sama KPU Kota Yogyakarta dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan proses penyusunan daftar pemilih juga berjalan dengan baik.



Temuan menarik lainnya adalah capaian kota-kota dengan karakteristik kepulauan, seperti Tual dan Tidore Kepulauan, yang berhasil masuk 10 besar dengan skor 76,50 meski memiliki DPT relatif kecil (80.700). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan geografis dapat diatasi melalui strategi registrasi yang adaptif. Sebaliknya, Kota Yogyakarta (77,50) dan Kota Bogor (77,50) yang memiliki DPT jauh lebih besar, masing-masing 320.594 dan 815.249 pemilih, tetap mampu mempertahankan skor tinggi meskipun menghadapi kompleksitas tantangan yang lebih besar.

Di sisi lain, 10 kota dengan skor terendah menunjukkan pola yang beragam. Kota Palangka Raya dan Kota Kotamobagu, misalnya, termasuk dalam kategori *involvement*. Rendahnya skor Kota Palangka Raya (58,00) disebabkan oleh minimnya laporan masyarakat dalam proses penyusunan daftar pemilih serta ketiadaan data yang menunjukkan adanya koordinasi KPU setempat dengan pihak eksternal, khususnya dalam menjangkau kelompok pemilih disabilitas dan kelompok marjinal lainnya. Faktor serupa juga memengaruhi rendahnya capaian Kota Kotamobagu.

Sementara itu, Kota Medan yang memiliki DPT terbesar (1.799.421 pemilih) hanya mencatatkan skor 60,50. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan yang kompleks dalam mengelola registrasi pemilih di kota metropolitan besar. Secara umum, pola yang muncul menunjukkan bahwa kota-kota berukuran kecil hingga menengah (dengan DPT 60.000–300.000) relatif lebih mudah mengoptimalkan proses registrasi dibandingkan kota metropolitan dengan DPT yang jauh lebih besar.

Total DPT pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024 mencapai 35.630.399 pemilih yang tersebar di 93 kota, dengan rata-rata 383.015 pemilih per kota. Namun, variasi yang sangat besar mulai dari Kota Tual (64.244 pemilih) hingga Kota Medan (1.799.421 pemilih) menunjukkan beragamnya tantangan dalam tahapan registrasi pemilih di wilayah urban.

Karakteristik kota-kota urban pada dasarnya memberikan keunggulan dalam hal aksesibilitas layanan registrasi serta koordinasi dengan Dukcapil. Namun, keunggulan tersebut juga dibarengi dengan tantangan spesifik, seperti tingginya mobilitas penduduk dan kompleksitas dalam mengidentifikasi pemilih sementara. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan registrasi yang lebih scalable serta pemanfaatan teknologi digital yang disesuaikan dengan ukuran dan karakteristik masing-masing kota.

Analisis variabel Registrasi Pemilih di tingkat kota menyimpulkan bahwa karakteristik dan skala urban secara signifikan memengaruhi dinamika pemutakhiran data pemilih. Kinerja unggul tidak ditentukan oleh besar kecilnya DPT, melainkan oleh kemampuan KPU dalam mengelola tantangan spesifik di wilayahnya. Keberhasilan kota-kota berkinerja tinggi seperti Pariaman dan Palopo menunjukkan bahwa partisipasi publik yang aktif dan koordinasi kelembagaan yang kuat adalah resep utama untuk mencapai akurasi data, terutama di kota skala kecil hingga menengah.

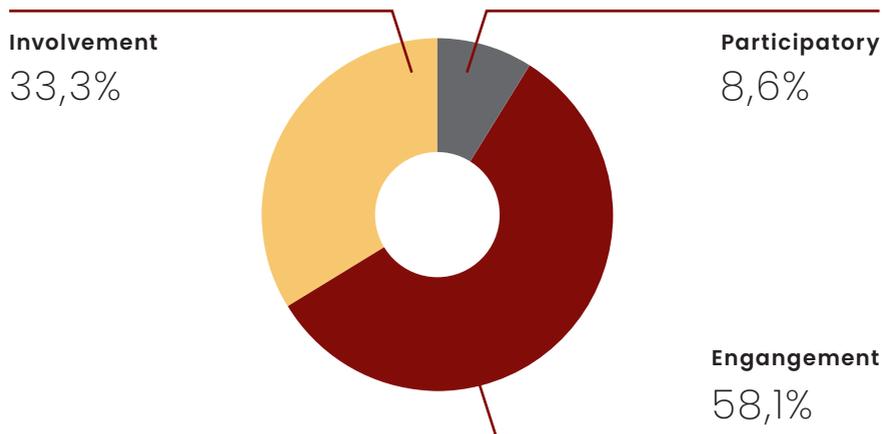


Di sisi lain, tantangan terbesar muncul di dua kutub yang berbeda. Pertama, pada kota metropolitan seperti Medan, beban administratif akibat besarnya populasi dan mobilitas tinggi menjadi kendala utama. Kedua, pada kota seperti Palangka Raya dan Kotamobagu, skor rendah lebih disebabkan oleh kelemahan dalam mendorong partisipasi publik dan menjangkau kelompok rentan, yang mengindikasikan adanya masalah manajerial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan “satu ukuran untuk semua” tidak efektif. Diperlukan strategi registrasi yang adaptif: pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kompleksitas di kota besar, dan penguatan kapasitas manajerial serta sosialisasi partisipatif untuk kota-kota lainnya.

B. Representasi dan Kompetisi dalam Pencalonan

Hasil pengukuran terhadap variabel pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024 menunjukkan variasi capaian antar daerah. Penilaian ini didasarkan pada beberapa indikator utama, yaitu jumlah pasangan calon, kehadiran calon perempuan dan calon perseorangan, pemerataan suara sah partai pengusung, serta tingkat keterlibatan massa dalam proses pendaftaran pasangan calon di KPU. Variabel Pencalonan di tingkat kota mencatat rata-rata 64,59, sedikit lebih tinggi dari kabupaten (62,20) namun masih lebih rendah dari provinsi (65,16).

Grafik 48. Kategori Partisipasi pada Variabel Pencalonan di Pemilihan Walikota/Wakil Walikota 2024



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Terdapat delapan kota (8,6%) yang berhasil mencapai kategori *participatory* pada variabel pencalonan. Skor tertinggi diraih oleh Kota Makassar dengan nilai 92,00, yang mencerminkan dinamika kompetisi elektoral yang kuat dan inklusif. Kota ini menghadirkan empat pasangan calon, termasuk tiga calon perempuan, dengan dukungan partai politik yang relatif merata sehingga tidak terjadi dominasi oleh satu pasangan calon tertentu. Tingginya keterlibatan masyarakat juga tampak dari antusiasme massa yang hadir dalam proses pendaftaran pasangan calon di KPU, menandakan partisipasi publik yang aktif sejak tahap awal pemilihan.



Pola serupa terlihat di Kota Sorong (88,00), Kota Bontang (83,00), Kota Langsa (82,00), dan Kota Salatiga (82,00). Kota-kota tersebut memperoleh skor tinggi karena menampilkan lebih dari dua pasangan calon, kehadiran calon perempuan maupun perseorangan yang memperkaya representasi politik, serta tingkat kompetisi yang tergolong tinggi atau setidaknya moderat. Kombinasi antara keragaman kandidat, distribusi dukungan politik yang kompetitif, dan partisipasi masyarakat yang luas menjadikan kota-kota ini menonjol sebagai contoh partisipasi yang substantif dan inklusif dalam tahapan pencalonan.

Sebanyak 54 kota (58,1%) lainnya termasuk dalam kategori engagement. Sejumlah kota dalam kategori ini sebenarnya menunjukkan kompetisi elektoral yang cukup dinamis, dengan skor yang mendekati kategori *participatory*. Umumnya, kota-kota ini memiliki lebih dari dua pasangan calon, mencerminkan tingkat keterbukaan dan kompetisi politik yang sehat. Distribusi dukungan partai politik juga tergolong cukup merata, sehingga tidak ada pasangan calon yang memperoleh dominasi signifikan. Selain itu, di beberapa daerah juga terdapat calon perempuan atau calon perseorangan, yang memperkuat aspek representasi politik dalam proses pencalonan.

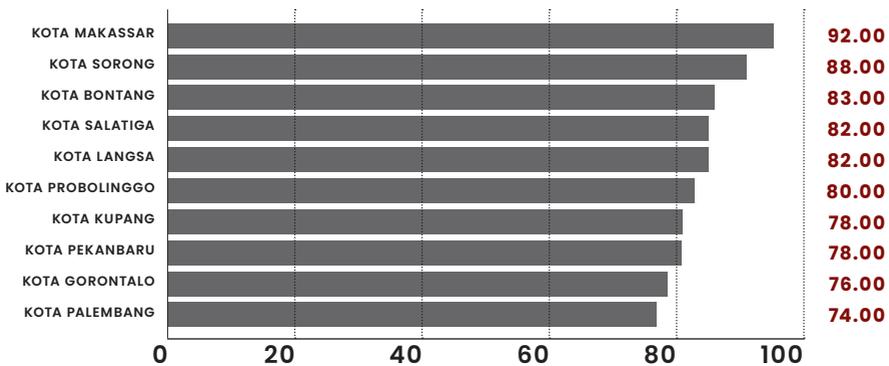
Meski demikian, perbedaan utama dibandingkan kategori *participatory* terletak pada rendahnya partisipasi sosial masyarakat selama tahapan pendaftaran pasangan calon di KPU. Keterlibatan publik lebih bersifat seremonial dan formal, belum menunjukkan mobilisasi dukungan

yang meluas. Dengan kata lain, dimensi kompetisi elektoral di kota-kota ini sudah cukup kuat, tetapi aspek partisipasi masyarakatnya belum berkembang secara substantif. Beberapa kota yang mencerminkan pola tersebut antara lain Kota Gorontalo (76,00), Palembang, Bima, Pagar Alam, Sungai Penuh, dan Tegal, dengan skor 74,00.

Sebanyak 31 kota (33,3%) masuk dalam kategori *involvement*, menunjukkan bahwa hampir sepertiga kota di Indonesia masih memiliki tingkat partisipasi yang relatif rendah dalam proses pencalonan kepala daerah. Meskipun demikian, di sejumlah daerah masih terdapat indikasi kompetisi elektoral yang berlangsung, meski tidak disertai dengan partisipasi publik yang kuat. Misalnya, Kota Tebing Tinggi mencatat skor 60,00 dengan kehadiran tiga pasangan calon, yang secara formal menunjukkan adanya kontestasi. Namun, tidak terdapat calon perempuan maupun calon perseorangan, dan pelibatan massa saat pendaftaran pasangan calon di KPU tergolong minim, sehingga dinamika kompetisi tersebut bersifat terbatas dan elitis. Kondisi serupa juga terlihat di Kota Bengkulu, yang memiliki lima pasangan calon, termasuk satu pasangan calon perseorangan dan satu calon perempuan. Meskipun konfigurasi kandidatnya beragam dan berpotensi meningkatkan kualitas kompetisi, rendahnya partisipasi masyarakat saat tahapan pendaftaran menunjukkan bahwa proses pencalonan belum menjadi ruang partisipatif yang inklusif.

Sementara itu, beberapa kota lain justru menunjukkan kondisi yang lebih tertutup, di mana hanya terdapat calon tunggal tanpa adanya kompetisi politik yang berarti. Misalnya, Kota Pasuruan, Samarinda, Tarakan, dan Pangkalpinang yang masing-masing memperoleh skor 47,00. Pola ini mencerminkan dominasi politik yang tidak sehat atau keterbatasan struktural dalam memunculkan alternatif kandidat di kota-kota tersebut.

Grafik 49. 10 Besar Variabel Pencalonan pada Pilwaktot 2024



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Tabel 11. Peringkat Variabel Pencalonan di Tingkat Kota

Rangking	Kabupaten	Skor Variabel Pencalonan	Jumlah Paslon	Paslon Perempuan	Paslon Perseorangan	Tingkat Kompetisi
1	KOTA MAKASSAR	92,00	4	3	0	TINGGI
2	KOTA SORONG	88,00	4	1	0	TINGGI
3	KOTA BONTANG	83,00	4	2	1	SEDANG
4	KOTA LANGSA	82,00	5	0	1	TINGGI

5	KOTA SALATIGA	82,00	3	2	0	TINGGI
6	KOTA PROBOLINGGO	80,00	4	1	0	TINGGI
7	KOTA KUPANG	78,00	5	3	0	TINGGI
8	KOTA PEKANBARU	78,00	5	3	0	TINGGI
90	KOTA PASURUAN	47,00	1	0	0	SANGAT RENDAH
91	KOTA SAMARINDA	47,00	1	0	0	SANGAT RENDAH
92	KOTA TARAKAN	47,00	1	0	0	SANGAT RENDAH
93	KOTA PANGKALPINANG	47,00	1	0	0	SANGAT RENDAH

Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Secara keseluruhan, dinamika pada variabel pencalonan dalam Pilkada 2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi di tahap ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di luar kendali penyelenggara pemilu. Sebelumnya, KPU telah berupaya mendorong membuka ruang kompetisi dengan mencegah munculnya calon tunggal, dengan memperpanjang masa pendaftaran pencalonan. Namun, tidak berhasil mengurangi jumlah calon tunggal pada pemilihan walikota/wakil walikota 2024.



C. Dinamika Kampanye dan Akses Informasi Publik

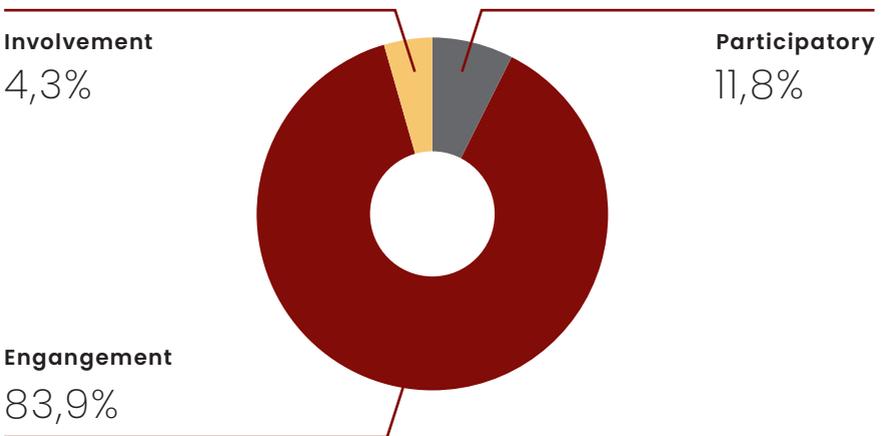
Tahapan kampanye di tingkat kota merepresentasikan sebuah arena kontestasi politik dengan karakteristik yang membedakannya dengan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. Berlangsung di tengah kepadatan populasi, heterogenitas sosial, dan derasnya arus informasi, kampanye politik di wilayah urban menjadi ajang adu strategi yang kompleks. Di sini, mobilisasi dukungan melalui media baru seringkali memiliki pengaruh yang setara, bahkan lebih besar, dibandingkan mobilisasi massa konvensional. Selain itu, dinamika kampanye di sebuah kota metropolitan, tentu saja sangat berbeda dengan kota pesisir berukuran sedang. Dengan demikian, kuantitas dan kualitas dari partisipasi masyarakat pada kampanye di 93 kota pada Pilkada 2024 menjadi cerminan dari kemampuan para peserta pilkada dalam menavigasi lanskap sosial-politik wilayah perkotaan yang dinamis. Bagian ini membedah capaian partisipasi masyarakat pada variabel Kampanye di seluruh kota pada Pilkada 2024.

Terkait dengan metodologi, capaian partisipasi masyarakat di tahapan kampanye di tingkat kota pada Pilkada 2024 juga diukur melalui tiga pilar utama. Penilaian difokuskan pada dinamika dan partisipasi publik, yang dalam konteks kota tidak hanya diukur dari kegiatan tatap muka, tetapi juga dari jangkauan dan interaksi di media sosial. Pilar kedua adalah peran fasilitasi KPU Kota dalam menciptakan kompetisi yang sehat, terutama dalam menyelenggarakan debat publik yang mampu mengangkat isu-isu relevan bagi masyarakat perkotaan. Pilar terakhir adalah integritas dan kepatuhan, yang diukur

dari transparansi dana kampanye dan, yang krusial, rendahnya angka pelanggaran seperti politik uang atau kampanye hitam yang seringkali lebih terselubung di lingkungan urban.

Untuk menangkap kompleksitas kampanye perkotaan, metode penilaian tetap mengandalkan sinergi antara dua pendekatan. Penilaian kuantitatif merekam data-data objektif, seperti jumlah iklan di media massa, jumlah pengikut akun media sosial, atau jumlah laporan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Kota. Untuk melakukan pendalaman data, penilaian Kualitatif melalui *expert judgement* juga dikembangkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisa data terhadap kualitas konten kampanye digital, relevansi isu yang diangkat dalam debat dengan problematika kota, serta efektivitas KPU dalam mengawasi berbagai modus pelanggaran modern yang lazim terjadi di perkotaan.

Grafik 50. Skor Agregat Variabel Kampanye di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

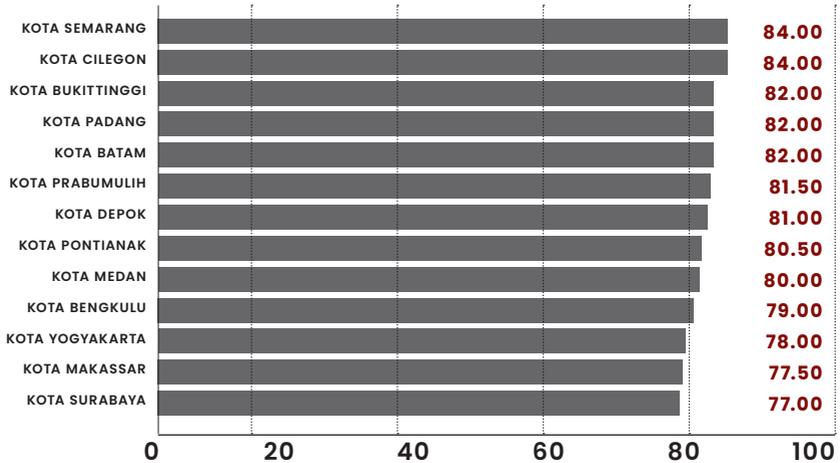


Secara umum, temuan utama pada variabel Kampanye di tingkat kota menunjukkan bahwa rata-rata skor nasional untuk variabel ini mencapai 69,81. Capaian tersebut menempatkan variabel Kampanye pada posisi ketiga dalam keseluruhan variabel yang digunakan pada Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) Pilkada 2024 di tingkat kota, setelah variabel Registrasi Pemilih dan *Voters Turn Out* (VTO). Selain itu, capaian ini juga sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian di tingkat kabupaten (69,13) dan di tingkat provinsi (69,47).

Jika kita elaborasi lebih lanjut, sebenarnya kita dapat melihat betapa strategisnya variabel Kampanye untuk menjembatani antara angka partisipasi masyarakat di tahapan Registrasi Pemilih dan angka partisipasi masyarakat di tahapan VTO. Dapat dikatakan bahwa angka partisipasi yang pemilih yang tinggi pada tahapan kampanye akan berkorelasi positif pada kesesuaian antara angka partisipasi pada registrasi pemilih dengan angka partisipasi pada VTO. Sebaliknya, angka partisipasi masyarakat yang rendah pada tahapan kampanye akan berkorelasi positif pada kesenjangan antara angka masyarakat pada registrasi pemilih dengan VTO.

Secara lebih spesifik, jika ditinjau dari distribusi kategori yang digunakan pada IPP Pilkada 2024, dari total 93 kota yang dianalisis, terdapat 11 kota (11,8%) yang masuk kategori *participatory*. Kota-kota merupakan contoh dari praktik baik, di mana penyelenggara, kandidat, dan masyarakat mampu membangun sinergi yang lebih kuat dalam pelaksanaan kampanye. Sedangkan 78 kota (83,9%) masuk dalam kategori *engagement*. Sisanya, 4 kota (4,3%) masih berada pada kategori *involvement*. Rendahnya capaian ini umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan dalam pendokumentasian kegiatan kampanye oleh KPU, rendahnya keterlibatan masyarakat, kurang optimalnya fasilitasi oleh KPU dan juga kurang optimalnya para peserta pilkada dalam memanfaatkan fasilitasi yang diberikan oleh KPU. Dari data ini kita dapat mengatakan bahwa mayoritas partisipasi pemilih pada tahapan kampanye di tingkat kota masih berada dalam kategori partisipasi yang bersifat prosedural. Sedangkan di beberapa daerah, partisipasi pemilih sudah mengarah pada bentuk partisipasi yang lebih substansial dan bermakna (*meaningful participation*). Dengan demikian, hal ini juga sama dengan yang terjadi di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten.

Grafik 51. 10 Besar Variabel Kampanye pada Pilwakot 2024



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Sebagai studi kasus, Kota Cilegon menempati posisi teratas dalam skor variabel Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Terdapat beberapa indikator yang mendukung penilaian tersebut. **Pertama**, dari sisi aktivitas kampanye, tercatat 70 kegiatan kampanye yang terdokumentasi dan dilaporkan secara resmi kepada KPU. Tingginya angka ini mencerminkan intensitas kampanye yang berjalan dalam koridor regulasi serta kemampuan penyelenggara untuk memastikan transparansi proses.

Kedua, KPU Kota Cilegon menunjukkan kapasitas fasilitasi yang signifikan dengan menyediakan 882 iklan kampanye dan 251 alat peraga kampanye (APK) bagi pasangan calon. Dukungan ini memperlihatkan keseriusan penyelenggara dalam menjamin kesetaraan akses komunikasi politik, sehingga seluruh kandidat dapat menyampaikan gagasannya kepada masyarakat secara lebih luas. **Ketiga**, tingkat keterlibatan publik juga cukup tinggi dengan partisipasi sekitar 3.000 orang dalam kegiatan kampanye yang terdokumentasi. Hal ini menunjukkan bahwa ruang kampanye tidak hanya diisi oleh kandidat dan penyelenggara, tetapi juga direspons positif oleh masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi lokal.

Keempat, kualitas kampanye di Cilegon diperkuat oleh keberadaan 2 kegiatan debat publik yang difasilitasi oleh KPU. Forum ini menjadi wadah penting bagi para kandidat untuk mempertemukan gagasan, sekaligus memberi kesempatan kepada pemilih untuk menilai secara langsung visi, misi, dan program pasangan calon. Kelima, dari sisi integritas, seluruh pasangan calon (3 paslon) tercatat patuh dalam menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPADAK). Tingkat kepatuhan penuh ini memperlihatkan bahwa praktik kampanye di Cilegon berjalan dalam standar akuntabilitas yang tinggi.



Selain itu, dukungan dana kampanye dari 4 pihak eksternal (perorangan maupun kelompok) menambah dimensi partisipasi masyarakat sipil, sekaligus memperlihatkan adanya legitimasi publik terhadap proses demokrasi. Terakhir, pemanfaatan kanal digital juga menjadi faktor pembeda. Total 447.672 pengikut media sosial pasangan calon yang terdaftar di KPU menjadi indikator bahwa strategi kampanye digital telah dioptimalkan secara maksimal. Tingginya jangkauan media sosial tidak hanya memperluas akses informasi, tetapi juga membuka ruang interaksi politik yang lebih dinamis dengan pemilih, khususnya kelompok muda.

Adapun Kota Cimahi menjadi Kota dengan skor terendah pada 49,50. Hal ini menunjukkan adanya tantangan sistemik dalam penyelenggaraan kampanye di wilayah ini. Rendahnya skor dikarenakan adanya keterbatasan dalam pemanfaatan berbagai saluran kampanye, minimnya inovasi dalam pendekatan komunikasi politik, rendahnya koordinasi antara KPU dengan para pemangku kepentingan dan rendahnya kepatuhan terhadap administrasi kampanye di kalangan peserta pilkada. Dari wilayah ini kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa karakter kampanye di wilayah urban pada umumnya ditandai dengan akses yang lebih baik terhadap media massa, platform digital, dan venue kampanye. Selain itu, wilayah dengan karakter seperti ini juga menghadapi berbagai tantangan, misalnya kompetisi pesan yang lebih intens, biaya kampanye yang relatif lebih tinggi, dan ekspektasi masyarakat urban yang lebih kritis terhadap substansi kampanye.

Dari keseluruhan data tentang partisipasi publik dalam tahapan kampanye di Pilkada 2024 di tingkat kota, kita dapat merumuskan beberapa poin kesimpulan. **Pertama**, dominasi kategori *engagement* menunjukkan bahwa sebagian besar kampanye telah berhasil menghadirkan ruang interaksi politik yang cukup terbuka, meskipun belum seluruhnya mampu naik ke level partisipasi substantif. Mirip dengan kondisi yang ada di tingkatan provinsi dan di tingkatan kabupaten, partisipasi masyarakat di tahapan kampanye di Pilkada 2024 sedang mengalami proses transformasi dari kategori *involvement* ke kategori *participatory*. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa upaya yang telah dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi di tahapan kampanye di Pilkada 2024 telah melahirkan adanya proses transformasi tersebut.

Kedua, adanya kesenjangan partisipasi masyarakat dalam tahapan kampanye di beberapa daerah. Kota-kota dengan capaian *participatory* memberi inspirasi tentang bagaimana sinergi antara penyelenggara, kandidat, dan masyarakat dapat menghasilkan praktik kampanye yang lebih sehat, setara, dan inklusif. Selain itu, kombinasi antara transparansi, fasilitasi optimal dari KPU, kepatuhan kandidat, serta pemanfaatan kanal digital mampu menghasilkan kualitas kampanye yang relatif komprehensif. Sebaliknya, beberapa kota dengan kategori *involvement* menunjukkan kurangnya inovasi dalam strategi komunikasi, keterlibatan publik yang luas, dan kepatuhan administratif sehingga kampanye cenderung kehilangan daya substansinya.

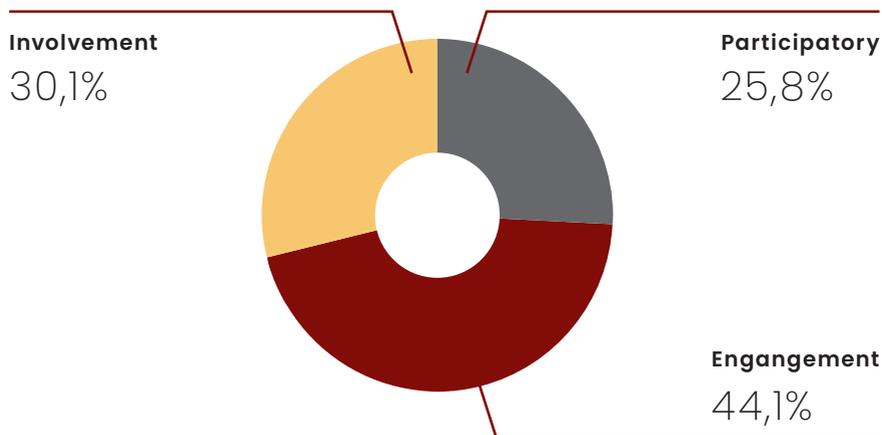


Ketiga, partisipasi masyarakat di tahapan kampanye tidak hanya merefleksikan performa teknis penyelenggaraan pilkada, tetapi juga menggambarkan kemampuan aktor-aktor politik dalam menavigasi lanskap urban yang penuh tantangan. Hal ini menegaskan bahwa penguatan kualitas kampanye di masa depan harus diarahkan pada dua aspek kunci: peningkatan kualitas partisipasi publik yang lebih bermakna dan penguatan integritas dan akuntabilitas kandidat maupun penyelenggara pilkada. Keduanya menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa kontestasi politik perkotaan benar-benar menjadi arena bagi pengembangan politik programatik.

D. Efektivitas Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Variabel Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) mencatatkan rata-rata tertinggi di tingkat kota yaitu 66,75, melampaui provinsi (60,97) dan kabupaten (61,94). Berdasarkan hasil skoring akhir variabel sosdiklih parmas, 24 kota masuk dalam kategori *participatory* dengan perolehan skor di atas ($> 77,50$), 41 kota masuk dalam kategori *engagement* dengan rentang perolehan skor akhir sebesar ($60 - 77,50$), dan 28 kota masuk dalam kategori *involvement* yang skornya kurang dari (< 60). Pencapaian ini menunjukkan bahwa lingkungan urban memberikan keunggulan komparatif dalam implementasi program literasi dan kesadaran pemilih, dengan potensi inovasi yang lebih beragam dan aksesibilitas yang lebih baik.

Grafik 52. Distribusi Kategori Variabel Sosdiklih Parmas Kota



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Seperti halnya di tingkat provinsi dan kabupaten, capaian variabel Sosdiklih Parmas di kota perlu dipahami dalam konteks keserentakan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tahun 2024 yang mengharuskan prioritas pada tahapan-tahapan krusial. Namun, kondisi urban memberikan beberapa keunggulan struktural seperti aksesibilitas infrastruktur komunikasi yang lebih baik, konsentrasi lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil yang lebih tinggi, serta literasi digital masyarakat yang relatif lebih tinggi.

Meski demikian, tantangan terkait ekosistem eksternal tetap ada dengan karakteristik yang unik. Pertama, indikator jumlah pemantau dan laporan hasil pemantauan menunjukkan kondisi yang sedikit lebih



baik dibanding kabupaten namun masih jauh dari ideal. Rata-rata nasional pemantau di kota mencapai 0,96 per kota, sedikit lebih tinggi dari kabupaten (0,78) namun jauh lebih rendah dari provinsi (3,81). Sebanyak 44 kota dari 93 kota (47,3%) sama sekali tidak memiliki pemantau pilkada, proporsi yang lebih baik dibanding kabupaten (70,6%) namun masih menunjukkan lemahnya ekosistem pemantauan di sebagian besar kota. Rata-rata laporan pemantauan mencapai 1,16 per kota, tertinggi di antara ketiga tingkatan administrasi, menunjukkan bahwa kota-kota yang memiliki pemantau cenderung lebih produktif dalam menghasilkan laporan tertulis.

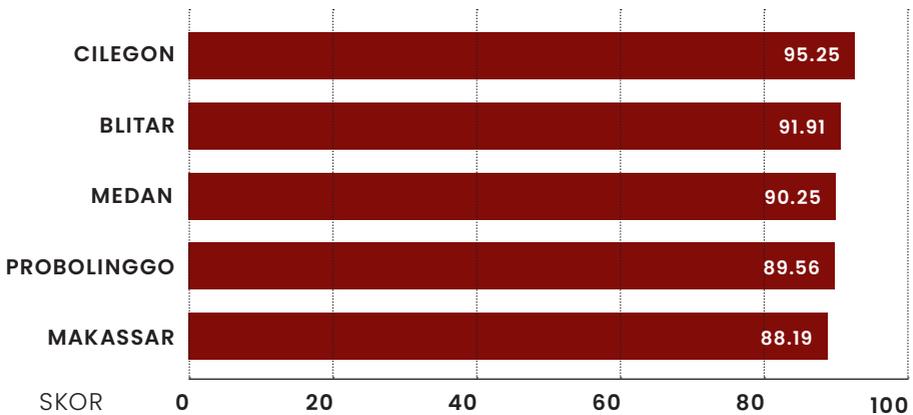
Kondisi ini mencerminkan bahwa meski lingkungan urban memiliki potensi lebih besar untuk mengembangkan ekosistem pemantauan dengan ketersediaan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas aktivis yang lebih terkonsentrasi, namun peredupan dunia pemantauan akibat minimnya pendanaan tetap berdampak signifikan. Revitalisasi ekosistem pemantauan di kota memerlukan pendekatan yang memanfaatkan keunggulan komparatif urban, seperti pengembangan model pemantauan berbasis mahasiswa dan dosen, kolaborasi dengan komunitas, serta pemanfaatan teknologi untuk menurunkan biaya pemantauan.

Kedua, indikator jumlah kerjasama menunjukkan kondisi yang menarik namun cukup kontradiktif. Rata-rata nasional kerja sama di level kota hanya 4,11 MoU per kota, jauh lebih rendah dari kabupaten (9,56) dan provinsi (9,97). Sebanyak 57 kota dari 93 kota (61,3%) belum mencatatkan kerja sama formal sama sekali, proporsi yang sedikit lebih baik dari kabupaten (64,1%) namun masih tergolong

tinggi. Kondisi ini mengejutkan mengingat kota umumnya memiliki konsentrasi mitra potensial yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi, media massa, organisasi profesi, dan komunitas kreatif.

Rendahnya rata-rata kerja sama formal di kota kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor: hambatan regulasi kerja sama bertingkat yang sama berlaku di semua level, kesibukan dan kompleksitas koordinasi di lingkungan urban yang lebih tinggi, serta kemungkinan KPU Kota lebih banyak melakukan kolaborasi informal yang tidak terdokumentasi sebagai MoU formal. Menariknya, beberapa kota seperti Medan dengan 54 kerja sama dan Cilegon dengan 29 kerja sama menunjukkan bahwa dengan inisiatif kuat, hambatan regulasi tetap dapat dinavigasi bahkan di tingkat kota dengan sumber daya yang lebih terbatas dibanding provinsi.

Grafik 53. 5 Besar Skor Variabel Sosdiklih Parmas Pilwali 2024



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024



Kota Cilegon mencatatkan pencapaian tertinggi dengan skor luar biasa 95,25, menunjukkan keberhasilan program sosialisasi yang sangat komprehensif dan inovatif. Keunggulan utama Cilegon terletak pada kombinasi pendekatan konvensional dan modern yang sangat seimbang. Inovasi unggulan mencakup program “war-war” (kampanye massal berbasis komunitas), podcast sebagai media komunikasi modern yang menjangkau generasi digital, “senam sehat” yang mengintegrasikan sosialisasi politik dengan aktivitas kesehatan masyarakat, dan “nonton bareng” yang memanfaatkan momen komunal untuk pendidikan pemilih. Kombinasi pendekatan tradisional dan modern ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap keberagaman preferensi masyarakat urban. Dari sisi kuantitatif, Cilegon mencatatkan 63 kegiatan sosdiklih yang melibatkan 6.355 pemilih, didukung oleh 29 kerja sama formal (tertinggi kedua nasional setelah Medan) yang menghasilkan 29 kegiatan dengan 1.050 peserta. Dengan 7 kategori segmentasi pemilih, Cilegon menunjukkan inklusivitas yang baik.

Kota Blitar (91,91) menempati posisi kedua dengan pendekatan pemanfaatan infrastruktur kota secara optimal. Inovasi pemanfaatan videotron Pemerintah Kota dan pengeras suara lalu lintas oleh Dinas Perhubungan menunjukkan sinergi yang efektif antara KPU dengan pemerintah daerah dalam memanfaatkan fasilitas publik untuk menjangkau masyarakat secara masif dan kontinyu. Blitar mencatatkan 68 kegiatan sosdiklih yang melibatkan 33.806 pemilih, menunjukkan jangkauan yang sangat luas relatif terhadap ukuran kota (DPT 120.181).

Kota Blitar juga mampu menghasilkan 15 kegiatan kerja sama dengan 1.650 peserta. Sementara ekosistem pemantauan menunjukkan perkembangan dengan 2 pemantau yang menghasilkan 1 laporan. Dengan 7 kategori segmentasi pemilih, Kota Blitar berhasil menjangkau beragam kelompok masyarakat.

Kota Medan (90,25) menempati posisi ketiga dengan pendekatan sangat inklusif dan tersegmentasi. Program unggulan di antaranya seperti sosialisasi kepada pemilih pemula dengan menjadikan siswa sebagai duta sosialisasi di sekolah masing-masing, sosialisasi kepada warga binaan Lapas Kelas I Medan untuk memastikan akses informasi bagi kelompok marginal, dan sosialisasi khusus kepada pemilih disabilitas dan perempuan di kantor PERTUNI Sumatera Utara. Pendekatan targeted ini menunjukkan komitmen terhadap inklusi dan aksesibilitas informasi kepemiluan. Medan mencatatkan 181 kegiatan sosdiklih yang melibatkan 8.500 pemilih, didukung oleh 54 kerjasama formal (tertinggi nasional di level kota) yang menghasilkan 54 kegiatan dengan 2.850 peserta. Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar yang menyelenggarakan Pilkada 2024, Medan menunjukkan bahwa kompleksitas urban dapat dikelola dengan baik melalui kerja sama ekstensif. Dari sisi pemantau, Pilkada Kota Medan mencatatkan 2 pemantau yang menghasilkan 2 laporan. Meski hanya menjangkau 4 kategori segmentasi pemilih, fokus Medan pada kelompok-kelompok spesifik yang sering termarginalkan menunjukkan prioritas pada sementasi tertentu.



Kota Probolinggo (89,56) menempati posisi keempat dengan kekuatan pada kemitraan multi-stakeholder yang sangat ekstensif. KPU Kota Probolinggo membangun kolaborasi strategis dengan beragam lembaga mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, komunitas Ojek Online, hingga institusi pendidikan. Jejaring yang luas ini memungkinkan penetrasi program sosialisasi ke berbagai segmen masyarakat dengan pendekatan yang sesuai karakteristik masing-masing kelompok. Probolinggo mencatatkan 38 kegiatan sosdiklih yang melibatkan 6.750 pemilih. Menariknya, meski tidak memiliki kerja sama formal (0 MoU) dan tidak ada pemantau atau laporan pemantauan, Probolinggo mampu mencatatkan skor sangat tinggi dengan kekuatan pada keberagaman kategori segmentasi pemilih. Capaian ini menggarisbawahi bahwa kolaborasi informal yang baik juga dapat menghasilkan dampak signifikan.

Kota Makassar (88,19) melengkapi lima besar dengan inovasi berbasis aktivitas kemasyarakatan yang kreatif. Program unggulan meliputi “Pilkada Run Menuju TPS” yang mengkombinasikan olahraga dengan edukasi politik, debat pelajar untuk mengasah kemampuan argumentatif generasi muda, jalan santai dan “zikir dan doa bersama” yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan kesadaran politik, “KPU Masuk Sekolah” untuk jangkauan pemilih pemula, hingga “café demokrasi” sebagai ruang diskusi informal. Pendekatan multi-platform ini menunjukkan kreativitas dalam memanfaatkan berbagai momentum kemasyarakatan. Makassar mencatatkan

13 kegiatan sosdiklih yang melibatkan 40.000 pemilih, menunjukkan efektivitas tinggi per kegiatan. Meski tidak memiliki kerja sama formal (0 MoU), Makassar menghasilkan 13 kegiatan kerja sama yang bersifat informal. Dari sisi pemantau, Kota Makassar mencatatkan 1 pemantau yang menghasilkan 1 laporan. Dengan 5 kategori segmentasi pemilih, Makassar mencapai jangkauan yang memadai.

Disparitas skor Sosdiklih Parmas di tingkat kota mencapai 55,22 poin, tertinggi di antara ketiga tingkatan administrasi, namun dengan rata-rata tertinggi (66,75) menunjukkan potensi besar lingkungan urban. Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan dalam kapasitas inovasi, ketersediaan mitra kolaboratif, dan kemampuan memanfaatkan keunggulan infrastruktur urban.

Keberhasilan lima kota teratas menunjukkan bahwa kombinasi antara pemanfaatan teknologi dan media modern (podcast, videotron), integrasi dengan aktivitas kesehatan dan olahraga (senam, jalan santai, lari), pendekatan berbasis komunitas dan keagamaan (zikir, doa bersama, café demokrasi), kemitraan strategis meski informal, dan perhatian khusus terhadap kelompok marginal menjadi praktik baik yang dapat diadaptasi sesuai konteks masing-masing kota.

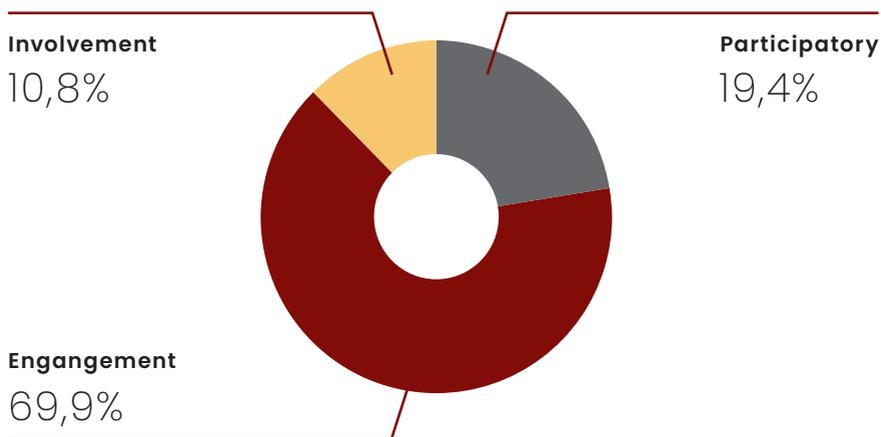


Kondisi ekosistem pemantauan yang masih lemah di tingkat kota dengan 47,3% kota tanpa pemantau menandakan perlunya perbaikan yang memanfaatkan keunggulan urban. Pengembangan model pemantauan berbasis mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi lokal, kolaborasi dengan komunitas lokal, pemanfaatan teknologi untuk menurunkan biaya pemantauan (seperti aplikasi mobile untuk pelaporan), serta pengembangan skema pendanaan mikro untuk pemantauan berbasis komunitas dapat menjadi solusi yang sesuai dengan karakteristik kota. Rendahnya rata-rata kerja sama formal (4,11 MoU per kota) yang kontradiktif dengan ketersediaan mitra potensial di kota menunjukkan perlunya evaluasi mendalam. Fasilitasi kerja sama informal yang lebih terstruktur, penyederhanaan prosedur kerjasama formal, dan pengembangan platform digital yang memfasilitasi koneksi cepat antara KPU Kota dengan mitra lokal dapat mengakselerasi pembangunan ekosistem kolaboratif. Keberhasilan Medan (54 MoU), Cilegon (29 MoU), dan kota-kota lain yang mencatatkan kerjasama tinggi perlu didokumentasikan sebagai best practice yang dapat disebarluaskan.

E. Partisipasi Aktual: Kehadiran Pemilih di TPS

Voter Turnout (VTO) mencatat rata-rata 70,29 di tingkat kota, konsisten dengan provinsi (70,80) dan kabupaten (71,00). Hasil skor variabel VTO menunjukkan masih didominasi oleh kategori *engagement* sebanyak 65 kota (69,9%). Terdapat 18 kota (19,4%) yang mampu menembus kategori *participatory*, sementara kategori *involvement* ditempati oleh 10 kota (10,8%). Capaian ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat urban untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024 tetap terjaga dengan baik, meski menghadapi tantangan spesifik lingkungan perkotaan.

Grafik 54. Distribusi Kategori Variabel VTO Kota

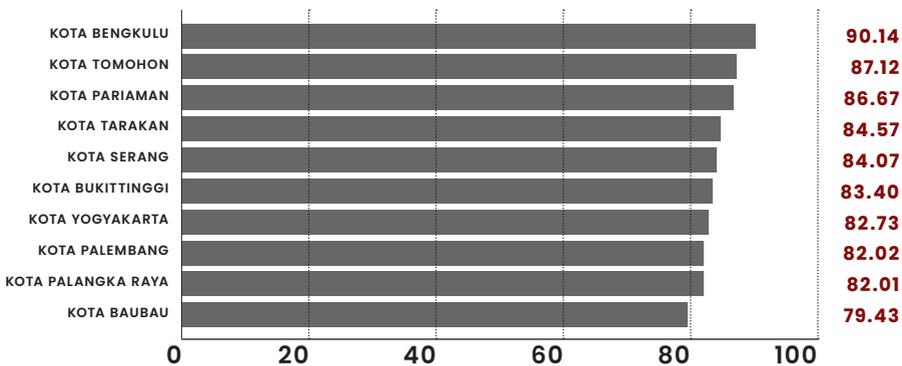


Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024



Kota Bengkulu meraih skor VTO tertinggi dengan 90,14, mencerminkan tingkat partisipasi pemilih yang luar biasa tinggi. Pencapaian ini mengindikasikan efektivitas partisipasi pemilih, aksesibilitas TPS yang baik, dan kemungkinan tingkat kesadaran memilih masyarakat yang tinggi. Sebagai ibu kota provinsi dengan karakteristik semi-metropolitan, Bengkulu berhasil mengkombinasikan keunggulan infrastruktur urban dengan pendekatan mobilisasi yang efektif. Disusul dengan Kota Tomohon di posisi kedua dengan skor 87,12, Kota Pariaman (86,67) di urutan ketiga, Kota Tarakan (84,57) posisi keempat, dan Kota Serang (84,07), Kota Bukittinggi (83,40), Kota Yogyakarta (82,73), Kota Palembang (82,02), Kota Palangka Raya (82,01), serta Kota Baubau (79,43) sebagai penutup 10 besar variabel *Voter Turnout*.

Grafik 55. 10 Besar Skor Variabel Turnout Pilwali 2024



Sumber: Hasil Indeks Partisipasi Pilkada 2024

Total keseluruhan, persentase kota-kota yang masuk dalam masing-masing kategori indeks masih di dominasi oleh kategori *engagement*. Setidaknya terdapat 69,89% kota yang skornya beradalam rentang kategori ini. Sementara itu untuk kategori *participatory* dan *involvement* masing-masingnya ada pada angka 19,4% dan 10,8%. Komposisi ini menjelaskan bahwasannya persentase tingkat partisipasi pilkada di tingkat kota relatif baik.

Sekalipun demikian, rentang skor VTO di tingkat kota mencapai 46,10 poin, berada di antara provinsi (37,76) dan kabupaten (47,15). Variasi ini menunjukkan bahwa meski lingkungan urban umumnya memiliki infrastruktur pemungutan suara yang lebih baik, masih terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan memobilisasi partisipasi pemilih antar kota. Tantangan VTO di lingkungan urban umumnya berkaitan dengan mobilitas penduduk yang tinggi, kesibukan aktivitas ekonomi pada hari pemungutan suara, dan kemungkinan sikap apolitis sebagian masyarakat urban. Sebaliknya, keunggulan urban meliputi aksesibilitas TPS yang lebih baik, infrastruktur transportasi yang memadai, dan umumnya kondisi keamanan yang lebih terjamin. Kota-kota dengan VTO tinggi umumnya berhasil mengatasi tantangan urban sambil mengoptimalkan keunggulan infrastruktur dan aksesibilitas yang tersedia.



Analisis Skor Indeks Partisipasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024 mengungkapkan karakteristik partisipasi politik urban yang unik dengan rata-rata nasional 68,81, sedikit lebih tinggi dari provinsi dan kabupaten. Dari 93 kota, mayoritas (91,4%) berada dalam kategori *engagement* dengan distribusi yang paling merata di antara ketiga tingkatan administrasi. Lima kota mencapai kategori *participatory* (5,4%) dan hanya 3 kota (3,2%) dalam kategori *involvement*, menunjukkan konsistensi capaian yang paling baik.

Keberagaman geografis pada kota-kota berprestasi tinggi dari Tomohon hingga Makassar, Bukittinggi, Cilegon, dan Pariaman, menunjukkan bahwa pencapaian partisipasi pemilihan yang optimal di lingkungan urban dapat dicapai di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, rentang skor terkecil (27,14 poin) mengindikasikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di tingkat kota memiliki variasi yang paling terkendali, mencerminkan keunggulan infrastruktur urban dan kapasitas penyelenggara pemilihan.

Variabel Sosdiklih Parmas menunjukkan capaian tertinggi di tingkat kota (66,75) dibandingkan provinsi dan kabupaten, mengindikasikan bahwa lingkungan urban lebih kondusif untuk program literasi dan kesadaran pilih. Akses yang lebih baik terhadap infrastruktur komunikasi, tingkat literasi yang relatif lebih tinggi, dan keberagaman institusi pendidikan menjadi faktor pendukung utama.

Sebaliknya, variabel Registrasi Pemilih menunjukkan capaian yang sedikit lebih rendah (69,79), mengindikasikan tantangan spesifik urban seperti mobilitas penduduk yang tinggi dan dinamika perubahan domisili. Tantangan ini memerlukan pendekatan registrasi pemilih yang lebih adaptif dan kolaboratif, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi.

Temuan ini menjadi dasar untuk pengembangan strategi peningkatan partisipasi pemilih di tingkat kota yang memanfaatkan keunggulan infrastruktur urban sambil mengatasi tantangan spesifik seperti mobilitas, individualisme, dan kompleksitas *governance* perkotaan. Penguatan Sosdiklih Parmas melalui inovasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat urban dan mendorong partai politik untuk memunculkan kandidat yang kompeten masih menjadi prioritas strategis. Penguatan sistem registrasi pemilih berbasis teknologi dan pengembangan pendekatan kampanye yang substantif dapat memperkuat kualitas partisipasi pada pemilihan mendatang.



6

**Ragam Inovasi
Pendidikan Pemilih
di Penjuru Nusantara**

6.

Ragam Inovasi Pendidikan Pemilih di Penjuru Nusantara

Secara harfiah, partisipasi politik dapat dimaknai sebagai sebuah usaha sadar warga negara untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik maupun kebijakan secara umum. Termasuk dalam agenda-agenda elektoral seperti pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif di tingkat nasional dan daerah. Partisipasi politik secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua bentuk, pertama partisipasi politik konvensional dan kedua partisipasi politik non-konvensional (Ekwenchi, 2014). Partisipasi politik konvensional merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan secara formal dan dilembagakan seperti mengikuti pemilihan umum, mengikuti kampanye politik, atau bergabung anggota partai politik. Sedangkan, partisipasi politik non-konvensional adalah partisipasi politik yang bersifat non formal atau tidak dilembagakan secara resmi seperti melakukan demonstrasi, membuat petisi, melakukan aksi mogok kerja maupun terlibat dalam kampanye digital dan aktivisme digital.

Penulis melihat terjadi pola pergeseran bentuk partisipasi politik publik dari yang konvensional menjadi non konvensional terutama dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi yang mendisrupsi kehidupan masyarakat.

Pergeseran pola partisipasi masyarakat dapat dilihat dari fenomena meningkatnya *vibe* atau geliat partisipasi anak muda membicarakan isu politik di media sosial, mulai tumbuh suburnya berbagai platform atau komunitas digital yang membicarakan isu politik dan kebijakan publik. Namun, disisi yang lain meskipun ada peningkatan tren dan anak muda membicarakan isu politik di media digital, representasi politik anak muda justru berbicara lain. Komisi Pemilihan Umum (KPU), mencatat jumlah pemilih muda jumlahnya mencapai 116,5 juta pemilih atau setara dengan 56% pemilih pada pemilu 2024 merupakan kalangan anak muda. Namun, meskipun anak muda mendominasi daftar pemilih tetap, hal ini tidak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan anak muda dalam pemilu serentak tahun 2024 (Sukmajati et al., 2024). Bahkan data CSIS menunjukkan tingkat keterpilihan caleg yang berusia dibawah 30-40 tahun pada pemilihan anggota legislatif tahun 2024 menurun sebesar 2-3% dari pileg tahun 2019 dengan tingkat keterpilihan sebesar 18,8% (Fernandes et al., 2023).



Meskipun banyak argumen yang dapat menjelaskan fenomena ini, misalnya anggapan yang menilai adanya penurunan jumlah keterpilihan anak muda di legislatif dikarenakan sebagian besar profil caleg muda yang berkontestasi pada pemilu merupakan anak muda yang berasal dari keluarga dinasti sehingga menjadi rasional sebagian besar anak muda tidak mau memilih mereka. Namun, Byung Chul Han berpendapat bahwa partisipasi masyarakat di era digital bisa saja berupa ilusi partisipasi di mana aktivitas politik masyarakat tidak mempengaruhi perubahan politik secara struktural (Han, 2020). Terlebih di era transisi demokrasi tradisional menuju demokrasi digital, influencer politik memainkan peranan penting dalam mempengaruhi partisipasi anak muda terhadap isu politik dan kebijakan publik (Khairuddin, 2025). Dalam pemahaman demokrasi digital ala Han, partisipasi politik yang terlihat aktif, seperti “klik” atau “like” di media sosial, sebenarnya adalah bentuk partisipasi pasif. Ini adalah ilusi partisipasi yang membuat kita merasa terlibat, padahal yang terjadi adalah de-politisasi (Han, 2020b). Isu politik disederhanakan menjadi konten viral, dan perdebatan substansial digantikan oleh penyebaran informasi yang cepat dan dangkal. Oleh karenanya, dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, pendidikan politik berkelanjutan menjadi suatu penting, guna melawan fenomena ilusi partisipasi dan mengarahkannya pada partisipasi politik substantif yang ditopang oleh literasi dan kesadaran politik yang kuat.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah instrumen vital dalam membentuk kesadaran politik warga, yang menjadi prasyarat bagi partisipasi politik yang aktif dan bermakna. Menurut Kimberly Voss dalam artikelnya *Media and Social Movement* (2015), kesadaran politik adalah pemahaman individu terhadap isu-isu dan ideologi yang dibentuk melalui proses konstruksi sosial. Sejalan dengan itu, Mirabath (dalam Binns, 2012) mendefinisikannya sebagai pemahaman yang mendorong individu dan kelompok untuk terlibat dalam aktivitas politik. Dengan demikian, kesadaran dan partisipasi politik memiliki hubungan kausalitas yang tak terpisahkan, kesadaran yang tinggi cenderung menghasilkan partisipasi yang kritis, sementara partisipasi yang pasif dapat mengindikasikan rendahnya kesadaran politik.

Meskipun kesadaran politik bukanlah satu-satunya faktor penentu, perannya sangat signifikan. Tingkat kesadaran ini dibangun melalui kerja-kerja sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, dalam praktiknya, program-program ini sering kali terjebak dalam pendekatan yang terlalu teknis dan prosedural, sehingga gagal menyentuh esensi pendidikan politik yang lebih dalam.



Sebagai lembaga negara yang independen, KPU memiliki posisi strategis untuk memastikan pendidikan pemilih berjalan berkualitas dan mendorong peningkatan kesadaran politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menegaskan peran krusial KPU dalam menyelenggarakan pemilu secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, KPU memiliki mandat untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program sosialisasi dan pendidikan pemilih secara holistik. Indikator keberhasilan dari program ini bukan hanya pada angka partisipasi, melainkan pada keterlibatan masyarakat yang aktif dan partisipasi yang bermakna di setiap tahapan pemilu.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang efektif berupaya mendorong partisipasi yang bermakna di setiap tahapan pemilu. Untuk mencapai tujuan ini, strategi yang digunakan haruslah kontekstual dan efektif, dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Aspek-aspek tersebut meliputi tipologi wilayah, apakah itu perkotaan atau pedesaan; potret demografi pemilih, seperti pemilih pemula, perempuan, atau disabilitas; kondisi sosial dan budaya setempat; serta konfigurasi politik dan tingkat kompetisi di daerah tersebut. Dalam Keputusan KPU No. 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih mengategorikan program menjadi dua bentuk:

1. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Langsung: Metode ini menekankan interaksi tatap muka dan pembangunan hubungan personal. Rincian kegiatan mencakup diskusi kelompok, pertemuan formal dan informal, acara sosial, kunjungan lapangan, serta kolaborasi dengan komunitas lokal. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya untuk membangun koneksi emosional dan memfasilitasi komunikasi dua arah yang lebih kaya.
2. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tidak Langsung: Fokus utama metode ini adalah penyampaian informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. KPU memanfaatkan media massa seperti radio, televisi, dan koran, serta media sosial untuk menjangkau audiens secara lebih luas dan efisien. Berbagai metode kreatif dapat diterapkan, seperti membuat jingle Pilkada yang informatif atau mengoptimalkan platform media sosial dengan konten yang menarik.

Penting untuk dicatat bahwa kombinasi dari kedua bentuk sosialisasi ini, disesuaikan dengan kebutuhan lokal, akan menghasilkan dampak yang optimal dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih. Bab ini akan mengulas secara mendalam strategi dan inovasi yang telah dikembangkan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten di Indonesia dalam menerapkan pendekatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang kontekstual.



6.1 Sinergi Pusat dan Daerah

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 menuntut adanya sinergi yang kuat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat dengan KPU di tingkat daerah. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan program sosialisasi dan pendidikan pemilih berjalan secara terstruktur, terarah, dan memiliki dampak yang luas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya instruksi atau dorongan dari KPU RI, KPU daerah dapat mengimplementasikan program-program yang seragam namun tetap adaptif terhadap konteks lokal.

Salah satu bentuk sinergi ini terlihat dari adanya program kerja yang bersifat instruksi atau dorongan dari KPU RI kepada KPU daerah. Dua contoh nyata dari program ini adalah “Nobar Film” dan “Pilkada *Run*”. Program Nobar Film bertujuan untuk menyajikan pendidikan politik melalui media yang lebih santai dan mudah dicerna, khususnya bagi pemilih pemula dan kaum muda. Film-film bertema demokrasi atau pemilu yang ditayangkan menjadi medium yang efektif untuk memicu diskusi dan refleksi tentang pentingnya partisipasi politik. Sementara itu, Pilkada *Run* memanfaatkan kegiatan olahraga yang populer untuk menarik partisipasi masyarakat secara massal. Dengan menyisipkan pesan-pesan pemilu dan demokrasi di tengah acara lari, KPU berhasil menjangkau audiens yang lebih luas, di luar kelompok yang secara tradisional aktif dalam kegiatan politik.

Melalui program-program terpusat ini, KPU RI memastikan bahwa pesan-pesan kunci tentang pemilu tersampaikan secara konsisten di seluruh Indonesia. Pada saat yang sama, KPU daerah memiliki ruang untuk mengadaptasi pelaksanaan program agar relevan dengan karakteristik dan budaya masyarakat setempat. Sinergi ini mencerminkan model kolaborasi yang efektif: adanya visi strategis dari pusat yang diterjemahkan menjadi aksi nyata dan kontekstual oleh KPU di daerah, sehingga upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi lebih terpadu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

A. Pilkada *Run*

Inovasi selanjutnya adalah Pilkada *Run* sebuah pendekatan yang memadukan politik dan aktivitas keolahragaan yakni "*Run*" atau Lari. Meskipun politik dan sports atau olahraga seringkali dianggap dua kutub yang berbeda namun pada titik tertentu keduanya memiliki kesamaan yakni semangat kompetisi (Strenk, 1979). Dalam konteks politik, kompetisi yang dimaksud adalah sebuah upaya untuk mendapatkan kepercayaan warga yang dilakukan oleh peserta pemilu baik kandidat maupun partai politik. Sedangkan dalam olahraga kompetisi seringkali diasosiasikan sebagai sebuah aktivitas fisik yang diperlombakan dengan tujuan memberikan hiburan pada masyarakat dan motivasi untuk hidup lebih sehat.



Secara historis relasi keduanya tidak dapat dipisahkan, bahkan pada momen tertentu aktivitas keolahragaan sangat kental dengan unsur politik (Meeuwssen & Kreft, 2023). Misalnya berkaitan dengan nama besar suatu negara, bentuk diplomasi politik antar negara lewat olimpiade dan sebagainya. Namun, konsep Pilkada Run bukan mengarah pada dimensi tersebut. Akan tetapi Pilkada Run sebagai sebuah inovasi mencoba menginternalisasi semangat kompetisi dalam aktivitas keolahragaan seperti sportivitas, kerja sama, disiplin, tanggung jawab, dedikasi, kejujuran, keadilan, fair play, rasa hormat, serta ketahanan (Gómez et al., 2010). Dimana nilai-nilai tersebut juga menjadi harapan dan tujuan suatu penyelenggaraan pemilu yakni **LUBER JURDIL** yaitu Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Kegiatan Pilkada *Run* di Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat tema “Berlari Menuju TPS” sebuah tema yang bertujuan menanamkan kesadaran kepada pemilih untuk mau berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada 18 Agustus 2024 di kawasan Telkom Pettarani, Makassar, kegiatan ini juga melibatkan komunitas lari dan masyarakat umum. Kegiatan ini berhasil menarik minat warga dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin dan pendidikan. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil membawa warna baru dalam kegiatan pendidikan politik di masyarakat dan secara tidak langsung KPU berhasil menjangkau kelompok pemilih yang selama ini tidak terjangkau melalui metode sosialisasi konvensional.

B. Nobar “Tepatilah Janji”

Gambar 1. Dokumentasi Gala Premiere



Sumber: Humas KPU RI

Film Tepatilah Janji merupakan hasil kolaborasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dengan insan perfilman di Indonesia. Film ini disutradarai oleh Garin Nugroho dan dibintangi oleh nama-nama besar aktor dan aktris Indonesia seperti Ibnu Jamil, Cut Mini, Shenina Cinnamon, Bimo Zeno, Kebin Abani dan lain-lain (Indra Purnama, 2024).



Sepanjang Oktober - November 2024 KPU Provinsi dan Kabupaten di Indonesia mengadakan serangkaian kegiatan nobar film ini di berbagai lokasi strategis seperti kampus, sekolah dan pondok pesantren (Sairil Ashar et al., 2025). Selain melakukan pemutaran film kegiatan nobar juga diselingi dengan kegiatan diskusi dan dialog bersama perwakilan KPU, pendidik dan peserta. Sekali lagi ini membawa warna baru dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu mulai dari pusat hingga daerah.

6.2 Kopi, Kampus, dan Kotak Suara: Kreativitas Sulawesi Selatan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024 merupakan salah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi baik diukur berdasarkan jumlah pemilih, demografis pemilih maupun aspek geografis serta kondisi sosial dan budaya. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten/kota yang terbagi kedalam 2 tipologi wilayah ada wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah pemilih tetap dalam Pilgub Sulsel 2024 berjumlah 6.680.807 pemilih yang tersebar di 313 kecamatan, 3.059 kelurahan/desa, dan dilaksanakan di 14.548 Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Sairil Ashar et al., 2025).

Dari aspek profil pemilih khususnya komposisi gender, pemilih di Sulawesi Selatan di dominasi oleh pemilih perempuan yang berjumlah 3.429.296 orang atau setara dengan 51,3% dibandingkan dengan pemilih laki-laki yang berjumlah 3.251.511 orang atau setara dengan 48,7% (Sairil Ashar et al., 2025). Selain itu, menurut Sairil Ashar dkk (2025) distribusi pemilih di Sulawesi Selatan juga tidak merata, wilayah perkotaan seperti Kota Makassar menjadi pusat konsentrasi pemilih lebih kurang 15,5% pemilih ada di Kota Makassar.

Karenanya, sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan alat penting untuk menciptakan pemilu yang inklusif dan demokratis. Untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2024, KPU Sulawesi Selatan menjadikan strategi sosialisasi sebagai cara utama untuk meningkatkan kesadaran politik, terutama di tengah kondisi geografis dan sosiokultural yang beragam. Tujuannya adalah pendidikan pemilih yang tidak hanya memberi informasi, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, baik dari segi jumlah maupun makna. Hal ini sejalan dengan pandangan ilmuwan politik Pippa Norris, yang berpendapat bahwa pendidikan pemilih adalah fondasi bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan (Norris, 2000).



Realitas ini menuntut KPU untuk mengadopsi model sosialisasi yang luwes dan adaptif. Di wilayah daratan, pendekatan massal seperti kampanye publik dan sosialisasi di ruang-ruang komunal relatif efektif. Namun, di wilayah kepulauan, model ini menjadi tidak relevan. Keterbatasan aksesibilitas dan tantangan logistik mengharuskan KPU untuk mengandalkan strategi yang lebih personal, seperti penggunaan transportasi laut untuk menjangkau setiap pulau dan pembentukan simpul-simpul relawan di tingkat desa.

Selain tantangan fisik, Sulawesi Selatan juga memiliki lanskap sosiokultural yang kaya, yang turut menjadi pertimbangan utama. Masyarakatnya merupakan perpaduan dari berbagai suku terutama Bugis, Makassar, dan Toraja yang masing-masing memiliki sistem nilai, bahasa, dan struktur sosial yang kuat. Oleh karena itu, pesan-pesan kepemiluan tidak cukup disampaikan secara formal melalui regulasi, melainkan harus dikomunikasikan melalui medium yang selaras dengan kearifan lokal. Pendekatan ini mengakui bahwa kepatuhan terhadap norma adat sering kali lebih kuat daripada kepatuhan terhadap aturan formal. Dengan demikian, kolaborasi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin komunitas menjadi krusial.

Pendekatan penyusunan program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang KPU Provinsi Sulawesi Selatan gunakan adalah pendidikan pemilih berkelanjutan. Pendidikan pemilih berkelanjutan sejatinya merupakan pendidikan pemilih yang dilakukan secara terus menerus serta berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik (Rozuli & Haboddin, 2019). Secara spesifik KPU Provinsi Sulawesi Selatan memperkenalkan program “GREBEG” yaitu Gerakan Pendidikan Pemilih secara Berkelanjutan dan Terintegrasi”. Program ini merupakan adopsi dari visi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat KPU Sulawesi Selatan. **GREBEG** menekankan pendekatan kolaboratif multipihak dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih, program ini melibatkan langsung KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dengan tujuan adanya sinkronisasi dan penyusunan program pendidikan pemilih berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, program **GREBEG** juga memungkinkan bagi penyelenggara pemilu untuk mengikutsertakan berbagai kelompok masyarakat mulai dari Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat Sipil dan instansi lainnya.

Penerapan program **GREBEG** sebagai sebuah pendekatan memungkinkan bagi KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU di seluruh Kabupaten/Kota dapat merancang kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang memperhatikan karakteristik lokal. Seperti melakukan diskusi publik, pelatihan, kampanye, hingga pemanfaatan media sosial. Adapun bentuk bentuk inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang KPU Sulsel susun adalah sebagai berikut

Forkopimda, dinas terkait, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, festival demokrasi ini menjadi momentum penting sekaligus penanda bahwa dimulainya tahapan Pilkada 2024.

Selain melaksanakan kegiatan Launching pada festival demokrasi ini KPU Sulsel memperkenalkan maskot pilgub sulawesi selatan yakni *To Lempuq* yaitu sebuah penanda dan simbol budaya serta nilai integritas. Dalam desain maskot *To Lempuq* digambarkan sebagai sebuah tokoh kartunal berbentuk kotak suara yang mengenakan songkok recca, sebuah songkok khas suku Bugis dan Makassar. Selain itu, *To Lempuq* juga digambarkan mengenakan sarung berwarna keemasan dengan tulisan lontar "Sulawesi Selatan" serta sepasang alas kaki berupa *terompah*.

Selain mengandung makna dan penanda yang baik, proses perancangan maskot ini juga melibatkan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. KPU merancang sebuah sayembara pembuatan maskot yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Sulawesi Selatan tanpa terkecuali, dalam sayembara tersebut terpilih karya Saudara Makmun, M. Pada seorang dosen dan pengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Inovasi KPU Sulawesi Selatan juga tidak berhenti pada sayembara dan pembuatan maskot namun KPU Sulsel juga melengkapi inovasi dengan mengadakan kegiatan Karnaval Maskot sebagai sebuah pendekatan kebudayaan. Karnaval maskot dilaksanakan selama dua hari yakni dimulai dari tgl 2-3 Agustus 2024 di Kota Parepare. Pada kegiatan tersebut 24 maskot dari kabupaten/kota di Sulsel diarak bersamaan di Taman Mattirotasi untuk meningkatkan gairah pesta demokrasi lokal.

B. KKN Tematik Pilkada Untuk Kita

Gambar 3. KKN Tematik KPU dan UNHAS



Sumber: Instagram KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Inovasi lainya yang KPU Sulsel kembangkan adalah melaksanakan KKN Tematik Pilkada Untuk Kita yang berkolaborasi bersama perguruan tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. KPU Sulsel mengajak Universitas Hasanuddin (UNHAS) melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik yang bertemakan Kepemiluan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 3 Juli 2024 di Kota Makassar dengan melibatkan lebih kurang 260 mahasiswa dari berbagai jurusan di Universitas Hasanuddin.

KKN Tematik bertemakan pemilihan merupakan sesuatu yang baru dalam konteks pelaksanaan KKN mahasiswa di Indonesia. Inovasi ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat dikembangkan dengan berbagai pendekatan dan bentuk, melibatkan perguruan tinggi dan mahasiswa setidaknya KPU telah berhasil 2 kelompok pemilih. Pertama adalah mahasiswa dan kedua adalah masyarakat umum, ini merupakan langkah strategis karena secara tidak langsung KPU Sulsel telah memulai ekosistem pendidikan pemilih yang kolaboratif dan berkelanjutan. Sebab selain memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada mahasiswa KPU melalui KKN ini juga memberdayakan mahasiswa untuk dapat menjadi agen-agen demokrasi yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan.

Karena dalam KKN ini mahasiswa akan mendapatkan materi dan pembekalan dari KPU, dosen dan praktisi pemilihan di Sulawesi Selatan yang tentunya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam membicarakan isu demokratisasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Mahasiswa juga ditempatkan secara berkelompok di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan selama 45 hari untuk menjadi agen pendidikan pemilih KPU Sulsel.

Model pendidikan pemilih berkelanjutan semacam ini merupakan praktik baik yang dapat diterapkan dan dikembangkan oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota di Indonesia untuk merancang model pendidikan kolaboratif bersama perguruan tinggi.

C. Café Demokrasi

Gambar 4. Dokumentasi Cafe Demokrasi



Sumber: Humas KPU RI

Tidak berhenti pada Festival Demokrasi, Karnaval Maskot dan KKN Tematik Kepemiluan, KPU Sulsel juga mengembangkan konsep pendidikan pemilih ala Gen-z atau pemilih muda. Café Demokrasi adalah kegiatan pendidikan pemilih yang memadukan pendekatan pendidikan politik dengan pendekatan kreatif dalam menghadirkan ruang publik delibratif pada pelaksanaan Pilgub Sulawesi Selatan tahun 2024. Ruang publik delibratif memainkan peranan penting dalam pendidikan politik

dan kewarganegaraan. Konsep ruang publik deliberatif pertama kali diperkenalkan oleh Jurgen Habermas, yang percaya bahwa ruang publik adalah arena di mana warga negara dapat berkumpul dan berdiskusi untuk membicarakan persoalan kepublikan tanpa ada paksaan dan intimidasi (Eder, 2006; McGuigan, 2016; Smyrniotis & Baisnée, 2023). Dalam konteks ini ruang publik deliberatif tersebut coba diciptakan oleh KPU Sulsel melalui *Café Demokrasi*.

Café Demokrasi menghadirkan gaya pendidikan politik baru di mana menggeser pola pendidikan politik yang bersifat top-down menjadi lebih partisipatif, dimana masyarakat dalam hal ini pemilih dapat berinisiatif memulai diskursus secara santai bersama penyelenggara pemilu, pemangku kebijakan, media, komunitas termasuk pemilih muda. Dalam perjalanannya KPU Sulsel telah berhasil menyelenggarakan *Café Demokrasi* sebanyak 9 sesi yang menargetkan audiens yang berbeda-beda. Selain itu, model pendidikan politik *Café Demokrasi* juga dikembangkan oleh KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

D. Kampanye Digital

Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh KPU Sulsel adalah menghadirkan pendidikan pemilih melalui platform digital. Mulai dari merancang kampanye digital, memproduksi konten digital seperti podcast dan webinar serta membuat gerakan ajakan untuk memilih dengan cara membuat lomba swafoto di TPS. Inovasi ini dihadirkan tentunya berdasarkan kesadaran bahwa adanya era disrupsi yakni perkembangan

teknologi dan informasi secara masal dalam praktik kehidupan masyarakat (White et al., 2023). Tujuan KPU selain meningkatkan antusiasme pemilih untuk datang ke TPS, pendekatan ini juga menyasar kelompok pemilih yang lebih yang mungkin saja belum terjangkau secara optimal melalui pendekatan konvensional.

E. Pagelaran Seni dan Talkshow

Gambar 5. Dokumentasi Pagelaran Seni Budaya dan UMKM



Sumber: Instagram KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Inovasi yang tidak kalah menarik yang KPU Sulsel kembangkan adalah mengkombinasikan pendidikan politik dengan pendekatan kebudayaan. Kegiatan ini bertujuan menyasar kelompok pemilih tradisional dan pegiat seni di Provinsi Sulawesi Utara. KPU Sulsel mengadakan Pagelaran Seni Budaya dan UMKM dengan tema “Pilkada Untuk Kita” yang diselenggarakan pada 21 September 2024 di Taman Pakui, Kota Makassar. Pagelaran ini menampilkan berbagai pertunjukan seni tradisional Sulawesi Utara, seperti tari-tarian, alat musik tradisional, sasatra lisan yang dikombinasikan dengan pesan kepemiluan.

6.3 “Kulak” dan Jambore: Ketahanan Demokrasi Ala Jawa Timur

Di Jawa Timur, partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan sekadar rutinitas, melainkan cerminan interaksi yang kompleks antara dimensi struktural, kultural, dan individual. Menurut Leni (2012) Jawa Timur dengan keragaman budaya yang ada, mulai dari kultur Madura di pesisir timur hingga kultur Arek di wilayah Surabaya dan Malang, menuntut pendekatan sosialisasi yang adaptif. KPU Jawa Timur telah menyadari pentingnya hal ini, sehingga program pendidikan pemilih yang mereka jalankan seringkali berbasis kearifan lokal, seperti penggunaan bahasa daerah dalam kampanye sosialisasi atau pendekatan komunitas di desa-desa terpencil. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran politik dengan cara yang relevan dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.



Strategi pendidikan pemilih di Jawa Timur dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik demografi yang beragam. Pemilih muda, yang mencakup sekitar 40% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), menjadi sasaran utama karena potensinya yang besar namun seringkali terhambat oleh apatisisme (Mustafa et al., 2024). Untuk mengatasi tantangan ini, KPU gencar melakukan program seperti “KPU Goes to Campus,” menggunakan media sosial, dan membuat konten kreatif agar informasi politik terasa lebih menarik dan mudah dicerna oleh generasi Z dan milenial (Salman & Muhiddin, 2024). Di sisi lain, KPU juga menyadari pentingnya melibatkan kelompok marginal seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Program sosialisasi khusus diadakan untuk mereka, termasuk sosialisasi di pesantren yang juga menysasar santri perempuan, serta penyediaan fasilitas ramah disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dinamika politik di Jawa Timur juga menghadirkan tantangan signifikan yang perlu diatasi. Salah satu isu utama adalah politik uang dan kurangnya literasi politik, terutama di daerah pedesaan, yang membuat masyarakat rentan terhadap praktik-praktik transaksional. Sebagai respons, KPU tidak hanya fokus pada edukasi teknis, tetapi juga mengintegrasikan pesan anti-politik uang dan anti-hoaks ke dalam programnya. Keberadaan tokoh-tokoh karismatik, seperti kyai di pesantren, dimanfaatkan untuk memobilisasi partisipasi yang lebih efektif daripada pendekatan materialistik.

Selain itu, KPU juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat (Ormas) seperti NU dan Muhammadiyah untuk memperluas jangkauan pendidikan pemilih dan membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

KPU Jawa Timur berperan lebih dari sekadar penyelenggara teknis. Mereka memposisikan diri sebagai fasilitator pendidikan yang memberdayakan masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Melalui program berkelanjutan, KPU tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran akan dampak keputusan politik terhadap kehidupan sehari-hari. Namun, upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri. Kolaborasi dengan multi-stakeholder melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, media, dan partai politik menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi demokrasi. Dengan mengukur dampak dari setiap program, KPU dapat terus menyempurnakan strateginya dan memastikan bahwa setiap warga negara di Jawa Timur memiliki akses yang setara terhadap informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.

Dalam sub ini penulis juga akan menguraikan inovasi dan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2024 kemarin.

A. Program “KPU Goes to Campus, School, dan Pesantren”

Gambar 6. Dokumentasi KPU JATIM Goes To Pesantren



Sumber: Humas KPU RI

Program “KPU Goes to Campus, School, dan Pesantren” merupakan strategi untuk menjangkau pemilih pemula dan generasi muda yang merupakan mayoritas dalam DPT. KPU menyelenggarakan seminar, diskusi panel, dan tanya jawab di universitas, sekolah, dan pesantren untuk memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme politik, hak pemilih, serta dampak keputusan politik terhadap kehidupan mereka. Dalam perjalanannya KPU

Jawa Timur telah melaksanakan setidaknya 15 kali *Goes To Campus* yang ada disekitar Jawa Timur (Salman & Muhiddin, 2024).

Selain melakukan kunjungan sekolah dan kampus, salah satu inovasi dari bentuk kegiatan kunjungan atau goes to yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur adalah kunjungan pondok pesantren. Sebagaimana diketahui bahwa Jawa Timur merupakan pusat perkembangan pendidikan gaya pesantren di Indonesia, karenanya santri itu sendiri merupakan salah satu kelompok pemilih terbesar di Jawa Timur.

B. Sosialisasi Gelar Seni Budaya

Gambar 7. Poster Gelar Seni Budaya



Sumber: Youtube KPU Provinsi Jawa Timur



Sosialisasi Gelar Seni Budaya adalah inovasi KPU yang menggabungkan pendidikan pemilih dengan kegiatan kesenian lokal, menjadikannya sebuah strategi yang efektif dan relevan. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak dengan memanfaatkan hiburan yang digemari masyarakat. Tujuan utamanya adalah menjangkau pemilih secara lebih luas dan maksimal, khususnya pemilih milenial, dan mencegah mereka menjadi golongan putih (golput).

Acara sosialisasi semacam ini, seperti yang diselenggarakan di Mojokerto dengan menampilkan kesenian bantengan, mengusung tema-tema yang relevan, seperti “Integrasi Keanekaragaman Budaya di Jawa Timur”. Dengan menyisipkan pesan-pesan penting pemilu di tengah pertunjukan seni, KPU berhasil mengubah kegiatan politik yang kaku menjadi acara yang meriah dan mudah diterima. Antusiasme masyarakat, yang terlihat dari ribuan warga yang memadati acara, menunjukkan bahwa pendekatan ini sangat berhasil. Selain itu, pemberian hadiah menarik seperti sepeda motor dan sepeda gunung juga turut memicu minat masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi

C. Jambore Satgas Demokrasi

Gambar 8. Dokumentasi Jambore Satgas Demokrasi



Sumber: Instagram KPU Provinsi Jawa Timur

KPU Jatim menyelenggarakan Jambore Satgas Demokrasi dengan tema “Meneguhkan Peran Intelektual Muda yang Berkarakter dan Berperadaban Unggul dalam Mewujudkan Pemilihan Serentak 2024 Jatim Berintegritas” pada 21 September 2024 di Jatim International Expo (JIE) Convention Exhibition, Surabaya.



Acara ini berawal dari gagasan organisasi mahasiswa Cipayung Plus yang ingin berkontribusi dalam menyukseskan Pemilihan Serentak 2024, tidak hanya sebagai pemilih. KPU Jatim memfasilitasi ide ini dan berkomitmen untuk terus memberikan ruang bagi kaum muda untuk beraktualisasi. Jambore ini bertujuan untuk mengajak masyarakat, khususnya anak muda, untuk mengawal proses pemilihan dan tidak bersikap apatis.

Program ini menunjukkan pendekatan proaktif KPU Jatim dalam menjangkau segmen pemilih muda dan mahasiswa. Dengan memberdayakan organisasi mahasiswa yang sudah terorganisir seperti Cipayung Plus, KPU Jatim berhasil mengubah potensi partisipasi pasif menjadi partisipasi aktif yang terstruktur. Ini bukan hanya sosialisasi satu arah, tetapi juga kemitraan strategis yang memanfaatkan jaringan dan kredibilitas organisasi mahasiswa untuk menyebarkan semangat demokrasi. Program ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pemilih muda sebagai agen perubahan dan pengawas dalam pemilu.

D. Serial Video “KULAK”

KPU Jatim memanfaatkan media sosial untuk strategi sosialisasi tidak langsung dengan meluncurkan serial video berjudul **“KULAK”** (KPU Jatim x Ilmu Komunikasi Unesa). Serial video ini dirilis di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok pada 29 Juni 2024.

Tujuan utama dari program ini adalah memberikan edukasi kepada pemilih di Jawa Timur tentang tahapan pemilu, prosedur pencoblosan, serta pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. KPU Jatim juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Bawaslu Jatim, FISIP UINSA, dan Diskominfo untuk menyelenggarakan talkshow dan podcast sebagai bagian dari upaya sosialisasi yang komprehensif.

KULAK adalah contoh inovasi KPU Jatim dalam beradaptasi dengan era digital. Dengan berkolaborasi bersama universitas dan menggunakan platform media sosial yang populer di kalangan anak muda, KPU Jatim berhasil menyajikan informasi yang sering dianggap kaku menjadi konten yang lebih menarik dan mudah dicerna. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman KPU Jatim terhadap perilaku konsumsi media audiens targetnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan literasi politik dan partisipasi pemilih.

E. Lomba Jurnalistik, Fotografi dan Video

Gambar 9. Poster Pemenang Lomba Foto dan Jurnalistik



Sumber: Instagram KPU Provinsi Jawa Timur

KPU Jatim mengadakan lomba jurnalistik, foto, dan video pada bulan Desember sebagai upaya sosialisasi yang kreatif dan partisipatif. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjangkau karya-karya kreatif terkait Pemilihan Serentak.

Proses penjurian dilakukan secara bertahap, mulai dari pengecekan kesesuaian tema, kualitas visual atau tulisan, hingga akurasi informasi dan etika jurnalistik. Pemenang diumumkan melalui media sosial. Salah satu karya foto pemenang adalah jepretan Darmono. KPU Jatim juga menyelenggarakan lomba kartun dengan persyaratan memposting karya di media sosial masing-masing peserta.

Lomba ini merupakan cara yang efektif untuk mengubah masyarakat dari sekadar objek sosialisasi menjadi subjek yang aktif memproduksi konten. Dengan mendorong partisipasi kreatif, KPU Jatim tidak hanya mendapatkan materi sosialisasi yang beragam, tetapi juga secara tidak langsung memperluas jangkauan pesannya melalui media sosial para peserta. Lomba ini juga membantu menciptakan narasi positif tentang pemilu dan demokrasi yang disebarkan langsung oleh masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih otentik dan kuat.

6.4 Rabu Bacarita: “Ruang” penjaga demokrasi di Tomohon

KPU Kota Tomohon telah merancang program sosialisasi yang memanfaatkan kearifan lokal sebagai strategi utama untuk menjangkau masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam Pilkada 2024. Pendekatan ini merupakan respons terhadap tantangan sosialisasi yang seringkali bersifat satu arah, kaku, dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari warga. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan sosial yang mengakar, KPU Tomohon berupaya membangun kesadaran politik yang lebih dalam, yang tidak hanya terbatas pada pemahaman teknis prosedural pemilihan. Strategi ini sangat penting untuk mengatasi apatisme politik dan memastikan bahwa masyarakat merasa terhubung dan memiliki rasa kepemilikan terhadap proses demokrasi.



A. Rabu Bacarita

Salah satu program unggulan yang mencerminkan pendekatan ini adalah Rabu Bacarita. Program ini merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara rutin setiap hari Rabu oleh KPU Kota Tomohon bersama PPK dan PPS. Secara teknis, mereka mengunjungi pusat-pusat keramaian warga seperti pasar, terminal, atau tempat publik lainnya untuk berdiskusi langsung mengenai pemilihan kepala daerah. Nama “Bacarita,” yang berarti “bercerita” atau “berdiskusi” dalam bahasa setempat, secara eksplisit menunjukkan esensi komunikasi dua arah dan dialog yang menjadi inti program ini. Melalui pendekatan ini, KPU tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menciptakan ruang bagi warga untuk bertanya, menyampaikan kekhawatiran, dan berinteraksi secara personal dengan penyelenggara pemilu.

Program Rabu Bacarita ini dapat dianalisis menggunakan model komunikasi interpersonal dan teori difusi inovasi. Dalam konteks ini, PPK dan PPS bertindak sebagai agen difusi yang menyebarkan informasi secara langsung dan persuasif. Komunikasi tatap muka memungkinkan KPU untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas, yang sulit dicapai melalui media sosialisasi tidak langsung. Efektivitas program ini juga terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan ritme kehidupan masyarakat. Kunjungan ke pusat keramaian di luar jam kerja formal memastikan bahwa sosialisasi dapat menjangkau berbagai segmen pemilih, dari pedagang hingga pekerja harian, tanpa mengganggu aktivitas ekonomi mereka.

Dengan demikian, Rabu Bacarita menjadi contoh sukses dari inovasi sosialisasi yang kontekstual dan efektif. Program ini berhasil memutus jarak antara lembaga penyelenggara dan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, dan membangun jembatan antara demokrasi formal dengan praktik sosial sehari-hari. Inovasi ini menunjukkan bahwa untuk mencapai partisipasi pemilih yang bermakna, pendekatan yang berfokus pada dialog, adaptasi budaya, dan keterlibatan komunitas merupakan strategi yang sangat menjanjikan.

6.5 KPU x OSIS: Menyemai Agen Demokrasi Muda di Kabupaten Bima

KPU Kabupaten Bima telah merancang beragam inovasi program sosialisasi dan pendidikan pemilih, yang sebagian besar merupakan hasil kolaborasi dengan KPU provinsi. Inovasi ini sangat penting untuk mengatasi tantangan geografis dan keterbatasan waktu dalam menjangkau seluruh wilayah. KPU Bima secara proaktif mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana utama untuk menyebarkan informasi dan edukasi politik, khususnya untuk menjangkau pemilih di wilayah-wilayah yang tidak dapat diakses secara langsung.

A. KPU X Pemilihan Ketua OSIS

Gambar 10. Dokumentasi KPU X Pemilihan Ketua OSIS



Sumber: KPU Kabupaten Bima

Salah satu program inovatif yang digagas oleh KPU Kabupaten Bima adalah menjadi fasilitator dan mentor bagi sekolah-sekolah yang sedang menyelenggarakan pemilihan OSIS. Dalam program ini, KPU membimbing seluruh tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Tujuannya adalah memberikan miniatur atau gambaran nyata dari proses pemilu dan demokrasi kepada para pelajar. Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik sejak dini, memperkenalkan nilai-nilai demokrasi seperti kejujuran, keadilan, dan partisipasi, serta mempersiapkan mereka sebagai calon pemilih masa depan yang kritis dan bertanggung jawab.

Inovasi ini juga mencerminkan sinergi antara KPU pusat dan daerah. KPU RI mendorong program-program terpusat seperti “Nobar Film” dan “Pilkada Run” yang kemudian diadaptasi dan diimplementasikan oleh KPU daerah, termasuk di Kabupaten Bima. Program-program seperti ini memastikan bahwa pesan-pesan utama tentang pemilu dan demokrasi tersampaikan secara konsisten di seluruh Indonesia. Pada saat yang sama, KPU Kabupaten Bima menggunakan otonomi mereka untuk menyesuaikan program tersebut dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, menciptakan pendekatan yang efektif dan relevan.

Gambar 11. Dokumentasi KPU X Pemilihan Ketua OSIS



FASILITASI KEGIATAN PEMILIHAN KETUA OSIS DI SMAN 1 LAMBU KABUPATEN BIMA

Sumber: KPU Kabupaten Bima



Selain itu, KPU Kabupaten Bima juga secara aktif memanfaatkan platform media sosial untuk edukasi politik. Dengan keterbatasan waktu dan wilayah yang luas, media sosial menjadi alat yang efisien untuk menyebarkan informasi tentang tahapan Pilkada, kandidat, dan pentingnya menggunakan hak pilih. Strategi ini memungkinkan KPU untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, terutama pemilih muda yang dominan menggunakan media digital, dan membangun komunitas online yang peduli terhadap isu-isu demokrasi. Pendekatan digital ini menjadi pelengkap yang kuat bagi sosialisasi langsung, memastikan jangkauan pesan yang maksimal.

6.6 Secangkir Kopi untuk Demokrasi: Adaptasi Pendidikan Pemilih di Kota Makassar

KPU Kota Makassar mengadopsi pendekatan sosialisasi terintegrasi yang mengakomodasi karakteristik kota urban dengan beragam etnis. Program-program mereka dirancang sebagai respons terhadap era transparansi dan perkembangan teknologi informasi yang menuntut lembaga publik untuk memberikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Roadmap sosialisasi KPU Makassar menunjukkan serangkaian program yang komprehensif, mulai dari acara masif seperti Kirab Pilkada dan Pilkada Run hingga inisiatif yang lebih terfokus seperti Podcast dan Rumah Pintar Pilkada. Di antara berbagai inovasi ini, program Cafe Demokrasi menjadi contoh nyata dari pendekatan yang menyorot segmen pemilih secara spesifik.

A. Café Demokrasi

Gambar 12. Dokumentasi Cafe Demokrasi



CAFÉ DEMOKRASI
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERSAMA
KOMUNITAS PEDULI LINGKUNGAN
“PILKADA RAMAH LINGKUNGAN”

Sumber: KPU Kota Makassar

Cafe Demokrasi adalah inovasi sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berbeda dengan sosialisasi konvensional di ruang formal, program ini menciptakan ruang diskusi yang santai dan akrab. Nama “Cafe Demokrasi” sendiri mengindikasikan suasana informal, yang bertujuan untuk memutus jarak antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Sasaran utama dari program ini adalah pemilih pemula atau pemilih muda, yang seringkali lebih responsif terhadap pendekatan yang tidak kaku dan interaktif.



Di sini, KPU tidak hanya bertindak sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membuka dialog tentang isu-isu Pilkada.

Secara strategis, Kafe Demokrasi adalah langkah adaptif KPU Makassar untuk membangun citra positif dan kredibilitas di tengah masyarakat urban. Dengan memanfaatkan lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian dan tempat berkumpul anak muda, seperti kafe, KPU berhasil menyampaikan pesan-pesan pemilu dengan cara yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, di mana pemilih dapat secara langsung bertanya, menyampaikan aspirasi, dan mendapatkan klarifikasi mengenai tahapan pemilihan atau isu-isu terkait. Hal ini sangat penting untuk melawan misinformasi dan membangun pemahaman yang benar tentang proses demokrasi. Inovasi ini, bersama dengan program-program lain seperti Lomba Debat Pilkada dan KPU Goes to (Pasar/Sekolah/Kampus), memperlihatkan komitmen KPU Kota Makassar untuk memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Gambar 13. Dokumentasi Cafe Demokrasi



Sumber: Instagram KPU Makassar

Program Kafe Demokrasi secara khusus berkontribusi pada upaya KPU Makassar untuk mencapai target partisipasi pemilih yang tinggi dan mempertahankan kota ini sebagai “Zona Hijau” dalam hal Pilkada. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai alat sosialisasi, tetapi juga sebagai jembatan untuk memperkuat partisipasi publik yang bermakna dan berkelanjutan.

6.7 Ruang, Alam, dan Desa Demokrasi: Inisiatif Kepulauan Selayar

Partisipasi pemilih di Kepulauan Selayar memiliki karakteristik yang kompleks dan multidimensional, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang jauh melampaui teknis pemilihan. Dinamika politik lokal, mulai dari Pemilu hingga Pilkada, sangat dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu isu geografis yang berakar pada distingsi antara “To Pulo” (masyarakat pulau) dan “To Daratan” (masyarakat daratan).



Pemisahan ini, yang telah ada sejak Orde Baru, telah berkembang dari sekadar masalah geografis menjadi alat perjuangan politik yang kuat. Di pihak “To Pulo,” istilah ini sering digunakan untuk memobilisasi dukungan yang berlandaskan pada sentimen primordialisme dan isu-isu ketidaksetaraan pembangunan. Sebagaimana dijelaskan oleh penelitian Abu Bakar (2015) dan Dwi Indriani (2015), dinamika ini menunjukkan tiga pola utama. Pertama penguatan identitas di masa kontestasi, Identitas “To Pulo” dan “To Daratan” menjadi sangat menonjol saat keduanya berhadap-hadapan dalam arena politik, meskipun sentimen ini cenderung meredam setelah kontestasi selesai. Kedua, konflik yang meluas: Pertentangan ini tidak terbatas pada Pilkada, tetapi juga merambah ke perebutan jabatan publik. Ketiga, Visi Politik yang Belum Stabil: Pergeseran orientasi politik di kalangan “To Pulo” menunjukkan bahwa aspirasi mereka belum terwujud sepenuhnya, bahkan ketika perwakilan mereka berhasil memegang kekuasaan.

Dengan konteks semacam ini menjadi landasan mengapa inovasi KPU Selayar tidak dapat sekadar fokus pada sosialisasi teknis, melainkan harus menyentuh akar permasalahan partisipasi pemilih. Inovasi seperti Grebek Desa dan Camping Pilkada hadir sebagai respons strategis untuk menjembatani kesenjangan ini, mengubah pemilih pasif menjadi pemilih yang kritis, serta mengangkat isu-isu yang relevan dengan realitas lokal.

A. Grebek Desa

Gambar 14. Dokumentasi Grebek Desa



Sumber: KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Grebek Desa merupakan sebuah inovasi program atau kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Badan Adhoc yakni PPK dan PPS. Mereka melakukan kegiatan sosialisasi secara Door to Door atau kunjungan dari rumah ke rumah untuk menginformasikan kepada pemilih tentang informasi seputar pilkada seperti waktu pelaksanaan pemilihan, tempat, kandidat dan dokumen pendukung yang harus mereka siapkan ketika melakukan pemilihan.



Selain itu, Grebek Desa dirasa lebih efektif karena pola komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan lebih terfokus dalam artian menysasar kepada pihak yang ditargetkan. Dari sisi pemilih juga merasa lebih nyaman ketika menerima informasi secara langsung, mereka tidak perlu menghadiri suatu tempat yang membuat mereka harus menghentikan pekerjaannya. Kegiatan Grebek Desa biasanya dilakukan dengan menyesuaikan waktu yang biasanya pemilih telah berada dirumah atau selesai melakukan aktivitasnya.

Inovasi ini mencerminkan pendekatan partisipasi yang berakar pada komunitas. Alih-alih menganggap pemilih sebagai audiens pasif yang harus datang ke tempat sosialisasi, Grebek Desa memposisikan mereka sebagai aktor aktif dalam proses demokrasi. Dengan menemui mereka di lingkungan tempat tinggal, program ini menunjukkan bahwa partisipasi politik dimulai dari tingkat yang paling mendasar, yaitu rumah tangga dan komunitas. Pendekatan ini memperkuat ikatan sosial dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap Pilkada. Hal ini juga dapat meminimalisir kendala seperti keterbatasan akses transportasi dan biaya, yang sering menjadi hambatan bagi pemilih di daerah terpencil.

B. Kemah Demokrasi

Kemah Demokrasi pada 20-21 November 2024 di Puncak Tanadoang menjadi wadah kreatif untuk memperkuat pemahaman demokrasi melalui kegiatan luar ruangan, dengan peserta sebanyak 100 orang. Inovasi seperti Kemah Demokrasi menjadi sangat relevan dalam konteks Pilkada di Kepulauan Selayar karena mengatasi beberapa tantangan klasik dalam sosialisasi pemilih. Pendekatan ini berhasil memecah kebekuan yang sering terjadi pada metode konvensional, di mana pendidikan politik cenderung bersifat satu arah, kering, dan prosedural. Dengan memindahkan kegiatan ke ruang terbuka, program ini mengubah pembelajaran menjadi pengalaman yang partisipatif dan tidak membosankan.

6.8 Camping Demokrasi: Inovasi Hijau dari Ujung Utara Negeri

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud merancang tiga inovasi utama untuk menjawab tantangan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya suara dalam demokrasi. Melalui integrasi pendidikan politik, advokasi lingkungan, dan pendekatan budaya, KPU Talaud berupaya menciptakan ekosistem pemilu yang inklusif dan berkelanjutan.



Dalam konteks Pilkada di Indonesia, sosialisasi dan pendidikan pemilih di wilayah kepulauan dan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) memiliki tantangan unik dan multidimensional. Wilayah ini ditandai oleh kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang terbatas, dan dinamika sosial-budaya yang khas, yang semuanya memengaruhi efektivitas program sosialisasi KPU.

Kondisi geografis yang sulit menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan sosialisasi. Akses antar-pulau yang sulit, ombak besar, dan arus yang kuat membuat perjalanan menjadi sulit dan berbahaya. Hal ini tidak hanya memengaruhi penyebaran informasi, tetapi juga pendistribusian logistik dan teknis lainnya.

Selain itu, banyak pemilih di wilayah kepulauan dan 3T bermigrasi ke kota untuk mencari lapangan kerja atau pendidikan yang lebih baik, sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, masalah data ganda, pemilih yang tidak valid, dan pemilih yang sudah meninggal juga masih menjadi isu yang sering ditemui.

A. *Camping* Pilkada Ramah Lingkungan

Gambar 16. Dokumentasi *Camping* Pilkada Kepulauan Talaud



Sumber: Instagram KPU Kepulauan Talaud

Inovasi *Camping* Pilkada muncul sebagai respons terhadap minimnya perhatian para kandidat terhadap isu lingkungan. Sebuah studi oleh *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 12% partai politik di Indonesia yang memasukkan agenda lingkungan dalam platform pemilu mereka pada tahun 2019. KPU Kepulauan Talaud memanfaatkan momentum Pilkada 2024 untuk mengubah paradigma ini dengan melibatkan 15 komunitas pencinta alam dalam kegiatan kampanye yang ramah lingkungan.

Melalui program ini, KPU Talaud menyelenggarakan workshop pengelolaan sampah dan penggunaan bahan daur ulang untuk atribut kampanye. Tujuannya tidak hanya mensosialisasikan tahapan pemilu, tetapi juga mendorong kandidat untuk mengadopsi visi lingkungan dalam platform politik mereka.

Partisipasi 1.200 aktivis lingkungan dalam acara ini menjadi bukti bahwa isu lingkungan dapat menjadi alat mobilisasi politik yang efektif. CSIS Indonesia (2022) menegaskan bahwa “koalisi hijau” antara penyelenggara pemilu dan komunitas lingkungan berpotensi mendorong kebijakan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan demikian, Camping Pilkada bukan hanya strategi sosialisasi, tetapi juga sebuah investasi politik untuk masa depan ekologis Kepulauan Talaud.

B. KPU FUN RUN & LINE DANCE

Gambar 17. Dokumentasi FUN RUN & Line Dance



Tambahkan sumber: Instagram KPU Kepulauan Talaud

KPU Talaud memanfaatkan kekuatan budaya lokal melalui KPU *FUN RUN & LINE DANCE* untuk menjangkau masyarakat yang apatis terhadap politik formal. Kegiatan ini mengadopsi filosofi “Porodisa Betagaya” nilai kebersamaan masyarakat Talaud dalam bentuk lari santai dan tarian massal yang diikuti 3.000 peserta dari berbagai latar belakang (KPU Talaud, 2023). Pesan pemilu disisipkan dalam gerakan tarian dan jingle “Singgawe Tarlih”, yang menjadi simbol kampanye partisipatif.

Untuk menarik minat generasi muda, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga mengadakan kegiatan kreatif dan inovatif seperti KPU *FUN RUN & LINE DANCE*. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mensosialisasikan tahapan Pilkada, tetapi juga untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan partisipatif.





7

**Penutup: Menuju
Partisipasi Masyarakat
yang Bermakna di Pilkada**

7.

Penutup: Menuju Partisipasi Masyarakat yang Bermakna di Pilkada

7.1 Kesimpulan

Perjalanan panjang menyusun Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 telah membawa kita melampaui sekadar angka dan peringkat. IPP Pilkada, sejak awal, dirancang bukan sebagai rapor penghakiman, melainkan sebagai cermin reflektif bagi seluruh pemangku kepentingan demokrasi di Indonesia. Setelah mengupas tuntas setiap variabel di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa partisipasi tidak hanya terletak pada tinggi rendahnya pemilih hadir di hari pemungutan suara, melainkan pada kualitas keterlibatan publik di sepanjang tahapan. Bagian penutup ini akan menyintesis seluruh temuan kunci, menawarkan refleksi, dan merumuskan rekomendasi strategis untuk masa depan demokrasi lokal kita.

Secara keseluruhan, hasil Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 menunjukkan sebuah potret partisipasi yang konsisten secara nasional, dengan skor rata-rata di tingkat provinsi (68,21), kabupaten (68,09), dan kota (68,81) yang seluruhnya berada dalam kategori *engagement*. Angka ini menandakan bahwa proses pilkada di Indonesia telah berjalan pada level yang cukup baik, di mana partisipasi publik telah melampaui sekadar atensi dan masuk ke dalam ranah “aksi” atau keterlibatan. Meskipun demikian, konsistensi ini juga menyingkap adanya pola kekuatan dan kelemahan yang bersifat sistemik di setiap tingkatan, baik administrasi, tata kelola maupun penegakan hukum.

Kekuatan utama yang menjadi tulang punggung Pilkada 2024 terletak pada variabel Registrasi Pemilih. Variabel ini secara konsisten menjadi salah satu capaian tertinggi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek teknis-administratif dari penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam proses pemutakhiran data pemilih, telah berjalan dengan solid dan berkualitas di sebagian besar wilayah Indonesia. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting bagi legitimasi proses elektoral, terutama menafasilitasi hak pilih di seluruh negeri.



Namun, di balik fondasi administrasi yang cukup kuat, IPP 2024 secara tegas menunjukkan adanya dua tantangan fundamental yang sama berlakunya di semua tingkatan yaitu variabel Pencalonan dan Sosialisasi & Pendidikan Pemilih (Sosdiklihparmas) secara konsisten menjadi yang terendah. IPP Pilkada 2024 mengungkap temuan penting, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek yang paling substantif dalam proses elektoral dan demokrasi yaitu kualitas kompetisi antar kandidat dan tingkat pemahaman pemilih justru menjadi titik terlemah. Hal ini menandakan bahwa meskipun masyarakat terlibat, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh proses rekrutmen politik yang sehat dan program pendidikan pemilih yang efektif dan berkesinambungan. Keserentakan Pemilu dan Pilkada juga menjadi tantangan dalam melakukan penyebaran informasi secara mendalam dan spesifik dalam tahapan yang berhimpitan.

Secara kelembagaan, KPU telah menunjukkan upaya optimal dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024. Standardisasi regulasi dan sistem kerja dibuktikan dengan menjaga stabilitas kinerja secara nasional, seperti yang tecermin dari skor rata-rata yang relatif konsisten di semua tingkatan.

Temuan-temuan dalam indeks ini memberikan beberapa refleksi teoretis penting. Pertama, IPP 2024 berfungsi sebagai alat ukur empiris untuk melihat pergeseran dari konsepsi *demokrasi elektoral* yang sempit yakni berfokus pada pemungutan suara menuju *demokrasi partisipatoris* yang lebih dalam, di mana kualitas keterlibatan warga di seluruh siklus pemilu menjadi esensial. Kedua, analisis ini mengafirmasi teori *electoral governance* yang memandang pengelolaan pemilu bukan lagi sebagai domain eksklusif negara (penyelenggara), melainkan sebagai arena multi-aktor di mana tanggung jawab terdistribusi di antara peserta pemilu, pemilih, media, dan masyarakat sipil.

7.2 Rekomendasi

Bertolak dari seluruh analisis dan refleksi di atas, berikut adalah tiga rekomendasi utama untuk penguatan partisipasi publik di pilkada mendatang:

1. Memperluas Makna Partisipasi dalam Kerangka Kebijakan: KPU perlu merevisi desain IPP ke depan dengan menguatkan bobot indikator Kualitatif, inovasi, dan deliberatif. Pengukuran tidak boleh berhenti pada “berapa banyak kegiatan”, tetapi harus bergeser ke “seberapa substantif dialog yang terbangun”. Ini akan mendorong Satker di daerah untuk bergeser dari sekadar pemenuhan target kuantitatif menuju penciptaan partisipasi yang bermakna.



2. Membangun Ekosistem Elektoral yang Kolaboratif: Perluasan tanggung jawab pengelolaan elektoral perlu diformalkan. KPU, Bawaslu dan Lembaga/Organisasi terkait di setiap tingkatan direkomendasikan untuk membangun “Pakta Demokrasi Lokal” yang secara formal melibatkan peserta pemilu, media, universitas, dan organisasi masyarakat sipil dalam agenda bersama untuk pendidikan pemilih, pengawasan partisipatif, dan pengelolaan tahapan yang lebih menyertakan keterlibatan multi pihak.

Mengintegrasikan Sistem Penyelenggaraan dan Pengawasan: Untuk memperkuat sinergi, KPU, Bawaslu dan Lembaga/Organisasi terkait perlu mengembangkan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang terintegrasi sejak awal tahapan. Ini mencakup platform data bersama untuk pemutakhiran daftar pemilih, sistem pelaporan pelanggaran yang terhubung, serta kalender kerja dan strategi komunikasi publik yang disusun bersama. Sinergi yang terbangun sejak awal akan menciptakan proses yang lebih solid, efisien, tepercaya dan mendukung peningkatan kualitas elektoral.





DAFTAR PUSTAKA

- Blais, A. (2006). What Affects Voter Turnout? *Annual Review of Political Science*, 9, 111–125. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.9.070204.105121>
- Eder, K. (2006). The Public Sphere. *Theory, Culture & Society*, 23(3), 607–611. <https://doi.org/10.1177/026327640606062705>
- Ekwenchi, O. C. (2014). Youth and Political Apathy: Lessons From a Social Media Platform. *International Journal of Social Sciences and Humanities Reviews*, 4(4), 1–8. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27235.81440>
- Fernandes, A., Suryahudaya, E. G., & Okhtariza, N. (2023). Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis , Adaptif dan Responsif. *Centre Strategic and International Studies (CSIS)*, 8. https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/Pemilih_Muda_Dalam_Pemilihan_Umum_2024.padaef?download=1
- Franklin, M. N. (2004). *Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies Since 1945*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511616884>
- Geys, B. (2006). Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research. *Electoral Studies*, 25(4), 637–663. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2005.09.002>

- Gómez, S., Kase, K., & Urrutia, I. (2010). Value Creation and Sport Management. *Value Creation and Sport Management*, 1–266. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511762765>
- Han, B.-C. (2020a). Infocracy: Digitization and the Crisis of Democracy.
- Han, B.-C. (2020b). Infocracy: Digitization and the Crisis of Democracy. 2, 216–217.
- IFES. (2014). *Gender Equality & Election Management Bodies: A Best Practices Guide*. International Foundation for Electoral Systems. https://www.ifes.org/sites/default/files/migrate/gender_equality_and_emb_best_practices_guide_final_2.pdf
- Indra Purnama, K. (2024). Sinopsis Film Tepatilah Janji Garapan Garin Nugroho. *Tempo.Co*. <https://www.tempo.co/teroka/sinopsis-film-tepatilah-janji-garapan-garin-nugroho-25378>
- Khairuddin. (2025). Partisipasi Politik Anak Muda: Kajian Sosiologis terhadap Aktivisme Digita. *Nusantara: Jurnal Ilmiah Nasional*, 1(1), 22–33.
- Kittilson, M. C., & Anderson, C. J. (2011). Electoral Competitiveness and Turnout in Established and New Democracies. In J. Gandhi & A. M. Ellis (Eds.), *The Politics of Electoral Systems*. Oxford University Press.
- KPU RI. (2021). *Laporan Tahunan KPU RI Tahun 2021*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. <https://www.kpu.go.id/page/read/427/laporan-tahunan>



- Leni, N. (2012). Demokrasi Dan Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur Menurut R. Zuhro, Dkk. *TAPIS*, 8(1), 20–39.
- Lijphart, A. (1997). Unequal Participation: Democracy's Unresolved Dilemma. *American Political Science Review*, 91(1), 1–14. <https://doi.org/10.2307/2952255>
- McGuigan, J. (2016). The Cultural Public Sphere. *European Journal Of Cultural Studies*, 8(4), 427–443.
- Meeuwssen, S., & Kreft, L. (2023). Sport and Politics in the Twenty-First Century. *Sport, Ethics and Philosophy*, 17(3), 342–355. <https://doi.org/10.1080/17511321.2022.2152480>
- Mustafa, R. K., Sairil Ashar, M. A. M., Sari, C. P., Putra, N. K., & Febriana, C. R. (2024). Tren Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada 2024 di Jawa Timur (F. D. Nailufar (ed.)). Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Norris, P. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790980>
- Rozuli, A. I., & Haboddin, M. (2019). Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(2), 129–148. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i2.818>
- Sairil Ashar, M. A. M., Anam, S., Adminanda, R., & Pangau, V. (2025). Mengurai Tren Politik Lokal: Dalam Pilkada Selawesi Selatan Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

- Salman, G., & Muhiddin, S. (2024). Jejak Tinda Demokrasi: Catatan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 di Jawa Timur (D. Widhiandono (ed.)). PT. Disway Rumah Berita.
- Smyrnaio, N., & Baisnée, O. (2023). Critically understanding the platformization of the public sphere. *European Journal of Communication*, 38(5), 435–445. <https://doi.org/10.1177/02673231231189046>
- Strenk, A. (1979). What Price Victory? The world of international sports and politics. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 445(1), 128–140. <https://doi.org/10.1177/000271627944500114>
- Sukmajati, M., Satria, P., Ikhsandi, D. M. R., & Indonesia, A. B. P. E. N. (2024). Potret Dana Kampanye Pada Kampanye Pileg (DPR-RI) 2019–2020 (E. Kurniawan (ed.)). Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- White, G., Dong, D., Campbell, D. E., & Lee, C. D. (2023). The Future of Civic Education: Implications for Research, Policy, and Practice. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 705(1), 249–257. <https://doi.org/10.1177/00027162231193538>
- Nugroho, K., & Liando, F. D. M. (2019). Nilai dan Asas Pemilu. Dalam P. U. Tanthowi, A. Perdana, & M. Sukmajati (Ed.), *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (hal. 23–56). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.



Lampiran: Skor Indeks Partisipasi Pilkada 2024

1. Indeks Partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024

NO	Provinsi	Registrasi Pemilih	Pencalonan	Kampanye	Sosdiklih parmas	VTO	Skor Akhir	Kategori
1	ACEH	61.60	57.00	78.50	67.28	63.64	66.27	Engagement
2	BALI	67.20	56.00	72.50	70.26	69.07	68.31	Engagement
3	BANTEN	58.00	56.00	72.50	71.07	60.79	64.15	Engagement
4	BENGKULU	60.00	77.00	65.00	69.88	60.32	64.77	Engagement
5	DKI JAKARTA	70.50	66.00	69.50	59.69	67.21	66.70	Engagement
6	GORONTALO	79.00	70.00	72.00	74.19	66.83	72.09	Engagement
7	JAMBI	67.00	73.00	65.50	46.69	76.30	66.03	Engagement
8	JAWA BARAT	81.50	86.00	83.50	72.41	70.48	77.22	Engagement
9	JAWA TENGAH	79.50	73.00	84.50	90.31	69.81	79.10	Participatory
10	JAWA TIMUR	84.00	83.00	86.50	89.03	68.88	80.87	Participatory
11	KALBAR	71.00	46.00	67.00	46.97	71.87	63.15	Engagement
12	KALSEL	72.60	61.00	63.50	49.91	68.14	63.74	Engagement
13	KALTENG	71.60	74.00	67.50	70.28	59.37	67.09	Engagement
14	KALTIM	69.60	62.00	64.50	42.09	75.85	64.19	Engagement
15	KALTARA	71.00	71.00	66.00	43.88	70.30	64.36	Engagement
16	KEP. BABEL	63.50	66.00	63.00	57.31	62.81	62.21	Engagement
17	KEPULAUAN RIAU	76.00	57.00	70.00	51.94	77.94	68.67	Engagement
18	LAMPUNG	64.50	61.00	65.00	54.28	53.83	59.01	Involvement
19	MALUKU	84.70	67.00	62.00	61.53	72.15	69.99	Engagement

20	MALUKU UTARA	70.66	73.00	69.00	56.97	77.42	69.85	Engagement
21	NTB	77.50	67.00	81.00	75.41	65.80	73.22	Engagement
22	NTT	79.70	71.00	69.50	69.22	85.81	76.53	Engagement
23	PAPUA	70.00	47.00	65.00	50.88	73.79	64.01	Engagement
24	PAPUA BARAT	74.00	48.00	62.00	52.50	88.83	69.15	Engagement
25	PAPUA BARAT DAYA	76.50	71.00	58.00	56.81	84.88	70.83	Engagement
26	PAPUA PEGUNUNGAN	74.00	60.00	64.00	53.97	77.30	67.58	Engagement
27	PAPUA SELATAN	75.00	69.00	74.00	45.09	78.12	69.15	Engagement
28	PAPUA TENGAH	44.00	49.00	57.50	40.22	51.07	48.57	Involvement
29	RIAU	65.60	54.00	71.00	55.19	63.74	62.88	Engagement
30	SULBAR	67.70	70.00	67.00	59.50	71.43	67.27	Engagement
31	SULSEL	73.50	63.00	74.00	89.19	82.10	78.27	Participatory
32	SULTENG	76.60	72.00	66.50	46.56	77.24	68.30	Engagement
33	SULTRA	83.50	70.00	77.50	50.72	71.54	70.80	Engagement
34	SULUT	78.50	79.00	79.50	81.91	77.21	79.05	Participatory
35	SUMBAR	75.80	62.00	64.00	70.97	70.27	69.44	Engagement
36	SUMSEL	64.50	67.00	64.00	63.00	67.21	65.16	Engagement
37	SUMUT	77.60	57.00	68.50	49.00	70.27	65.80	Engagement
Skor Akhir		71.82	65.16	69.47	60.97	70.80	68.21	Engagement



2. Indeks Partisipasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024

NO	Provinsi	Registrasi Pemilih	Pencalonan	Kampanye	Sosdiklih parmas	VTO	Skor Akhir	Kategori
1	KABUPATEN ACEH BARAT	74.00	59.00	62.00	61.75	61.35	63.85	Engagement
2	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	70.10	48.00	64.00	61.75	62.27	62.65	Engagement
3	KABUPATEN ACEH JAYA	65.00	84.00	58.50	44.09	56.57	58.89	Involvement
4	KABUPATEN ACEH SELATAN	69.10	54.00	65.50	42.47	59.25	58.59	Involvement
5	KABUPATEN ACEH SINGKIL	72.50	67.00	72.00	59.06	68.06	67.83	Engagement
6	KABUPATEN ACEH TAMIANG	68.50	44.00	61.00	52.31	58.33	58.26	Involvement
7	KABUPATEN ACEH TENGAH	72.00	74.00	64.00	63.78	68.60	67.93	Engagement
8	KABUPATEN ACEH TENGGARA	66.50	52.00	62.00	52.31	72.07	62.98	Engagement
9	KABUPATEN ACEH TIMUR	65.50	68.00	64.50	53.13	82.73	68.24	Engagement
10	KABUPATEN ACEH UTARA	66.50	44.00	62.00	47.84	71.15	61.02	Engagement
11	KABUPATEN BENER MERIAH	70.00	54.00	61.00	51.50	59.25	59.68	Involvement
12	KABUPATEN BIREUEN	67.10	66.00	64.00	69.88	70.36	67.90	Engagement
13	KABUPATEN GAYO LUES	80.00	52.00	63.00	42.47	64.60	61.67	Engagement
14	KABUPATEN ACEH BESAR	65.00	76.00	61.50	66.31	53.44	62.19	Engagement

15	KABUPATEN NAGAN RAYA	69.00	50.00	70.00	64.19	62.04	64.25	Engagement
16	KABUPATEN PIDIE	68.00	67.00	68.00	48.56	53.21	59.58	Involvement
17	KABUPATEN PIDIE JAYA	71.00	59.00	57.50	61.34	60.64	62.06	Engagement
18	KABUPATEN SIMEULUE	67.00	78.00	59.00	48.66	74.87	65.19	Engagement
19	KABUPATEN BANGLI	72.10	77.00	62.00	71.63	51.93	64.42	Engagement
20	KABUPATEN BULELENG	64.00	46.00	72.50	66.16	53.44	61.16	Engagement
21	KABUPATEN GIANYAR	71.10	75.00	77.00	87.94	76.17	77.56	Participatory
22	KABUPATEN JEMBRANA	71.00	59.00	64.00	72.25	57.39	64.57	Engagement
23	KABUPATEN BADUNG	68.50	59.00	64.00	71.50	69.52	67.56	Engagement
24	KABUPATEN KARANGASEM	64.10	52.00	71.00	71.03	69.19	67.18	Engagement
25	KABUPATEN KLUNGKUNG	62.00	48.00	65.50	73.75	62.43	63.78	Engagement
26	KABUPATEN TABANAN	72.70	75.00	69.00	83.06	68.24	72.92	Engagement
27	KABUPATEN TANGERANG	63.50	69.00	64.50	48.56	53.44	58.24	Involvement
28	KABUPATEN LEBAK	71.00	73.00	73.00	72.38	59.48	68.42	Engagement
29	KABUPATEN PANDEGLANG	69.00	87.00	78.00	84.06	58.07	72.33	Engagement
30	KABUPATEN SERANG	69.00	68.00	67.00	72.63	75.49	71.17	Engagement
31	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	65.00	52.00	67.00	58.50	90.37	70.41	Engagement
32	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	75.30	86.00	65.00	42.88	78.25	68.71	Engagement



33	KABUPATEN BENGKULU UTARA	66.50	47.00	62.00	60.28	59.49	60.30	Engagement
34	KABUPATEN KAUR	70.50	66.00	62.00	41.25	62.74	60.17	Engagement
35	KABUPATEN KEPAHANG	67.50	69.00	67.00	44.91	71.15	64.13	Engagement
36	KABUPATEN LEBONG	76.30	71.00	65.50	65.31	70.10	69.55	Engagement
37	KABUPATEN MUKOMUKO	74.50	58.00	59.50	59.88	57.86	61.93	Engagement
38	KABUPATEN REJANG LEBONG	73.10	66.00	64.50	52.31	67.20	64.74	Engagement
39	KABUPATEN SELUMA	73.20	59.00	66.00	55.56	77.64	68.15	Engagement
40	KABUPATEN BANTUL	78.00	66.00	77.00	90.00	65.81	75.34	Engagement
41	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	79.10	70.00	81.50	86.88	72.81	78.34	Participatory
42	KABUPATEN KULON PROGO	80.10	70.00	76.50	84.31	76.99	78.28	Participatory
43	KABUPATEN SLEMAN	75.50	63.00	83.00	86.06	70.12	76.25	Engagement
44	KABUPATEN BOALEMO	71.30	77.00	76.50	60.69	73.68	71.50	Engagement
45	KABUPATEN GORONTALO	65.50	50.00	70.50	50.59	79.93	66.30	Engagement
46	KABUPATEN GORONTALO UTARA	74.00	68.00	78.00	49.94	59.69	65.09	Engagement
47	KABUPATEN BONE BOLANGO	77.30	72.00	78.00	76.88	61.35	72.04	Engagement
48	KABUPATEN POHUWATO	71.10	53.00	73.50	80.56	86.42	76.26	Engagement
49	KABUPATEN BATANG HARI	71.30	47.00	69.50	59.31	65.81	64.47	Engagement
50	KABUPATEN BUNGO	66.30	64.00	70.50	61.75	77.68	69.41	Engagement

51	KABUPATEN KERINCI	79.50	68.00	74.00	49.88	77.57	70.75	Engagement
52	KABUPATEN MERANGIN	74.00	59.00	59.50	68.00	83.42	71.23	Engagement
53	KABUPATEN MUARO JAMBI	77.50	72.00	67.00	55.41	86.90	73.25	Engagement
54	KABUPATEN SAROLANGUN	63.50	78.00	62.50	67.44	69.06	67.21	Engagement
55	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	69.00	82.00	73.50	78.75	73.61	74.53	Engagement
56	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	74.50	68.00	64.50	57.44	72.32	67.78	Engagement
57	KABUPATEN TEBO	69.50	64.00	71.50	57.44	63.70	65.20	Engagement
58	KABUPATEN BANDUNG	72.50	59.00	87.00	70.44	66.74	71.91	Engagement
59	KABUPATEN BANDUNG BARAT	73.00	74.00	70.00	81.19	84.57	77.61	Participatory
60	KABUPATEN BOGOR	73.00	69.00	63.50	78.75	69.32	70.75	Engagement
61	KABUPATEN GARUT	67.30	63.00	69.50	80.38	76.50	72.69	Engagement
62	KABUPATEN INDRAMAYU	64.00	70.00	73.00	90.25	81.52	76.91	Engagement
63	KABUPATEN CIAMIS	76.30	47.00	64.00	68.00	78.30	69.85	Engagement
64	KABUPATEN CIANJUR	71.50	68.00	72.50	63.19	65.82	67.98	Engagement
65	KABUPATEN CIREBON	63.50	76.00	66.50	73.13	75.13	70.76	Engagement
66	KABUPATEN KUNINGAN	74.30	70.00	63.50	67.44	73.74	70.17	Engagement
67	KABUPATEN SUMEDANG	64.30	80.00	73.00	80.38	66.93	71.61	Engagement
68	KABUPATEN KARAWANG	71.00	68.00	58.00	73.13	80.63	71.41	Engagement



69	KABUPATEN MAJALENGKA	75.00	64.00	75.50	68.06	84.19	75.37	Engagement
70	KABUPATEN PANGANDARAN	71.50	68.00	71.00	58.31	79.29	70.75	Engagement
71	KABUPATEN PURWAKARTA	68.50	44.00	51.50	62.72	53.70	57.05	Involvement
72	KABUPATEN SUBANG	69.50	50.00	62.00	61.50	69.76	64.53	Engagement
73	KABUPATEN SUKABUMI	69.50	72.00	69.00	68.00	71.42	69.93	Engagement
74	KABUPATEN TASIKMALAYA	77.50	50.00	65.00	79.56	83.64	74.51	Engagement
75	KABUPATEN BEKASI	70.50	66.00	70.50	68.81	75.12	71.10	Engagement
76	KABUPATEN BANJARNEGARA	78.00	67.00	77.50	86.06	64.18	74.27	Engagement
77	KABUPATEN BANYUMAS	78.50	51.00	72.50	94.31	75.73	76.88	Engagement
78	KABUPATEN BATANG	77.50	63.00	72.50	90.25	69.30	75.14	Engagement
79	KABUPATEN BREBES	67.50	51.00	70.00	53.44	78.76	66.92	Engagement
80	KABUPATEN CILACAP	77.00	76.00	74.00	86.19	64.18	74.29	Engagement
81	KABUPATEN DEMAK	75.00	78.00	63.00	88.63	77.83	76.48	Engagement
82	KABUPATEN GROBOGAN	72.50	54.00	70.00	88.63	67.20	71.79	Engagement
83	KABUPATEN JEPARA	74.50	49.00	89.00	90.25	63.71	74.76	Engagement
84	KABUPATEN BLORA	74.00	58.00	68.00	41.66	76.05	65.35	Engagement
85	KABUPATEN BOYOLALI	72.50	56.00	74.00	80.50	92.24	78.67	Participatory
86	KABUPATEN PATI	74.50	78.00	66.50	84.56	77.58	76.19	Engagement
87	KABUPATEN PEKALONGAN	72.00	73.00	66.00	65.16	64.88	67.40	Engagement

88	KABUPATEN PURBALINGGA	74.90	63.00	68.00	85.25	66.74	71.95	Engagement
89	KABUPATEN SEMARANG	74.90	63.00	77.00	86.88	72.07	75.68	Engagement
90	KABUPATEN TEMANGGUNG	76.00	59.00	76.00	75.81	68.13	71.90	Engagement
91	KABUPATEN WONOGIRI	63.50	59.00	88.50	72.94	68.11	71.32	Engagement
92	KABUPATEN KARANGANYAR	74.00	71.00	74.00	86.19	79.76	77.87	Participatory
93	KABUPATEN KEBUMEN	77.00	71.00	72.50	66.69	71.06	71.66	Engagement
94	KABUPATEN KENDAL	68.00	78.00	77.50	59.94	69.06	69.61	Engagement
95	KABUPATEN KLATEN	67.00	65.00	59.50	85.13	71.87	70.39	Engagement
96	KABUPATEN KUDUS	68.50	61.00	72.00	89.31	77.11	75.19	Engagement
97	KABUPATEN MAGELANG	77.00	54.00	71.50	86.88	80.39	76.59	Engagement
98	KABUPATEN PEMALANG	75.00	49.00	73.50	67.44	82.69	72.89	Engagement
99	KABUPATEN PURWOREJO	73.50	61.00	60.00	74.75	61.86	66.31	Engagement
100	KABUPATEN REMBANG	77.00	53.00	70.00	74.75	82.45	74.39	Engagement
101	KABUPATEN SRAGEN	76.00	49.00	65.50	62.56	63.23	64.68	Engagement
102	KABUPATEN SUKOHARJO	67.00	51.00	79.50	80.94	65.81	70.33	Engagement
103	KABUPATEN TEGAL	71.50	59.00	82.00	79.88	68.73	73.19	Engagement
104	KABUPATEN WONOSOBO	73.50	49.00	57.50	61.75	62.74	62.27	Engagement
105	KABUPATEN BANGKALAN	73.50	52.00	71.00	70.69	91.51	75.69	Engagement
106	KABUPATEN BANYUWANGI	76.50	44.00	69.50	65.00	57.86	63.96	Engagement



107	KABUPATEN BONDOWOSO	66.50	67.00	77.50	58.06	74.29	69.40	Engagement
108	KABUPATEN GRESIK	71.00	47.00	69.50	76.38	70.48	69.22	Engagement
109	KABUPATEN JEMBER	74.00	53.00	67.00	65.81	80.63	70.85	Engagement
110	KABUPATEN JOMBANG	71.50	68.00	67.00	80.53	66.74	70.63	Engagement
111	KABUPATEN BOJONEGORO	67.00	53.00	64.50	67.44	78.50	68.64	Engagement
112	KABUPATEN MAGETAN	78.50	59.00	69.50	71.06	68.26	70.19	Engagement
113	KABUPATEN MOJOKERTO	65.50	53.00	76.00	51.00	79.20	67.56	Engagement
114	KABUPATEN NGAWI	75.50	47.00	67.50	66.63	58.58	64.20	Engagement
115	KABUPATEN PASURUAN	74.50	58.00	84.00	55.06	61.61	66.99	Engagement
116	KABUPATEN PONOROGO	75.50	71.00	68.00	73.13	79.93	74.40	Engagement
117	KABUPATEN KEDIRI	72.50	66.00	78.50	84.31	68.26	74.14	Engagement
118	KABUPATEN LAMONGAN	74.50	62.00	82.00	67.44	59.29	68.77	Engagement
119	KABUPATEN LUMAJANG	71.50	67.00	73.00	72.69	63.93	69.32	Engagement
120	KABUPATEN MADIUN	71.90	59.00	65.00	52.63	62.30	62.49	Engagement
121	KABUPATEN MAGETAN	75.50	59.00	64.50	51.81	78.02	67.67	Engagement
122	KABUPATEN MALANG	71.50	58.00	72.50	51.00	60.92	63.08	Engagement
123	KABUPATEN NGANJUK	56.00	70.00	70.00	75.81	69.52	68.22	Engagement
124	KABUPATEN PACITAN	74.50	54.00	78.00	72.31	61.85	68.92	Engagement
125	KABUPATEN PAMEKASAN	67.50	66.00	65.50	78.50	65.55	68.56	Engagement

126	KABUPATEN PROBOLINGGO	76.50	66.00	68.50	60.94	66.51	67.74	Engagement
127	KABUPATEN SAMPANG	73.00	78.00	72.50	67.19	88.05	76.75	Engagement
128	KABUPATEN SIDOARJO	66.00	71.00	70.50	73.13	64.18	68.28	Engagement
129	KABUPATEN SITUBONDO	78.90	65.00	81.00	51.16	76.44	71.64	Engagement
130	KABUPATEN SUMENEP	71.50	54.00	63.00	73.94	68.83	67.74	Engagement
131	KABUPATEN TRENGGALEK	69.00	47.00	60.00	76.63	60.92	64.10	Engagement
132	KABUPATEN TUBAN	70.50	49.00	60.50	72.56	67.44	65.84	Engagement
133	KABUPATEN TULUNGAGUNG	68.00	72.00	70.00	81.63	65.35	70.73	Engagement
134	KABUPATEN BENGKAYANG	83.50	50.00	75.50	65.97	83.64	75.09	Engagement
135	KABUPATEN KAPUAS HULU	81.50	67.00	74.50	63.13	91.52	77.98	Participatory
136	KABUPATEN KAYONG UTARA	77.50	62.00	76.00	74.34	86.39	77.69	Participatory
137	KABUPATEN KETAPANG	70.50	54.00	66.00	65.56	84.56	71.18	Engagement
138	KABUPATEN KUBU RAYA	69.50	70.00	77.50	79.88	67.44	72.61	Engagement
139	KABUPATEN LANDAK	78.50	66.00	79.00	69.88	86.65	78.07	Participatory
140	KABUPATEN MELAWI	68.50	57.00	66.00	47.09	78.00	65.42	Engagement
141	KABUPATEN MEMPAWAH	76.50	58.00	75.00	60.13	67.90	68.50	Engagement
142	KABUPATEN SAMBAS	79.50	62.00	74.00	78.00	75.57	75.17	Engagement
143	KABUPATEN SANGGAU	73.50	55.00	73.50	75.81	73.96	72.25	Engagement
144	KABUPATEN SEKADAU	65.00	59.00	66.00	63.22	69.76	65.67	Engagement



145	KABUPATEN SINTANG	74.00	69.00	67.00	73.50	77.64	73.09	Engagement
146	KABUPATEN BALANGAN	74.00	47.00	63.00	60.94	74.89	66.76	Engagement
147	KABUPATEN BANJAR	60.00	54.00	62.00	54.25	70.68	61.85	Engagement
148	KABUPATEN BARITO KUALA	66.50	51.00	59.00	67.44	72.54	65.45	Engagement
149	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	72.50	59.00	64.50	48.56	69.89	63.98	Engagement
150	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	82.50	54.00	75.00	54.50	68.81	68.44	Engagement
151	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	78.00	61.00	72.50	71.19	66.27	70.32	Engagement
152	KABUPATEN KABUPATEN TAPIN	79.50	64.00	62.00	58.00	78.81	69.94	Engagement
153	KABUPATEN KOTABARU	67.50	73.00	76.00	51.50	71.30	67.69	Engagement
154	KABUPATEN TABALONG	70.50	56.00	74.50	56.69	60.18	63.99	Engagement
155	KABUPATEN TANAH BUMBU	78.50	52.00	57.50	53.13	63.19	61.98	Engagement
156	KABUPATEN TANAH LAUT	71.00	59.00	67.50	53.44	52.75	60.11	Engagement
157	KABUPATEN BARITO SELATAN	72.20	69.00	71.00	58.25	72.45	68.93	Engagement
158	KABUPATEN BARITO TIMUR	70.40	65.00	67.50	45.31	55.54	59.80	Involvement
159	KABUPATEN BARITO UTARA	65.30	59.00	68.00	60.44	88.52	71.20	Engagement
160	KABUPATEN GUNUNG MAS	64.50	63.00	64.50	58.31	57.86	61.12	Engagement
161	KABUPATEN KAPUAS	73.80	74.00	87.50	69.06	80.87	77.73	Participatory

162	KABUPATEN KATINGAN	70.80	63.00	71.00	51.81	70.83	66.27	Engagement
163	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	68.50	63.00	71.00	66.50	58.10	64.93	Engagement
164	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	74.40	70.00	66.00	78.50	72.92	72.66	Engagement
165	KABUPATEN LAMANDAU	67.50	64.00	70.00	52.06	57.39	61.53	Engagement
166	KABUPATEN MURUNG RAYA	67.50	59.00	68.50	70.22	73.25	69.12	Engagement
167	KABUPATEN PULANG PISAU	72.80	53.00	69.00	82.81	68.60	70.80	Engagement
168	KABUPATEN SERUYAN	78.50	68.00	65.00	67.44	55.54	65.65	Engagement
169	KABUPATEN SUKAMARA	65.40	49.00	60.00	53.13	58.56	58.17	Involvement
170	KABUPATEN BERAU	70.00	63.00	71.00	51.91	61.70	63.39	Engagement
171	KABUPATEN KUTAI BARAT	66.00	61.00	66.50	56.38	54.71	60.29	Engagement
172	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	69.10	55.00	62.50	53.13	54.61	58.83	Involvement
173	KABUPATEN KUTAI TIMUR	65.00	75.00	76.50	57.19	79.90	71.21	Engagement
174	KABUPATEN MAHAKAM ULU	74.00	62.00	60.00	45.06	69.21	62.78	Engagement
175	KABUPATEN PASER	68.50	58.00	74.50	54.50	57.87	62.66	Engagement
176	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	70.00	67.00	73.00	60.44	58.79	65.02	Engagement
177	KABUPATEN BULUNGAN	69.00	49.00	68.50	68.75	71.14	67.49	Engagement
178	KABUPATEN TANA TIDUNG	73.50	49.00	64.50	73.63	94.79	75.66	Engagement



179	KABUPATEN MALINAU	66.30	47.00	73.00	50.19	77.56	65.87	Engagement
180	KABUPATEN NUNUKAN	67.20	54.00	63.00	46.69	61.56	59.25	Involvement
181	KABUPATEN BANGKA	61.50	47.00	63.50	59.63	58.32	59.12	Involvement
182	KABUPATEN BANGKA BARAT	69.50	65.00	79.00	74.69	68.35	71.64	Engagement
183	KABUPATEN BANGKA SELATAN	65.00	51.00	62.00	67.19	62.10	62.57	Engagement
184	KABUPATEN BANGKA TENGAH	69.00	49.00	67.50	59.38	57.15	61.22	Engagement
185	KABUPATEN BELITUNG	71.30	61.00	78.00	47.75	71.83	67.06	Engagement
186	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	62.50	49.00	70.50	55.88	52.39	58.39	Involvement
187	KABUPATEN BINTAN	78.00	51.00	69.50	83.38	79.70	75.19	Engagement
188	KARIMUN	78.20	66.00	72.00	64.19	70.73	70.70	Engagement
189	KEPULAUAN ANAMBAS	76.70	68.00	68.50	53.94	77.35	69.83	Engagement
190	KABUPATEN LINGGA	74.50	54.00	77.00	68.66	75.02	71.94	Engagement
191	KABUPATEN NATUNA	79.50	58.00	73.50	61.91	73.48	70.82	Engagement
192	KABUPATEN TANGGAMUS	72.00	67.00	67.00	63.38	55.07	63.70	Engagement
193	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	77.50	50.00	65.00	66.22	66.24	66.62	Engagement
194	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	60.00	70.00	76.00	52.63	64.18	63.98	Engagement
195	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	61.00	49.00	73.00	58.91	71.88	65.05	Engagement

196	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	68.00	53.00	63.50	73.13	82.95	71.11	Engagement
197	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	71.10	59.00	74.00	52.72	67.44	65.70	Engagement
198	KABUPATEN MESUJI	72.00	66.00	76.50	57.19	58.79	65.37	Engagement
199	KABUPATEN PESAWARAN	73.10	63.00	81.00	51.50	64.64	66.81	Engagement
200	KABUPATEN PESISIR BARAT	62.00	77.00	65.00	54.25	81.05	68.26	Engagement
201	KABUPATEN PRINGSEWU	74.00	61.00	76.50	54.50	66.05	66.91	Engagement
202	KABUPATEN TULANG BAWANG	64.00	70.00	62.50	51.00	62.54	61.26	Engagement
203	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	66.50	51.00	64.00	77.19	64.15	65.88	Engagement
204	KABUPATEN WAY KANAN	72.00	67.00	69.50	63.50	68.13	68.14	Engagement
205	KABUPATEN BURU	69.50	75.00	75.00	49.13	76.01	69.03	Engagement
206	KABUPATEN BURU SELATAN	73.50	73.00	66.00	43.03	69.36	64.61	Engagement
207	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	76.50	77.00	70.00	46.69	73.93	68.52	Engagement
208	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	75.50	77.00	66.00	63.94	85.93	74.57	Engagement
209	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	73.00	61.00	68.50	57.84	72.74	67.79	Engagement
210	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	74.50	77.00	71.00	44.66	85.92	71.51	Engagement



211	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	75.00	69.00	66.00	52.38	77.40	68.80	Engagement
212	KABUPATEN MALUKU TENGAH	74.50	79.00	62.50	44.66	79.40	68.05	Engagement
213	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	79.50	66.00	68.00	44.09	79.65	68.82	Engagement
214	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	77.00	71.00	67.50	45.88	69.02	65.88	Engagement
215	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	67.50	51.00	73.00	42.88	87.36	67.98	Engagement
216	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	74.00	78.00	66.50	61.50	75.75	70.93	Engagement
217	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	65.50	68.00	66.50	54.25	74.76	66.48	Engagement
218	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	82.50	72.00	61.00	45.47	78.55	68.56	Engagement
219	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	70.00	56.00	67.00	49.13	68.10	63.25	Engagement
220	KABUPATEN PULAU MOROTAI	70.50	69.00	69.50	46.28	80.65	68.35	Engagement
221	KABUPATEN PULAU TALIABU	80.50	66.00	68.00	44.66	70.87	66.49	Engagement
222	KABUPATEN BIMA	84.50	73.00	71.50	65.56	91.52	79.07	Participatory
223	KABUPATEN DOMPU	63.00	57.00	78.50	66.38	79.26	71.05	Engagement
224	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	74.00	95.00	84.50	64.75	81.35	78.55	Participatory

225	KABUPATEN LOMBOK BARAT	75.00	91.00	68.00	50.75	76.04	70.66	Engagement
226	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	86.50	69.00	82.00	68.81	79.65	78.26	Participatory
227	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	72.50	73.00	81.50	78.94	63.21	72.85	Engagement
228	KABUPATEN LOMBOK UTARA	86.50	85.00	73.00	54.81	67.17	71.51	Engagement
229	KABUPATEN SUMBAWA	72.50	75.00	76.50	70.44	75.45	74.02	Engagement
230	KABUPATEN ALOR	78.00	77.00	71.50	66.38	81.49	75.32	Engagement
231	KABUPATEN BELU	72.50	75.00	72.50	66.38	69.95	70.76	Engagement
232	KABUPATEN ENDE	81.00	71.00	76.00	49.13	69.48	69.17	Engagement
233	KABUPATEN FLORES TIMUR	83.50	63.00	67.00	66.88	89.23	76.54	Engagement
234	KABUPATEN KUPANG	80.50	81.00	66.50	51.56	70.18	68.87	Engagement
235	KABUPATEN MALAKA	77.50	54.00	67.00	60.69	69.01	67.14	Engagement
236	KABUPATEN SABU RAIJUA	70.50	69.00	72.50	62.56	67.62	68.30	Engagement
237	KABUPATEN LEMBATA	77.50	63.00	66.00	65.56	72.05	69.73	Engagement
238	KABUPATEN MANGGARAI	81.50	70.00	77.50	45.47	77.89	71.26	Engagement
239	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	78.00	62.00	81.00	63.94	90.60	77.97	Participatory
240	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	72.50	71.00	73.50	48.72	74.15	68.29	Engagement



241	KABUPATEN NAGEKEO	72.50	71.00	77.00	48.72	68.56	67.31	Engagement
242	KABUPATEN NGADA	73.50	64.00	67.50	49.38	64.86	63.93	Engagement
243	KABUPATEN ROTE NDAO	77.50	89.00	79.00	50.75	70.18	71.40	Engagement
244	KABUPATEN SIKKA	77.50	84.00	61.00	59.31	73.02	69.87	Engagement
245	KABUPATEN SUMBA BARAT	71.50	73.00	70.00	64.75	68.79	69.19	Engagement
246	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	73.10	73.00	70.00	59.06	76.94	70.81	Engagement
247	KABUPATEN SUMBA TENGAH	83.00	81.00	70.50	67.19	72.29	73.92	Engagement
248	KABUPATEN SUMBA TIMUR	73.00	85.00	83.00	83.38	73.21	78.34	Participatory
249	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	69.00	58.00	76.50	72.06	70.90	70.58	Engagement
250	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	79.00	75.00	82.00	61.50	69.04	72.71	Engagement
251	KABUPATEN BIAK NUMFOR	67.50	69.00	64.50	61.91	68.55	66.25	Engagement
252	KABUPATEN JAYAPURA	74.50	60.00	63.00	56.06	94.56	73.08	Engagement
253	KABUPATEN KEEROM	76.00	54.00	63.50	47.09	67.63	63.01	Engagement
254	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	81.00	61.00	67.00	46.28	56.36	61.86	Engagement
255	KABUPATEN SUPIORI	72.00	63.00	67.00	70.00	73.43	70.13	Engagement
256	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	69.00	56.00	55.50	43.03	65.64	58.80	Involvement

257	KABUPATEN SARMI	72.50	58.00	61.50	47.09	69.49	62.87	Engagement
258	KABUPATEN WAROPEN	59.50	68.00	77.00	50.34	78.56	67.74	Engagement
259	KABUPATEN FAKFAK	76.50	50.00	64.50	67.00	62.04	65.21	Engagement
260	KABUPATEN KAIMANA	73.50	54.00	64.50	40.03	86.40	66.93	Engagement
261	KABUPATEN MANOKWARI	65.50	46.00	62.50	55.44	63.65	60.38	Engagement
262	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	67.50	68.00	62.00	51.00	59.95	60.89	Engagement
263	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	69.00	59.00	58.00	68.88	60.19	63.13	Engagement
264	KABUPATEN TELUK BINTUNI	68.50	64.00	69.00	64.19	94.55	75.10	Engagement
265	KABUPATEN TELUK WONDAMA	77.10	52.00	73.50	53.59	92.68	73.84	Engagement
266	KABUPATEN MAYBRAT	76.00	51.00	62.00	43.38	86.87	67.44	Engagement
267	KABUPATEN RAJA AMPAT	69.50	70.00	66.00	49.13	74.51	66.28	Engagement
268	KABUPATEN SORONG	77.50	62.00	72.00	55.63	66.73	67.24	Engagement
269	KABUPATEN SORONG SELATAN	73.00	89.00	74.00	54.38	93.62	77.26	Engagement
270	KABUPATEN TAMBRAUW	77.50	63.00	55.50	44.25	87.33	67.95	Engagement
271	KABUPATEN JAYAWIJAYA	71.10	69.00	68.00	51.94	65.29	64.69	Engagement
272	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	65.10	51.00	71.00	43.03	81.62	65.41	Engagement
273	KABUPATEN LANNY JAYA	71.10	51.00	52.50	43.03	79.29	62.21	Engagement



274	KABUPATEN NDUGA	71.50	49.00	64.00	44.66	59.11	58.66	Involvement
275	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	72.50	71.00	63.00	43.03	72.77	64.64	Engagement
276	KABUPATEN TOLIKARA	72.00	53.00	68.00	49.07	68.58	63.69	Engagement
277	KABUPATEN YALIMO	49.50	51.00	57.50	49.50	53.90	52.57	Involvement
278	KABUPATEN YAHUKIMO	71.10	57.00	68.00	64.72	75.10	68.99	Engagement
279	KABUPATEN ASMAT	75.00	57.00	62.50	51.13	79.40	67.25	Engagement
280	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	81.00	53.00	79.00	64.63	79.87	74.19	Engagement
281	KABUPATEN MAPPI	56.50	55.00	69.50	51.97	60.86	59.35	Involvement
282	KABUPATEN MERAUKE	78.60	57.00	73.00	57.63	69.46	68.38	Engagement
283	KABUPATEN DEIYAI	69.00	62.00	67.00	58.53	94.55	73.47	Engagement
284	KABUPATEN DOGIYAI	67.10	81.00	66.00	49.13	65.29	64.13	Engagement
285	KABUPATEN MIMIKA	76.00	78.00	69.00	48.97	86.90	72.67	Engagement
286	KABUPATEN NABIRE	66.50	67.00	67.50	43.03	78.75	65.73	Engagement
287	KABUPATEN PANIAI	69.50	73.00	71.00	48.31	63.19	64.02	Engagement
288	KABUPATEN PUNCAK	67.10	71.00	65.00	49.50	65.29	63.01	Engagement
289	KABUPATEN INTAN JAYA	52.50	55.00	52.50	43.03	51.68	50.61	Involvement
290	KABUPATEN PUNCAK JAYA	67.50	67.00	69.50	43.03	74.86	65.16	Engagement
291	KABUPATEN BENGKALIS	63.60	58.00	75.00	56.25	68.13	65.21	Engagement

292	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	67.50	76.00	79.00	47.75	54.62	62.84	Engagement
293	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	65.50	66.00	69.00	59.50	53.21	61.36	Engagement
294	KABUPATEN KAMPAR	68.00	54.00	69.00	53.44	68.73	64.11	Engagement
295	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	72.10	68.00	74.00	47.72	75.60	68.24	Engagement
296	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	65.10	48.00	65.00	40.84	53.79	55.12	Involvement
297	KABUPATEN PELALAWAN	70.50	80.00	79.00	69.19	81.32	76.13	Engagement
298	KABUPATEN ROKAN HILIR	71.10	54.00	78.50	55.06	74.55	68.70	Engagement
299	KABUPATEN ROKAN HULU	70.50	70.00	71.50	71.56	58.08	67.14	Engagement
300	KABUPATEN SIAK	70.50	52.00	76.00	60.56	72.68	68.42	Engagement
301	KABUPATEN MAJENE	49.50	50.00	60.00	48.56	57.85	53.97	Involvement
302	KABUPATEN MAMASA	75.50	70.00	73.00	46.94	87.37	72.30	Engagement
303	KABUPATEN MAMUJU	77.50	58.00	77.00	71.06	85.51	76.57	Engagement
304	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	71.50	69.00	67.50	55.63	81.02	70.13	Engagement
305	KABUPATEN PASANGKAYU	72.00	48.00	63.00	56.69	71.86	64.69	Engagement
306	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	69.10	79.00	79.00	52.38	74.98	70.49	Engagement
307	KABUPATEN BANTAENG	74.10	79.00	66.00	46.94	58.32	62.80	Engagement



308	KABUPATEN BARRU	68.10	56.00	67.50	49.38	69.63	63.48	Engagement
309	KABUPATEN BONE	79.10	48.00	67.50	56.69	75.94	68.24	Engagement
310	KABUPATEN BULUKUMBA	81.00	59.00	66.50	40.84	64.87	63.03	Engagement
311	KABUPATEN ENREKANG	63.50	61.00	76.00	56.69	82.94	70.22	Engagement
312	KABUPATEN GOWA	80.50	84.00	75.00	61.25	86.67	77.75	Participatory
313	KABUPATEN JENEPONTO	77.50	71.00	70.00	70.19	91.30	78.03	Participatory
314	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	77.00	70.00	70.00	81.44	74.18	74.94	Engagement
315	KABUPATEN LUWU	48.50	48.00	52.50	42.06	59.36	51.22	Involvement
316	KABUPATEN LUWU TIMUR	63.00	70.00	68.00	72.41	81.52	72.14	Engagement
317	KABUPATEN LUWU UTARA	77.50	68.00	61.50	53.44	70.45	66.42	Engagement
318	KABUPATEN MAROS	70.10	47.00	67.00	77.00	76.52	70.48	Engagement
319	KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	80.00	55.00	76.00	83.50	73.95	75.59	Engagement
320	KABUPATEN PINRANG	83.50	71.00	71.00	66.88	64.13	70.61	Engagement
321	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	67.20	71.00	71.00	57.69	81.52	70.73	Engagement
322	KABUPATEN SINJAI	71.90	61.00	75.00	68.50	68.82	69.83	Engagement
323	KABUPATEN SOPPENG	76.50	53.00	74.50	74.56	68.37	70.92	Engagement
324	KABUPATEN TAKALAR	62.50	49.00	62.00	44.09	62.31	57.31	Involvement
325	KABUPATEN TANA TORAJA	74.00	49.00	65.50	72.13	68.37	67.74	Engagement

326	KABUPATEN TORAJA UTARA	82.00	49.00	68.00	82.81	84.79	76.90	Engagement
327	KABUPATEN WAJO	73.50	50.00	73.00	71.65	83.40	73.65	Engagement
328	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	61.00	60.00	60.00	85.00	73.92	69.38	Engagement
329	KABUPATEN BANGGAI LAUT	76.50	60.00	75.50	72.56	80.90	75.18	Engagement
330	KABUPATEN BUOL	74.10	58.00	70.00	45.06	91.05	70.95	Engagement
331	KABUPATEN DONGGALA	73.50	64.00	70.50	53.19	70.67	67.04	Engagement
332	KABUPATEN POSO	66.20	67.00	71.00	48.97	73.24	65.91	Engagement
333	KABUPATEN MOROWALI	64.50	55.00	69.50	45.31	78.58	64.94	Engagement
334	KABUPATEN MOROWALI UTARA	65.50	52.00	66.00	63.94	74.15	66.53	Engagement
335	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	73.50	58.00	67.50	46.69	74.63	65.73	Engagement
336	KABUPATEN SIGI	80.50	60.00	73.00	69.63	75.10	73.15	Engagement
337	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	78.00	63.00	76.00	74.88	70.40	73.20	Engagement
338	KABUPATEN TOLITOLI	73.50	56.00	70.50	63.94	89.67	74.09	Engagement
339	KABUPATEN BANGGAI	76.20	55.00	61.00	72.56	92.70	75.26	Engagement
340	KABUPATEN BOMBANA	77.50	58.00	68.00	61.91	76.46	70.22	Engagement
341	KABUPATEN BUTON	68.50	71.00	73.50	45.31	74.63	66.95	Engagement
342	KABUPATEN BUTON SELATAN	76.50	53.00	65.00	60.94	76.95	68.87	Engagement



343	KABUPATEN BUTON TENGAH	79.50	49.00	70.00	46.94	76.26	67.07	Engagement
344	KABUPATEN BUTON UTARA	66.00	61.00	57.50	67.94	74.17	66.64	Engagement
345	KABUPATEN KONAWE UTARA	73.00	59.00	67.00	46.13	89.45	69.96	Engagement
346	KABUPATEN KOLAKA	69.50	49.00	83.50	87.53	81.87	77.57	Participatory
347	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	65.50	55.00	73.50	72.13	73.48	69.77	Engagement
348	KABUPATEN KOLAKA UTARA	73.20	51.00	56.50	55.88	82.68	67.02	Engagement
349	KABUPATEN KONAWE	73.90	53.00	60.00	67.84	71.60	67.13	Engagement
350	KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	76.30	58.00	69.50	65.81	76.00	70.92	Engagement
351	KABUPATEN KONAWE SELATAN	62.80	53.00	63.00	44.91	68.82	60.09	Engagement
352	KABUPATEN MUNA	76.00	65.00	74.50	69.28	82.48	75.20	Engagement
353	KABUPATEN MUNA BARAT	80.50	47.00	60.50	65.25	70.23	67.02	Engagement
354	KABUPATEN WAKATOBI	71.20	53.00	60.00	62.28	77.57	67.27	Engagement
355	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	67.50	70.00	77.00	46.94	69.75	66.21	Engagement
356	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	72.50	57.00	71.00	71.31	87.11	74.79	Engagement
357	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	65.50	57.00	64.00	46.13	85.27	66.41	Engagement

358	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	68.50	80.00	69.00	70.50	67.43	69.83	Engagement
359	KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	78.20	57.00	62.50	69.69	84.79	73.21	Engagement
360	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	69.10	67.00	71.50	82.00	82.89	76.09	Engagement
361	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	75.50	57.00	71.00	46.94	69.30	65.18	Engagement
362	KABUPATEN MINAHASA	71.50	59.00	68.50	67.13	68.24	67.80	Engagement
363	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	72.50	61.00	68.50	43.69	71.02	64.34	Engagement
364	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	67.50	79.00	68.00	69.81	85.27	74.54	Engagement
365	KABUPATEN MINAHASA UTARA	77.10	67.00	83.00	70.13	84.81	78.19	Participatory
366	KABUPATEN AGAM	72.20	63.00	69.50	76.06	66.05	69.67	Engagement
367	KABUPATEN DHARMASRAYA	65.50	55.00	65.00	76.19	72.70	68.65	Engagement
368	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	74.50	54.00	71.00	64.31	89.68	74.27	Engagement
369	KABUPATEN SIJUNJUNG	74.10	49.00	75.50	68.63	78.98	72.24	Engagement
370	KABUPATEN SOLOK SELATAN	75.10	52.00	62.50	79.63	78.50	72.20	Engagement
371	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	70.50	68.00	67.50	66.06	50.19	62.67	Engagement



372	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	80.00	72.00	75.50	69.88	61.38	70.69	Engagement
373	KABUPATEN PASAMAN	78.70	66.00	75.00	70.63	58.56	69.03	Engagement
374	KABUPATEN PASAMAN BARAT	77.90	71.00	65.50	46.69	61.79	63.65	Engagement
375	KABUPATEN PESISIR SELATAN	74.70	59.00	71.50	75.81	62.07	68.92	Engagement
376	KABUPATEN SOLOK	81.50	74.00	52.50	40.03	48.44	56.74	Involvement
377	KABUPATEN TANAH DATAR	69.50	44.00	62.00	46.13	54.71	56.34	Involvement
378	KABUPATEN BANYUASIN	79.40	64.00	69.50	57.16	82.49	72.36	Engagement
379	KABUPATEN EMPAT LAWANG	63.70	47.00	63.00	45.31	69.30	59.89	Involvement
380	KABUPATEN LAHAT	66.40	90.00	78.50	55.81	82.25	73.82	Engagement
381	KABUPATEN MUARA ENIM	76.00	76.00	73.50	77.13	55.31	69.52	Engagement
382	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	72.70	68.00	71.00	68.81	69.30	70.09	Engagement
383	KABUPATEN MUSI RAWAS	71.90	65.00	65.50	51.56	66.23	64.16	Engagement
384	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	73.70	62.00	79.50	60.44	84.32	74.22	Engagement
385	KABUPATEN OGAN ILIR	62.90	47.00	69.50	69.97	52.39	60.89	Engagement
386	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	72.00	54.00	74.50	56.63	76.87	69.09	Engagement

387	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	75.50	68.00	64.00	68.00	75.70	71.01	Engagement
388	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	71.90	68.00	69.50	52.16	69.65	66.41	Engagement
389	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	66.50	54.00	61.00	52.56	59.49	59.26	Involvement
390	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	70.50	68.00	63.50	41.81	70.45	63.10	Engagement
391	KABUPATEN ASAHAN	67.20	47.00	69.00	77.28	52.06	63.01	Engagement
392	KABUPATEN DAIRI	84.20	64.00	72.00	88.75	69.30	76.18	Engagement
393	KABUPATEN DELI SERDANG	68.00	61.00	85.00	55.88	49.74	62.80	Engagement
394	KABUPATEN BATU BARA	70.00	55.00	74.00	69.06	65.94	67.89	Engagement
395	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	70.40	72.00	70.50	71.44	74.31	71.96	Engagement
396	KABUPATEN KARO	64.00	66.00	63.00	58.91	58.79	61.42	Engagement
397	KABUPATEN NIAS	64.50	52.00	61.00	45.47	67.42	59.62	Involvement
398	KABUPATEN LABUHANBATU	70.00	59.00	63.00	58.09	68.04	64.53	Engagement
399	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	69.70	66.00	65.50	59.06	75.60	68.13	Engagement
400	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	67.50	47.00	57.00	44.34	64.99	57.97	Involvement



401	KABUPATEN LANGKAT	56.50	53.00	70.00	46.78	52.75	55.78	Involvement
402	KABUPATEN MANDAILING NATAL	69.30	53.00	62.00	58.09	52.29	58.86	Involvement
403	KABUPATEN NIAS BARAT	73.50	57.00	65.00	47.91	54.12	59.22	Involvement
404	KABUPATEN NIAS SELATAN	83.20	71.00	64.00	76.50	82.89	76.71	Engagement
405	KABUPATEN NIAS UTARA	84.70	50.00	66.00	78.94	55.30	67.52	Engagement
406	KABUPATEN PADANG LAWAS	70.70	58.00	62.50	63.13	55.76	61.79	Engagement
407	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	68.20	51.00	66.00	43.69	56.00	57.48	Involvement
408	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	72.70	47.00	60.50	46.53	54.85	57.10	Involvement
409	KABUPATEN SAMOSIR	65.00	67.00	63.00	57.44	58.08	61.21	Engagement
410	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	67.00	47.00	69.00	49.38	47.64	56.07	Involvement
411	KABUPATEN SIMALUNGUN	69.70	59.00	70.00	72.44	64.64	67.72	Engagement
412	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	73.10	53.00	71.50	59.06	75.13	68.57	Engagement
413	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	71.00	54.00	74.50	41.25	55.30	59.34	Involvement
414	KABUPATEN TAPANULI UTARA	73.20	63.00	73.50	53.44	69.52	67.18	Engagement
415	KABUPATEN TOBA	68.00	51.00	67.50	65.35	57.17	62.42	Engagement
Skor Akhir		71.78	62.20	69.13	61.94	71.00	68.09	Engagement

3. Indeks Partisipasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024

NO	Provinsi	Registrasi Pemilih	Pencalonan	Kampanye	Sosdiklih parmas	VTO	Skor Akhir	Kategori
1	KOTA BANDA ACEH	69.50	72.00	71.00	60.06	57.15	64.46	Engagement
2	KOTA LANGSA	62.50	82.00	66.50	42.88	54.14	58.82	Involvement
3	KOTA LHOKSEUMAWE	61.50	72.00	75.00	62.56	70.44	68.14	Engagement
4	KOTA SABANG	66.50	73.00	57.00	73.88	63.89	65.94	Engagement
5	KOTA SUBULUSSALAM	62.50	68.00	65.00	57.69	62.74	62.66	Engagement
6	KOTA DENPASAR	66.00	59.00	69.50	86.88	63.25	69.35	Engagement
7	KOTA CILEGON	70.00	70.00	84.00	95.25	69.54	77.71	Participatory
8	KOTA SERANG	62.00	70.00	67.50	69.47	84.07	72.02	Engagement
9	KOTA TANGERANG	70.50	66.00	70.00	85.25	75.25	74.33	Engagement
10	KOTA TANGERANG SELATAN	70.00	63.00	70.00	75.56	76.44	72.34	Engagement
11	KOTA BENGKULU	73.50	60.00	79.00	59.88	90.14	75.52	Engagement
12	KOTA YOGYAKARTA	77.50	66.00	78.00	70.69	82.73	76.66	Engagement
13	KOTA GORONTALO	66.20	76.00	64.00	60.84	59.01	63.51	Engagement
14	KOTA JAMBI	73.00	59.00	76.50	52.88	76.99	69.47	Engagement
15	KOTA SUNGAI PENUH	68.50	74.00	62.00	60.94	76.42	68.61	Engagement



16	KOTA BEKASI	68.00	70.00	68.00	83.50	61.86	69.46	Engagement
17	KOTA CIMAHI	70.50	70.00	49.50	40.03	44.04	52.22	Involvement
18	KOTA BANJAR	74.50	72.00	66.00	66.63	65.11	68.16	Engagement
19	KOTA BOGOR	77.50	58.00	76.00	67.44	69.30	70.78	Engagement
20	KOTA CIREBON	68.30	58.00	76.00	85.00	65.57	71.33	Engagement
21	KOTA DEPOK	73.50	56.00	81.00	85.25	70.94	74.83	Engagement
22	KOTA SUKABUMI	78.50	66.00	66.00	60.75	69.29	68.44	Engagement
23	KOTA TASIKMALAYA	70.50	54.00	74.50	62.63	71.18	68.28	Engagement
24	KOTA BANDUNG	70.50	72.00	66.50	50.19	70.25	65.71	Engagement
25	KOTA SEMARANG	73.00	71.00	84.00	80.13	74.32	76.82	Engagement
26	KOTA TEGAL	66.50	74.00	63.00	66.06	61.39	64.93	Engagement
27	KOTA MAGELANG	69.50	49.00	73.50	82.81	67.89	70.43	Engagement
28	KOTA PEKALONGAN	70.00	63.00	59.00	77.25	76.42	70.48	Engagement
29	KOTA SALATIGA	72.00	82.00	69.50	81.50	72.93	74.68	Engagement
30	KOTA SURAKARTA	68.00	53.00	73.00	78.25	61.37	67.56	Engagement
31	KOTA BLITAR	74.00	68.00	67.50	91.19	63.25	72.31	Engagement
32	KOTA MALANG	64.00	55.00	68.50	63.38	78.18	68.13	Engagement
33	KOTA BATU	74.00	69.00	76.50	55.06	72.80	69.85	Engagement
34	KOTA KEDIRI	74.00	62.00	67.50	82.94	67.89	71.46	Engagement
35	KOTA PASURUAN	64.00	47.00	66.00	51.00	73.00	62.80	Engagement
36	KOTA PROBOLINGGO	75.00	80.00	73.00	89.56	70.92	76.79	Engagement
37	KOTA MADIUN	69.00	65.00	65.50	80.94	69.75	70.51	Engagement

38	KOTA MOJOKERTO	74.00	58.00	68.00	78.00	61.83	68.35	Engagement
39	KOTA SURABAYA	72.00	55.00	77.00	86.88	71.98	74.27	Engagement
40	KOTA PONTIANAK	72.00	71.00	80.50	64.00	72.00	72.00	Engagement
41	KOTA SINGKAWANG	71.50	65.00	69.50	75.94	67.77	70.22	Engagement
42	KOTA BANJARBARU	71.50	62.00	66.50	59.13	64.64	65.02	Engagement
43	KOTA BANJARMASIN	64.50	51.00	70.50	67.84	70.68	66.87	Engagement
44	KOTA PALANGKA RAYA	58.00	53.00	70.00	66.38	82.01	68.78	Engagement
45	KOTA BALIKPAPAN	70.00	51.00	71.50	59.94	53.68	61.49	Engagement
46	KOTA BONTANG	72.00	83.00	68.00	50.69	60.18	64.49	Engagement
47	KOTA SAMARINDA	64.50	47.00	64.00	60.84	72.00	64.17	Engagement
48	KOTA TARAKAN	65.50	47.00	65.00	82.16	84.57	72.60	Engagement
49	KOTA PANGKALPINANG	73.20	47.00	60.00	49.63	79.24	65.04	Engagement
50	KOTA BATAM	71.00	63.00	82.00	79.06	78.98	76.41	Engagement
51	KOTA TANJUNGPINANG	73.00	63.00	74.50	75.00	79.24	74.57	Engagement
52	KOTA BANDAR LAMPUNG	69.50	62.00	74.50	73.13	62.79	68.46	Engagement
53	KOTA METRO	73.00	49.00	61.50	59.75	64.87	63.21	Engagement
54	KOTA AMBON	61.50	68.00	63.00	60.94	73.48	65.93	Engagement



55	KOTA TUAL	80.10	72.00	73.50	51.00	70.90	69.39	Engagement
56	KOTA TERNATE	69.00	68.00	63.50	59.72	76.62	68.23	Engagement
57	KOTA TIDORE KEPULAUAN	76.50	59.00	66.00	60.94	69.96	67.58	Engagement
58	KOTA BIMA	68.00	74.00	76.00	61.56	78.48	72.06	Engagement
59	KOTA MATARAM	73.50	59.00	64.00	68.25	59.98	65.04	Engagement
60	KOTA KUPANG	69.50	78.00	70.50	71.63	78.96	73.81	Engagement
61	KOTA JAYAPURA	62.50	53.00	55.00	40.03	67.40	57.03	Involvement
62	KOTA SORONG	61.50	88.00	68.50	46.48	62.76	62.92	Engagement
63	KOTA DUMAI	73.10	70.00	73.00	76.44	54.61	67.89	Engagement
64	KOTA PEKANBARU	66.50	78.00	73.50	61.94	58.32	65.68	Engagement
65	KOTA MAKASSAR	68.50	92.00	77.50	88.19	75.71	78.75	Participatory
66	KOTA PALOPO	82.50	61.00	69.50	47.75	73.70	68.16	Engagement
67	KOTA PAREPARE	65.50	61.00	70.00	79.28	73.00	70.96	Engagement
68	KOTA PALU	67.50	65.00	61.00	63.38	68.36	65.38	Engagement
69	KOTA KENDARI	72.00	61.00	68.50	51.00	71.38	65.81	Engagement
70	KOTA BAUBAU	64.50	67.00	61.00	44.09	79.43	64.45	Engagement
71	KOTA BITUNG	66.30	49.00	72.50	64.31	73.35	67.53	Engagement
72	KOTA KOTAMOBAGU	58.20	55.00	71.50	51.41	72.54	63.48	Engagement
73	KOTA MANADO	70.20	53.00	73.00	68.59	72.55	69.42	Engagement
74	KOTA TOMOHON	74.50	71.00	72.50	83.63	87.12	79.36	Participatory
75	KOTA BUKITINGGI	70.60	73.00	82.00	79.00	83.40	78.64	Participatory
76	KOTA PAYAKUMBUH	69.50	70.00	75.50	47.75	63.93	64.73	Engagement

77	KOTA PADANG	68.00	66.00	82.00	74.75	73.39	73.57	Engagement
78	KOTA PADANG PANJANG	69.20	66.00	66.50	78.75	70.12	70.53	Engagement
79	KOTA PARIAMAN	85.00	66.00	76.00	63.94	86.67	77.59	Participatory
80	KOTA SAWAHLUNTO	74.50	64.00	74.50	60.69	75.00	70.84	Engagement
81	KOTA SOLOK	74.50	54.00	63.00	58.25	69.75	65.48	Engagement
72	KOTA PAGAR ALAM	73.20	74.00	66.00	56.63	77.80	69.90	Engagement
73	KOTA PRABUMULIH	73.50	70.00	81.50	67.44	55.30	68.08	Engagement
74	KOTA LUBUK LINGGAU	74.00	59.00	60.00	46.94	75.93	64.87	Engagement
75	KOTA PALEMBANG	64.50	74.00	65.00	73.06	82.02	72.52	Engagement
76	KOTA BINJAI	69.30	68.00	65.00	63.38	70.58	67.51	Engagement
77	KOTA GUNUNGSITOLI	76.10	54.00	67.00	65.00	71.52	68.48	Engagement
78	KOTA MEDAN	60.50	66.00	80.00	90.25	79.00	76.45	Engagement
79	KOTA SIBOLGA	72.00	57.00	64.50	63.94	66.50	65.74	Engagement
80	KOTA TEBING TINGGI	68.70	60.00	62.50	59.19	65.35	63.68	Engagement
81	KOTA PADANGSI- DIMPUNAN	67.20	66.00	72.50	58.91	49.73	61.24	Engagement
82	KOTA PEMATANG- SIANTAR	60.50	61.00	66.50	61.75	65.37	63.46	Engagement
83	KOTA TANJUNGBALAI	68.20	66.00	70.50	52.88	70.94	66.20	Engagement
84	KOTA BANDA ACEH	69.50	72.00	71.00	60.06	57.15	64.46	Engagement



85	KOTA LANGSA	62.50	82.00	66.50	42.88	54.14	58.82	Involvement
86	KOTA LHOKSEUMAWA	61.50	72.00	75.00	62.56	70.44	68.14	Engagement
87	KOTA SABANG	66.50	73.00	57.00	73.88	63.89	65.94	Engagement
88	KOTA SUBULUSSALAM	62.50	68.00	65.00	57.69	62.74	62.66	Engagement
89	KOTA DENPASAR	66.00	59.00	69.50	86.88	63.25	69.35	Engagement
90	KOTA CILEGON	70.00	70.00	84.00	95.25	69.54	77.71	Participatory
91	KOTA SERANG	62.00	70.00	67.50	69.47	84.07	72.02	Engagement
92	KOTA TANGERANG	70.50	66.00	70.00	85.25	75.25	74.33	Engagement
93	KOTA TANGERANG SELATAN	70.00	63.00	70.00	75.56	76.44	72.34	Engagement
Skor Akhir		69.79	64.59	69.81	66.75	70.29	68.81	Engagement



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

www.kpu.go.id

ISBN 978-623-6183-91-5



9

786236

183915